



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II TAHUN 2015

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2015



Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden dan kepala daerah selambatnya 3 bulan sesudah semester bersangkutan berakhir. IHPS II Tahun 2015 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 704 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang diselesaikan BPK pada semester II 2015.

IHPS II Tahun 2015 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya untuk ikhtisar hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2015 menyertakan 8 lampiran dan materi seluruh *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS tersebut. Selain itu, yang baru dalam IHPS ini, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Dalam IHPS II Tahun 2015 juga disertakan hasil pemeriksaan mengenai kesiapan pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah disampaikan dalam bentuk Pendapat BPK kepada Presiden.

Akhir kata, BPK berharap IHPS II Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2016
Badan Pemeriksa Keuangan RI

i	Kata Pengantar
iii	Daftar Isi
viii	Daftar Tabel
xii	Daftar Grafik
xiii	Daftar Lampiran
xviii	Tentang BPK
xx	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

2 BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

4 Pemeriksaan Kinerja

4	Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi
4	Penanggulangan Kemiskinan
8	Pendidikan
8	Tunjangan Profesi Guru
9	Pelayanan Pendidikan
11	Kesehatan
11	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
19	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
21	Ketahanan Pangan
21	Penelitian Prioritas Pangan
24	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
24	Reformasi Keuangan Negara

24	Pengelolaan Keuangan
32	Pengelolaan Sistem Informasi
41	Pelayanan Publik
42	Legalisasi Aset Program Nasional Agraria
45	Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
46	Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api
48	Perizinan Impor Garam
50	Pelayanan Kesehatan Haji
52	Penempatan dan Perlindungan TKI
54	Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka

56 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

56	Pendidikan
56	Tunjangan Guru
60	Pengelolaan Pendidikan Tinggi
66	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
66	Reformasi Keuangan Negara
66	Pengelolaan Pendapatan
72	Pengelolaan Belanja
77	Manajemen Aset
83	Pengelolaan BLU
87	Pelayanan Publik
87	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

92 BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

94 Pemeriksaan Keuangan

94	Opini
----	-------

- 101 Sistem Pengendalian Intern
- 106 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

113 Pemeriksaan Kinerja

114 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi

- 114 Penanggulangan Kemiskinan

120 Pendidikan

- 120 Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

122 Kesehatan

- 122 Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas
- 127 Program Kesehatan Ibu dan Anak

129 Perumahan

- 129 Penyediaan Akses Air Bersih

133 Pemerataan Antarwilayah

- 133 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 138 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

139 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

140 Reformasi Keuangan

- 140 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- 144 Pengelolaan Pajak Daerah
- 149 Manajemen Aset
- 151 Efektivitas Audit dan Reviu Inspektorat
- 153 Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar

154 Pelayanan Publik

- 154 Pelayanan Perizinan Terpadu

157 Bank Pembangunan Daerah

165 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

165 Pendidikan

165 Tunjangan Guru

172 Pemerataan Antarwilayah

172 Dana Otonomi Khusus

177 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

177 Reformasi Keuangan Daerah

178 Penyusunan RPJMD

182 Pengelolaan Pendapatan

187 Pengelolaan Belanja

192 Manajemen Aset

197 Operasional RSUD

202 Operasional BUMD

210 BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

212 Pemeriksaan Kinerja

212 BUMN

212 Pengelolaan Keuangan

220 Transportasi Laut

227 Perkebunan

231 Badan Lainnya

231 Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

238 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

238 BUMN

238 Operasional BUMN

243 Pengelolaan Lahan

248 Badan Lainnya

248 Perhitungan Bagi Hasil Migas

- 254 Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI
258 Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Otoritas Jasa Keuangan

264BAB IV Hasil Pemantauan BPK

266 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

- 267 Pemantauan TLRHP 2010–2014
273 Pemantauan TLRHP Tahun 2015
275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat
275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah
275 Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN
276 Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

276 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

- 277 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah
279 Permasalahan dalam Penyelesaian
Ganti Kerugian Negara/ Daerah

281 Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

- 284 Daftar Singkatan & Akronim
296 Daftar Istilah
305 Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015
Tabel 1.1	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru
Tabel 1.2	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru
Tabel 1.3	Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Tabel 1.4	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Tabel 1.5	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.8	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.11	Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.14	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.16	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat
Tabel 1.17	Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Tabel 1.18	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Tabel 1.19	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Nilai Aset dan Pendapatan atas 539 Pemda pada Akhir Tahun 2014
Tabel 2.2	Perbandingan Opini 35 LKPD antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014
Tabel 2.3	Permasalahan dan Nilai Permasalahan 35 LKPD 2014
Tabel 2.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah
Tabel 2.5	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan
Tabel 2.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi
Tabel 2.8	Daftar 15 Provinsi dan 15 Kabupaten yang Diuji Petik
Tabel 2.9	Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Produksi
Tabel 2.10	Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Operasional
Tabel 2.11	Penilaian terhadap BPD Menurut Efektivitas Ekonomi
Tabel 2.12	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan & Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda
Tabel 2.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda
Tabel 2.15	Sebaran Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012
Tabel 2.18	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas RPJMD

Tabel 2.19	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas RPJMD
Tabel 2.20	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.21	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.22	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tabel 2.23	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.24	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.25	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah
Tabel 2.26	Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.27	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset
Tabel 2.28	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset
Tabel 2.29	Sebaran Pemeriksaan Operasional RSUD
Tabel 2.30	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional RSUD
Tabel 2.31	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional RSUD
Tabel 2.32	Sebaran Pemeriksaan atas Operasional BUMD
Tabel 2.33	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD
Tabel 2.34	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD
Tabel 2.35	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Tabel 3.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMN
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Lahan
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Lahan
Tabel 3.5	Wilayah Kerja KKKS yang diperiksa BPK dalam Rangka Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2014
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

Tabel 3.8	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK
Tabel 3.11	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini atas 539 LKPD Tahun 2014
Grafik 2	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014
Grafik 3	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 4	Temuan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2015
Grafik 2.1	Opini atas 539 LKPD Tahun 2014
Grafik 2.2	Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2010-2014
Grafik 2.3	Opini LKPD dari Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014
Grafik 4.2	Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat
Grafik 4.3	Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah
Grafik 4.4	Perkembangan Data TLRHP BUMN
Grafik 4.5	Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya
Grafik 4.6	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2015
Grafik 4.7	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015
Grafik 4.8	Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 4.9	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 4.10	Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2015

Daftar Lampiran

Lampiran A.1.	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Pusat
Lampiran A.2.	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran A.3.	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per Tema IHPS II Tahun 2015
Lampiran C.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Tunjangan Guru
Lampiran C.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Tunjangan Guru
Lampiran C.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Lampiran C.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi
Lampiran C.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
Lampiran C.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat
Lampiran C.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
Lampiran C.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat
Lampiran C.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Manajemen Aset Pusat
Lampiran C.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Manajemen Aset Pusat

Lampiran C.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan BLU
Lampiran C.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan BLU
Lampiran C.13	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Lampiran C.14	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Lampiran D.1.	Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014
Lampiran D.2.	Pengecualian Akun pada 35 LKPD Tahun 2014 yang Memperoleh Opini WDP dan TMP
Lampiran D.3.	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan-Kelemahan SPI Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014
Lampiran D.4.	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan - Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014
Lampiran D.5.	Daftar Kelompok Temuan Kepatuhan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014
Lampiran E.1.	Daftar Permasalahan yang Mempengaruhi Keberhasilan Upaya Pemda dalam Menyediakan Akses Air Bersih
Lampiran E.2.	Daftar Permasalahan Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua
Lampiran F.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
Lampiran F.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
Lampiran F.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 dan 2012
Lampiran F.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 dan 2012

Lampiran F.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat
Lampiran F.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat
Lampiran F.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Lampiran F.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah
Lampiran F.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pelaksanaan Belanja Daerah
Lampiran F.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pelaksanaan Belanja Daerah
Lampiran F.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Manajemen Aset Daerah
Lampiran F.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Manajemen Aset Daerah
Lampiran F.13	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Lampiran F.14	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Lampiran F.15	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Lampiran F.16	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Lampiran G.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMN
Lampiran G.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional BUMN

Lampiran G.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Lahan
Lampiran G.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Lahan
Lampiran G.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
Lampiran G.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
Lampiran G.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI
Lampiran G.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI
Lampiran G.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK
Lampiran G.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK
Lampiran H.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan
Lampiran H.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
Lampiran H.3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana Periode 2003 - 2015

Tentang BPK

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan Amanat Pasal 23 E Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, adalah lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaganegara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan layanan umum, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait tugas BPK tersebut meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan dimaksud, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dhi. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk dapat ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana tersebut dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tiga bulan setelah semester berakhir.

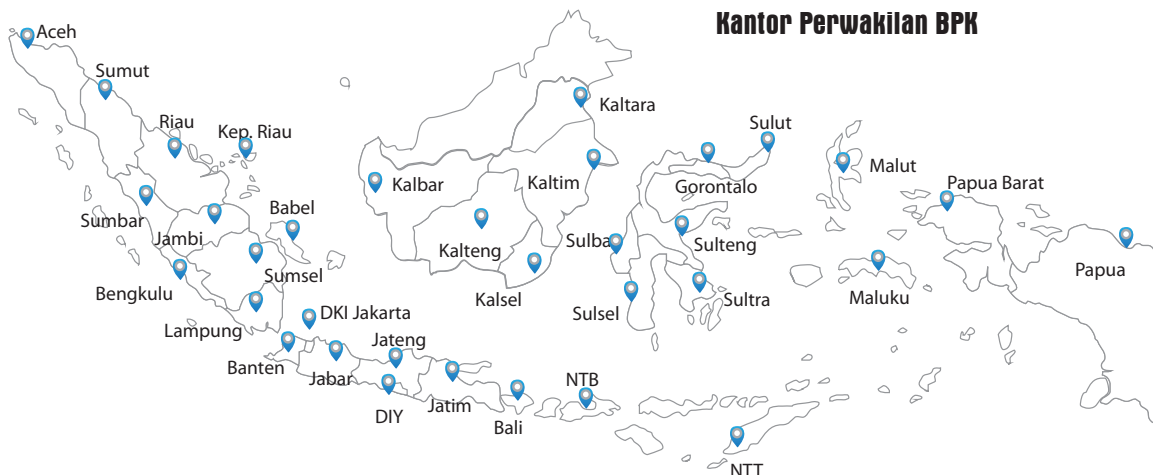
Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, namun juga peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Memenuhi amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Kantor Perwakilan BPK



Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 disusun untuk memenuhi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar tersebut merupakan ringkasan atas 704 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2015.

LHP tersebut meliputi 92 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 571 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 41 LHP (6%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, LHP dimaksud terdiri atas 35 LHP (5%) keuangan, 277 LHP (39%) kinerja, dan 392 LHP (56%) dengan tujuan tertentu.

Tabel 1: Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan
Pemerintah Pusat	92	947
Pemeriksaan Kinerja	28	315
PDTT	64	632
Pemerintah Daerah & BUMD	571	5.095
Pemeriksaan Keuangan	35	613
Pemeriksaan Kinerja	240	1.988
PDTT	296	2.494
BUMN dan Badan Lainnya	41	506
Pemeriksaan Kinerja	9	119
PDTT	32	387
Total	704	6.548
Pemeriksaan Keuangan	35	613
Pemeriksaan Kinerja	277	2.422
PDTT	392	3.513

Hasil pemeriksaan di atas memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan tidak memiliki dampak finansial. Adapun, permasalahan yang mengandung indikasi unsur pidana disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah dan tidak dimuat dalam ikhtisar ini.

IHPS II Tahun 2015 disusun dari 6.548 temuan yang memuat 8.733 permasalahan, yang meliputi 2.175 (25%) kelemahan SPI dan 6.558 (75%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,49 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 2.537 (39%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp9,87 triliun. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Kerugian negara sebanyak 1.401 (55%) permasalahan senilai Rp710,91 miliar.
- Potensi kerugian negara sebanyak 453 (18%) permasalahan senilai Rp1,15 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 683 (27%) permasalahan senilai Rp8 triliun.

Selain itu, terdapat 4.021 (61%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 1.121 (28%) penyimpangan administrasi dan 2.900 (72%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,61 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp970,15 miliar (10%) pada saat pemeriksaan.

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015

No.	KETERANGAN	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lain		Total	
		Per- ma- sa- lah- an	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Per- ma- sa- lah- an	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	373	-	1.608	-	194	-	2.175	-
	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
1	Kerugian	181	91.704,44	1.191	532.111,36	29	87.101,49	1.401	710.917,29
2	Potensi Keru- gian	38	436.720,29	381	626.689,79	34	95.300,80	453	1.158.710,88
3	Kekurangan Penerimaan	115	1.351.509,10	460	2.040.782,23	108	4.615.830,03	683	8.008.121,36
	Sub Total 1 (berdampak finansial)	334	1.879.933,83	2.032	3.199.583,38	171	4.798.232,32	2.537	9.877.749,53
4	Penyimpangan administrasi	232	-	779	-	110	-	1.121	-
5	Ketidakhema- tan	19	15.521,62	71	130.807,99	19	294.498,22	109	440.827,83
6	Ketidake- fisienan	2	154.900,68	52	53.518,03	27	119.149,17	81	327.567,88
7	Ketidakefek- tifan	393	168.468,67	2.194	362.005,90	123	314.587,92	2.710	845.062,49
	Sub Total 2	646	338.890,97	3.096	546.331,92	279	728.235,31	4.021	1.613.458,20
	Total Ketidak- patuhan	980	2.218.824,80	5.128	3.745.915,30	450	5.526.467,63	6.558	11.491.207,73
	(Sub Total 1 + 2)								
Total		1.353	2.218.824,80	6.736	3.745.915,30	644	5.526.467,63	8.733	11.491.207,73
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan (Rp juta)			10.199,04		957.824,26		2.135,28		970.158,58

IHPS Semester II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas: (1) Penanggulangan kemiskinan, (2) Pengelolaan tunjangan profesi guru dan pelayanan pendidikan, (3) Sistem Penyediaan Air Minum, (4) Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dan (5) Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Penanggulangan Kemiskinan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada pemerintah pusat dan daerah TA 2010-2014 mencakup pengelolaan 9 program penanggulangan kemiskinan nasional yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga di tingkat pusat dan Program Penanggulangan Kemiskinan di 15 provinsi dan 15 kabupaten.

BPK melakukan uji petik pemeriksaan terhadap (1) Program Keluarga Harapan pada Kementerian Sosial, (2) Program Jamkesmas/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kementerian Kesehatan, (3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, (5) Program Rumah Sangat Murah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (6) Program Listrik Murah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (7) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program-program lain seperti (1) Beras Miskin dan (2) Bantuan Siswa Miskin telah dilaporkan pada IHPS sebelumnya.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada: (1) Perencanaan kebijakan, (2) Pengelolaan program, dan (3) Pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2014 antara lain disebabkan: (1) Belum tepatnya kebijakan mengenai pengelolaan database penduduk miskin, (2) Tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan (3) Belum tersedianya data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak menerima KUR.

Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru dan Pelayanan Pendidikan

PEMERIKSAAN atas tunjangan profesi guru dan pelayanan pendidikan dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan yang terdiri dari 2 objek pemeriksaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 1 objek pemeriksaan Kementerian Agama dan 39 objek pemeriksaan pemda. Hasil pemeriksaan bidang pendidikan menunjukkan:

- Pengelolaan tunjangan profesi (TP) guru dan pelayanan pendidikan dalam pengelolaan guru, buku kurikulum dan sarana prasarana belum efektif. Permasalahan yang terjadi pada sistem pelayanan pendidikan antara lain:
 - ▶ Jumlah alokasi anggaran TP guru secara nasional belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga pembayaran TP guru tidak tepat waktu dan menimbulkan tunggakan TP guru.
 - ▶ Target tahunan renstra dan alokasi anggaran terkait jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru belum sepenuhnya selaras dengan target dan proyeksi anggaran RPJMN. Hal ini mengakibatkan pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi guru yang merata berisiko tidak tercapai.
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan dana tambahan penghasilan guru pada Kemendikbud dan 36 pemda belum sepenuhnya didukung dengan penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi antara lain:
 - ▶ Sistem aplikasi data pokok pendidikan belum dapat mendukung proses pendataan dan validasi data usulan tunjangan profesi guru secara memadai.
 - ▶ Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru diberikan kepada guru yang telah pensiun, meninggal dunia, cuti di luar cuti tahunan, tugas belajar serta tidak memenuhi syarat jumlah jam mengajar.
 - ▶ Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional guru nonPNS (Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp2,83 miliar kepada yang tidak berhak.

- ▶ Keterlambatan penyaluran tunjangan profesi dan dana tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dari rekening kas daerah Pemkab Lahat ke rekening guru minimal Rp46,70 miliar.
- ▶ Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penerimaan SKTP oleh Bagian Keuangan Dinas Pendidikan sehingga pencairan TP yang akan disalurkan kepada guru penerima tertunda pada Pemkab Timor Tengah Selatan.

Penyediaan Akses Air Bersih

HASIL pemeriksaan BPK pada 45 Pemda di 25 Provinsi terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada periode 2014-semester I 2015 menyimpulkan bahwa permasalahan utama yang sangat memengaruhi keberhasilan upaya pemda dalam menyediakan akses air bersih adalah:

- Pemda belum memiliki konsep perencanaan yang baik untuk meningkatkan cakupan penyediaan akses air bersih.
- Upaya pemda dalam mendorong penyediaan akses air bersih yang layak belum maksimal.
- Kepedulian pemda dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat kurang optimal.

Implementasi SAP Berbasis Akrua¹

PEMERIKSAAN implementasi SAP berbasis akrual meliputi pemeriksaan atas efektivitas pembinaan implementasi SAP berbasis akrual pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual (112 pemda). Hasil pemeriksaan menunjukkan implementasi SAP berbasis akrual secara umum belum efektif karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Penyiapan dan pembinaan kepada pemda oleh Kemendagri terkait dengan aplikasi dalam penerapan SAP berbasis akrual belum optimal,

1 BPK telah memberikan Pendapat kepada Presiden mengenai hal ini melalui Surat Ketua BPK No.171/S/I/11/2015 tanggal 30 November 2015 perihal Pendapat BPK.

mengakibatkan sistem aplikasi belum dapat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat, lengkap dan handal.

- Kebijakan akuntansi dan praktik pencatatan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada pemerintah pusat belum mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual yang dapat mengakibatkan Laporan Operasional dan Neraca belum dapat menyajikan keseluruhan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pemerintah selama satu periode akuntansi.
- Pengendalian aplikasi pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atas proses rekonsiliasi dalam rangka konsolidasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih lemah. Hal ini mengakibatkan konsolidasi Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) belum dapat dilakukan dengan menggunakan SPAN.
- Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur terkait dengan mekanisme *Control Self Assessment* (CSA) dalam rangka pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak memiliki dokumentasi yang memadai atas risiko dan efektivitas pengendalian internal dalam penyusunan LK BUN dan LKPP.
- Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 112 pemda untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif karena masih adanya permasalahan terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) yaitu diantaranya pemda belum memiliki strategi yang komprehensif, tidak merencanakan kebutuhan kompetensi, tidak merencanakan kebutuhan pelatihan SDM, sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan belum memiliki regulasi yang selaras dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

Bank Pembangunan Daerah

BPK melakukan pemeriksaan atas 21 BPD untuk menilai perannya dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. BPK menemukan bahwa:

- Sebanyak 5 BPD sudah efisien, 5 BPD cukup efisien dan 11 BPD tidak/ belum efisien secara relatif terhadap BPD lainnya dalam hal efisiensi fungsi produksi.
- Sebanyak 10 BPD sudah efisien, 6 BPD cukup efisien dan 5 BPD tidak/ belum efisien secara relatif terhadap BPD lainnya dalam hal efisiensi fungsi operasional.
- Sebanyak 1 BPD sudah efektif, 10 BPD cukup efektif dan 10 BPD tidak/ belum efektif dalam mendorong perekonomian daerah.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat antara lain atas: (1) Pengelolaan pendidikan tinggi, (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (3) Pengelolaan sistem informasi, (4) Pengelolaan pendapatan, (5) Pengelolaan belanja, dan (7) Manajemen aset.

Pengelolaan Pendidikan Tinggi

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendidikan tinggi dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain:

- Pengalihan saldo BMN dari Kemendikbud ke Kemenristek Dikti belum dilaksanakan sejak peralihan Ditjen Dikti pada Kemenristek Dikti.
- Kekurangan penerimaan atas selisih kurs dan kesalahan penyetoran kontribusi peserta *ASEAN University Games* (AUG) serta belum diterimanya pendapatan sewa kantin dan rumah dinas sebesar Rp8,58 miliar pada Universitas Sriwijaya.
- Penerima dana talangan belum mempertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran, pembayaran biaya perjalanan dinas dan honor melebihi standar, kekurangan volume dan denda keterlambatan yang belum disetor pada Universitas Sebelas Maret sebesar Rp16,49 miliar.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

BPK melakukan pemeriksaan JKN atas 5 objek pemeriksaan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan 3 rumah sakit pemerintah. Hasil pemeriksaan atas JKN menyimpulkan bahwa penyelenggaraan program JKN belum sepenuhnya

efektif dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan JKN antara lain:

- Kajian penetapan besaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum dilaksanakan secara memadai karena konsultan tidak dapat memenuhi hal-hal dalam kontrak. Hal tersebut memungkinkan tidak adanya analisis/kajian yang mendasari penetapan iuran PBI. Akibatnya, Kementerian Kesehatan belum mendapatkan nilai iuran PBI yang ideal untuk Program JKN.
- Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo (RSCM) belum optimal, sehingga program rujukan yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif.

Pengelolaan Sistem Informasi

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan teknologi informasi pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan permasalahan antara lain:

- Komitmen pimpinan Kemenkeu dalam mengarahkan, mengevaluasi dan memonitor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mencapai visi misi Kemenkeu dalam membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi masih perlu ditingkatkan.
- Pengelolaan sistem penerimaan dan piutang pajak masih belum dapat memberikan hasil yang memadai, mengakibatkan adanya risiko kurang catat penerimaan di Modul Penerimaan Nasional (MPN).

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan dilakukan terhadap 24 objek pemeriksaan pada 4 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Keuangan. Hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan menunjukkan antara lain:

- Kekurangan penerimaan negara pada Kemenkeu yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, pajak rokok dan denda administrasi senilai Rp843,80 miliar, dan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertambangan sektor minerba dan PBB Tubuh Bumi sebesar Rp308,42 miliar.

- Pada Kejaksaan RI, barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya karena petikan putusan terlambat diterima dan keterbatasan anggaran untuk melakukan lelang. Selain itu terdapat barang rampasan yang belum dieksekusi karena belum dilakukan pemusnahan, tidak diketahui statusnya, tidak diketahui keberadaanya atau dokumen kepemilikan belum dikuasai.

Pengelolaan Belanja

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan pada 16 K/L. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain:

- Pada Kementerian Perhubungan terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan di 9 paket pekerjaan senilai Rp14,66 miliar, di antaranya pada pengadaan bahan konstruksi jalan kereta api, pekerjaan stabilisasi tanah, konstruksi jalan rel, dan struktur atas jembatan rangka baja.
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan kontrak pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi sebesar Rp7,56 miliar, di antaranya pekerjaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan, bantuan pembangunan infrastruktur transportasi, pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut dan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Manajemen Aset

PEMERIKSAAN atas manajemen aset dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan pada 7 K/L di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain:

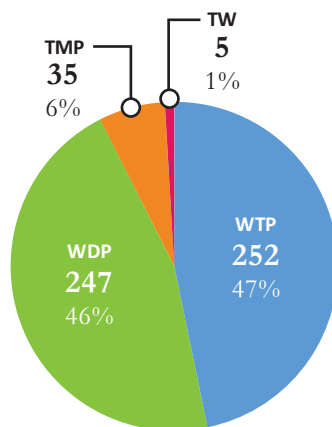
- Proses pengalihan BMN Kemenaker kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui mekanisme transfer antar-K/L dan mekanisme likuidasi senilai Rp4,29 triliun belum selesai.
- Penerimaan negara pada TNI Angkatan Udara belum diterima karena Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau)/ mitra penyewa belum menyeter ke kas negara dan/ atau kenaikan tarif sesuai dengan kontrak belum diperhitungkan sebesar Rp35,05 miliar.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

IHPS Semester II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD antara lain atas: (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), (2) Pengelolaan dana otonomi khusus, (3) Pengelolaan pendapatan, (4) Pengelolaan belanja.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Grafik 1. Opini atas 539
LKPD Tahun 2014



IHPS II Tahun 2015 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 35 LKPD Tahun 2014 dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2014. Hasil pemeriksaan atas 35 LKPD mengungkapkan 1 opini Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (3%), 17 opini Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (48%), 1 opini Tidak Wajar (TW) (3%), dan 16 opini Tidak Memberikan Pendapat/ TMP (46%). Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD 2014 telah dilaporkan dalam IHPS I 2015.

Dengan demikian hasil pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD seperti terlihat dalam grafik 1.

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN pemerataan antarwilayah dilakukan terhadap pengelolaan dana otonomi khusus pada 8 pemda di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- Pemprov Papua belum sepenuhnya memiliki perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur arah, target

dan indikator kinerja dalam rangka tercapainya penyelenggaraan otonomi khusus.

- Regulasi dan kebijakan Pemprov Papua Barat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan, dan kebijakan penganggaran belum didukung dengan rencana definitif dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan tidak mengacu sepenuhnya pada undang-undang terkait otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Selain itu terdapat kekurangan volume pekerjaan/ barang atas pelaksanaan pekerjaan, di antaranya pembangunan pengamanan dan pengendalian abrasi pantai Raise serta pembangunan gedung kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) sebesar Rp9,20 miliar.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 30 objek pemeriksaan pada 30 pemda. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- Kekurangan penerimaan senilai Rp509,92 miliar di Pemprov Jambi, karena adanya wajib pajak (WP) yang belum membayar pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pengelola aset Bangun, Guna, Serah (*Built, Operate and Transfer/ BOT*) belum membayar kontribusi, serta terdapat retribusi laboratorium belum disetor oleh bendahara penerimaan ke kas daerah.
- Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) serta pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah tahun 2014, PKB dan BBNKB senilai Rp15,13 miliar belum dipungut/ diterima pemprov Sumatra Selatan.

Pengelolaan Belanja

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah terhadap 167 objek pemeriksaan pada 164 pemda. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain:

- Keterlambatan pekerjaan pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru Paket III dan 10 kontrak lainnya yang belum dikenakan denda senilai Rp821,69 miliar pada Pemprov Kalimantan Timur.
- Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung, rumah jabatan, pasar tradisional serta sarana dan prasarana rumah sederhana sehat pada Pemkab Mamberamo Tengah Provinsi Papua sebesar Rp11,12 miliar.

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 32 objek pemeriksaan BUMN dan 9 objek badan lainnya.

BUMN

HASIL pemeriksaan atas BUMN yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Armada kapal PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) belum memadai dalam melayani penyeberangan antara lain karena pemeliharaan rutin kapal belum dilaksanakan sesuai dengan SOP dan beberapa pekerjaan *docking* kapal terlambat atau tidak sesuai dengan kontrak. Hal tersebut mengakibatkan risiko tidak terdeteksinya kerusakan mesin kapal sehingga trip tidak tercapai sesuai ketentuan dan armada tidak dapat segera dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan di antaranya dari Kapal Portlink VII minimal sebesar Rp3,28 Miliar.
- Mekanisme inspeksi (*vetting*) kapal belum diimplementasikan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sesuai dengan standar khusus *best practice* bidang migas, akibatnya, kapal PTK berpotensi terjadi kecelakaan dan tidak mendapatkan kontrak karena tidak memenuhi kualitas standar keselamatan umum dan yang berlaku pada perusahaan minyak.
- Proses produksi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) tidak didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai yaitu terdapat alat berat yang rusak dan menjadi kendala pada saat proses produksi, serta perawatan sarana dan fasilitas tidak dilakukan secara berkala.

- Sanksi denda keterlambatan, di antaranya atas pelaksanaan pekerjaan pembuangan limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* dan pekerjaan *Engineering, Procurement and Construction (EPC) Of Tarahan Port Expansion Phase 5* belum dikenakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk kepada pihak ketiga sebesar Rp38,33 miliar.
- Penerimaan PT Pelindo II (Persero) dari PT Hutchison Ports Jakarta PTE Limited (HPJ) atas pembayaran diterima di muka/ *Up front fee* perpanjangan perjanjian PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) belum optimal karena pemotongan pajak penghasilan oleh Otoritas Pajak Singapura masih dapat dihindarkan dan PT Pelindo II belum menerima pendapatan sewa atas penggunaan 4 unit *Rubber Tyred Gantry (RTG)* dari PT JITC sebesar Rp450,40 miliar.

Badan Lainnya

HASIL pemeriksaan atas Badan Lainnya yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil minyak dan gas pada SKK Migas menunjukkan antara lain terdapat biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* pada 7 wilayah kerja Kontraktor Kotrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp4 triliun.
- Pencairan dan penggunaan fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tidak sesuai dengan perjanjian serta penarikan fasilitas pembiayaan sebelum kewajiban dan syarat efektif fasilitas pembiayaan terpenuhi, sehingga pembiayaan pada 3 debitur menjadi macet senilai Rp47,92 miliar.

Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK telah menyampaikan 221.207 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp100,56 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) untuk periode tersebut sebagai berikut:

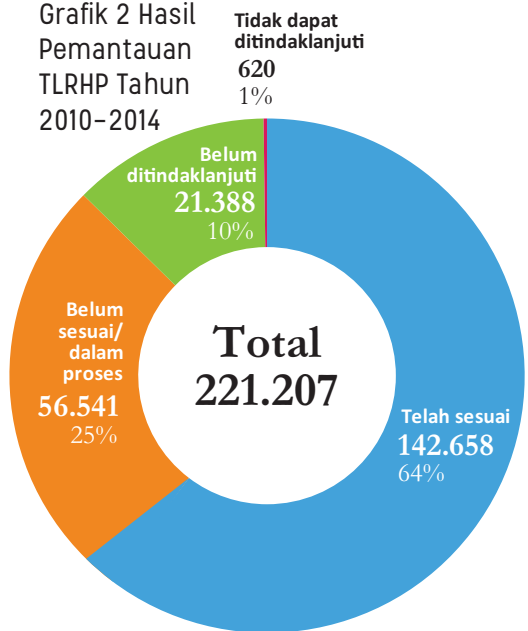
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 142.658 rekomendasi (64%) senilai Rp46,33 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 56.541 rekomendasi (25%) senilai Rp49,31 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 21.388 rekomendasi (10%) senilai Rp4,15 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 620 rekomendasi (1%) senilai Rp771,94 miliar.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp34,28 triliun. Sedangkan untuk periode 2010-2014 sebesar Rp32,56 triliun.

Mengawali tahun pertama RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 36.339 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2015 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp121,64 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.939 rekomendasi (35%) senilai Rp1,05 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 12.681 rekomendasi (35%) senilai Rp7,75 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 10.713 rekomendasi (29%) senilai Rp112,84 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (1%) senilai Rp1,26 miliar.

Grafik 2 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014



Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2015, sebanyak 4 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Intelijen Negara. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

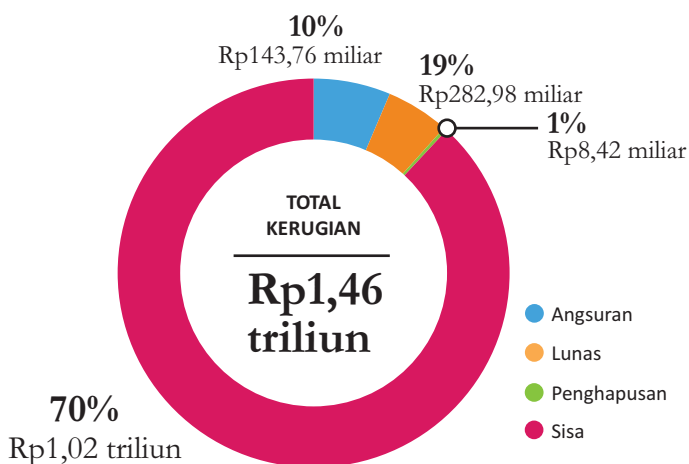
Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp989,14 miliar.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2015 memuat jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 22.539 kasus senilai Rp1,46 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 3.

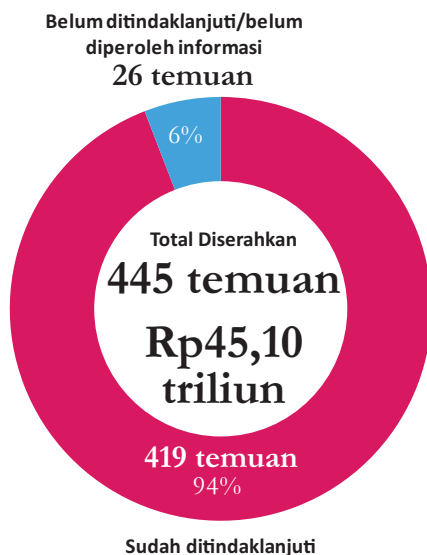
Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran sebanyak 4.847 kasus senilai Rp143,76 miliar (10%), pelunasan sebanyak 11.864 kasus senilai Rp282,98 miliar (19%), dan penghapusan sebanyak 156 kasus senilai Rp8,42 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.527 kasus senilai Rp1,02 triliun (70%).

Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003–2015 dengan Status Telah Ditetapkan



Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan Kepada Instansi Berwenang

Grafik 4 Temuan yang Disampaikan
ke Instansi yang Berwenang Tahun
2003 - 2015



SELAMA semester II tahun 2015, BPK telah menyampaikan 2 surat hasil temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Kepolisian RI yang memuat 2 temuan senilai Rp71,26 miliar. Dengan demikian, selama periode 2003 - 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 230 surat yang memuat 445 temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana senilai Rp33,48 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,10 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 419 temuan (94%) (Grafik4).

Jakarta, Maret 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.



IHPS II TAHUN 2015

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2015

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 92 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat dari total 704 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 28 hasil pemeriksaan kinerja dan 64 hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran A.1.¹. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 *Softcopy* LHP selengkapnya dapat dilihat pada *flash disk* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IHPS II Tahun 2015

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan kinerja sesuai dengan dimensi dalam RPJMN 2015-2019, meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan (1) Pemerataan antar kelompok pendapatan/ ekonomi, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Ketahanan pangan, dan (5) Tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 28 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan 315 temuan yang antara lain memuat 2 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp154,90 miliar dan 361 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp50,30 miliar.

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang terkait dengan pemerataan antarkelompok pendapatan/ ekonomi yaitu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh lintas instansi baik pusat maupun daerah. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B* No. 1-5.

Penanggulangan Kemiskinan

KEMISKINAN merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional karena dipengaruhi banyak faktor dan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur yang pelaksanaannya dibagi dalam empat tahap RPJMN. Sebagaimana diungkapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004, RPJMN 2010- 2014 merupakan tahapan kedua pencapaian visi RPJPN tersebut.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas RPJMN 2010-2014, yaitu dengan penurunan tingkat kemiskinan absolut 14,1% pada 2009 menjadi 8%-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Dalam RPJMN 2015-2019, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program pembangunan dimensi pemerataan dengan menurunkan kesenjangan antarkelompok ekonomi, khususnya indikator tingkat kemiskinan yang menurun dari 10,96 % (2014) ke 7-8 % (2019).

Pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2010-2014 mencakup pengelolaan sembilan program penanggulangan kemiskinan nasional yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga di tingkat pusat dan program penanggulangan kemiskinan di 15 provinsi dan 15 kabupaten yang disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan karena: (1) Target penurunan tingkat kemiskinan yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 tidak tercapai, (2) Kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat dan daerah berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional, dan (3) Peran BPK dalam rangka mendorong pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang tertuang dalam alinea kedua dan keempat pembukaan UUD 1945 melalui pemeriksaan dan rekomendasi yang bersifat komprehensif.

BPK melakukan uji petik pemeriksaan terhadap (1) Program Keluarga Harapan pada Kementerian Sosial, (2) Program Jamkesmas/ Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kementerian Kesehatan, (3) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (4) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, (5) Program Rumah Sangat Murah pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (6) Program Listrik Murah pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (7) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program-program lain seperti (1) Beras Miskin dan (2) Bantuan Siswa Miskin telah dilaporkan pada IHPS sebelumnya.

Pemerintah pusat telah berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk melaksanakan percepatan tersebut dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada: (1) Perencanaan kebijakan; (2) Pengelolaan program; dan (3) Pelaksanaan kegiatan.

BPK menyimpulkan bahwa pemerintah tidak dapat mencapai target penurunan tingkat kemiskinan tahun 2014 antara lain disebabkan: (1) Belum tepatnya kebijakan mengenai pengelolaan *database* penduduk



miskin, (2) Tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dan (3) Belum tersedianya data dan informasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak menerima KUR.

Beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- Dalam desain kebijakan mengenai *database* penduduk miskin, Pemerintah belum menetapkan pengelola *database* yang jelas dan kebijakan pemutakhiran *database* yang terintegrasi antara Kementerian Sosial, TNP2K, Badan Pusat Statistik (BPS), dan kementerian/pemerintah daerah pelaksana program. Selain itu, belum ada kebijakan yang menetapkan Basis Data Tunggal (BDT) sebagai data tunggal sasaran penerima manfaat seluruh program penanggulangan kemiskinan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran yang disebabkan *database* yang digunakan tidak valid dan mutakhir serta kriteria penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan tidak jelas.
- Pemberian fasilitas penjaminan KUR masih belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM dalam rangka

mendukung penanggulangan kemiskinan tahun 2010 sampai dengan semester I tahun 2015. Penyebab utamanya adalah belum tersedianya data dan informasi pelaku UMKM yang layak menerima KUR termasuk prioritas bidang usaha yang menjadi sasaran Program KUR.

Secara umum kualitas data pada program penanggulangan kemiskinan akan diperbaiki oleh kementerian/ lembaga terkait.

Untuk mengatasi permasalahan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Presiden agar:

- Menginstruksikan Menteri Sekretaris Negara mengevaluasi peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan *database* penduduk miskin untuk kemudian mengambil kebijakan strategis terkait pendataan, pemutakhiran, dan penggunaan *database* tunggal penduduk miskin sebagai sasaran penerima bantuan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
- Menginstruksikan Menteri Sosial untuk:
 - ▶ Menerbitkan peraturan menteri sebagai penjabaran UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yaitu terkait dengan pengelolaan *database* penduduk miskin berbasis teknologi informasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Menteri Sekretaris Negara pada rekomendasi di atas.
 - ▶ Berkoordinasi dengan BPS dan TNP2K dalam membuat suatu basis data penduduk miskin yang valid dan mutakhir dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan untuk digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan di tingkat K/L dan pemerintah daerah.
- Menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan agar meminta para menteri teknis terkait termasuk Menteri Koperasi dan UKM untuk menetapkan kebijakan terkait dengan prioritas bidang usaha yang akan dibiayai KUR dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyusun *roadmap* pembinaan dan penyiapan *database* pelaku UMKM sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2010-2014 mengungkapkan 44 temuan yang memuat 2 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp154,90 miliar, 47 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp50,06 miliar. Selain itu, terdapat 3 permasalahan potensi kerugian negara Rp277,13 miliar.

Pendidikan

Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 2 objek pemeriksaan di bidang pendidikan yang terdiri atas 1 objek terkait tunjangan profesi guru agama dan 1 objek terkait dengan pelayanan pendidikan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B* No.6-7.

Tunjangan Profesi Guru

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan tunjangan profesi guru (TPG) TA 2014-semester I 2015 pada Kementerian Agama. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tersedianya guru yang berkualitas dan profesional. Untuk meningkatkan profesionalisme guru di bawah pembinaan dan pengawasannya, Kementerian Agama melaksanakan kegiatan sertifikasi dan memberikan tunjangan sertifikasi guru.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan TPG. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan diarahkan pada aspek organisasi, kebijakan, tata laksana dan sumber daya pengelolaan TPG, proses perencanaan/ penganggaran TPG, proses seleksi peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan penetapan penerima TPG serta proses pembayaran dan pertanggungjawaban TPG.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan tunjangan profesi guru belum efektif. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Pengelolaan TPG belum sepenuhnya didukung struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Belum seluruh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota memiliki struktur organisasi Penyelenggaraan Agama. Selain itu, pembentukan kelompok kerja (pokja) juga belum didukung dengan alur koordinasi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, serta dukungan SDM yang cukup. Hal tersebut mengakibatkan pengelolaan kegiatan sertifikasi dan pengelolaan TPG pada Kementerian Agama belum sepenuhnya efektif.
- Jumlah alokasi anggaran TPG secara nasional belum sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, pembayaran TPG tidak tepat waktu dan menimbulkan tunggakan TPG.
- Penetapan surat keputusan (SK) guru profesional belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah peserta yang lulus PLPG dan tidak tepat waktu.

Akibatnya, guru yang telah lulus PLPG dan telah mendapatkan sertifikat pendidikan belum mendapatkan hak pembayaran TPG.

- Pembayaran TPG belum dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga menimbulkan kekecewaan kepada para guru. Akibatnya, tujuan TPG untuk mendorong motivasi para guru meningkatkan kualitas belajar mengajar berpotensi tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut Kementerian Agama menyatakan telah berupaya memperbaiki kelemahan yang ada.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar memerintahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Dirjen Pendis, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu dan Bimas Budha untuk:

- Melakukan evaluasi dan menyempurnakan struktur organisasi penyelenggara keagamaan pada Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag, serta uraian tugas dan fungsi koordinasi Kelompok Kerja Sertifikasi Guru di tingkat pusat.
- Berkoordinasi dengan Kemendikbud untuk mempercepat penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG) pada tahun yang sama dengan tahun kelulusan PLPG, dan meningkatkan pengawasan serta pengendalian terhadap proses penetapan NRG dan penetapan guru profesional.
- Memerintahkan kepada para Kepala Kanwil dan Kepala Kantor Kementerian Agama untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, sehingga pembayaran TPG dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- Melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk memprioritaskan anggaran pembayaran dan penyelesaian tunggakan TPG.

Pelayanan Pendidikan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengembangan sistem pendidikan di antaranya melalui pengembangan kurikulum, penataan manajemen berbasis sekolah, penguatan SDM tenaga pendidik, dan komitmen terhadap pemenuhan standar pelayanan minimum di bidang pendidikan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan pendidikan TA 2014-semester I 2015 pada Kemendikbud. Pemeriksaan kinerja

tersebut dilakukan untuk menilai program dan kegiatan pemerintah yang telah melakukan pengembangan sistem pendidikan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas peningkatan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Kemendikbud dalam pengelolaan guru, buku kurikulum 2013 serta sarana dan prasarana.

Untuk mencapai tujuan itu, pemeriksaan diarahkan pada kegiatan dan program pendidikan dasar dan menengah dan guru. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelayanan pendidikan belum efektif. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Target tahunan renstra dan alokasi anggaran terkait dengan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru belum sepenuhnya selaras dengan target dan proyeksi anggaran RPJMN. Perencanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan jumlah kualitas dan kompetensi guru yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Dasar, Ditjen Pendidikan Menengah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah sejalan dengan Renstra 2010-2014 dan 2015-2019.

Namun, alokasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan proyeksi karena ada keterbatasan alokasi anggaran dan perubahan struktur organisasi di Kemendikbud. Selain itu, tak ada anggaran khusus guna memenuhi kebutuhan guru. Hal ini mengakibatkan pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan jumlah kualifikasi dan kompetensi guru yang merata berisiko tidak tercapai.

- Perencanaan Buku Wajib Kurikulum 2013 dan pengelolaan hak cipta belum sepenuhnya memadai. Kemendikbud telah mengalokasikan dana pembelian Buku Wajib Kurikulum 2013, namun belum mencukupi kebutuhan. Kemendikbud juga telah berupaya melindungi hak cipta atas Buku Wajib Kurikulum 2013, tetapi hanya sebatas perlindungan hak cipta dari kontributor dan belum ada upaya perlindungan hak cipta dari publik.

Hal ini mengakibatkan alokasi anggaran dana bantuan sosial dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pembelian buku Kurikulum 2013 berpotensi tidak mencukupi kebutuhan yang ditargetkan. Selain itu, terbuka peluang penyalahgunaan materi buku wajib Kurikulum 2013 untuk memperoleh keuntungan komersial yang tidak wajar oleh pihak-pihak tertentu.

- Target penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam renstra Kemendikbud dan satker tidak sejalan dengan target dalam RPJMN

2010-2014. Begitu pula dengan target indikator angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar antara renstra Kemendikbud dan RPJMN. Ketidakselarasan itu mengakibatkan perumusan program untuk mengukur pencapaian sasaran tidak memadai.

Atas kondisi tersebut Kemendikbud menyatakan akan menjaga konsistensi renstra dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN.

BPK telah merekomendasikan kepada Mendikbud agar:

- Menyelaraskan target renstra Kemendikbud untuk pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru dengan target RPJMN
- Mereviu implementasi Kurikulum 2013 dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan serta mengupayakan perlindungan hak cipta atas Buku Wajib Kurikulum 2013 dari publik.
- Berkomitmen kuat untuk mencapai kinerja terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan RPJMN.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendidikan pada 2 objek tersebut mengungkapkan 25 temuan, yang memuat 31 permasalahan ketidakefektifan.

Kesehatan

Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 6 objek pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas 5 objek pemeriksaan Jaminan Kesehatan Nasional, dan 1 objek Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B* No.8-13.

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta NonPenerima Bantuan Iuran (NonPBI). Peserta PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta NonPBI adalah setiap orang yang tidak tergolong fakir miskin

dan orang tidak mampu, yang membayar iurannya secara sendiri ataupun kolektif ke BPJS Kesehatan.

BPK telah memeriksa penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada:

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan TA 2014-semester I 2015
- Kementerian Kesehatan TA 2010-semester I 2015
- Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Ciptomangunkusumo (RSCM) TA 2014-semester I 2015
- Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati TA 2014-semester I 2015
- Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita TA 2014-semester I 2015

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PEMERIKSAAN BPK pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kendala penyelenggaraan program JKN yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan kepesertaan semesta tahun 2019.
- Mengidentifikasi serta mengevaluasi penyelenggaraan program JKN baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi tahun 2014 dan semester I 2015.

Penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan pada 2014-2015 berdampak cukup signifikan terhadap penjaminan kesehatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. BPJS Kesehatan telah menambah jumlah kepesertaan secara signifikan dalam rangka pencapaian kepesertaan semesta pada awal 2019. Untuk memudahkan iuran, peserta telah disediakan sistem pembayaran *online* yang terintegrasi dengan beberapa vendor pembayaran.

Hasil pemeriksaan menunjukkan penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan kepesertaan semesta 2019. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Penetapan sasaran/ target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerja unit-unit kerja BPJS Kesehatan belum terukur dengan jelas dan



memadai. BPJS Kesehatan tidak memiliki pedoman penyusunan target dari setiap indikator atau inisiatif strategis, baik yang terdapat pada *Annual Management Contract (AMC)* dan *Annual Performance Contract (APC)* maupun penyusunan target dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Tidak ada dasar rumus perhitungan yang seharusnya digunakan. Akibatnya, sasaran atau target indikator kinerja dan proses evaluasi kinerjanya tidak dapat diukur secara memadai.

- BPJS Kesehatan belum optimal dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait mengenai kasus kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, peserta JKN tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai mengenai kejelasan penjamin pembayaran apabila mendapat kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Selain itu, fasilitas kesehatan terhambat mendapatkan pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan, sehingga berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan menyatakan berbagai permasalahan dan kelemahan yang ada telah berusaha diperbaiki.

Dalam pemeriksaan ini, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar:

- Menyusun pedoman penghitungan dan penetapan serta evaluasi atas sasaran/ target indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKAT.
- Meningkatkan koordinasi secara berkala yang dituangkan dalam surat edaran bersama antara BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan PT Jasa Raharja mengenai penjaminan prosedur kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

Kementerian Kesehatan

PEMERIKSAAN pada Kementerian Kesehatan bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014.
- Mengidentifikasi kendala serta mengevaluasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi TA 2010-semester I 2015.

Kementerian Kesehatan telah menjalankan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta peraturan pendukungnya. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain Kemenkes telah menetapkan peraturan-peraturan dalam bentuk standar atau petunjuk teknis/ pelaksanaan penyelenggaraan program JKN yang menjadi acuan pihak berkepentingan dalam pelaksanaan program JKN, dan menetapkan pusat-pusat rujukan dalam *Roadmap Supply Side* Fasilitas Kesehatan 2015-2019.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan belum sepenuhnya efektif dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta Jaminan Kesehatan. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Kementerian Kesehatan belum optimal menyusun rencana aksi dalam melaksanakan program JKN 2012-2019 yang telah ditetapkan lintas K/L. Hal yang belum optimal antara lain perencanaan pengembangan sarana prasarana dan tenaga kesehatan pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL), khususnya milik pemerintah. Selain itu, fasilitas kesehatan belum merata, sehingga pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta JKN belum optimal.
- Kajian penetapan besaran iuran PBI belum dilaksanakan secara memadai. Hal tersebut tercermin dari:

- ▶ Kajian penetapan kebijakan besaran iuran dalam JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh konsultan tidak terealisasi dikarenakan tidak terpenuhinya hal-hal dalam kontrak sehingga memungkinkan tidak adanya analisis/kajian yang mendasari penetapan iuran PBI tersebut;
- ▶ Presentase iuran PBI pada Program JKN yang dibiayai dari dana APBN/ APBD tahun 2014 dan 2015 (sampai dengan September) masing-masing sebesar 52% dan 42% dari total iuran Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan;
- ▶ Presentase penggunaan dana untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada FKTL oleh peserta PBI baik yang dibiayai dari dana APBN/APBD pada tahun 2014 sampai dengan 2015 hanya sebesar 26% dari total utilisasi penggunaan dana klaim oleh peserta non-PBI sebesar 74%.

Kondisi tersebut menunjukkan mayoritas dana Program JKN dinikmati oleh peserta JKN non-PBI sehingga Kementerian Kesehatan hendaknya juga mempertimbangkan data tersebut dalam pengambilan kebijakan penetapan komposisi besaran iuran dana PBI. Hal itu mengakibatkan Kementerian Kesehatan belum mendapatkan nilai iuran PBI yang ideal untuk Program JKN.

- Mekanisme perencanaan dan monitoring ketersediaan obat melalui e-katalog untuk mendukung program JKN belum memadai, sehingga belum terdapat jaminan ketersediaan obat yang sesuai dengan formularium nasional pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Pemberi layanan kesehatan masih mengalami kesulitan dalam penyediaan obat, sehingga peserta program JKN harus mengeluarkan biaya tambahan.

Kementerian Kesehatan menyatakan adanya permasalahan itu dan telah berupaya melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan antara lain agar:

- Meningkatkan peran dan tugas Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Program JKN serta membuat mekanisme yang memungkinkan Kemenkes mengetahui kondisi riil SDM, sarana dan prasarana kesehatan pada FKTP dan FKTL dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program JKN.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait dalam penetapan kewajiban besaran anggaran iuran PBI.

- Meningkatkan mekanisme perencanaan dan monitoring penyediaan obat untuk menjamin ketersediaan obat pada fasilitas kesehatan melalui e-katalog.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM)

PEMERIKSAAN pada RSCM bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan Unit Rawat Inap Terpadu (URIT) Gedung A dan Unit Rawat Jalan Terpadu (URJT) pada RSCM sebagai fasilitas kesehatan dalam mendukung keberhasilan program JKN.

Hasil pemeriksaan menunjukkan RSCM telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai antara lain adanya perencanaan atas pelaksanaan program pelayanan kesehatan secara menyeluruh, meskipun belum menggunakan dasar perhitungan kebutuhan dan didokumentasikan dengan baik.

RSCM juga telah memiliki prosedur operasi standar mulai dari pasien mendaftar sampai pasien memperoleh pelayanan kesehatan, meskipun belum lengkap dan terperinci. Selain itu, RSCM juga telah melaksanakan prosedur pelayanan secara konsisten sesuai dengan panduan klinis dan kebutuhan pasien tanpa dikenakan biaya pada kelas pelayanan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh pasien.

BPK menyimpulkan penyelenggaraan program JKN pada RSCM khususnya pada URJT dan URIT Gedung A belum sepenuhnya efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta JKN. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

- Pelaksanaan program rujukan sebagai salah satu bentuk dukungan pelaksanaan JKN, baik dari sistem rujukan berjenjang maupun program rujuk balik di RSCM, belum optimal. Untuk sistem rujukan berjenjang masih terdapat pasien rujukan dengan diagnosis yang seharusnya dapat ditangani oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kedua, tapi ditangani di RSCM. Tidak berjalannya program Jakarta Sehat 2015 karena ketiadaan anggaran dana hibah Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya, program rujukan yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya berjalan efektif.
- Pengelolaan sediaan farmasi yang diperlukan untuk mendukung pelayanan pasien peserta JKN BPJS Kesehatan belum memadai. Terdapat 229 jenis perbekalan farmasi kosong pada Juni 2015 dan ada

perbedaan persepsi atas pengakuan penghitungan barang farmasi. Akibatnya, terjadi kekosongan obat pada beberapa unit layanan di RSCM yang memengaruhi pelayanan pasien JKN peserta BPJS Kesehatan.

- Proses verifikasi, administrasi dan penyelesaian klaim pasien JKN peserta BPJS Kesehatan belum tepat waktu dan tepat jumlah. Akibatnya, perlu prosedur tambahan dalam pengendalian pendapatan, karena perbedaan nilai pendapatan diterima dengan bukti penerimaan. Selain itu, proses penyelesaian klaim gagal/ *pending* perlu waktu lebih lama dan berpotensi tidak tertagih karena tidak adanya SOP klaim tersebut.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, manajemen RSCM menyatakan adanya kelemahan pelaksanaan program JKN di RSCM.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSCM agar:

- Menyusun sistem pengelolaan rujukan yang lengkap, terperinci dan aplikatif sebagai pedoman bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- Memerintahkan kepala unit kerja/ layanan dalam melakukan usulan perencanaan pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya.
- Menetapkan SOP pengajuan klaim yang mengatur alur dan jangka waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan proses pengajuan klaim, dan menetapkan SOP klaim gagal/ *pending*.

Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati (RSUP Fatmawati)

PEMERIKSAAN BPK pada RSUP Fatmawati bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan (IRJ) dan Instalasi Rawat Inap C Gedung Prof. Dr. Soelarto (GPS) RSUP Fatmawati.

RSUP Fatmawati telah melaksanakan program JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yang diterbitkan Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai RSUP Fatmawati antara lain adanya perencanaan terhadap pelaksanaan program pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dan dimilikinya SOP mulai pasien mendaftar sampai pasien memperoleh pelayanan kesehatan.

BPK menyimpulkan penyelenggaraan program JKN pada RSUP Fatmawati khususnya IRJ dan IRNA GPS belum sepenuhnya efektif memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada peserta JKN. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- RSUP Fatmawati belum memiliki SOP pelaksanaan monitoring evaluasi atas pelaksanaan program JKN. Akibatnya, tidak ada dasar bagi pemegang kepentingan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut.
- Waktu tunggu pelayanan belum sesuai dengan kebijakan teknis. Pada IRJ, indikator kinerja adalah waktu tunggu pasien pada masing-masing poliklinik, yakni < 60 menit dan ketepatan waktu kehadiran dokter sesuai dengan jam pelayanan, yakni pukul 09.30 WIB-selesai. Pada GPS, indikator kinerja adalah ketepatan waktu jadwal *visite* dokter, yakni sebelum pukul 14.00 WIB. Laporan dan rekapitulasi sampai dengan Oktober 2015, pada IRJ waktu tunggu pasien adalah 1 jam 5 menit dan kehadiran dokter sesuai dengan pelayanan masih cukup rendah. Pada GPS, tingkat kepatuhan dokter untuk hadir sesuai jam *visite* rawat inap harus diperbaiki karena memengaruhi lamanya masa rawat inap pasien. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pasien, khususnya pada pasien JKN.

Atas permasalahan tersebut, RSUP Fatmawati menyatakan manajemen telah berupaya memperbaiki kelemahan yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi RSUP Fatmawati antara lain agar:

- Membuat kebijakan terkait laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program JKN seiring terbentuknya Tim Evaluasi Impelentasi JKN/ Antifraud RSUP Fatmawati.
- Menggunakan hasil evaluasi kehadiran dokter sesuai jam pelayanan dan jadwal *visite* sebagai salah satu penilaian kinerja dokter poliklinik.

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita

PEMERIKSAAN BPK pada RSJPD Harapan Kita bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan kesehatan pada RSJPD Harapan Kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan tingkat lanjut dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program JKN.

Manajemen RSJPD Harapan Kita juga telah berupaya meningkatkan pelayanan rumah sakit dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program JKN. Langkah yang dilakukan antara lain dengan mendirikan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) klaim penagihan JKN.

BPK menyimpulkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSJPD Harapan Kita untuk mendukung penyelenggaraan program JKN tahun 2014-2015 belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- RSJPD belum sepenuhnya memiliki sarana prasarana dan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelayanan pasien dan mendukung keberhasilan program JKN. Akibatnya, peningkatan mutu pelayanan medis kepada pasien dengan penggunaan tenaga medis dan perawat yang cukup belum optimal.
- RSJPD belum sepenuhnya melaksanakan prosedur klaim sesuai dengan ketentuan, antara lain belum mengajukan klaim secara tepat waktu. Koordinasi antara RSJPD dengan BPJS Cabang Jakarta Barat belum berjalan secara memadai. Hal ini mengakibatkan klaim *pending* mengganggu *cash flow* RSJPD dan memengaruhi pemberian pelayanan ke pasien. Selain itu, permasalahan JKN pada RSJPD juga belum terinformasikan dengan baik kepada regulator, dalam hal ini Kemenkes maupun BPJS Kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, Direksi RSJPD menyatakan manajemen telah berupaya memperbaiki kelemahan yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Dirut RSJPD Harapan Kita agar:

- Menyusun kebutuhan SDM RSJPD Harapan Kita berdasarkan analisis beban kerja yang valid, dan segera melakukan rekrutmen SDM untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM guna meningkatkan pelayanan kesehatan, menambah dan/ atau mengoptimalkan ruangan yang ada untuk mengurangi antrean pasien dan menambah/ memperbaiki perlengkapan /alat kesehatan yang rusak untuk mengoptimalkan pelayanan.
- Menetapkan prosedur baku dalam rangka menindaklanjuti klaim yang dikembalikan oleh BPJS.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional pada 5 objek mengungkapkan 54 temuan, yang memuat 69 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp246,60 juta.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

SALAH satu fungsi strategis BPOM adalah untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi

persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM melakukan pengawasan *premarket* dan *postmarket*.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap efektivitas koordinasi pengawasan obat dan/ atau makanan oleh pemerintah melalui BPOM TA 2014-semester I 2015. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas koordinasi pengawasan obat dan/ atau makanan oleh pemerintah melalui BPOM.

Hasil pemeriksaan menunjukkan secara umum BPOM telah melaksanakan pengawasan *premarket* dan *postmarket* sesuai dengan standar, menerapkan sistem manajemen mutu, menjalin kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini, dan mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan.

Selain itu, BPOM juga telah meningkatkan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program dan administrasi, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, sarana dan prasarana. Hal ini juga sudah tertuang dalam Renstra BPOM 2010-2014 dan 2015-2019.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan koordinasi pengawasan obat dan makanan oleh pemerintah melalui BPOM masih belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- BPOM belum didukung dasar hukum yang kuat dan khusus, dalam hal ini Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan untuk menjalankan dan memperluas fungsi dan kewenangannya. Akibatnya, dokumen perencanaan BPOM yang menjadi acuan untuk tahun 2015 belum sepenuhnya mencerminkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN. Selain itu, dasar hukum BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan belum memadai.
- Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan obat dan makanan pada pemerintah pusat dan daerah masih lemah. Akibatnya, pelaksanaan kerja sama belum dapat mendukung pengawasan obat dan makanan secara optimal. Timbulnya kendala dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan yang pelaksanaan maupun tindak lanjutnya memerlukan koordinasi lintas sektoral.

Atas permasalahan tersebut, BPOM menyatakan telah berupaya memperbaiki kelemahan yang ada. Namun, BPOM belum dapat mengoptimalkan fungsi pengawasannya karena sebagian besar

kewenangan itu bersifat delegatif, sehingga diperlukan kewenangan yang bersifat atributif berdasarkan ketentuan dalam sebuah undang-undang. RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 sebagai inisiatif DPR-RI khususnya Komisi IX diharapkan dapat mengoptimalkan tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.

Selain itu, dalam hal penguatan koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPOM mengakui terdapat kendala keterbatasan anggaran dan personel baik dari kementerian/ lembaga lain maupun dari dinas/ instansi pemerintah daerah.

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BPOM untuk meningkatkan koordinasi dengan:

- Kementerian negara/ lembaga dalam mengusulkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan ke DPR untuk dijadikan prioritas, sehingga BPOM mendapatkan kewenangan yang lebih kuat dan melekat, untuk selanjutnya diikuti penerbitan peraturan pelaksanaan setingkat peraturan pemerintah.
- Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman, pembinaan, dan komitmen tentang pengawasan obat dan makanan.

Hasil pemeriksaan BPK atas koordinasi BPOM mengungkapkan 11 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Ketahanan Pangan

PADA semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 1 objek pemeriksaan ketahanan pangan, yakni penelitian prioritas nasional program ketahanan pangan. (*Lampiran B No. 14*).

Penelitian Prioritas Pangan

RPJMN 2010-2014 menyatakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memiliki tugas melakukan penelitian prioritas nasional (PN) untuk mendukung program PN yang dilaksanakan pemerintah. Penelitian tersebut dilakukan dalam empat bidang PN, salah satunya adalah bidang ketahanan pangan.

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas program penelitian PN dalam mendukung program ketahanan pangan pada LIPI TA 2010-2014



bertujuan untuk menilai efektivitas program penelitian PN dalam mendukung program ketahanan pangan pada Pusat Penelitian Biologi dan Pusat Penelitian Bioteknologi.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan program penelitian PN tidak efektif dalam mendukung program ketahanan pangan. LIPI telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas program penelitian PN, yaitu dengan adanya kerja sama internal dan eksternal yang baik dalam pelaksanaan dan pendayagunaan hasil penelitian PN. Namun, masih terdapat permasalahan yang membutuhkan perbaikan. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perencanaan penelitian program PN tidak didukung oleh Standar Operasi Prosedur (SOP) yang baku. SOP dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan PN tidak ditetapkan sampai dengan tahun 2014, sehingga perencanaan penelitian tidak mempunyai panduan yang baku. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya target penelitian program PN yang dibebankan pemerintah kepada LIPI.
- Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penelitian belum memadai. Perlengkapan sarana dan prasarana rumah kaca pada Puslit Bioteknologi kurang memadai, sarana dan prasarana penelitian yang lebih *advanced*, juga ruangan dan peralatan laboratorium di Pusat Penelitian Biomaterial, masih belum memadai. Akibatnya, kegiatan penelitian tidak berjalan optimal dan tujuan pelaksanaan kegiatan penelitian tidak tercapai.
- Penelitian belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan rencana dan tidak memiliki *output* yang jelas. Evaluasi usulan penelitian yang

dilakukan Tim Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (PME)/tim panel belum memadai. Akibatnya, sasaran *output* yang ditetapkan tidak jelas dan tidak adanya keberlanjutan atas penelitian.

- Kegiatan penelitian PN yang dilaksanakan LIPI belum terjamin mutunya. Inspektorat belum melakukan pemeriksaan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dilaksanakan dengan tepat. Selain itu, tidak ada proses pemeriksaan yang memastikan bahwa kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan Tim PME telah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Akibatnya, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian PN belum terjamin mutunya.

Atas permasalahan tersebut Kepala LIPI menyatakan adanya permasalahan pelaksanaan dan pendayagunaan hasil penelitian PN.

BPK telah merekomendasikan Kepala LIPI untuk menginstruksikan Sekretaris Utama agar:

- Menyusun dan menetapkan pedoman atau panduan penelitian yang berisi antara lain sistem manajemen mutu pada kegiatan utama/prioritas LIPI.
- Bersama Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk anggaran, dan selanjutnya mengalokasikan anggaran pemenuhannya secara bertahap.
- Bersama-sama Kepala Puslit membentuk tim ahli untuk membantu tim PME dalam menilai perencanaan kegiatan penelitian dan evaluasinya.
- Bersama-sama Kepala Biro PK LIPI untuk menyusun Manual Indikator Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP) untuk tingkat eselon I, dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk tingkat satuan kerja. Manual tersebut antara lain berisi informasi tentang nama IKU/ IKP/ IKK, definisi, teknik menghitung, dan lokasi data.
- Memerintahkan Kepala Inspektorat agar menyusun dan menetapkan SOP tentang pemeriksaan terhadap substansi kegiatan penelitian dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim PME dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.

Hasil pemeriksaan BPK atas penelitian prioritas nasional program ketahanan pangan mengungkapkan 15 temuan, yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 14 objek pemeriksaan tata kelola dan reformasi birokrasi yang terdiri atas 7 objek pemeriksaan reformasi keuangan negara dan 7 objek pengelolaan pelayanan publik.

Reformasi Keuangan Negara

PEMERIKSAAN atas reformasi keuangan negara terdiri atas 3 objek pemeriksaan pengelolaan keuangan dan 4 objek pemeriksaan pengelolaan sistem informasi. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya pada *Lampiran B* No.15-21.

Pengelolaan Keuangan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan terkait dengan reformasi keuangan negara pada 3 objek pemeriksaan, yaitu 1 objek pada Kementerian Dalam Negeri dan 2 objek pada Kementerian Keuangan dengan perincian sebagai berikut:

- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di pemerintah daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- Pemeriksaan kinerja atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual (*Internal Control Over Financial Reporting/ ICOFR*) pada Kementerian Keuangan dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah.
- Pemeriksaan kinerja atas efektivitas penyusunan dan penetapan APBN/P TA 2014-2016 dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi terkait lainnya di Jakarta.

Pembinaan Implementasi SAP Berbasis Akrual

SESUAI dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat dilaksanakan tahun 2008. Akan tetapi, sampai dengan tahun 2010, pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan dan masih menggunakan basis kas. Dalam

perkembangannya, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menganut basis akrual penuh. Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda. Pada Pasal 10 Permendagri tersebut diatur bahwa penerapan SAP berbasis akrual paling lambat tahun 2015.

Berdasarkan Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Dit. P2KD) bertugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Salah satu fungsinya melaksanakan pembinaan umum di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja di Dit. P2KD dengan tujuan untuk menilai efektivitas pembinaan Dit. P2KD dalam implementasi SAP berbasis akrual di pemda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dhi. Dit. P2KD dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual pada pemda masih belum efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih adanya beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya sebagai berikut:

- Regulasi/ kebijakan terkait penerapan SAP berbasis akrual pada pemda belum mencakup seluruh perlakuan akuntansi baik dalam hal pengakuan, pencatatan, penilaian, klasifikasi, dan pengungkapan, misalnya klasifikasi kas di luar Bendahara Umum Daerah (BUD) belum diatur secara jelas dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Modul Akuntansi Berbasis Akrual terkait dengan kriteria pengakuan kas di luar BUD. Dengan demikian, pemda berpotensi tidak menyajikan kas di luar BUD dalam laporan keuangan. Demikian pula dengan piutang lainnya, belum diatur tentang metode pembentukan penyisihan piutangnya, sehingga penyisihan untuk jenis piutang di luar piutang pajak dan piutang retribusi berpotensi tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih. Hal tersebut mengakibatkan kebijakan/ regulasi terkait penerapan SAP berbasis akrual yang diterbitkan Kemendagri belum dapat digunakan sepenuhnya untuk panduan dalam penyusunan kebijakan akuntansi oleh pemda sebagai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akurat dan andal.

- Penyiapan dan pembinaan kepada pemda terkait dengan aplikasi dalam penerapan SAP berbasis akrual belum optimal antara lain kegiatan pembinaan terhadap pemda berupa forum pembahasan tidak membahas secara mendalam mengenai kesesuaian aplikasi dengan SAP dan peraturan lainnya, sehingga sistem aplikasi yang dimiliki pemda masih bermasalah. Hal ini antara lain terlihat pada aplikasi yang belum dapat menghasilkan laporan keuangan, sistem aplikasi yang belum terintegrasi secara vertikal (sistem aplikasi SKPD/ Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada SKPKD/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) dan horizontal (antaraplikasi dalam sistem), dan aplikasi yang belum sesuai dan/ atau tidak fleksibel menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan sistem aplikasi belum dapat menghasilkan LKPD berbasis akrual yang akurat, lengkap dan handal.

Atas permasalahan tersebut, Kemendagri menyatakan sampai saat ini Kemendagri masih menginventarisasi permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemda dan melakukan penyempurnaan aplikasi.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar:

- Menginventarisasi seluruh transaksi akuntansi di pemda untuk merevisi/ menyusun kebijakan/ regulasi terkait implementasi SAP berbasis akrual yang komprehensif.
- Lebih optimal dalam melakukan penyiapan dan pembinaan terkait dengan aplikasi pelaporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan praktik manajemen yang lebih baik.

Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

TAHUN 2015 merupakan tahun awal penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah pusat. Untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan dan atau pengembangan terhadap sistem dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi yang mendukung penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Perubahan basis akrual, yang diikuti dengan perubahan sistem dan kebijakan akuntansi serta sistem informasi, menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kembali penilaian terhadap efektivitas desain dan implementasi pengendalian yang ada untuk meminimalkan dampak dari risiko yang timbul pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual.

Salah satu sistem pengendalian yang dimiliki pemerintah adalah *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR). ICOFR adalah

pengendalian yang secara khusus didesain untuk mengatasi risiko-risiko yang ada dalam proses penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas ICOFR dengan tujuan untuk menilai efektivitas desain dan implementasi ICOFR dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual. Hasil pemeriksaan menunjukkan desain dan implementasi ICOFR dalam pelaporan keuangan pemerintah pusat berbasis akrual belum efektif untuk menjamin kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Adapun, permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Kebijakan akuntansi dan praktik pencatatan pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada pemerintah pusat belum mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, yaitu pengakuan pendapatan Laporan Operasional, Beban dan Aset, tidak dilakukan pada saat timbulnya hak/ kewajiban, tetapi dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran ke dan dari kas negara, dengan dokumen sumber yang sama dengan basis *Cash Toward Accrual* (CTA), yaitu dokumen realisasi pendapatan/ belanja. Pengakuan transaksi-transaksi akrual tersebut hanya dilakukan pada akhir periode pelaporan melalui jurnal-jurnal penyesuaian akrual.

Oleh karena itu, sistem pencatatan akuntansi masih berbasis CTA dengan penyesuaian akrual pada akhir periode pelaporan. Kondisi ini menimbulkan risiko tidak tercatatnya seluruh hak dan kewajiban pemerintah yang layak diakui sebagai beban/ pendapatan dalam satu periode laporan, ketidaktepatan periode pengakuan aset tetap yang juga berpengaruh terhadap nilai dan periode pengakuan beban penyusutan pada Laporan Operasional, dan tidak seragam serta konsistennya transaksi penyesuaian pada akhir periode laporan.

- Pernyataan menteri/ pimpinan lembaga mengenai penyelenggaraan pengendalian internal yang memadai sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara belum sepenuhnya didasarkan pada mekanisme penilaian mandiri atas pengendalian internal/ *Control Self Assessment* (CSA). CSA merupakan parameter evaluasi mandiri terhadap pencapaian efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh setiap unit *risk* yang terlibat, yang mencakup proses evaluasi mulai dari faktor yang dievaluasi, indikasi kekuatan pengendalian yang sudah dilaksanakan,

indikasi kelemahan pengendalian yang masih memerlukan perbaikan dan pemberian nilai (skor) dan dengan pencapaian masing-masing unsur SPIP.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Kementerian Keuangan belum memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur terkait mekanisme CSA dalam rangka pelaporan keuangan berbasis akrual. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah tidak memiliki dokumentasi yang memadai atas seluruh risiko dan efektivitas pengendalian internal dalam penyusunan Laporan Keuangan (LK) Bendahara Umum Negara (BUN) dan LKPP, baik risiko pada saat proses konsolidasi LK BUN dan LKPP, risiko pada saat konsolidasi LK Bagian Anggaran (BA) BUN dan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) pada masing-masing jenjang unit akuntansi konsolidator di BA BUN dan KL, maupun risiko pada tingkat satuan kerja sebagai unit akuntansi yang menghasilkan transaksi dan dokumen sumber akuntansi serta laporan keuangan tingkat satker.

- Masih terdapat kelemahan pengendalian aplikasi pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) atas proses konsolidasi dan penyusunan LKPP, mulai dari proses rekonsiliasi antara pengguna anggaran dengan BUN pada tingkat KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan Kanwil DJPB (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan), proses rekonsiliasi BMN (Barang Milik Negara) antara KPPN/ KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan Kanwil DJPB/ Kanwil DJKN (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), serta proses konsolidasi LKKL yang masih memiliki kelemahan pengendalian *input* SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) dan SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Hal ini mengakibatkan konsolidasi LK BUN dan LKPP belum dapat dilakukan dengan menggunakan SPAN, yang antara lain disebabkan LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), dan Neraca konsolidasian yang dihasilkan oleh SPAN belum dapat menyajikan data yang valid, serta belum tersedianya data transaksi seluruh BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) pada SPAN.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan antara lain memberikan tanggapan:

- Pada umumnya kebijakan yang ada sudah memadai, tapi untuk kebijakan yang belum memadai akan dikaji ulang dan diperbaiki.

- Kementerian Keuangan telah melaksanakan penilaian mandiri atas pengendalian intern dalam penyiapan laporan keuangan dalam bentuk penyiapan perangkat pemantauan pengendalian intern dan pemantauannya oleh Unit Kepatuhan Internal, walaupun dalam pelaksanaannya belum menyeluruh dan lengkap mengingat perangkat pemantauan atau yang disebut *Risk and Control Matrix* belum secara lengkap disusun untuk seluruh kegiatan penyiapan laporan keuangan.
- Keterbatasan infrastruktur SPAN serta jumlah pengguna (*user*) SPAN yang tersedia saat ini merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan. Pengalokasian jumlah *user* SPAN serta infrastrukturnya pada masing-masing kantor pelayanan, kantor pusat dan Kantor Wilayah DJPBN, serta satuan kerja BA BUN pada lingkup Kementerian Keuangan disesuaikan dengan analisis beban kerja pada masing-masing kantor tersebut saat SPAN dirancang. Untuk masalah rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) yang belum dapat dilakukan, hal ini dikarenakan antara KPPN dan KPKNL masih memiliki perbedaan dalam jumlah kantor wilayah DJPBN dengan DJKN.

BPK telah merekomendasikan Kementerian Keuangan agar:

- Melengkapi kebijakan dan sistem akuntansi untuk dapat melakukan pencatatan transaksi akrual pada saat timbulnya hak dan kewajiban dan tidak hanya pada akhir periode pelaporan.
- Mengkaji dan menetapkan kebijakan terkait dengan desain dan implementasi CSA dalam rangka pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan mengikutsertakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam aplikasi SPAN untuk mendukung proses rekonsiliasi dan konsolidasi LKPP dan LKBUN serta membuat kajian dan mengembangkan aplikasi yang dapat mendukung ketentuan pelaksanaan kegiatan pelaporan keuangan yang memadai.

Penyusunan dan Penetapan APBN/P TA 2014-2016

APBN merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara, yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan transfer, dan anggaran pembiayaan. Proses penyusunan APBN meliputi perencanaan dan penganggaran APBN. Tahap perencanaan menghasilkan Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang digunakan sebagai pedoman penyusunan anggaran.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyusunan dan penetapan APBN/P Tahun 2014-2016 dalam rangka mendukung pelaksanaan RKP. Hasil pemeriksaan menunjukkan penyusunan dan penetapan asumsi dasar ekonomi makro, anggaran pendapatan pajak dan PNBPN Migas, anggaran belanja KL dan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN/P Tahun 2014-2015 dan APBN Tahun 2016 masih belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2014-2016. Hal tersebut terlihat dari proses penyusunan dan penetapan APBN/P yang masih belum memadai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anggaran pendapatan pajak dan PNBPN Migas belum sepenuhnya melalui proses yang prudent, yaitu: (a) Penyusunan anggaran pendapatan pajak belum sepenuhnya mempertimbangkan setiap kebijakan atau rencana kebijakan perpajakan yang akan diterapkan, (b) Adanya penganggaran pajak penghasilan (PPH) dan Bea Masuk (BM) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang tidak memiliki dasar pengaturan dalam UU Pajak Penghasilan dan UU Kepabeanan, serta menambah beban APBN dengan meningkatnya anggaran belanja yang bersifat *mandatory spending*, (c) Penyusunan anggaran PNBPN dan migas belum didasarkan pada *lifting* migas yang disepakati SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam rencana kerja dan anggaran.

Hal ini berdampak pada anggaran pendapatan pajak dan PNBPN migas yang kurang sesuai dengan kemampuan pemerintah untuk memperoleh pendapatan.

- Penyusunan anggaran belanja K/L belum sepenuhnya melalui proses yang prudent, yaitu: (a) Mekanisme perhitungan pagu indikatif sebagai dasar penentuan kebutuhan belanja K/L belum memadai, (b) Adanya alokasi anggaran belanja K/L yang belum jelas sasaran/ *output* keluarannya, baik pada tahap pengajuan RAPBN oleh pemerintah maupun pada tahap penetapan APBN sesuai dengan hasil pembahasan dengan DPR, (c) Belum seluruh sasaran dalam RKP dijabarkan secara jelas dalam sasaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL), dan (d) Belum adanya mekanisme untuk menjamin kesesuaian sasaran program/ kegiatan RKAKL dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKP.

Permasalahan ini berdampak pada tidak jelasnya kontribusi anggaran belanja K/L terhadap pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RKP dan tidak terserapnya anggaran belanja K/L karena tidak sesuai dengan kemampuan daya serap K/L.

- Dalam penyusunan anggaran DAK, pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan sasaran DAK yang ditetapkan pada RKP dalam menyusun anggaran DAK, baik anggaran total maupun anggaran per bidang DAK. Selain itu, terdapat perubahan mekanisme alokasi anggaran DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK Tambahan Usulan Daerah pada APBNP Tahun 2015 dan DAK Fisik Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, tanpa disertai pedoman alokasi anggaran DAK yang jelas.

Permasalahan ini berdampak pada tidak jelasnya kontribusi alokasi anggaran DAK terhadap pencapaian sasaran DAK yang ditetapkan dalam RKP dan tidak transparannya alokasi DAK per daerah.

Atas permasalahan tersebut secara umum Bappenas dan Kementerian Keuangan antara lain memberi tanggapan bahwa:

- Penyusunan APBN/ P TA 2014-2016 telah mempertimbangkan dampak kebijakan tetapi tidak semua kebijakan dapat dihitung dampaknya.
- Pemberian fasilitas pajak DTP dalam UU APBN bersifat *lex specialis derogat lex generalis*, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya atau konstitusi yang lebih tinggi. Namun demikian, Badan Kebijakan Fiskal akan mengkaji dan mempertimbangkan kebijakan pajak DTP dalam revisi peraturan perpajakan. Sehubungan dengan tanggapan tersebut, BPK berpendapat UU APBN tidak dapat bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) bahwa UU APBN yang bersifat menetapkan (*acte condition*) tidak dapat diperlakukan sebagai *lex specialis* terhadap undang-undang lain yang bersifat mengatur (*acte regle*).
- Akan dilakukan perbaikan/ penyempurnaan dalam penyusunan anggaran belanjanya.
- Akan dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan anggaran DAK dengan mempertimbangkan perubahan kebijakan pemerintah yang mungkin terjadi.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan beberapa langkah, antara lain:

- Menetapkan mekanisme penyusunan target pendapatan yang memperhitungkan dampak setiap kebijakan atau rencana kebijakan

perpajakan dan pendokumentasiannya, melakukan kajian atas alternatif kebijakan fasilitas perpajakan, dan menetapkan mekanisme penghitungan anggaran PNBPN migas yang selaras dengan target *lifting*;

- Menetapkan ketentuan mengenai tahapan penyusunan dan penetapan pagu indikatif yang memperjelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi serta menyusun mekanisme pengendalian dalam rangka memastikan kesesuaian alokasi anggaran belanja KL dan sasaran RKA-KL dengan sasaran yang ditetapkan dalam RKP;
- Menyusun dan menetapkan peraturan pengendalian terkait alokasi anggaran DAK serta mengkaji mekanisme pengendalian penganggaran, pengalokasian, dan pelaksanaan DAK untuk selanjutnya menetapkan kebijakan mengenai hal tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas 3 objek pengelolaan keuangan tersebut mengungkapkan 54 temuan, yang memuat 60 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Sistem Informasi

BPK melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai efektivitas kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 3 objek pemeriksaan pada Kementerian Keuangan dan 1 objek pemeriksaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), yaitu:

- Pengelolaan teknologi informasi keuangan tahun 2012-2015 dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan.
- Kegiatan pengendalian pengelolaan sistem informasi impor dan cukai untuk menjamin integrasi, akurasi, kelengkapan, dan validitas penerimaan negara.
- Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi terkait dengan penerimaan dan piutang pajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan pada Ditjen Pajak dan instansi vertikal di bawahnya.
- Efektivitas penyelenggaraan sistem katalog elektronik (*e-catalogue*) TA 2014 dan 2015.



Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

TEKNOLOGI informasi dan komunikasi (TIK) Kementerian Keuangan dikelola berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan. Dalam kurun 2009–2015, Kementerian Keuangan menetapkan 44 ketentuan berupa KMK, Keputusan Sekretaris Jenderal, Keputusan *Chief Information Officer* (CIO), dan Surat Edaran Menteri Keuangan sebagai panduan pelaksanaan KMK Nomor 260/KMK.01/2009, termasuk menetapkan KMK Nomor 338/KMK.01/2012 tentang Arah Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola TIK guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan terutama dalam hal membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi.

BPK menyimpulkan tata kelola TIK belum sepenuhnya efektif guna mendukung pencapaian visi dan misi Kemenkeu terutama dalam hal membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi karena masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Pimpinan Kemenkeu masih perlu meningkatkan komitmen dalam mengarahkan, mengevaluasi dan memonitor TIK untuk mencapai visi misi Kemenkeu dalam membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi. Permasalahan yang terjadi di antaranya Kemenkeu belum sepenuhnya mengidentifikasi kebutuhan TIK yang selaras dengan proses bisnis. Akibatnya proses pengintegrasian sistem TIK dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKN) menjadi satu kesatuan fungsional berisiko tidak dapat direalisasikan.
- Strategi TIK yang selaras dengan strategi dan tujuan Kemenkeu belum ditetapkan dalam Renstra TIK (*ICT Blueprint*) yang memuat komponen lengkap. Strategi TIK belum menginterpretasikan tujuan organisasi untuk komponen *ICT Blueprint* yang dimuat dalam KMK Nomor 456/KMK.01/2015, yaitu antara lain komponen definisi proses bisnis serta arsitektur aplikasi dan pemetaannya terhadap proses bisnis. Hal ini mengakibatkan tujuan integrasi TIK Kemenkeu berisiko tidak tercapai.

Permasalahan lainnya adalah belum terdapat penanggung jawab pengelolaan populasi data pada tingkat Kemenkeu dalam rangka integrasi data yang menjamin terpenuhinya prinsip data sesuai dengan kebijakan pengelolaan TIK di lingkungan Kemenkeu. Ketentuan pengelolaan data dalam bentuk pertukaran data seperti KMK Nomor 274/KMK.01/2010 hanya mengatur perihal pemilik data, penghimpun, dan penyimpan data. Implementasi KMK Nomor 274/KMK.01/2010 diwujudkan dalam bentuk keputusan CIO tentang pertukaran data yang terakhir ditetapkan dengan Keputusan CIO Nomor KEP-01/SA.5/2013. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak diatur pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan jenis data yang wajib disediakan dan/atau dipertukarkan. Hal ini mengakibatkan pertukaran data berisiko tidak memenuhi prinsip data dalam hal prinsip *complete, Reliable, Up to date, Secure, accurate* (TRUST) dan pemanfaatan data.

- Struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur belum optimal untuk menggerakkan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Permasalahan yang terjadi di antaranya kebijakan strategis dan prosedur operasional TIK belum mencerminkan proses bisnis TIK yang mendukung arah kebijakan Kemenkeu di bidang informasi dan teknologi keuangan. Akibatnya, prinsip pembagian kerja berisiko tidak sejalan dengan prinsip organisasi TIK dalam hal fungsi strategi, proyek investasi, operasional, pendukung dan manajemen risiko.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa:

- Proses bisnis dan arsitektur aplikasi pada tingkat Kementerian Keuangan termasuk proses bisnis yang melibatkan beberapa unit eselon 1, dalam proses penyusunan yang tercakup dalam *enterprises architecture Integrated Finansial Management Information System* (IFMIS).
- Inisiatif untuk proses bisnis dan arsitektur aplikasi pada tingkat Kemenkeu (termasuk proses bisnis yang melibatkan beberapa unit eselon I) dalam proses penyusunan yang tercakup dalam *enterprise architecture* IFMIS.
- Tanggung jawab dan mekanisme pertukaran data telah diatur Kemenkeu. Ke depannya Kemenkeu akan menyusun aturan yang mempertegas mekanisme dan tanggung jawab pengelolaan data.
- Kebijakan yang terkait Sistem Informasi Manajemen Keuangan Negara (SIMKN) dan kebijakan IFMIS akan disusun setelah konsep arsitektur bisnis selesai disusun.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan antara lain agar:

- Segera menetapkan proses bisnis dan kebutuhan TIK pada tingkat Kemenkeu terutama dalam mewujudkan integrasi sistem TIK dalam SIMKN.
- Segera menetapkan komponen Renstra TIK secara lengkap sesuai dengan prinsip umum sebagaimana diatur dalam kebijakan pengelolaan TIK Kemenkeu.
- Menetapkan kebijakan terkait penanggung jawab dan mekanisme pengelolaan data pada tingkat Kemenkeu yang berorientasi pada prinsip data sebagaimana diatur dalam kebijakan pengelolaan TIK Kemenkeu.
- Menginventarisasi dan menetapkan kebijakan strategis dan prosedur operasional TIK yang belum disusun dengan memperhatikan proses bisnis TIK yang sejalan dengan arah dan kebijakan Kemenkeu di bidang informasi dan teknologi keuangan.

Pengelolaan Sistem Informasi Impor dan Cukai

DATA dan informasi kepabeanan dan cukai pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta penentuan kebijakan pada DJBC, instansi terkait lainnya (termasuk BPK), pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan sistem informasi impor dan cukai pada DJBC.

Pemeriksaan kinerja atas pengendalian pengelolaan sistem informasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi impor dan cukai untuk menjamin integrasi, akurasi, kelengkapan dan validitas penerimaan negara.

BPK menyimpulkan pengendalian atas kegiatan pengelolaan sistem informasi impor dan cukai belum efektif dalam menjamin integrasi, akurasi, kelengkapan, dan validitas penerimaan negara karena masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- Adanya *data center* yang tidak terintegrasi dengan Pusat Informasi Teknologi Keuangan (Pusintek) dan tanpa persetujuan *Chief Information Officer*. *Data center* tersebut terdapat pada Kantor Pusat DJBC, Kantor Pelayanan Utama (KPU) BC Tanjung Priok 1, KPU BC Soekarno Hatta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Sumatera Utara 1. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan integrasi perangkat TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Sistem Informasi Keuangan Terpadu yang mampu menyajikan informasi keuangan negara yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan.
- Aplikasi subsistem dalam *Sistem Customs Excise Information System and Automation (CEISA)* DJBC belum sepenuhnya saling terintegrasi dan Sistem CEISA DJBC belum sepenuhnya saling terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (INSW). Hal tersebut mengakibatkan data CEISA Kepabeanan tidak dapat diyakini validitas dan akurasinya.
- *Log Backup* Sistem Informasi CEISA tidak berisi informasi yang sesuai dengan KMK Nomor 350/KMK.01/2010. *Log backup* tersebut tidak mencantumkan media yang digunakan, lokasi penyimpanan media *backup*, tanggal pemindahan dan petugas yang memindahkan. Selain itu, terdapat status *log backup* sebanyak 57 kali gagal tanpa ada penjelasan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tersedianya *backup data* yang hilang/ rusak/ terhapus pada aplikasi CEISA Impor jika sewaktu-waktu data tersebut dibutuhkan kembali dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan oleh DJBC.
- Kebutuhan pengawasan dan pelayanan pita cukai belum didukung aplikasi Sistem Aplikasi Cukai (SAC) yang memadai, di antaranya aplikasi SAC-2 gagal dalam melakukan validasi input dan pemrosesan transaksi cukai etil alkohol dan cukai hasil tembakau. Hal tersebut mengakibatkan informasi dan data yang disajikan pada SAC tidak dapat diyakini validitasnya antara lain terkait penerimaan cukai dan PPN.



Atas permasalahan tersebut, pihak DJBC memberikan tanggapan bahwa:

- *Data Center* yang dimaksud adalah *data center* yang lama ketika sistem masih desentralisasi. Saat ini secara fungsional, *Data Center* tersebut hanya terpakai untuk jaringan dan layanan KITE yang masih menggunakan sistem desentralisasi. Pada tahun 2016, sedang diproses untuk sentralisasi layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) secara keseluruhan.
- Pengembangan IT DJBC didasarkan pada IT *blue print* yang dibuat pada tahun 2010 dan berdasarkan IT *direction* pengembangan sistem yang dilakukan adalah tersentralisasi. Mengenai data CEISA yang tidak dapat dikonfirmasi dengan Indonesia National Single Window (INSW), data tersebut dapat ditemukan di INSW. Saat ini sedang dilakukan penyusunan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang tata cara pengembangan sistem IT sesuai standar *System Development Life Cycle* (SDLC).
- *Backup* yang gagal seharusnya dilihat berdasarkan tanggal, waktu, dan *databasenya*, sehingga tidak semua *database* mengalami kegagalan *backup* pada tanggal tersebut.



- Aplikasi SAC2 tidak dapat memvalidasi banyaknya lembar yang diajukan di formulir CK-1A (pemesanan pita cukai hasil tembakau) melebihi stok persediaan cukai karena aplikasi tidak melakukan validasi banyaknya stok.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Bea dan Cukai antara lain agar:

- Melakukan inventarisasi *data center* dan perangkat TIK yang belum terintegrasi.
- Memerintahkan Direktur IKC untuk mengembangkan aplikasi CEISA agar subsistem dalam sistem CEISA saling terintegrasi.
- Mengupayakan media penyimpanan di DC dan DRC yang memadai dan *log backup* sesuai dengan KMK Nomor 350/KMK.01/2010 Lampiran angka 5 mengenai *Backup Data*.
- Memerintahkan Direktur IKC untuk menginventarisasi kelemahan di dalam SAC dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan desain SAC serta menyusun SOP terkait penanganan gangguan SAC.

Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan dan Piutang Pajak

LAPORAN hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2013-2014 masih menunjukkan permasalahan adanya kelemahan SPI, terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terkait penerimaan dan piutang pajak.

Pemeriksaan kinerja atas pengendalian pengelolaan sistem informasi bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi penerimaan dan piutang pajak serta penyajiannya dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjamin integritas, akurasi, kelengkapan, dan validitas penerimaan dan piutang pajak.

BPK menyimpulkan pengendalian atas kegiatan pengelolaan sistem informasi penerimaan dan piutang pajak serta penyajiannya pada laporan keuangan DJP belum efektif dalam menjamin integrasi, akurasi, kelengkapan dan validitas penerimaan negara karena masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- Pengelolaan sistem penerimaan dan piutang pajak belum efektif. Hasil pengujian atas *database* penerimaan dengan membandingkan antara *database* Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan *log file* Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) *generator* menunjukkan data penerimaan pajak masih belum dapat memberikan hasil yang memadai. Selain itu, terdapat penggunaan transaksi yang berasal dari *log file* NTPN *generator* yang tidak terdapat di MPN yang diakui sebagai transaksi pengurang Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP) Modul Penagihan. Hal ini menunjukkan adanya risiko kurang catat penerimaan di MPN.
- Menu informasi dan monitoring sebagai salah satu metode penyajian data *output* hasil *input* data ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) belum menyajikan seluruh data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan piutang pajak dan belum dapat menyajikan data yang dapat diyakini integritas dan validitasnya. Hasil pengujian terhadap aplikasi SIDJP menunjukkan masih terdapat data yang belum disajikan dalam menu informasi dan monitoring, di antaranya *register* tanggal penyampaian SKP dan *register* tanggal penyampaian SK Keberatan. Selain itu, terdapat data yang belum dapat diyakini integritas dan validitasnya, di antaranya jenis SKP disebutkan sebagai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetapi bernilai negatif dan nihil serta jenis SKP disebutkan sebagai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tetapi bernilai positif dan nihil.

Atas permasalahan tersebut, DJP memberikan tanggapan bahwa:

- Perbaikan lebih lanjut akan dilakukan pada MPN G2 serta telah dilakukan penutupan Menu *input* ALPP Modul Penagihan dan penggunaan SIDJP.

- DJP akan membuatkan menu-menu tersebut di menu informasi dan monitoring SIDJP. DJP juga akan melakukan analisis dan evaluasi terkait menu *input*-an modul pemeriksaan, penagihan, dan keberatan pada aplikasi administrasi maupun aplikasi *Case Management* SIDJP.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak antara lain agar:

- Melakukan verifikasi *database* penerimaan pajak dan rekonsiliasinya dari MPN dan *logfile* NTPN *generator*.
- Menyusun atau mengevaluasi menu informasi dan monitoring terkait data piutang pajak yang dapat dijadikan bahan rekonsiliasi/rujukan bagi *user* baik *user* penginput data maupun *user* terkait yang membutuhkan data terkait piutang pajak.

Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik (e-Catalogue)

KATALOG elektronik menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah. Katalog elektronik merupakan bagian dari pengembangan sistem pengadaan barang/ jasa pemerintah melalui *e-purchasing*.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai apakah penyelenggaraan sistem katalog elektronik telah efektif. BPK menyimpulkan kegiatan penyelenggaraan sistem katalog elektronik kurang efektif terutama karena:

- Penyelenggaraan sistem katalog elektronik belum sepenuhnya didukung dengan sistem informasi yang memadai. Permasalahan tersebut di antaranya aplikasi dalam penyelenggaraan katalog elektronik (aplikasi *e-catalogue* dan *e-purchasing*) belum sepenuhnya dapat menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna katalog. Hal ini mengakibatkan pengguna aplikasi katalog elektronik selaku pembeli dapat melakukan pemesanan atas produk yang tidak tersedia/ stok kosong. Selain itu, pembeli tidak dapat mengetahui perkiraan harga produk setelah negosiasi dan perubahan harga produk terakhir.
- Proses pencantuman usulan barang/ jasa yang akan dimasukkan dalam katalog elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Permasalahan tersebut di antaranya pemrosesan atas usulan produk barang/ jasa untuk katalog tidak sesuai dengan SOP. Hal ini mengakibatkan produk yang tercantum dalam katalog belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- Penayangan produk dalam katalog elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Permasalahan tersebut di antaranya data dan informasi produk yang ditayangkan dalam aplikasi *e-catalogue* belum dapat memberikan peringatan secara otomatis untuk produk yang kontraknya akan atau telah berakhir, belum dapat menampilkan riwayat transaksi pembelian (instansi pembeli produk, kuantitas, kurs, dan harga pembelian) sebagai bahan negosiasi harga, dan belum dapat menampilkan informasi jumlah ketersediaan (stok) produk barang/jasa. Hal ini mengakibatkan proses pengadaan melalui *e-catalogue* menjadi tidak efisien dan memakan waktu lama.

Atas permasalahan tersebut, LKPP telah melakukan upaya penyempurnaan terhadap kelemahan aplikasi dan mengakui terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP.

BPK merekomendasikan kepada Kepala LKPP antara lain agar:

- Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyempurnakan aplikasi penyelenggaraan katalog elektronik yang terintegrasi dan informatif.
- Menyempurnakan SOP terkait dengan proses penerimaan usulan barang/jasa yang akan dimasukkan dalam katalog elektronik.
- Menyusun pedoman standar materi/ informasi produk yang harus diinput di *e-catalogue*.

Hasil pemeriksaan BPK atas 4 objek pemeriksaan terkait dengan pengelolaan sistem informasi tersebut mengungkapkan 44 temuan, yang memuat 51 permasalahan ketidakefektifan.

Pelayanan Publik

PELAYANAN publik menjadi salah satu kegiatan yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka pelaksanaan program reformasi birokrasi. Pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 7 kegiatan pelayanan publik. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran B* No.22-28.

- Pengelolaan Kegiatan Legalisasi Aset Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran (TA) 2013-Semester I 2015 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

- Pelayanan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2013-2014 pada Mahkamah Konstitusi (MK).
- Kegiatan Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api Nonorganik TNI/Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013-Semester I 2015.
- Efektivitas Penerbitan Perizinan Impor Garam pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014-Semester I Tahun 2015 di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Pelayanan Kesehatan Haji tahun 1436 H/ 2015 M pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi.
- Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri dengan Skema *private to private* (P to P) pada Tahap Penempatan pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI), Perwakilan RI di Hong Kong Kuala Lumpur, Tawau, Abu Dhabi, Jeddah, dan Dubai serta Instansi Terkait lainnya.
- Efektivitas Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Tahun 2014-Oktober 2015 di Jakarta.

Legalisasi Aset Program Nasional Agraria

PROGRAM Nasional Agraria (PRONA) pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka menerbitkan sertifikat hak atas tanah, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. Penyelenggaraan PRONA ditujukan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, terutama untuk tanah nonpertanian milik perorangan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan legalisasi aset PRONA TA 2013-semester I 2015 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan legalisasi aset PRONA tanah nonpertanian milik perorangan. Untuk itu, pemeriksaan diarahkan pada sumber daya manusia, sumber daya



keuangan, data dan informasi, prosedur pelaksanaan kegiatan legalisasi aset pertanahan PRONA sesuai dengan tahapan dan pedoman yang berlaku, *monitoring*, *evaluasi* serta *pertanggungjawaban*. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pengelolaan belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan program.

Kementerian ATR/ BPN telah berupaya menyiapkan sumber daya yang dimiliki seperti dana, data dan informasi, prosedur dan menyusun petunjuk teknis (juknis) yang memuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan PRONA. Dana kegiatan berasal dari DIPA Bagian Anggaran Kementerian ATR/ BPN.

Kementerian ATR/ BPN juga berupaya menyediakan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan, BPN menunjuk Direktorat Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT sebagai perumus kebijakan teknis dan pelaksana kegiatan.

Selain upaya-upaya tersebut, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Prosedur PRONA yang ada belum dapat mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Prosedur/ juknis PRONA yang dimiliki saat ini belum disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satker, belum ada harmonisasi antara satu program dengan program

yang lain, serta belum maksimalnya dukungan pihak eksternal terkait. Hal ini mengakibatkan pencapaian target PRONA sulit dipenuhi, hasil program kegiatan Inventarisasi Pengaturan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan PRONA dan program PRONA belum berdampak optimal dengan masih adanya sasaran program yang belum mendapatkan pelayanan PRONA.

- Beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan legalisasi aset PRONA Kementerian ATR/BPN belum didukung dengan data yang lengkap dan memadai. Pelaksanaan tahap pengumpulan data yuridis, pengukuran, pemeriksaan tanah, penerbitan hak/ pengesahan data fisik dan yuridis, dan penerbitan sertifikat belum sepenuhnya sesuai persyaratan dalam juknis. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan PRONA belum optimal di mana tahap kegiatan PRONA belum berjalan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan dalam juknis yang telah ditetapkan.
- Pendokumentasian warkah legalisasi aset PRONA belum dilaksanakan dengan memadai. Penyimpanan warkah di satker belum memiliki standar yang seragam, belum memanfaatkan perkembangan teknologi, satker belum memiliki bagian khusus yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan warkah, dan belum memiliki tempat penyimpanan warkah yang memadai untuk memudahkan akses dan terawat. Hal ini mengakibatkan risiko hilang dan rusaknya warkah serta lambatnya pelayanan kegiatan pertanahan.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian ATR/ BPN mengakui tiga permasalahan di atas. Selain itu, kegiatan IP4T tidak semata-mata dilakukan untuk dimanfaatkan kegiatan PRONA, tetapi dapat juga untuk kegiatan rutin dan legalisasi aset lain. Kegiatan PRONA hanya mengkomodasi IP4T dalam hal pensertifikatannya.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri ATR/ Kepala BPN agar:

- Merevisi juknis kegiatan PRONA untuk disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing satker, memanfaatkan hasil kegiatan IP4T atau kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan PRONA untuk dilanjutkan dengan kegiatan PRONA, berkoordinasi dan mengimbau pemerintah daerah agar memberikan fasilitas keringanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada sasaran program PRONA yang tidak mempunyai kemampuan melunasi.
- Memerintahkan Koordinator Kegiatan PRONA melaksanakan PRONA sesuai dengan juknis; segera membuat kebijakan pelaksanaan PRONA

dengan memperhatikan tujuan organisasi dan mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan yang dihadapi, dan kondisi satker masing-masing; segera menetapkan dan menerapkan juknis/ prosedur yang telah disesuaikan sebelum perencanaan serta pelaksanaan kegiatan PRONA dimulai.

- Menyusun standar baku penyimpanan warkah untuk memudahkan pencarian sehingga warkah tersimpan dan terdokumentasi dengan baik, aman dan terlindungi.

Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan peradilan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2013-2014 pada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas pelayanan peradilan perkara PHPU. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pelayanan peradilan perkara PHPU belum sepenuhnya efektif.

MK telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan perkara PHPU, antara lain melalui permohonan secara *online* yang dapat diakses oleh para pencari keadilan serta membuka akses persidangan kepada masyarakat dengan menghadirkan fasilitas *video conference* yang tersebar di 39 fakultas hukum pada perguruan tinggi seluruh Indonesia. MK juga telah menyelesaikan putusan atas perkara PHPU sesuai dengan ketentuan, yakni selama 14 hari kerja sejak perkara diregister untuk PHPU Presiden dan Wakil Presiden, dan 30 hari kerja sejak perkara diregister untuk PHPU Legislatif.

Selain upaya perbaikan yang telah dicapai, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Kebijakan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara PHPU tidak mengacu pada SOP dan terdapat perbedaan jangka waktu penyelesaian minutas antarperaturan di MK. Tidak terdapat keseragaman terkait dengan jangka waktu melengkapi berkas antarperaturan di MK. Pelaksanaan proses pemeriksaan kelengkapan berkas perkara MK mengacu pada kebijakan lisan pimpinan MK. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan prosedur pelaksanaan pelayanan peradilan PHPU tidak seragam, baik dari metode pelaksanaan kegiatan maupun waktu penyelesaian dan *output* yang dihasilkan.
- Diterbitkannya akta permohonan lengkap atas permohonan yang tidak lengkap dan belum dilakukan pengisian atas informasi terkait

dengan pelaksanaan peradilan PHPU di dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Adanya nomor ketetapan yang sama dari beberapa perkara yang berbeda, dan per tanggal 19 November 2015 MK belum melakukan pengisian atas informasi di BRPK. Hal ini mengakibatkan belum tertibnya administrasi perkara dan Pemohon berpotensi melengkapi berkas perkara di luar batas waktu yang ditentukan.

- Tidak terdapat mekanisme serah terima berkas antara panitera pengganti (PP) dan arsiparis pada perkara PHPU Legislatif dan lama penyelesaian minutasasi oleh PP melebihi ketentuan. Setelah pelaksanaan perkara PHPU Legislatif 2014, tidak terdapat tanda serah terima berkas perkara yang telah diminutasasi antara PP dan arsiparis. Hal ini mengakibatkan potensi hilangnya berkas perkara atas berkas yang belum diminutasasi sejak 2013.

Atas permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi akan melakukan evaluasi dan upaya perbaikan.

BPK merekomendasikan kepada Sekretaris Jenderal MK agar:

- Menyusun pedoman kerja yang secara terperinci mengatur uraian tugas dan percepatan waktu pelayanan peradilan PHPU.
- Menyusun mekanisme koordinasi antar unit pelaksana terkait dengan penerimaan permohonan sampai dengan registrasi PHPU Kepala Daerah.
- Menyusun mekanisme pengawasan atas pelaksanaan minutasasi pelayanan peradilan perkara PHPU Legislatif, berkoordinasi dengan panitera untuk menyelesaikan minutasasi perkara dan memerintahkan panitera dan panitera muda untuk melakukan reviu berkas minutasasi berkas perkara sesuai dengan SOP.

Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengawasan izin penggunaan senjata api (senpi) nonorganik TNI/ Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2013-semester I 2015. Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan untuk mendorong efektivitas kegiatan pengawasan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari pemeriksaan kinerja ini untuk menguji efektivitas Polri dalam melakukan pengawasan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pengawasan izin

penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Perizinan penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri belum didukung dengan aplikasi *database* yang terintegrasi. Aplikasi *database* tidak memuat informasi dan data tentang riwayat perpanjangan izin kepemilikan dan penggunaan beserta riwayat penggudangan senpi nonorganik TNI/ Polri secara terintegrasi, sehingga untuk mengetahui informasi tersebut harus melihat secara manual pada arsip/ takah perizinan dan melakukan konfirmasi kepada Kepolisian Daerah (Polda) yang mengeluarkan rekomendasi perizinan penggunaan senpi. Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dan Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda belum mempunyai data dan informasi yang terintegrasi tentang masa berlaku izin kepemilikan senpi (Buku PAS) dan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri (Kartu Izin Khusus Hak Senjata Api/ IKHSA, Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet/ SIPSPK, Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Gas/ SIPSPG, dan Kartu Izin Penggunaan Pinjam Pakai Senjata Api/ Pengpin). Hal ini mengakibatkan pimpinan Polri tidak dapat mengetahui perkembangan capaian keberhasilan maupun permasalahan atas kegiatan pengawasan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri secara kuantitatif dan *real time* yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
- Pengawasan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri yang dilakukan oleh Baintelkam dan Ditintelkam belum optimal. Belum ada prioritas kegiatan inventarisasi untuk mendapatkan informasi tentang status keberadaan senpi nonorganik TNI/ Polri yang belum diperpanjang izinnya oleh pemiliknya masing-masing. Hal ini mengakibatkan potensi timbulnya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan kegiatan perizinan dan pengawasan izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri.
- Polri kehilangan kesempatan memperoleh PNBP dari izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri minimal sebesar Rp2,94 miliar. Berdasarkan laporan penerimaan PNBP perizinan senpi nonorganik TNI/ Polri dari Subbid Sendak (Senjata Api dan Bahan Peledak) Baintelkam Polri menunjukkan tidak semua pemilik senpi nonorganik TNI/ Polri memperpanjang izin penggunaan senpi. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah kehilangan kesempatan memperoleh PNBP yang bersumber dari perizinan penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri minimal sebesar Rp2,94 miliar.

Atas permasalahan tersebut, Baintelkam menyatakan adanya kelemahan perizinan senpi tersebut. Namun, terkait PNBP, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang PNBP yang berlaku di

lingkungan Polri belum mengatur tentang pemilik senpi yang tidak melakukan perpanjangan surat izinnya tetapi tetap membayar PNB. Baintelkam Polri akan berupaya untuk menginformasikan dan mengimbau kepada pemilik senpi untuk memperpanjang izinnya setiap tahun, sehingga PNB yang berasal dari senpi nonorganik TNI/ Polri dapat dioptimalkan.

Berdasarkan tanggapan Kepala Baintelkam tersebut, BPK masih menemukan senpi yang izinnya telah daluwarsa dan tidak dilakukan perpanjangan izin oleh pemiliknya, tetapi masih dipegang oleh para pemilik senpi atau tidak berada di gudang senpi masing-masing Polda.

BPK telah merekomendasikan kepada Kapolri agar:

- Mengembangkan aplikasi *database* yang memuat informasi dan data tentang riwayat perpanjangan izin kepemilikan dan penggunaan beserta riwayat pengudangan senpi nonorganik TNI/ Polri secara terintegrasi dengan Ditintelkam Polda.
- Melakukan penelitian dan inventarisasi kembali seluruh senpi nonorganik TNI/ Polri yang izinnya tidak diperpanjang oleh pemilik senpi, baik senpi yang beredar di masyarakat maupun yang berada di seluruh gudang senpi milik Polri, milik PB Perbakin, dan milik Komisi Pemberantasan Korupsi, dan segera mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan senpi nonorganik TNI/ Polri yang beredar di masyarakat.
- Menginventarisasi kembali dan mengenakan tarif serta menagih PNB dari izin penggunaan senpi nonorganik TNI/ Polri kepada pemilik senpi yang masih dipegang oleh masing-masing pemilik senpi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memperpanjang izin penggunaan senpi minimal sebesar Rp2,94 miliar dan menyetorkan ke kas negara dengan tembusan bukti setor serta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) disampaikan kepada BPK.

Perizinan Impor Garam

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja tentang efektivitas penerbitan perizinan impor garam pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi terkait lainnya tahun 2014-semester I tahun 2015 di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada importasi garam masih banyak terdapat kelemahan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penerbitan perizinan impor dan rekomendasi impor dengan mempertimbangkan adanya pengaruh



dari deregulasi dan debirokratisasi yang sedang dijalankan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan penerbitan perizinan impor garam. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pelaksanaan penerbitan perizinan impor garam masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Sistem teknologi informasi *e-licensing* pada Kemenperin belum terkoneksi (*online*), terintegrasi, dan mutakhir dengan sistem INATRADE Kementerian Perdagangan untuk pengiriman data tentang impor garam industri. Sistem belum mengakomodir pelayanan perizinan maupun permohonan rekomendasi secara *online* bagi calon pemohon izin maupun rekomendasi. Sistem *e-licensing* Kemenperin belum terkoneksi dengan sistem INATRADE Kemendag dan data kedua sistem tersebut belum terintegrasi. Hal ini mengakibatkan Kemenperin tidak mempunyai data lengkap yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis secara komprehensif guna mendukung penentuan alokasi kebutuhan impor garam terhadap industri yang membutuhkan garam industri sebagai bahan baku/ penolong produksinya.

- Koordinasi intern Kemenperin, antara Direktorat Industri Kimia Dasar (IKD) dan Unit Pelayanan Publik (UPP), Direktorat Impor Kemendag, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor selaku Koordinator UPTP I, serta pihak ekstern dengan instansi terkait lainnya belum memadai. Rekomendasi impor yang diterbitkan belum diunggah ke sistem *e-licensing* oleh Direktorat IKD, namun telah diserahkan secara fisik ke pemohon melalui UPP, sehingga data jumlah rekomendasi (alokasi kebutuhan impor yang disetujui) yang diterbitkan antara data Direktorat IKD dan data sistem *e-licensing* berbeda. Hal ini mengakibatkan kebijakan pemberian perizinan impor berisiko belum akurat dan Kemenperin kesulitan membangun *database* perusahaan yang valid, termasuk mengenai realisasi impor garam.
- Kemendag dan Kemenperin belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan realisasi impor garam. Tidak terdapat evaluasi atas penyampaian laporan realisasi impor garam. Hal ini mengakibatkan jumlah barang yang berasal dari importasi tidak dapat diketahui yang dapat berdampak pada kurang tepatnya pengambilan kebijakan pemberian izin impor dan adanya risiko menjadi celah masuknya garam konsumsi.

Kemenperin dan Kemendag menyatakan akan melakukan evaluasi dan upaya perbaikan serta meningkatkan koordinasi untuk memperbaiki pelayanan publik.

BPK secara umum telah merekomendasikan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan agar:

- Mempercepat realisasi koneksi antar sistem pada Kementerian melalui INSW.
- Mempercepat integrasi sistem *e-licensing* dan INATRADE melalui INSW terkait dengan penerbitan rekomendasi dan pelaporan realisasi impor.
- Menyusun SOP yang mengatur tentang monitoring atas penyampaian laporan realisasi impor meliputi penyampaian laporan secara *online* dan *manual*.

Pelayanan Kesehatan Haji

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan haji tahun 1436 H/ 2015 M pada Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Arab Saudi.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelayanan kesehatan haji tahun 1436 H/ 2015 M. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelayanan kesehatan haji ini belum sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- Terdapat jemaah haji yang tidak memenuhi syarat (*Istitho'ah*) kesehatan, tetapi tetap diberangkatkan. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum menetapkan pedoman tata kelola ibadah haji secara komprehensif dan lemahnya koordinasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama dalam menyikapi permasalahan kesehatan Jemaah haji. Hal ini mengakibatkan meningkatnya risiko meninggalnya jemaah haji risiko tinggi (*risti*).
- Pemeriksaan kesehatan terhadap calon jemaah haji di Indonesia tidak efektif. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas belum tepat waktu dan belum sepenuhnya akurat. Demikian juga pemeriksaan embarkasi yang berkisar 3-4 jam tidak efektif. Pemeriksaan akhir terhadap seluruh jemaah haji pada embarkasi masih perlu dilakukan untuk memastikan kondisi jemaah haji. Hal ini mengakibatkan hasil pemeriksaan kesehatan pertama atas jemaah haji belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan kondisi kesehatan jemaah haji.
- Sanitasi pelayanan kesehatan haji pada empat embarkasi belum



memadai. Hasil pengujian laboratorium menyatakan terdapat bakteri *e-coli* dalam sampel air yang diambil dari sumber air yang digunakan jemaah. Format dan metode penilaian yang digunakan oleh Tim Sanitasi dan *Surveilans* (Sansur) di masing-masing embarkasi berbeda karena belum adanya standar penilaian. Hal ini mengakibatkan jemaah haji berpotensi terjangkit penyakit tertentu dan keberangkatannya tertunda.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan menyatakan akan berupaya memperbaiki kelemahan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Kesehatan agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya untuk mengusulkan kepada Presiden supaya mengeluarkan pedoman tata kelola pelaksanaan ibadah haji yang komprehensif, termasuk mengenai *istitho'ah* kesehatan, pelayanan kesehatan, sanitasi dan *surveilans* kesehatan haji.

Penempatan dan Perlindungan TKI

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri skema *Private to Private* (P to P) pada tahap masa penempatan pada Kementerian



Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BPN2TKI), Perwakilan RI di Hong Kong Kuala Lumpur, Tawau, Abu Dhabi, Jeddah, dan Dubai serta instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri skema *P to P* pada tahap masa penempatan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintah dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *P to P* pada tahapan masa penempatan, belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan program.

Kemnaker, BPN2TKI, Perwakilan RI, dan instansi terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam penempatan dan perlindungan TKI skema *P to P*, antara lain:

- Perwakilan RI telah menetapkan pembagian tugas antara fungsi konsuler dengan fungsi ketenagakerjaan serta telah membina dan mengawasi pelaksanaan moratorium sesuai kewenangannya.
- Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN) yang dikelola oleh BPN2TKI telah terkoneksi dengan Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) yang dikelola oleh Ditjen Imigrasi Kemkumhan, sehingga melalui pengembangan lebih lanjut diharapkan sistem ini dapat digunakan untuk memantau kedatangan dan kepulangan TKI secara *real time*.
- Kemnaker, BPN2TKI, dan Perwakilan RI telah berupaya membuat kajian, evaluasi, dan analisis penanggulangan atas permasalahan TKI yang mendasar di negara penempatan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- Pembinaan dan pengawasan atas penempatan dan perlindungan TKI pada tahap masa penempatan belum sepenuhnya didukung dengan peraturan dan kebijakan Pemerintah RI yang utuh dan komprehensif serta terkendala oleh hukum dan sistem ketenagakerjaan yang berlaku di negara penempatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut juga belum sepenuhnya terbentuk dan terintegrasi secara menyeluruh dan meliputi semua *stakeholder* terkait. Hal tersebut mengakibatkan perlindungan TKI tidak optimal.
- Penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menyelesaikan penyebab mendasar/sistemik. Hal ini mengakibatkan permasalahan TKI masih terus terjadi sampai saat ini walaupun dengan kasus yang lebih sedikit.

Kemnaker, BPN2TKI dan instansi terkait lainnya menyatakan akan berupaya meminimalisir permasalahan yang ada dan melakukan upaya perbaikan atas kelemahan yang ada.

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kemnaker dan BPN2TKI agar :

- Menteri Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai peraturan tentang tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama masa penempatan.
- Berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait untuk melakukan upaya diplomasi dengan negara-negara penempatan TKI dalam rangka melindungi TKI.
- BPN2TKI berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan dan K/L terkait mengenai optimalisasi SISKOTKLN sebagai sistem yang dapat digunakan untuk mendata kedatangan dan kepulangan TKI, serta meningkatkan perlindungan TKI dan optimalisasi pendayagunaan *database* TKI bermasalah di Perwakilan RI dan kajian kelayakan integrasi *database* TKI bermasalah.
- Membuat kajian permasalahan TKI secara menyeluruh dan penyebab mendasar/ sistemik untuk menetapkan kebijakan penanganan TKI yang lebih komprehensif.

Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan jasa pelayanan bahan pustaka pada Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2014-Oktober 2015 di Jakarta.

Tujuan dari pemeriksaan kinerja ini untuk menilai efektivitas pengelolaan dan jasa pelayanan bahan pustaka pada Deputy Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional tahun 2014-Oktober 2015.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan dan jasa pelayanan bahan pustaka, Perpusnas telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan dan jasa pelayanan bahan pustaka, antara lain dengan membangun aplikasi *Integrated Library Information System (INLIS)* untuk memudahkan dalam penelusuran lokasi bahan pustaka, membangun sistem pencarian katalog secara *online*, dan melengkapi koleksi bahan pustaka digital melalui kegiatan alih media.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Perencanaan pengelolaan dan jasa pelayanan bahan pustaka kurang memadai, antara lain struktur organisasi dan tata kerja Perpustakaan belum sepenuhnya menggambarkan tugas dan tanggung jawab Perpustakaan yang diamanatkan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, beberapa kebijakan teknis yang disusun belum ditetapkan ke dalam peraturan kepala, dan analisis beban kerja (ABK) yang digunakan dalam pengusulan formasi tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas. Hal tersebut mengakibatkan SOP dan pedoman tidak dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan hasil ABK tidak dapat digunakan sebagai dasar usulan kebutuhan pegawai.
- Pelaksanaan pengelolaan di bidang deposit bahan pustaka tidak memadai, antara lain penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku; pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan KCKR belum tertib; serta penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) tidak memadai. Hal ini mengakibatkan pemantauan atas pelaksanaan serah simpan KCKR tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, tujuan penyusunan BIN tidak tercapai dan KIN kurang menggambarkan koleksi nasional yang ada.

Perpusnas menyatakan akan berupaya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

Terhadap kelemahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Perpustakaan agar:

- Menjalankan UU No. 43 Tahun 2007 dan PP No. 24 Tahun 2014 antara lain dengan menyempurnakan SOTK, dan menyusun dan menetapkan SNP, serta ketentuan mengenai kewajiban penyelenggaraan perpustakaan seperti diamanatkan PP Nomor 24 Tahun 2014.
- Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai pengenaan sanksi kepada penerbit/perusahaan rekaman yang tidak menyerahkan KCKR, menyusun kebijakan mengenai penyusunan dan pengalokasian BNI sesuai dengan tujuan yang seharusnya, dan melakukan sosialisasi pentingnya penyusunan katalog daerah sebagai bahan KIN dengan optimal.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pelayanan publik pada 6 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 61 temuan, yang memuat 67 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat 1 permasalahan

Pengelolaan kegiatan legalisasi aset Program Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran (TA) 2013-Semester I 2015 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) di Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja pelayanan publik pada 7 objek pemeriksaan tersebut mengungkapkan 68 temuan, yang memuat 76 permasalahan ketidakefektifan. Selain itu, terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp2,93 miliar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan dimensi dalam RPJMN 2015-2019 meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait (1) Pendidikan, dan (2) Tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan dilakukan atas 64 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 632 temuan yang memuat 983 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 373 kelemahan sistem pengendalian intern dan 610 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,73 triliun.

Pendidikan

BPK telah memeriksa 7 objek pemeriksaan terkait dengan pendidikan yang terdiri atas 1 objek terkait tunjangan guru dan 6 objek terkait pengelolaan pendidikan tinggi.

Tunjangan Guru

SEBAGAI pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Terkait dengan hal tersebut, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengatur komponen biaya personalia satuan pendidikan selain gaji pokok, antara lain adalah tunjangan fungsional dan tunjangan profesi bagi guru.

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi dan masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tunjangan fungsional guru diberikan kepada guru PNS/ PNSD. Sementara subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada guru bukan PNS/ PNSD.

BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan guru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 dan semester I 2014 (*Lampiran B No. 29*).

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan guru telah didukung dengan penerapan sistem pengendalian yang memadai serta dilaksanakan oleh Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan guru belum sepenuhnya didukung dengan penerapan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan pada saat pemeriksaaan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan guru adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, SOP tidak ditaati, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.1 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru

Permasalahan Utama & Contohnya
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru diberikan kepada guru yang telah pensiun, meninggal dunia, cuti diluar cuti tahunan, tugas belajar, serta tidak memenuhi syarat jumlah jam mengajar

Permasalahan Utama & Contohnya
- Guru PNSD di 11 kabupaten/ kota menerima tunjangan profesi lebih dari 12 bulan/ tahun. - Pembayaran tunjangan profesi guru pada 33 kabupaten/ kota kurang bayar Rp200,82 miliar yang disebabkan belum dilakukannya penyesuaian gaji pokok sesuai PP Tahun 22 Tahun 2013.
SOP tidak ditaati
- Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dana Tambahan Penghasilan (DTP) kepada guru penerima mengalami keterlambatan minimal 1 bulan - Dana TPG minimal Rp783,92 miliar dan DTP Guru minimal Rp33,22 miliar terlambat diterima di kas daerah antara 1 minggu - 2 bulan - Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota tidak/ belum membuat laporan realisasi penyaluran TPG dan DTP sesuai dengan ketentuan serta melewati batas waktu yang ditentukan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
- Guru yang belum mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) diusulkan menerima subsidi tunjangan fungsional serta terdapat guru yang tidak diusulkan, namun memperoleh surat ketetapan subsidi tunjangan fungsional - Adanya kesalahan perhitungan saldo dana TPG per 31 Desember 2013 yang belum memperhitungkan pembayaran tunggakan tahun sebelumnya serta terdapat tunggakan TPG yang belum tercakup pada hasil verifikasi BPKP pada 7 kabupaten/ kota minimal Rp37,26 miliar.
Lain-lain kelemahan SPI
- Kemendikbud dan Kemenkeu tidak menganggarkan dana cadangan atas adanya kekurangan alokasi penyaluran TPG tahun 2014 minimal sebesar Rp3,58 triliun dan berpotensi tidak dapat dibayarkan oleh 260 Pemda kepada guru penerima - SOP tentang mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Tunjangan Profesi (SKTP) belum disusun - Petunjuk teknis tentang tata cara monitoring dan evaluasi penyaluran TPG dan DTP belum disusun

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan guru adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, bukti pertanggungjawaban belanja tidak lengkap/ tidak valid, pemanfaatan barang/ jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.2 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru

Permasalahan Utama & Contohnya
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan
Kelebihan pembayaran tunjangan fungsional guru nonPNS sebesar Rp2,83 miliar kepada yang tidak berhak

- Terdapat kelebihan pembayaran TPG atas kesalahan verifikasi NUPTK terhadap 154 guru sebesar Rp543,77 juta

Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid

- Pembayaran TPG minimal sebesar Rp1,60 miliar bagi guru bukan PNSD belum didukung bukti status kepegawaian yang valid dan *update*

Pemanfaatan barang/ jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan

- Sistem aplikasi data pokok pendidikan belum dapat mendukung proses pendataan dan validasi data usulan TPG secara memadai

Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan

- Sebanyak 7 kabupaten/ kota terlambat menyetorkan PPh Pasal 21 sebesar Rp35,69 miliar atas pembayaran TPG dan DTP.
- Kekurangan pemotongan PPh Pasal 21 atas penyaluran TPG dan DTP di 14 Kab/kota sebesar Rp 224,31 juta dan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 di 7 Kabupaten/ Kota sebesar Rp65,60 juta

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kelebihan pembayaran TPG, TPF dan DTP kepada guru serta pembayaran tunjangan yang tidak tepat sasaran.
- Hak guru untuk memperoleh tunjangan tidak terpenuhi serta penyaluran dana tunjangan profesi dan DTP kepada guru penerima tidak dapat dilakukan secara tepat waktu.
- Tertundanya penerimaan negara tertunda atas PPh Pasal 21 yang berasal dari pembayaran tunjangan guru.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Kemendikbud belum menyusun dan menetapkan SOP terkait dengan mekanisme penerbitan SKTP dan tata cara monitoring dan evaluasi penyaluran TPG dan DTP.
- Kemendikbud kurang mensosialisasikan petunjuk teknis (Juknis) dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan penyaluran TPG mulai dari kriteria penerima sampai proses penyaluran.
- Pengelola TPG pada dinas pendidikan kabupaten/ kota kurang cermat dalam memverifikasi data dan kelengkapan dokumen pembayaran TPG serta tim TPG pusat tidak melakukan rekonsiliasi data realisasi pembayaran dengan usulan dari pemerintah daerah.
- Belum sempurnanya sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kemendikbud dalam rangka mendukung proses penyaluran TPG.

Atas permasalahan tersebut, Kemendikbud akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun pedoman atau peraturan internal yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TP dan TF.

BPK merekomendasikan kepada Mendikbud agar:

- Menyempurnakan dan mengintegrasikan sistem aplikasi yang ada dan mengoptimalkan pemanfaatannya dalam pengelolaan sertifikasi guru dan penyaluran TPG.
- Memperbaiki proses verifikasi pada tingkat kementerian dan dinas pendidikan kabupaten/ kota dengan menerbitkan panduan verifikasi atas calon penerima TPG.
- Berkoordinasi dengan kementerian keuangan untuk memperbaiki mekanisme transfer dana TPG dan DTP supaya tepat waktu, tepat jumlah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan dana tambahan penghasilan guru pada Kemendikbud mengungkapkan 19 temuan yang memuat 25 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 17 kelemahan sistem pengendalian intern dan 8 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,37 miliar.

Atas temuan ketidakpatuhan telah dilakukan penyetoran ke kas negara senilai Rp27,90 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan guru menurut entitas disajikan pada *Lampiran C.1 dan C.2.*

Pengelolaan Pendidikan Tinggi

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat/ swasta. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang sejak tahun 2014 berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Adapun, satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat/ swasta dikoordinasikan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang merupakan satuan kerja di bawah Kemenristekdikti.



Dalam melaksanakan fungsinya, setiap perguruan tinggi perlu memperhatikan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan, PTN perlu memperhatikan prinsip pengelolaan BLU.

Pemeriksaan pengelolaan pendidikan tinggi di Kemenristekdikti difokuskan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tahun 2014 dan 2015 pada Ditjen Pendidikan Tinggi/ Ditjen Dikti (sebelum dan sesudah penggabungan dengan Kemenristekdikti), Kopertis wilayah III dan IV, serta 5 PTN, yaitu Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Jember (Unej), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Sriwijaya (Unsri). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 30-35*.

Pemeriksaan meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset tetap tahun 2014 dan 2015.

Pemeriksaan atas pengelolaan pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan secara konsisten, serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset tetap.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan pengendalian internal serta pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset tetap pada Ditjen Dikti, Kopertis Wilayah III Jakarta dan Kopertis Wilayah IV Bandung serta 5 PTN tersebut di atas, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan pendidikan tinggi, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendidikan tinggi antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.3 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Satker/BLU
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	16	6
Aset tetap dan persediaan yang dibeli dari belanja barang belum dicatat dan dilaporkan.		Unej
Realisasi pendapatan tahun berkenaan baru disetor, dicatat dan dilaporkan pada periode tahun berikutnya.		UM
Penerimaan dan belanja atas kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) tidak dicatat dan dilaporkan.		UNS
Pendapatan, biaya serta laba Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Undip tidak dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU Undip.		UNDIP
SOP belum disusun	13	5
Pengelolaan penerimaan belum diatur dalam SOP, sehingga masih terdapat penerimaan yang terlambat disetor/ digunakan langsung.		UNS
Waktu yang diperlukan untuk setiap tahap dalam kegiatan penilaian angka kredit dosen belum diatur dalam SOP, sehingga sering berlarut-larut.		Ditjen Dikti, Kopertis Wil. III Jakarta dan Kopertis Wil. IV Bandung
Tata cara pemberian jasa pengujian, penyewaan, dan penggunaan alat laboratorium belum didukung SOP dan tarif pelayanan laboratorium belum ditetapkan.		Undip

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Per-masalahan	Satker/BLU
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	5	4
Kendaraan dinas dicatat ganda dan/ atau memiliki saldo negatif.		Undip
Sejak peralihan, Ditjen Dikti belum melaksanakan pengalihan saldo BMN dari Kemendikbud ke Kemenristekdikti.		Ditjen Dikti
Lain-lain kelemahan SPI	20	5
PNBP disetorkan terlambat dan digunakan langsung.		Unej
Hilangnya potensi pendapatan karena penggunaan aset oleh pihak ketiga tidak dipungut sewa, dan kerusakan aset tidak segera diperbaiki.		Unsri
Hilangnya potensi pendapatan karena pemungutan tarif sewa gedung dan retribusi parkir lebih rendah dari yang ditetapkan.		UM

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendidikan tinggi antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Per-masalahan	Nilai (Rp Miliar)	Satker/BLU
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	12	11,22	6
Kekurangan penerimaan atas selisih kurs dan kesalahan penyetoran kontribusi peserta ASEAN University Games (AUG) serta belum diterimanya pendapatan sewa kantin dan rumah dinas.		8,58	Unsri
Penerimaan jasa layanan pada 3 subsatker yang belum disetor ke rekening BLU .		1,46	UNS

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Satker/BLU
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	5	1,21	2
Pembayaran kepada konsultan pusklat UNS melebihi nilai kontrak, pembayaran atas pelaksanaan tugas tim persiapan operasional kegiatan pusklat tidak memiliki dasar hukum, dan terdapat pembayaran tunjangan profesi kepada dosen yang sedang tugas belajar.		1,11	UNS
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN.	16	-	5
Aset tetap yang sudah tidak dikuasai oleh Ditjen Dikti namun masih tercatat dan belum dihapuskan.		-	Ditjen Dikti
Sebanyak 17 rumah dinas digunakan oleh penghuni yang tidak berhak dan 3 rumah dinas dialihfungsikan oleh penghuni untuk kegiatan usaha/ komersial.		-	Unej
Pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga tidak dikenakan tarif sewa.		-	Unsri
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	60	27,95	6
Penerima dana talangan belum mempertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran, pembayaran biaya perjalanan dinas dan honor melebihi standar, kekurangan volume dan denda keterlambatan belum disetor.		16,49	UNS
Sisa dana dari program beasiswa dan denda keterlambatan belum disetor, dan terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan, TGR belum diproses serta pemborosan		4,42	Ditjen Dikti
Undip masih menyimpan dana pembayaran untuk rekanan pelaksana kontrak tahun 2010 yang telah dihentikan, dan terdapat kurang volume pekerjaan, TGR yang belum diproses, denda keterlambatan belum disetorkan, penerimaan yang digunakan langsung, pekerjaan terhambat dan barang yang tidak dimanfaatkan.		3,87	Undip
Jasa giro dari rekening milik BLU dikenakan pemotongan PPh oleh bank.			Unsri, Undip, UNS, dan UM
Sebanyak 562 program studi masih dibiarkan aktif, meskipun rasio dosen tetap terhadap mahasiswanya telah melebihi standar yang ditetapkan dan seharusnya dinonaktifkan.			Ditjen Dikti, Kopertis Wil. III Jakarta dan Kopertis Wil. IV Bandung

Permasalahan tersebut mengakibatkan :

- Kekurangan penerimaan negara karena adanya pendapatan yang belum dipungut/ disetorkan.

- Pendapatan dan biaya yang tidak dicatat dan dilaporkan mengakibatkan laporan keuangan BLU tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
- Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang melebihi standar mengakibatkan tujuan penjaminan mutu pendidikan melalui penerapan rasio tidak tercapai.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Menristekdikti dan rektor universitas terkait belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau sumber dana lainnya.
- Perencanaan kegiatan kurang memadai.
- Pengelola kurang memahami ketentuan mengenai pengelolaan pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyusun pedoman atau peraturan internal yang dibutuhkan terkait pengelolaan pendidikan tinggi.

BPK merekomendasikan kepada Menristekdikti dan rektor universitas terkait agar:

- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja serta pengelolaan aset.
- Menyusun dan melengkapi kebutuhan SOP.
- Memberikan sanksi kepada para pihak yang lalai dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara TA 2014-2015 pada Ditjen Dikti, Kopertis Wilayah III Jakarta dan Kopertis Wilayah IV Bandung, serta 5 PTN mengungkapkan 77 temuan yang memuat 147 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 54 kelemahan sistem pengendalian intern dan 93 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp40,38 miliar.

Selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan penyetoran kas sebesar Rp486,39 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara TA 2014-2015 pada Ditjen Dikti, Kopertis Wilayah III dan IV serta 5 PTN disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.3 dan C.4*.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan yang terkait dengan tata kelola dan reformasi birokrasi terhadap 94 objek pemeriksaan yang terdiri atas 93 objek pemeriksaan terkait reformasi keuangan negara dan 1 objek pemeriksaan terkait pelayanan publik.

Reformasi Keuangan Negara

HASIL PDTT atas bidang reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, manajemen aset serta pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Pengelolaan Pendapatan

Pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dilakukan pada 24 objek pemeriksaan di 4 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kejaksaan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Daftar K/L dan objek pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 36-59*.

Tabel 1.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

Kementerian	Jumlah objek pemeriksaan
1. Kementerian Luar Negeri	14
2. Kejaksaan RI	6
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
4. Kementerian Keuangan	3
Jumlah	24

Lingkup pemeriksaan pengelolaan pendapatan meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan pajak migas dan minerba, program *sunset policy*, pita cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan untuk mengetahui apakah entitas telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan secara umum rancangan dan implementasi SPI pelaksanaan anggaran dan penerimaan pajak, cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk program *sunset policy* 2008-2009, BPK tidak dapat menyimpulkan apakah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut program tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Karena BPK tidak memperoleh data dan dokumen yang cukup memadai untuk menilai pelaksanaan program *sunset policy* pada 2 Kanwil di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu, beserta seluruh kanwil sampel, yaitu Kanwil DJP Jakarta Barat, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jawa Barat I, dan Kanwil DJP Jawa Timur I.

Adapun, untuk pengelolaan pendapatan, pada umumnya rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan pendapatan belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecuali Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel dan KBRI Den Haag yang telah cukup efektif.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP tidak ditaati, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	24	4
Beberapa Kejari belum melakukan penatausahaan dan upaya intensif dalam melakukan penagihan uang pengganti yang berasal dari pidana tambahan atas perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).		Kejaksaan RI
Penerbitan <i>grosse akte</i> (surat ukur kapal) yang tidak sesuai dengan fisik kapal mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan.		KKP

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pemerintah belum melakukan amandemen <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) terhadap Kontraktor Kontrak Kerkjasama (KKKS) yang menggunakan <i>Tax Treaty</i>, sehingga pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal Rp262,56 miliar.		Kemenkeu
SOP tidak ditaati	21	3
Rekening penampungan PNBP pada KBRI Oslo belum mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan.		Kemlu
Barang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terlambat penyelesaiannya, karena petikan putusan terlambat diterima dan keterbatasan anggaran untuk melakukan lelang. Selain itu, terdapat barang rampasan yang belum dieksekusi karena belum dilakukan pemusnahan, tidak diketahui statusnya, tidak diketahui keberadaannya, atau dokumen kepemilikan belum dikuasai.		Kejaksaan RI
Sisa kertas berhologram tahun desain 2009 dan 2010, sisa kertas pita cukai hasil tembakau (PCHT) tahun desain 2011 berupa kertas cetakan dasar dan kertas berhologram serta kertas rusak karena mesin, sisa PCHT tahun 2014 karena salah cetak, dan kertas hologram PCHT dan pita cukai minuman mengandung etil alkohol (PCMMEA) tahun 2013 yang rusak karena mesin (<i>lost in machine</i>) belum dimusnahkan oleh Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).		Kemenkeu
Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak menyusun Laporan Hasil Program <i>Sunset Policy</i> secara nasional dan laporan tahunan tidak didukung dengan <i>database</i> yang valid karena terdapat perbedaan jumlah SPT, nilai penerimaan, dan jumlah WP antara <i>database Sunset Policy</i> yang ditatausahakan di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan data Laporan Tahunan DJP Tahun 2008 dan 2009.		Kemenkeu
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan	14	2
Restitusi pajak atas pembelian barang dan jasa belum diajukan permohonan penggantian oleh KBRI Wina, KBRI Oslo dan KBRI Stockholm kepada pemerintah negara setempat. Selain itu, KBRI Bratislava belum memiliki rekening PNBP.		Kemlu
Pelekatan pita cukai pada barang kena cukai yang telah mengalami kenaikan harga jual eceran dan mutasi penerimaan pita cukai yang tidak terdapat dalam dokumen pemesanan pita cukai DJBC. Selain itu, laporan barang kena cukai hasil tembakau (BKCHT) dan laporan BKCMMEA terlambat dilaporkan oleh pengusaha pabrik kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.		Kemenkeu
Lain-lain kelemahan SPI	34	4
Belum ada aturan dan kebijakan yang jelas dari Kepala Perwakilan KBRI Roma yang berkaitan dengan penyetoran PNBP.		Kemlu
Data kedatangan dan keberangkatan kapal pada 4 Pelabuhan Perikanan tidak sistematis, tanpa mencatat lamanya kapal bertambat labuh, sehingga perhitungan etmal untuk menghitung PNBP dilakukan secara rata-rata		KKP

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
DJBC belum menyusun SOP, di antaranya tentang pengendalian atas penyediaan bahan baku kertas untuk kebutuhan pencetakan pita cukai, tugas dan fungsi tim pengawas dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas kegiatan pencetakan pita cukai, serta mekanisme kegiatan produksi barang kena cukai yang dilaksanakan oleh mitra produksi.		Kemenkeu

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, penyetoran penerimaan negara terlambat, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	33	1.255,28	4
PNBP dari jasa pemakaian listrik, jasa pengadaan air, dan jasa kebersihan TA 2013-semester I 2015 pada 6 pelabuhan perikanan kurang dipungut.		3,68	KKP
- Kekurangan penerimaan negara dari PPN, cukai, pajak rokok dan denda administrasi terutama disebabkan oleh: - Pelekatan pita cukai pada BKC yang telah melewati masa berlakunya, dan pengusaha BKC masih melekatkan pita cukai yang mempunyai Harga Jual Eceran (HJE) berbeda dan sudah tidak berlaku lagi. - Pelaporan PPN yang sebanding dengan nilai cukai dikembalikan secara ganda, yaitu dikreditkan dalam SPT PPN sekaligus diperhitungkan dalam pembayaran PPN pada saat pembayaran. - Pengajuan pemberitahuan mutasi BKC yang melewati tanggal 1 bulan ke-4 sejak batas waktu pelekatan akibat perubahan HJE, seharusnya tidak diberikan pengembalian cukai. - Impor barang kena pajak tidak dikenakan PPN dan belum dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran.		843,80	Kemenkeu

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
- Kekurangan penerimaan negara terutama oleh: - PBB pertambangan sektor minerba belum dibayar dan/ atau kurang ditetapkan. - PBB Tubuh Bumi tahun 2010-2012 kurang ditetapkan karena adanya selisih produksi batu bara dan harga satuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan perhitungan Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). - Harga patokan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB atau perhitungan PBB tahun 2011 dan 2012 tidak sesuai dengan harga patokan batu bara. - Perhitungan PBB yang tidak sesuai dengan PKP2B.		308,42	Kemenkeu
- Kekurangan penerimaan negara yang berasal dari penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang seharusnya tidak diberikan, terutama kepada: - WP orang pribadi yang terdaftar dan telah menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh di tahun 2009. - SPT yang disampaikan tidak sesuai dengan periode pelaksanaan <i>Sunset Policy</i>. - WP Badan yang baru mendaftarkan diri tahun 2008 dan 2009, mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.		99,15	Kemenkeu
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	13	--	3
Pengajuan permohonan restitusi pajak oleh Peraturan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa kepada pemerintah setempat, tidak dilakukan secara rutin, tepat waktu, dan tidak segera disetorkan ke kas negara.	--	--	Kemlu
Pengelolaan barang bukti <i>verstek</i> pada Kejari belum memadai, terutama berkas tilang <i>verstek</i> tidak dapat ditemukan, adanya selisih jumlah barang bukti tilang diputus <i>verstek</i> berdasarkan berkas tilang yang masih tertunggak dengan jumlah fisik barang bukti kendaraan bermotor, serta barang bukti tilang berupa kendaraan bermotor diputus <i>verstek</i> tidak dikuasai oleh Kejari. Selain itu, upaya penagihan denda dan biaya perkara tilang yang tertunggak tidak optimal dan penghapusan piutang denda dan ongkos perkara tilang <i>verstek</i> belum sesuai dengan ketentuan.	--	--	Kejaksaan RI
Kantor Pelayanan Pajak belum menindaklanjuti penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak atas potensi omzet PPh Badan dan penyerahan barang/ jasa kena pajak (BKP/ JKP) yang belum dilaporkan oleh wajib pajak.	--	--	Kemenkeu

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Penyetoran penerimaan negara terlambat	11		2
Penyetoran PNBP oleh beberapa Perwakilan RI di luar negeri terlambat dilakukan.	--	--	Kemlu
Uang rampasan atas perkara yang telah <i>inkracht</i> terlambat diserahkan ke bendahara penerimaan pada masing-masing Kejari.	--	--	Kejaksaan RI
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	8	0,27	4
Penerimaan negara dari denda tilang <i>verstek</i> tidak disetor ke kas negara melainkan untuk kepentingan pribadi petugas tilang.		0,04	Kejaksaan RI
Direktorat Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan belum menggunakan koefisien produktivitas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terbaru, sehingga tarif pungutan hasil perikanan lebih rendah dan mengakibatkan kekurangan PNBP.		0,23	KKP

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pemerintah belum melakukan amandemen PSC dengan KKKS yang menggunakan *tax treaty*.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan penagihan dan menarik kekurangan penerimaan serta lemahnya pengawasan dan pengendalian.
- Pejabat terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan serta belum menyusun SOP yang diperlukan.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan serta pengendalian, menyusun pedoman atau peraturan internal yang dibutuhkan, dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas negara.

BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Keuangan agar mendorong percepatan amendemen PSC terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty* untuk memberikan kepastian bagian negara dari pelaksanaan PSC.
- Menteri/ Jaksa Agung agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk segera melakukan penagihan dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkan penerimaan yang telah diterima ke kas negara.

- Menteri/ Jaksa Agung agar memerintahkan pejabat terkait untuk segera menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan.
- Menteri/ Jaksa Agung agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan sanksi sesuai ketentuan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pada 4 entitas mengungkapkan 108 temuan yang memuat 158 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 93 kelemahan sistem pengendalian intern dan 65 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,25 triliun.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan itu dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp48,48 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan dapat dilihat pada *Lampiran C.5 dan C.6*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN pengelolaan belanja pemerintah pusat dilakukan terhadap 42 objek pemeriksaan pada 16 Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) sebagai berikut:

Tabel 1.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

	Kementerian	Jumlah Entitas yang Diperiksa
1.	Kementerian Pertahanan	1
2.	Markas Besar TNI	3
3.	Kementerian Luar Negeri	14
4.	Kementerian Dalam Negeri	1
5.	Ombudsman RI	1
6.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1
7.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	5
8.	Kejaksaan RI	6
9.	Mahkamah Agung	1
10.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1
11.	Kementerian Perhubungan	3

	Kementerian	Jumlah Entitas yang Diperiksa
12.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1
13.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1
14.	Kementerian Agama	1
15.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1
16.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Jumlah	42

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B* No. 60-81.

Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan belanja telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan belanja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas belanja pada 42 objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, pada 7 objek pemeriksaan, yaitu Atase Pertahanan Republik Indonesia (Athan RI) di Den Haag, Athan RI di Pretoria, Athan RI di Roma, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel, KBRI Den Haag, KBRI Athena serta KBRI Pretoria disimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan belanja telah cukup efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	11	4
Penyusunan anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak direncanakan secara memadai, di antaranya belum mengganggu biaya perjalanan dinas <i>training pilot</i>.		Kementerian Pertahanan
Alokasi anggaran untuk tunjangan sewa rumah, tunjangan penghidupan luar negeri dan belanja keperluan perkantoran pada KBRI Pretoria di Afrika Selatan tidak memadai.		Kemlu
Penganggaran untuk kegiatan penyegelan/ penggeledahan/ penyitaan pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bukan merupakan wewenang dan tupoksi kejaksaan.		Kejaksaan RI
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	22	4
Pertanggungjawaban biaya representasi tidak didukung dengan persetujuan atasan langsung, dan penatausahaan dokumen pendukung pengeluaran biaya sewa rumah pada KBRI Washington D.C di Amerika Serikat tidak tertib.		Kemlu
Mekanisme pembayaran biaya penanganan perkara setelah penyelesaian penanganan perkara mengakibatkan pertanggungjawaban belanja pada Kejati Bali melewati batas akhir tahun.		Kejaksaan RI
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	4	3
Pertanggungjawaban pemberian bantuan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) tidak sesuai dengan realisasi penggunaan bantuan.		Kementerian Pertahanan
Pembayaran tunjangan sewa rumah pada Athan RI di Den Haag melebihi ketentuan Menteri Keuangan.		Markas Besar TNI
Lain-lain kelemahan SPI	13	5
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan) tidak memiliki mekanisme pengelolaan dana pembinaan.		Kementerian Pertahanan
Kejati Bali belum memiliki standar biaya masukan dalam menyusun anggaran penanganan perkara.		Kejaksaan RI
Pelaksanaan kegiatan organisasi kepemudaan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, yaitu kegiatan dilaksanakan sebelum perjanjian dan bantuan yang diberikan lebih rendah dari yang diperjanjikan.		Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume,

bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	33	35,87	10
Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan kontrak, di antaranya pekerjaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Tengah, pekerjaan bantuan pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Halmahera Selatan, serta pekerjaan pembangunan/ pengembangan infrastruktur laut dan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada Satker Pengembangan Daerah Khusus tahun anggaran (TA) 2014.		7,56	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan kontrak pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, di antaranya pada pekerjaan pembangunan lanjutan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkotika Kelas III Langkat, LP Pemuda Langkat, Rumah Tahanan (Rutan) Humbang Hasundutan, dan renovasi <i>layout</i> Gedung Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Medan.		4,24	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan di 9 paket pekerjaan pada satker Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara, di antaranya pada item pekerjaan pengadaan bahan konstruksi jalan kereta api, pekerjaan stabilisasi tanah, pekerjaan menghampar ballas dan subballas, pekerjaan konstruksi jalan rel, dan pekerjaan struktur atas jembatan rangka baja.		14,66	Kementerian Perhubungan
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	38	13,02	12
Kelebihan pembayaran atas pekerjaan perbaikan darurat bencana erupsi gunung merapi, perbaikan dalam rangka penanganan darurat bencana akibat lahar dingin gunung merapi di Kabupaten Klaten.		3,32	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan LP dan Rutan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, serta kelebihan pembayaran atas keuntungan yang tidak berhak diperoleh rekanan pada Kanim Kelas I Khusus Surabaya dan Kanim Kelas I Tanjung Perak.		1,70	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan jasa konsultasi perencanaan dan manajemen konstruksi pembangunan LP dan Rutan, serta kelebihan pembayaran atas keuntungan yang tidak berhak diperoleh rekanan di Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kanim Kelas I Bandung.		1,46	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran atas kegiatan mobilisasi/ demobilisasi pada pekerjaan pengerukan alur pelayaran dan kolam Pelabuhan Belawan, pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Labuhan Angin TA 2013, serta biaya langsung personel atas pekerjaan pembangunan/ pengembangan sistem informasi pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan.		2,92	Kementerian Perhubungan
Bukti Pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	33	--	9
Realisasi belanja dukungan kepada 13 Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan KODAM (Babinminvetcaddam), bantuan kepada LVRI serta pemeliharaan peralatan dan mesin di Ditjen Pothan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.		--	Kementerian Pertahanan
Pembayaran biaya pengamanan, piket dan perjalanan dinas, serta biaya operasional khusus kepala perwakilan pada KBRI Athena tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang cukup dan valid.		--	Kemlu
Realisasi belanja atas kegiatan penayangan di televisi tahun 2014, akomodasi dan konsumsi paket <i>fullboard</i> serta pendukungnya pada Asisten Deputi Organisasi tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.		--	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	135	211,30	15
Proyek pembangunan sistem pengolahan air laut menjadi air bersih dengan teknologi <i>reverse osmosis</i> di Kabupaten Merauke dan pembangunan dermaga di Kabupaten Halmahera Timur yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pembangunan infrastruktur transportasi di Kabupaten Nabire dan Biak Numfor tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat daerah tertinggal.		95,19	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Pelaksanaan 3 paket pekerjaan lintas Bandar Tinggi-Perlanaan TA 2014 tidak selesai hingga belum dapat dimanfaatkan, pelaksanaan lelang tahun 2013 dan 2014 kurang sesuai dengan ketentuan dan terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang belum dilaksanakan pada paket pekerjaan pembangunan jalur ganda antara Medan-Araskabu dan jembatan kereta api lintas Bandar Tinggi-Kuala Tanjung.		27,31	Kementerian Perhubungan
Penggunaan sisa bantuan Dana Siap Pakai (DSP) tidak sesuai dengan peruntukan hingga mengakibatkan kerugian negara Rp2,95 miliar. Selain itu, terdapat potensi relokasi 791 kepala keluarga (KK) dengan anggaran Rp44,29 miliar di Kabupaten Agam yang belum dilakukan, serta pemahalan harga atas pekerjaan pengadaan sarana, penguatan teknologi informasi kebencanaan dan bantuan logistik pada Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat serta Direktorat Logistik.		57,23	BNPB

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena Sekretaris Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban belanja.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun pedoman atau peraturan internal untuk mendukung pengelolaan belanja, dan menyetorkan kerugian ke kas negara.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga terkait agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk membuat perencanaan dalam penyusunan anggaran dan DIPA dengan memperhatikan kebutuhan.
- Menyusun dan menetapkan sistem pengendalian yang memadai untuk mendukung pelaksanaan belanja.
- Menagih dan menyetorkan kerugian negara ke kas negara.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK, Panitia Penerima Barang dan Konsultan Pengawas Pekerjaan yang tidak menjalankan tugasnya dengan cermat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada 16 K/L mengungkapkan 190 temuan yang memuat 289 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 50 kelemahan SPI dan 239 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp260,20 miliar.

Entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan dana ke kas negara senilai Rp7,92 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.7 dan C.8*.

Manajemen Aset

PEMERIKSAAN manajemen aset pemerintah pusat dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan pada 7 Kementerian Negara/ Lembaga (K/L), yaitu Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Kementerian Luar Negeri,

dan Kementerian Ketenagakerjaan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 82 s.d. 86*.

Tabel 1.11 Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

Kementerian	Jumlah Entitas yang Diperiksa
1. Kementerian Pertahanan	1
2. Markas Besar TNI	3
3. TNI Angkatan Laut	1
4. TNI Angkatan Udara	1
5. TNI Angkatan Darat	1
6. Kementerian Luar Negeri	14
7. Kementerian Ketenagakerjaan	1
Jumlah	22

Lingkup pemeriksaan manajemen aset meliputi pengelolaan aset tahun 2014 dan 2015.

Pemeriksaan manajemen aset bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas manajemen aset telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan aset/ Barang Milik Negara (BMN) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan aset pada 17 objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, pada 5 objek pemeriksaan, yaitu Atase Pertahanan Republik Indonesia (Athan RI) di Den Haag, Athan RI di Pretoria, Athan RI di Roma, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel, serta KBRI Den Haag disimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan aset telah cukup efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam manajemen aset pemerintah pusat antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	38	5
Renovasi gedung serta penambahan perlengkapan dan peralatan kamar senilai Rp410 juta belum dicatat dan dilaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).		TNI Angkatan Darat
Pencatatan barang milik negara pada KBRI/ KJRI belum tertib, antara lain seperti BMN belum dicatat, BMN yang rusak parah dan telah diusulkan untuk dihapus belum direklasifikasi ke aset lain-lain, BMN yang sudah dihapuskan masih tercatat di neraca, dokumen sumber pencatatan belum ada, serta pencatatan daftar barang ruangan tidak akurat.		Kemlu
Aset senilai Rp18,60 miliar dalam kondisi rusak berat masih tercatat sebagai aset tetap, serta peralatan dan mesin senilai Rp104,38 miliar yang telah didistribusikan ke Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah masih tercatat dalam neraca direktorat.		Kementerian Ketenagakerjaan
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	8	5
Penatausahaan persediaan pada Athan RI di Den Haag belum pernah dibuat secara tertulis dan belum dilakukan <i>stock opname</i>.		Markas Besar TNI
Laporan BMN Tahun 2013 dan Tahun 2014 pada Athan RI di Roma belum disampaikan.		Markas Besar TNI
Pengelolaan dokumen imigrasi pada KBRI Stockholm belum tertib, di antaranya <i>stock opname</i> tidak dilakukan, berita acara cek fisik tidak dibuat, dan rekonsiliasi tidak dilakukan, serta terdapat perbedaan jumlah dokumen imigrasi antara fisik dengan pencatatan.		Kemlu
Proses pengalihan BMN Kemenaker kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui mekanisme transfer antar-K/L dan mekanisme likuidasi senilai Rp4,29 triliun belum selesai.		Kementerian Ketenagakerjaan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	8	2
Pemanfaatan lahan Kawasan Pabrik I eks PT Dirgantara Indonesia di Lanud Husein Sastranegara oleh PT BIA belum didukung dengan perjanjian yang mengatur besaran nilai kontribusi sewa, sehingga potensi pendapatan negara atas pemanfaatan lahan tahun 2013-pertengahan 2015 minimal sebesar Rp7,25 miliar tidak diterima.		TNI Angkatan Udara
Perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan yang digunakan untuk <i>Golf Course & Country Club</i> Matoa tidak mengatur tentang besaran dan kewajiban kompensasi pemanfaatan lahan.		TNI Angkatan Udara

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pemanfaatan Wisma TNI AL untuk kegiatan komersial oleh Primer Koperasi TNI AL tidak didukung perjanjian kerja sama, sehingga tidak memberikan kontribusi bagi negara.		TNI Angkatan Laut
Lain-lain kelemahan SPI	30	6
Penggunaan langsung atas penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN senilai Rp90,50 miliar.		Kementerian Pertahanan
Perjanjian pemanfaatan BMN yang dilaksanakan setelah 28 Januari 2010 namun belum mendapatkan izin Menteri Keuangan.		TNI Angkatan Darat

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset antara lain aset tidak diketahui keberadaannya, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Aset tidak diketahui keberadaannya	7	80,08	1
Peralatan, mesin, laptop dan notebook senilai Rp80,08 miliar tidak diketahui keberadaannya.		80,08	Kementerian Ketenagakerjaan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	17	48,32	5
Penerimaan negara sebesar Rp35,05 miliar belum diterima karena Inkopau/ mitra penyewa belum menyetor ke kas negara dan/ atau kenaikan tarif sesuai dengan kontrak belum diperhitungkan.		35,05	TNI Angkatan Udara
Pendapatan negara belum diterima sebesar Rp12,39 miliar, karena belum dipungut atau belum dilakukan penyetoran oleh penyewa.		12,39	TNI Angkatan Darat
Pemanfaatan BMN tidak memiliki landasan perjanjian kerja sama 2011-2015, mengakibatkan kekurangan penerimaan negara Rp781,17 juta.		0,78	TNI Angkatan Laut
Simpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	57	--	7
22 objek pemanfaatan BMN belum mendapatkan penetapan status penggunaan BMN dari Menteri Keuangan		--	Markas Besar TNI

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Per-masalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Aset tetap pada KBRI/ KJRI belum seluruhnya diberi kode barang, kode barang berbeda dengan SIMAK, dan barang rusak berat belum diusulkan penghapusan.		--	Kemlu
Barang yang telah dijual/ lelang belum dihapuskan dari daftar barang. Selain itu, aset rusak berat dan terbakar belum diusulkan penghapusan.		--	Kementerian Ketenagakerjaan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	48	10,36	6
2 BMN belum memiliki bukti kepemilikan. Selain itu, 18 bidang tanah milik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) yang akan diserahkan kepada Kemendikbud belum bersertifikat atas nama Pemerintah RI atau atas nama yayasan yang membawahi UPN.		--	Kementerian Pertahanan
Beberapa bidang tanah milik Kementerian Ketenagakerjaan belum memiliki bukti kepemilikan, idle, dan/atau dikuasai pihak lain.		--	Kementerian Ketenagakerjaan

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan:

- Saldo aset tetap dan persediaan dalam neraca dan laporan BMN berpotensi belum dapat menyajikan kondisi BMN yang sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan negara atas pemanfaatan BMN.
- BMN berpotensi hilang karena tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain.
- Penerimaan negara dari hasil pemanfaatan aset belum diterima.
- Potensi permasalahan kepemilikan tanah dan/atau risiko hilangnya aset tanah milik negara.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pengelola barang dan pengguna barang/kuasa pengguna barang kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN.
- Pengurus barang/ penyimpan barang unit kerja terkait lalai menatausahakan BMN.
- Perjanjian kerja sama pemanfaatan aset/ BMN belum ada/ belum lengkap mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, terutama mengenai kewajiban pemberian kontribusi kepada negara atas pemanfaatan aset.

- Pejabat yang bertanggung jawab belum intensif untuk melakukan penagihan kepada penyewa BMN yang belum/ kurang membayar ke kas negara.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemantauan dan penertiban dalam rangka pengamanan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Staf TNI terkait agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menarik kembali aset milik pemerintah yang dikuasai/ belum dikembalikan pihak lain. Selain itu, juga melakukan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan sanksi kepada pengelola barang yang lalai tidak mengawasi dan mengendalikan pengelolaan.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi dan inventarisasi guna menelusuri keberadaan aset dan memproses potensi kerugian negara atas aset tetap yang hilang.
- Membuat kesepakatan dengan para mitra tentang besaran nilai kontribusi ke kas negara minimal sebesar nilai sewa BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN, selama izin pemanfaatan aset dari Menteri Keuangan belum terbit.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan secara intensif kepada penyewa BMN yang belum/ kurang membayar ke kas negara.
- Melakukan inventarisasi aset secara periodik, mencatat seluruh aset dalam kartu inventaris barang, serta menertibkan administrasi peminjaman BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada 22 entitas mengungkapkan 147 temuan yang memuat 213 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 84 kelemahan sistem pengendalian intern dan 129 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp138,77 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset dan/atau menyetorkan ke kas negara senilai Rp576,72 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset menurut entitas disajikan pada *Lampiran C.9 dan C.10*.

Pengelolaan BLU

BADAN Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan serta didasarkan atas prinsip efisiensi dan produktivitas.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 7 BLU, yaitu 2 BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan 5 BLU Rumah Sakit Bhayangkara di bawah Kepolisian Negara RI. Ke-7 BLU tersebut adalah Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Gelora Bung Karno (PPK GBK), Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII), RS Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto Jakarta, RS Bhayangkara Tingkat II Mappa Oudang Makassar, RS Bhayangkara Tingkat II H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, RS Bhayangkara Tingkat III Tulungagung dan RS Bhayangkara Tingkat III Pusdik Sabhara Porong. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 87 s.d. 91*.

Tabel 1.14 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

Kementerian	Jumlah BLU yang Diperiksa
1. Sekretariat Negara	2
2. Kepolisian Negara RI	5
Jumlah	7

Lingkup pemeriksaan meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja serta investasi BLU.

Pemeriksaan pengelolaan BLU bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern secara efektif, dan apakah pengelolaan pendapatan, belanja dan investasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan:

- Pengelolaan PPK GBK dan BPP TMII belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengelolaan 5 BLU RS Bhayangkara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan SPI pengelolaan pendapatan dan belanja pada 4 BLU RS Bhayangkara telah dirancang dan diimplementasikan secara efektif, kecuali SPI pada RS Bhayangkara

Said Sukanto Jakarta belum mampu secara efektif menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan BLU, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

Permasalahan utama pengendalian intern dalam pengelolaan BLU antara lain SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Permasalahan	Satker/BLU
SOP belum disusun	17	5
PPKGBK belum memiliki standar penghitungan pemakaian dan pengelolaan tagihan biaya listrik kepada pihak ketiga yang menggunakan fasilitasnya.		PPKGBK
BPP TMII belum memiliki SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pengelolaan dana sponsor yang memadai.		BPP TMII
BPP TMII belum memiliki peraturan internal yang mengatur transaksi dan penyimpanan valuta asing.		BPP TMII
BPP TMII belum memiliki ketentuan besaran tarif sewa Plasa Arsipel /Taman Bhinneka Tunggal Ika (TBTI).		BPP TMII
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	12	4
Beberapa organisasi olah raga yang menggunakan fasilitas bangunan dan lahan belum didukung surat perjanjian atau belum melunasi kewajiban sewa/ denda.		PPKGBK
Nilai kontribusi mitra kerja sama belum disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sesuai dengan perjanjian kerja sama, sehingga berpotensi hilangnya penerimaan sebesar Rp1,29 miliar.		PPKGBK
Aset yang disewakan kepada pihak ketiga belum didukung surat perjanjian dan dikenakan biaya sewa.		RS Bhayangkara R. Said Sukanto
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	9	4
Pelunasan dan pengenaan tarif pemakaian sarana dan fasilitas tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pendapatan yang dipungut belum memiliki dasar hukum yang sah.		PPKGBK

Permasalahan Utama & contohnya	Jumlah Permasalahan	Satker/BLU
TIKE sebagai salah satu unit pengelola kegiatan usaha TMII telah mencadangkan dana atas nama rekening manajer TIKE, digunakan untuk keperluan lain dan tidak diadministrasikan dengan tertib.		BPP TMII
Lain-lain kelemahan SPI	22	5
Proses <i>free and clear</i> atas aset tanah yang dikelola PPKGBK belum selesai.		PPKGBK
Manager TIKE tidak cermat dalam melakukan investasi dan terdapat dana investasi yang tidak dicatat dalam neraca sebesar Rp2,12 miliar.		BPP TMII
Pengelola mengenakan tarif sewa puri dan pondok di TMII lebih tinggi daripada tarif resmi yang ditetapkan.		BPP TMII
Terdapat selisih pencatatan pendapatan administrasi rawat jalan pasien umum menurut rekam medik dengan Buku Besar Penerimaan.		RS Bhayangkara R. Said Sukanto

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan BLU antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Satker/BLU
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	12	22,21	5
BPP TMII kurang menerima pendapatan kompensasi, kontribusi, denda yang belum dipungut dari perjanjian kerja sama <i>Built Operate Transfer</i> (BOT) sebesar Rp12,27 miliar serta TIKE kurang membayar pajak daerah sebesar Rp781 juta.		13,05	BPP TMII
PPKGBK kurang menerima biaya sewa atas penggunaan ruangan, lahan & bangunan, sarana & prasarana serta denda sebesar Rp8,43 miliar.		8,43	PPKGBK

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Satker/BLU
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	3	3,93	2
Pelaksanaan perjanjian kerja sama jasa pengamanan dan kebersihan tidak sesuai dengan kontrak dan upah yang diberikan di bawah ketentuan UMR.		3,91	PPKGBK
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	7	--	3
2 museum di TMII yang status kepemilikan dan pengelolaannya belum jelas, sehingga tidak terpelihara dan tidak beroperasi.		--	BPP TMII
Pemanfaatan lahan & bangunan serta fasilitas tanpa perikatan hukum, dan proses perpanjangan/ pengakhiran perjanjian dengan mitra kerja sama tidak sesuai dengan ketentuan.		--	PPKGBK
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	40	8,35	5
Pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak, hasil pengadaan kursi tribun gedung basket telah mengalami kerusakan dan garansi tidak dimanfaatkan, pendapatan jasa giro dan bunga deposito milik PPKGBK dikenakan pajak, serta pembayaran gaji, honorarium dan premi dana pensiun untuk direksi dan dewan pengawas PPKGBK melebihi ketentuan.		3,37	PPKGBK
Sisa obat dan alkes tahun 2013 dan 2014 dijual kepada pasien BPJS, pengeluaran belanja makan pasien, jaga kawal dan piket tidak didukung pertanggungjawaban yang memadai, serta pembayaran jasa <i>embalase</i>, premi laboratorium dan ULP jaga piket tidak sesuai dengan ketentuan.		1,97	RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya, RS Bhayangkara Tingkat III Tulungagung dan RS Bhayangkara Tingkat III Puskid Sabhara Porong
Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, kas tekor, pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan, serta denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum ditagih.		2,14	BPP TMII
Bendahara tidak melakukan pemungutan dan pemotongan PPN atas pembayaran kepada pihak ketiga.		---	RS Bhayangkara Said Sukanto

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Kepala BLU kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BLU.
- Pelaksana pengelola BLU kurang memahami peraturan dan ketentuan pengelolaan BLU.
- BLU belum menyusun SOP yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menertibkan aset BLU yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta menyelesaikan aset yang bermasalah, dan menyusun pedoman atau peraturan internal yang dibutuhkan terkait pengelolaan BLU.

BPK merekomendasikan kepada Kepala BLU agar:

- Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan investasi.
- Menertibkan aset BLU yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga serta menyelesaikan aset yang bermasalah.
- Melakukan penagihan atas pendapatan yang telah menjadi hak BLU, namun belum diterima.
- Menyusun dan menetapkan SOP sesuai dengan kebutuhan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pada 7 BLU mengungkapkan 69 temuan dengan 122 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 60 kelemahan sistem pengendalian intern dan 62 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp34,51 miliar.

Atas permasalahan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp1,13 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan BLU disajikan selengkapnya pada *Lampiran C.11 dan C.12*.

Pelayanan Publik

Hasil PDTT atas pelayanan publik merupakan hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436 H/ 2015 M pada Kementerian Agama (Kemenag)

Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjelaskan di samping haji reguler yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kemenag, terdapat haji khusus yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yakni Biro Perjalanan Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Pemerintah dalam hal ini Kemenag berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan ibadah haji khusus oleh PIHK.

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/ 2015M pada Kemenag, Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal RI dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Saudi Arabia (Lampiran B No. 92).

Pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/ 2015M difokuskan pada kegiatan pendaftaran dan pengelolaan kuota, pengelolaan keuangan, pelayanan jemaah, serta pengawasan haji khusus dan akreditasi PIHK.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan penyelenggaraan ibadah haji khusus terhadap ketentuan perundang-undangan, termasuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/2015M belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini ditunjukkan dari masih adanya kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/ 2015M antara lain SOP belum disusun, SOP tidak ditaati, dan pencatatan dan proses penyusunan laporan tidak memadai.

Tabel 1.17 Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Permasalahan Utama & Contohnya
SOP belum disusun
- Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) belum mengatur secara terperinci tugas dan tanggung jawab Kanwil Kemenag Provinsi terkait dengan pendaftaran haji khusus. - Direktorat Jenderal PHU belum memiliki regulasi yang mengatur kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi terkait pembinaan, monitoring dan evaluasi PIHK di daerah. - Direktorat Jenderal PHU belum memiliki regulasi yang mengatur mekanisme pendaftaran haji khusus secara langsung tanpa melalui PIHK, dan prosedur untuk memastikan pengembalian dana calon jemaah haji khusus yang melakukan pembatalan telah diterima oleh yang berhak. - Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri tidak memiliki regulasi yang mengatur sistem keagenan bagi PIHK. - Kementerian agama belum memiliki regulasi tentang penyelenggaraan haji di luar kuota. - Direktur Jenderal PHU belum mengatur regulasi pelayanan kesehatan bagi jemaah haji khusus.

Permasalahan Utama & Contohnya
SOP tidak ditaati
- Kemenag belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi paket perjalanan ibadah haji khusus, serta pelayanan akomodasi, katering, transportasi dan kesehatan yang dilakukan PIHK. - Sistem monitoring dan pelaporan data jemaah haji khusus belum berjalan optimal.
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat
Kemenag tidak ada data akurat tentang jumlah jemaah khusus <i>waiting list</i> dan jemaah lunas tunda, karena rekening untuk setoran awal dan lunas BPIH regular dan BPIH khusus tergabung menjadi satu.
Lain-lain kelemahan SPI
Perbedaan data antara daftar tunggu jemaah haji khusus dengan jumlah setoran awal pada rekening menteri agama, tetapi tidak dilakukan rekonsiliasi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan ibadah haji antara lain penyimpangan peraturan bidang tertentu, pelayanan kepada masyarakat tidak optimal, dan tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik.

Tabel 1.18 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Permasalahan Utama & Contohnya
Penyimpangan peraturan bidang tertentu
- Masih terdapat kelemahan dalam sistem pendaftaran, pembatalan, pelunasan dan pengembalian BPIH jemaah khusus, sehingga terjadi pembatalan dan pemindahan jemaah haji khusus secara sepihak oleh PIHK. - Penggunaan kuota petugas haji khusus bagi jemaah haji tidak sesuai dengan ketentuan.
Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal
- Layanan transportasi dan akomodasi yang disediakan PIHK kepada jemaah haji khusus belum sesuai dengan standar pelayanan minimal. - Terdapat calon jemaah haji khusus yang masuk dalam daftar tunggu pada 3 PIHK yang tidak ditemukan keberadaan alamat kantornya.
Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik
- Pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan PIHK oleh Dirjen PHU kurang memadai, sehingga masih terdapat PIHK yang izinnya tidak diperpanjang atau telah diblokir, namun masih menerima pendaftaran haji khusus. - Kementerian Agama belum maksimal menertibkan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang membuka pendaftaran calon jemaah haji khusus.

Permasalahan di atas terjadi antara lain karena:

- Belum tersedianya SDM untuk melakukan pengawasan dan pengendalian PIHK, layanan pengaduan bagi jemaah haji khusus, dan sistem informasi yang dapat diakses calon jemaah haji khusus.
- Kementerian Agama belum memiliki regulasi yang lengkap seperti mekanisme pendaftaran jemaah haji khusus secara langsung ke Kanwil/ Kankemenag dan kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi untuk melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi PIHK di daerah.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menyatakan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan regulasi terkait pendaftaran, penundaan dan pembatalan serta pemberangkatan jemaah haji khusus.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama agar:

- Menyusun, menyempurnakan dan menetapkan regulasi-regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tidak mematuhi ketentuan.
- Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
- Menyediakan informasi yang transparan dan dapat diakses oleh calon jemaah haji khusus mengenai daftar tunggu, penundaan dan pembatalan haji khusus.

Hasil pemeriksaan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/ 2015M mengungkapkan 22 temuan yang memuat 29 permasalahan, yaitu 15 kelemahan sistem pengendalian intern dan 14 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1436H/ 2015M dapat dilihat pada *Lampiran C.13 dan C.14*.

Hasil pemeriksaan atas 92 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 947 temuan yang memuat 1.353 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 373 kelemahan sistem pengendalian intern dan 980 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,21 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyeter ke kas negara senilai Rp10,19 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada Tabel 1.19.

Tabel 1.19 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Kinerja		PDTT		Total	
	Perma salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma salahan	Nilai (Rp Juta)
Kelemahan SPI						
1. SPI	-	-	373	-	373	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan						
1. Kerugian	2	296,33	179	91.408,11	181	91.704,44
2. Potensi kerugian	3	277.131,93	35	159.588,36	38	436.720,29
3. Kekurangan peneri- maan	2	3.368,99	113	1.348.140,11	115	1.351.509,10
Sub Total 1 (berdampak finansial)	7	280.797,25	327	1.599.136,58	334	1.879.933,83
4. Penyimpangan Admi- nistrasi	-	-	232	-	232	-
5. Ketidakhematan	-	-	19	15.521,62	19	15.521,62
6. Ketidakefisienan	2	154.900,68	-	-	2	154.900,68
7. Ketidakefektifan	361	50.309,08	32	118.159,59	393	168.468,67
Sub Total 2	363	205.209,76	283	133.681,21	646	338.890,97
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	370	486.007,01	610	1.732.817,79	980	2.218.824,80
Total	370	486.007,01	983	1.732.817,79	1.353	2.218.824,80
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara		-		10.199,04		10.199,04
Jumlah LHP		28		64		92
Jumlah Temuan		315		632		947

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD





IHPS II tahun 2015 memuat pemeriksaan terhadap 571 objek pemerintah daerah dan BUMD. Pemeriksaan tersebut meliputi 35 objek pemeriksaan keuangan, 240 objek pemeriksaan kinerja, dan 296 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dan BUMD dapat dilihat pada Lampiran B.2.¹. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹ *Softcopy* LHP selengkapnya dapat dilihat pada *flash disk* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IHPS II Tahun 2015

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 dari 539 pemerintah daerah (pemda) yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) 2014. Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD 2014 telah dilaporkan dalam IHPS I 2015. LKPD 2014 dari 35 pemda tersebut terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh (539) LKPD 2014.

Dari 35 LKPD yang telah diperiksa pada semester II tahun 2015, terdapat 3 daerah pemekaran, yang baru pertama kali menyusun LKPD Tahun 2014. Daerah pemekaran itu adalah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Total aset dan pendapatan seluruh pemda (539 LKPD) pada akhir tahun 2014 dirinci dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nilai Aset dan Pendapatan atas 539 Pemda
pada Akhir Tahun 2014

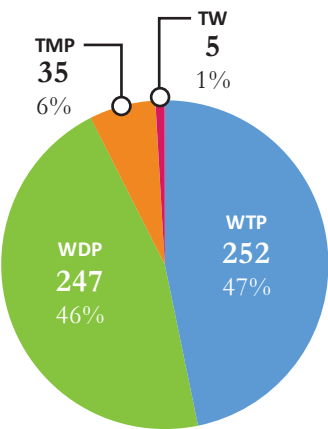
Keterangan		Nilai
Aset	:	Rp2.267,68 triliun
Kewajiban	:	Rp22,61 triliun
Ekuitas	:	Rp2.245,05 triliun
Pendapatan	:	Rp834,84 triliun
Belanja	:	Rp799,03 triliun

Cakupan pemeriksaan atas 35 LKPD pada semester II tahun 2015 meliputi Neraca yang terdiri atas; aset senilai Rp54,36 triliun, kewajiban senilai Rp441,21 triliun, dan ekuitas senilai Rp53,92 triliun; serta Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas 35 LKPD terdiri atas pendapatan senilai Rp25,85 triliun, belanja senilai Rp24,51 triliun, dan pembiayaan *netto* senilai Rp3,34 triliun.

Opini

HASIL pemeriksaan atas seluruh LKPD tahun 2014 (539 LKPD), BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD seperti terlihat dalam grafik 2.1.

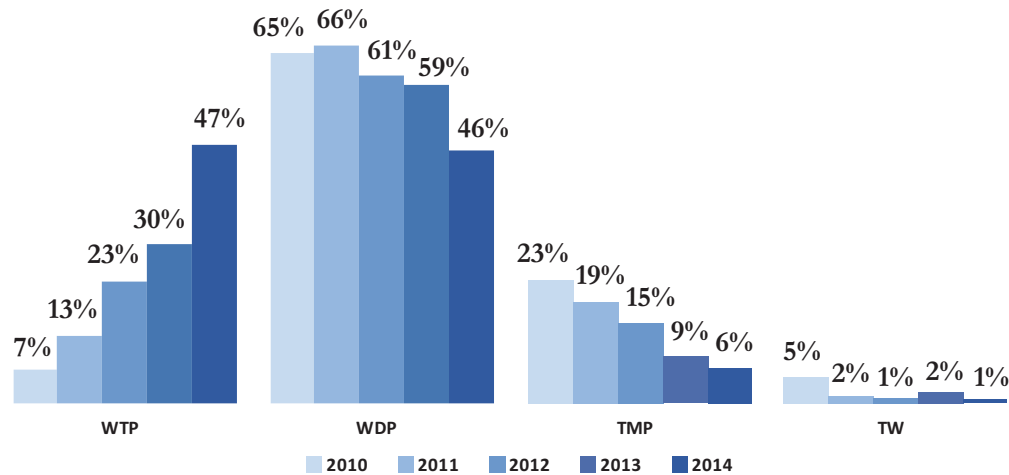
Grafik 2.1. Opini atas 539 LKPD Tahun 2014



Perkembangan opini atas 539 LKPD Tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya (2013) mengalami peningkatan yang cukup signifikan (*lihat grafik 2.2*). Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 138 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari TW atau TMP menjadi WDP atau WTP sebanyak 33 LKPD, dan dari WDP menjadi WTP sebanyak 105 LKPD. Secara keseluruhan, jumlah LKPD yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan dari 156 LKPD menjadi 252 LKPD atau naik sebesar 18%. Perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemda dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dapat dilihat pada grafik 2.3.

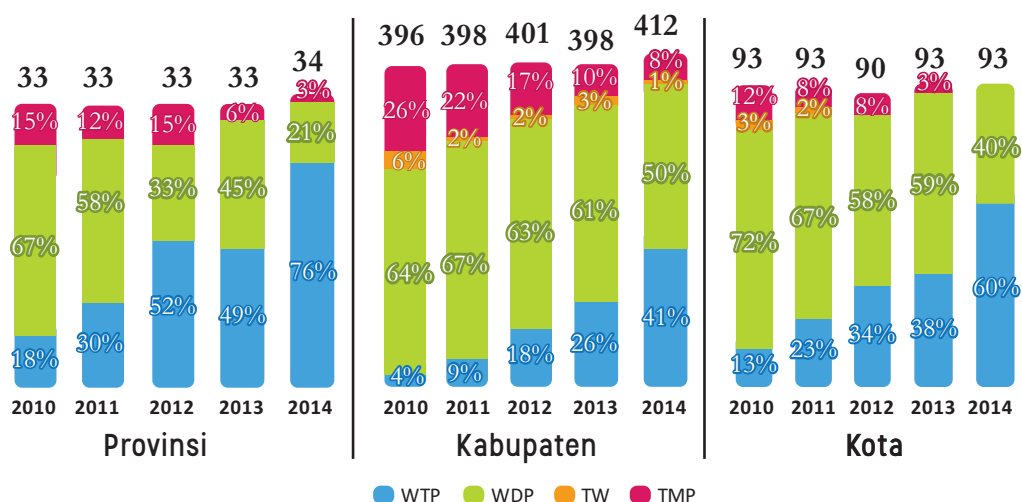
Tabel Opini atas 539 LKPD dapat dilihat pada Lampiran D.1

Grafik 2.2. Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2010–2014



Sementara itu, hasil pemeriksaan 35 LKPD 2014, BPK memberikan opini WTP atas 1 (3%) LKPD, opini WDP atas 17 (48%) LKPD, opini TW (tidak wajar) atas 1 (3%) LKPD, dan opini TMP atas 16 (46%) LKPD. Daftar opini untuk seluruh LKPD dapat dilihat dalam lampiran D.1. Perbandingan opini atas 35 LKPD sebagaimana yang tampak pada tabel 2.2.

Grafik 2.3. Opini LKPD dari Tahun 2010–2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



Tabel 2.2 Perbandingan Opini 35 LKPD antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014

No.	Entitas	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014
1	Kab. Labuhanbatu Utara	WDP	WTP
2	Kab. Mandailing Natal	TMP	WDP
3	Kab. Nias Barat	TMP	TMP
4	Kab. Nias Selatan	TMP	TMP
5	Kab. Nias Utara	TMP	WDP
6	Kab. Padang Lawas	TMP	WDP
7	Kab. Toba Samosir	WDP	WDP
8	Kota Tanjungbalai	TMP	WDP
9	Kab. Kupang	TMP	WDP
10	Kab. Lembata	WDP	WDP
11	Kab. Malaka	---	TMP
12	Kab. Nagekeo	WDP	WDP
13	Kab. Rote Ndao	TMP	WDP
14	Kab. Sikka	WDP	WDP
15	Kab. Tana Tidung	WDP	WDP
16	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	TMP
17	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	TMP
18	Kota Ambon	WDP	WDP
19	Kab. Biak Numfor	WDP	TW
20	Kab. Boven Digoel	TMP	TMP
21	Kab. Deiyai	TMP	TMP

No.	Entitas	Opini Tahun 2013	Opini Tahun 2014
22	Kab. Dogiyai	TMP	TMP
23	Kab. Intan Jaya	TMP	TMP
24	Kab. Keerom	TMP	TMP
25	Kab. Mamberamo Raya	TMP	TMP
26	Kab. Mamberamo Tengah	TMP	TMP
27	Kab. Nduga	TMP	WDP
28	Kab. Pegunungan Bintang	WDP	WDP
29	Kab. Puncak	TMP	TMP
30	Kab. Sarmi	TMP	TMP
31	Kab. Supiori	WDP	WDP
32	Kab. Tolikara	TMP	TMP
33	Kab. Waropen	TMP	TMP
34	Kab. Manokwari Selatan	---	WDP
35	Kab. Pegunungan Arfak	---	WDP

Terdapat 1 LKPD yang mengalami kenaikan dari WDP menjadi WTP yaitu Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Kenaikan opini tersebut disebabkan Pemkab Labuhanbatu Utara telah melakukan proses penyelesaian permasalahan kas di Bendahara Pengeluaran melalui pembebanan sementara oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan telah melakukan rekonsiliasi aset tetap antara neraca dan KIB (Kartu Investaris Barang) SKPD serta telah menyajikannya dalam neraca per 31 Desember 2014.

Adapun, 7 LKPD mengalami kenaikan opini dari TMP menjadi WDP yaitu LKPD Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Nduga. Kenaikan itu dikarenakan entitas tersebut telah melaksanakan perbaikan atas kelemahan LKPD tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut antara lain:

- Penyajian saldo kas dan sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) di bendahara pengeluaran sesuai keberadaannya;
- Penyajian saldo persediaan berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun;
- Penyusunan daftar aset tetap dan konsolidasi pencatatan antara Bidang Akuntansi dengan Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD);
- Pembuatan perjanjian angsuran sewa;

- Inventarisasi dan pencatatan atas aset tetap;
- Penyajian saldo piutang dan investasi nonpermanen sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Pencatatan utang jangka pendek lainnya secara konsisten berdasarkan data pendukung yang memadai serta mencatat utang bunga sesuai dengan perhitungan kementerian keuangan;
- Penyelesaian hutang atas kelebihan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) dengan mekanisme pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat; dan
- Penyajiannilai belanjadaerahsesuaidenganbuktipertanggungjawaban.

Secara umum, atas LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan pada pelaporan keuangan sesuai dengan SAP. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- Kas
Masalah yang terkait dengan Kas terjadi pada 26 pmda. Ketidaksesuaian pelaporan kas sesuai dengan SAP meliputi antara lain:
 - ▶ Akumulasi saldo kas pada tahun-tahun sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan tidak dalam penguasaan bendahara;
 - ▶ Saldo kas yang tidak diketahui perincian/keberadaannya, saldo kas dalam laporan keuangan berbeda dengan Buku Kas Umum;
 - ▶ Kas di bendahara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke kas daerah; dan
 - ▶ Penyajian saldo Kas tidak sesuai SAP.
- Aset Lancar selain Kas

Permasalahan yang terkait dengan Aset Lancar selain Kas terjadi pada 17 pmda. Ketidaksesuaian pelaporan Aset Lancar selain Kas dengan SAP meliputi antara lain:

- ▶ Penatausahaan persediaan yang kurang memadai karena tidak dilakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan dan penyajian persediaan tidak didukung dengan kartu persediaan, sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran atas mutasi persediaan;
- ▶ Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dilaporkan dalam neraca; dan

- ▶ Penatausahaan piutang pajak tanpa didukung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sehingga tidak dapat dilakukan pengujian nilainya.

- Aset Tetap

Permasalahan tersebut terjadi pada 32 pemda. Ketidaksesuaian pelaporan Aset Tetap dengan SAP meliputi antara lain:

1. Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan dalam kartu inventaris barang (KIB) dan direkonsiliasi serta diinventarisasi secara memadai;
2. Aset tetap tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung dengan bukti kepemilikan.

- Belanja

Permasalahan tersebut terjadi di 22 pemda. Ketidaksesuaian pelaporan belanja dengan SAP yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Akun Lainnya

Penyajian akun lainnya yang tidak sesuai dengan SAP sehingga menyebabkan opini tidak WTP meliputi akun:

1. Kewajiban terjadi pada 11 pemda antara lain berupa pengelolaan Utang Pihak Ketiga yang tidak tertib;
2. Pendapatan yang terjadi pada 7 pemda diantaranya berupa pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional tidak sesuai mekanisme APBD;
3. Investasi yang terjadi pada 6 pemda antara lain berupa investasi non permanen dana bergulir disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi.

Secara rinci permasalahan penyajian akun yang menjadi penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP seperti diungkapkan di atas dapat dilihat pada Lampiran D.2

Terdapat 1 pemda yaitu Pemkab Biak Numfor, Provinsi Papua yang mengalami penurunan opini atas LKPD Tahun 2014 dari WDP menjadi TW setelah sebelumnya selama 2 tahun berturut-turut memperoleh opini WDP.

Penurunan opini tersebut terjadi karena kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

- Pencatatan piutang PBB-P2 Tahun 2013 hasil pengalihan piutang dari pemerintah pusat dan Tahun 2014 hasil pemungutan Pemkab Biak Numfor tidak dilakukan.
- Pencatatan persediaan tidak disertai rincian dan persediaan obat di apotik Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang rawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), vaksin hibah dari provinsi pada Dinas Kesehatan dan persediaan hasil pengadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum dicatat.
- Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap belum memadai, yaitu aset yang tidak dikapitalisasi ke aset induknya dalam daftar aset, aset yang tidak jelas nilai kapitalisasinya, aset tetap dalam kondisi rusak berat, dan aset tetap belum dilengkapi bukti kepemilikan.
- Saldo Aset Lainnya, diantaranya merupakan saldo Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/ TGR) Pemkab Biak Numfor telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan pengadilan, namun Majelis TP/ TGR belum menetapkan Surat Keputusan Pembebanan (SKP) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- PAD digunakan langsung dan tidak dilaporkan dalam LRA tahun 2014.
- Realisasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga belum dipertanggungjawabkan.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan, selain memberikan opini, BPK juga melakukan pengujian SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian atas 35 LKPD 2014 mengungkapkan 613 temuan yang di dalamnya terdapat 474 permasalahan sistem pengendalian intern dan 507 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan kelemahan administrasi. Secara rinci permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Permasalahan dan Nilai Permasalahan 35 LKPD 2014

KETERANGAN	Permasalahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI		
1 SPI	474	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:		
2 Kerugian	208	198,295.44
3 Potensi Kerugian	23	19,195.37
4 Kekurangan Penerimaan	66	22,097.70
Sub Total 1 (berdampak finansial)	297	239,588.51
5 Kelemahan Administrasi	210	-
Sub Total 2	210	-
Total ketidakpatuhan (Sub total 1 + 2)	507	239,588.51
Total Pemerintah Daerah (kelemahan SPI dan ketidakpatuhan)	981	239,588.51
Jumlah LHP		35
Jumlah Temuan		613
Nilai temuan yang sudah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah (dalam juta rupiah)		2,260.23

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 35 LKPD menunjukkan terdapat 474 permasalahan kelemahan SPI.

- Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan.

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang ditemukan antara lain: pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya.

Permasalahan pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 78 permasalahan yang terjadi di 31 pemda. Permasalahan tersebut pada umumnya berupa aset yang belum dicatat pada neraca, atau nilai aset di neraca berbeda dengan catatan pendukungnya. Diantarapermasalahanpencatatanyangditemukandanmempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan adalah:

- ▶ Pengendalian arus kas masuk dan keluar atas perhitungan fihak ketiga oleh BUD pada Pemkab Nias Barat kurang memadai sehingga terjadi kurang saji pada kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran serta lebih saji arus kas keluar dari aktivitas non anggaran.
- ▶ Kepala Bidang Aset dan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah pada Pemkab Nias Selatan sebagai pembantu pengelola barang milik daerah belum maksimal dalam mengkoordinasikan pencatatan dan pengakuan persediaan milik daerah, sehingga persediaan Kabupaten Nias Selatan pada neraca TA 2014 tidak diyakini kewajarannya.
- ▶ Penyajian aset tetap pada Pemkab Tana Tidung belum akurat antara lain, terdapat 2 bidang tanah belum memiliki nilai perolehan, 24 bidang tanah tidak diketahui luasnya, aset tetap berupa tanah badan jalan dan tanah yang berasal dari hibah seluas 53.475 m² belum tercatat, sehingga saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 belum dapat diyakini kewajarannya.

Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak 91 permasalahan yang terjadi di 33 pemda.

Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan diantaranya: nilai aset yang belum direkonsiliasi antara pencatatan bidang akuntansi dengan pengelola aset, dan aset belum diinventarisir. Permasalahan proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya:

- ▶ Nilai aset tetap Pemkab Tana Tidung yang disajikan pada neraca tidak sama dengan nilai aset tetap yang disajikan Bidang Aset.
- ▶ Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DP2KA) Pemkab Pegunungan Bintang tidak melakukan rekonsiliasi perhitungan piutang dengan pihak ketiga segera setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- ▶ Nilai investasi permanen Pemkab Lembata pada PDAM dan PD Purin Lewo belum didukung dengan laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited*).

Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya sebanyak 17 permasalahan terjadi di 14 pemda. Permasalahan tersebut antara lain entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta sistem informasi

akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

- **Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja**

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja meliputi antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan, penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan lainnya.

Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 65 permasalahan yang terjadi di 30 pemda. Permasalahan proses perencanaan kegiatan tidak memadai yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya:

- ▶ Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Malaka tidak cermat dalam mengevaluasi RKA-SKPD dan menganggarkan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan sehingga realisasi belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan keuangan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan pertanggungjawaban realisasi belanja alokasi dana desa belum dapat digunakan sebagai alat pengendalian.
- ▶ Sekretaris Daerah Pemkab Nias Selatan selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan TAPD kurang akurat dalam menyusun proyeksi pendapatan sehingga Pemkab Nias Selatan tidak dapat melakukan pembayaran belanja pada tahun anggaran berjalan akibat kekurangan kas.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak 61 permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi di 26 pemda. Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya:

Pemkab Seram Bagian Timur menetapkan keputusan tentang penggunaan dana yang diterima dari BPJS-Kesehatan dan Jamkesda tidak sesuai ketentuan; menyajikan serta mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Kapitasi JKN, Dana Non Kapitasi JKN dan Dana Jamkesda dengan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku sehingga berpotensi salah saji atas penggunaan dana-dana tersebut.

Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya sebanyak 53 permasalahan terjadi di 26 pemda. Permasalahan tersebut antara lain: mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 16 permasalahan yang terjadi di 10 pemda, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD sebanyak 2 permasalahan yang terjadi di 2 pemda. Kelemahan lainnya yang ditemukan adalah penetapan atau pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 15 permasalahan terjadi pada 12 pemda dan penetapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja sebanyak 18 permasalahan yang terjadi di 15 pemda, serta 2 permasalahan lain terkait kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran dan belanja terjadi pada 2 pemda.

- **Kelemahan Struktur Pengendalian Intern**

Kelemahan struktur pengendalian intern meliputi: entitas tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur, SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern, Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal.

Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal sebanyak 52 permasalahan yang terjadi di 22 pemda. Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya:

- ▶ Pemkab Mamberamo Raya belum segera menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK RI terkait kas di bendahara pengeluaran sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran yang disajikan pada neraca tidak dapat diyakini kewajarannya dan kas di bendahara pengeluaran s.d Tahun 2012 dan Tahun 2013 berpotensi merugikan keuangan daerah.

- ▶ Sekretaris Daerah Pemkab Tana Tidung selaku pengelola Barang Milik Daerah (BMD) belum melaksanakan tugasnya secara optimal, yaitu tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya mengakibatkan saldo aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2014 belum dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan/atau potensi terjadinya penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- ▶ Pemkab Waropen belum menindaklanjuti rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya terkait penatausahaan persediaan sehingga nilai persediaan dalam neraca per 31 Desember 2014 tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi hilangnya persediaan yang tidak tercatat.

Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur sebanyak 28 permasalahan yang terjadi di 15 pemda. Permasalahan tidak adanya SOP yang formal untuk suatu prosedur diantaranya:

- ▶ Pemkab Boven Digoel belum membuat kebijakan akuntansi untuk penyusunan LKPD dan belum memiliki perjanjian dengan Bank Rakyat Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadi kurang saji pada penggunaan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan (penerimaan pembiayaan) yang berasal dari SiLPA TA 2013 pada LRA dan Neraca TA 2014.
- ▶ Pemkab Kupang belum mengkonsolidasikan Pendapatan antara PAD Kabupaten Kupang dengan Pendapatan BLUD, sehingga LKPD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014 tidak dapat diyakini telah dilaporkan secara lengkap.

Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya sebanyak 29 permasalahan yang terjadi di 21 pemda. Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya berupa SOP tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati terjadi pada 19 pemda sebanyak 26 permasalahan, pemda tidak memiliki satuan pengawas intern terjadi pada 2 pemda sebanyak 2 permasalahan, serta satu permasalahan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Rincian kelemahan sistem pengendalian per jenis temuan pada masing-masing pemda disajikan pada lampiran D.3.

Permasalahan kelemahan pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, kurang koordinasi antar pejabat terkait, belum membuat kebijakan/SOP untuk suatu prosedur, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Atas permasalahan tersebut, pemda akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, melakukan inventarisasi ulang atas aset, berkoordinasi dengan pihak terkait dan inspektorat, menyusun anggaran yang lebih akurat, lebih cermat dalam mengelola dan melakukan pencatatan, melaporkan dan menyetorkan sisa kas secara baik dan tepat waktu, menyusun laporan keuangan dengan melakukan konsolidasi seluruh SKPD, serta melakukan pengawasan melekat.

Terhadap permasalahan sistem pengendalian intern tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun kebijakan/SOP untuk suatu prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi 507 ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp198,29 miliar, potensi kerugian daerah sebesar Rp19,19 miliar, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp22,09 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pemda telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp2,26 miliar.

Kerugian Daerah

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang berakibat kerugian daerah mencapai 208 permasalahan senilai Rp198,29 miliar yang terjadi di 35 pemda. Permasalahan utamanya antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian negara lainnya.

Tabel 2.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	46	38,01	31
Kekurangan volume lima paket pekerjaan belanja modal gedung dan perumahan		4,05	Kab. Mamberamo Tengah
Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas PU, Dinas Tata Kota dan Dinas Kesehatan		1,02	Kota Ambon
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada pekerjaan pengadaan obat dan perbekalan daerah		3,93	Kab. Puncak
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	14	16,03	9
Kegiatan tiga paket pengadaan bahan obat-obatan dan peralatan medis habis pakai Dinas Kesehatan		4,49	Kab. Waropen
Bendahara pengeluaran Badan Kesbangpol dan Linmas mempertanggungjawabkan belanja tidak sesuai dengan realisasi kegiatan		3,96	Kab. Intan Jaya
Pembayaran empat paket kegiatan Dinas Pendidikan dan Olahraga tidak sesuai ketentuan		0,92	Kab. Seram Bagian Barat
Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	39	39,71	26
Realisasi belanja pegawai Sekretaris DPRD tidak sesuai dengan peraturan		21,63	Kab. Tolikara
Realisasi belanja pegawai untuk pembayaran honorarium anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan		2,67	Kab. Nduga
Realisasi pembayaran honor kepada anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan		2,21	Kab. Boven Digoel
Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian negara lainnya	109	104,53	29
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	32	12,52	18
Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	8	5,14	6
Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	7	0,96	5
Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	9	2,29	7

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
• Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	32	12,22	14
• Permasalahan ketidakpatuhan lainnya	21	71,37	17

Permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku;
- Belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
- Pejabat/ pegawai kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya.

Atas permasalahan tersebut, pemda akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga/rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran/dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki penganggaran dan pengelolaan keuangan, serta melakukan pembinaan.

Terhadap permasalahan kerugian negara, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian; dan
- Mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

UNTUK permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah terdapat 23 permasalahan sebesar Rp19,19 miliar yang terjadi di 18 pemda. Permasalahan utamanya antara lain aset tetap tidak diketahui keberadaannya, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada potensi kerugian lainnya.

Tabel 2.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya	2	11,58	2
Aset tetap peralatan dan mesin diantaranya kendaraan roda dua, kursi lipat, dan proyektor.		1,84	Kab. Seram Bagian Timur
Barang inventaris diantaranya alat panen, speedboat, dan alat kesehatan		9,74	Kab. Seram Bagian Barat
Kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	16	6,04	13
Potensi kerugian daerah senilai Rp1,2 M atas pekerjaan pembukaan dan perkerasan jalan, pembangunan jalan, pembangunan bronjong, dan pekerjaan lainnya		1,2	Kab. Nias Barat
Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada potensi kerugian lainnya	5	1,54	5
Piutang/ pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih		1,31	Kab. Toba Samosir
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang disajikan pada Akun Aset Lain-Lain belum didukung dengan SKTJM		0,17	Kab. Malaka
Kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pensiun dan terkena hukuman		0,04	Kab. Lembata
Pembayaran ganda tunjangan profesi guru		0,01	Kab. Nias Selatan

Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan tersebut, pemda akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mendesak pihak penyedia barang/jasa untuk menyeter kelebihan pembayaran serta berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan terkait dengan penatausahaan dana bergulir,

penyelesaian serah terima pengakuan atas tuntutan ganti rugi, dan pengembalian aset ke pemda.

Terhadap permasalahan potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Kepala Daerah agar memberikan sanksi sesuai denganketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Kepala Daerah agar meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Pihak-pihak yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan agar menyetor ke kas daerah.

Kekurangan Penerimaan

UNTUK permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terdapat 66 permasalahan sebesar Rp22,09 miliar yang terjadi di 31 pemda. Permasalahan utamanya antara lain penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada kekurangan penerimaan lainnya.

Tabel 2.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasa- lahan	Nilai (Rp miliar)	Peme- rintah Daerah
Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlam- batan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau di- pungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah	63	21,98	31
• Pengakuan tagihan angsuran kios/ los pasar tidak didukung oleh naskah perjanjian yang memadai, sehingga pendapatan daerah dari sewa belum diterima		3,35	Kab. Man- dailing Natal
• Pengelolaan PAD kurang memadai, sehingga terjadi kurang penerimaan atas pajak minerba		2,56	Kab. Waropen

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Pemerintah Daerah
Denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan kantor pemerintah dan jalan produksi kecamatan belum dikenakan		1,83	Kab. Nias Selatan
Ketidapatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada kekurangan penerimaan lainnya.	3	0,10	2
Pengenaan tarif pajak bahan galian C tidak sesuai dengan ketentuan serta dan pengenaan PPh atas jasa giro yang tidak sesuai dengan ketentuan		0,08	Kab. Lembata
Pengenaan PPh atas jasa giro yang tidak sesuai dengan ketentuan		0,01	Kab. Nias Selatan

Permasalahan kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggungjawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, dan tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak.
- Pejabat yang bertanggungjawab kurang/ belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan kekurangan penerimaan, pemda akan menindaklanjuti antara lain dengan penyetoran kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Kelemahan Administrasi

UNTUK permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan administrasi terdapat 210 permasalahan yang terjadi di 35 pmda. Permasalahan utamanya antara lain bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid, sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah, kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada kelemahan administrasi lainnya.

Tabel 2.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Pemerintah Daerah
Pertanggungjawaban tidak akuntabel	100	33
Pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak akuntabel		Kab. Seram Bagian Timur
Pertanggungjawaban selain perjalanan dinas yang tidak akuntabel		Kab. Malaka
Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas daerah	15	15
Keterlambatan penyeteroran sisa UYHD		Kab. Nias Utara
Sisa kas di bendahara pengeluaran TA 2014 yang belum disetorkan ke kas daerah		Kab. Kupang
Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah	24	24
Tanah yang belum bersertifikat		Kab. Seram Bagian Barat
Kendaraan yang tidak memiliki bukti kepemilikan		Kab. Boven Digoel
Pengadaan tanah hanya didukung dengan surat pelepasan adat dan kuitansi pelepasan tanpa didukung sertifikat tanah		Kab. Keerom
Ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berakibat pada kelemahan administrasi lainnya.	71	28
Jasa giro dari rekening dana kapitasi JKN selama tahun 2014 belum disetor ke kas		Kab. Tolikara
Keterlambatan penyeteroran utang PFK ke kas negara/ pihak terkait		Kab. Seram Bagian Barat
Proses pengalihan nama aset tanah Pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan		Kab. Nagekeo

Permasalahan kelemahan administrasi pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola barang milik daerah.

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.

Atas permasalahan kelemahan administrasi tersebut, pemma akan melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan, melakukan pembinaan terhadap pejabat terkait, menyelesaikan pengembalian UYHD, melanjutkan proses inventarisasi, serta berkoordinasi dengan instansi pemberi hibah terkait kepemilikan aset.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

Permasalahan ketidakpatuhan untuk setiap jenis temuan disajikan pada Lampiran D.4 dan permasalahan secara terperinci untuk setiap LKPD dapat dilihat dalam lampiran D.5.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp198,29 miliar Potensi kerugian senilai Rp19,19 miliar dan kekurangan penerimaan senilai Rp22,09 miliar, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran kas atau penyerahan aset senilai Rp2,26 miliar. Secara rinci, hasil pemeriksaan dapat dilihat pada LHP (daftar LHP pada Lampiran B2) yaitu no. 93 s.d. no.127 pada *flashdisk* terlampir.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan kinerja sesuai dengan dimensi dalam RPJMN 2015-2019 meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait: (1) Pemeriksaan pemerataan antar kelompok pendapatan/ ekonomi; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Perumahan; (5) Pemerataan antar wilayah; serta (6) Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Pemeriksaan dilakukan atas 219 objek pemeriksaan pada pemda dan 21 objek pemeriksaan pada BUMD. Pemeriksaan pada BUMD merupakan pemeriksaan pada 21 BPD. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan 1.988 temuan yang antara lain memuat 5 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp8,24 miliar, 52 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp53,51 miliar, dan 2.114 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp313,02 miliar.

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 30 objek pemeriksaan pemerataan antar kelompok pendapatan/ ekonomi yaitu pemeriksaan atas program penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 128 s.d. 157.

Penanggulangan Kemiskinan

PROGRAM penanggulangan kemiskinan bukan hanya merupakan kebijakan pemerintah pusat namun juga merupakan kebijakan pemda yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, diperlukan peranan pemerintah daerah yang optimal untuk mencapai maksud dan tujuan program tersebut dalam tiga tahapan utama, yaitu perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan.

BPK memeriksa kinerja pengelolaan program penanggulangan kemiskinan TA 2010-2014 pada 15 provinsi dan 15 kabupaten, yaitu:

Tabel 2.8 Daftar 15 Provinsi dan 15 Kabupaten yang Diuji Petik

No.	Nama Provinsi	Nama Kabupaten
1.	Aceh	Simeulue
2.	Sumatera Utara	Simalungun
3.	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir
4.	Lampung	Lampung Timur
5.	Jawa Barat	Garut
6.	Jawa Tengah	Banjarnegara
7.	Jawa Timur	Bangkalan
8.	Kalimantan Barat	Bengkayang
9.	Sulawesi Selatan	Jeneponto

No.	Nama Provinsi	Nama Kabupaten
10.	Gorontalo	Gorontalo Utara
11.	Sulawesi Tenggara	Buton
12.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
13.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
14.	Maluku	Maluku Tenggara Barat
15.	Papua	Tolikara

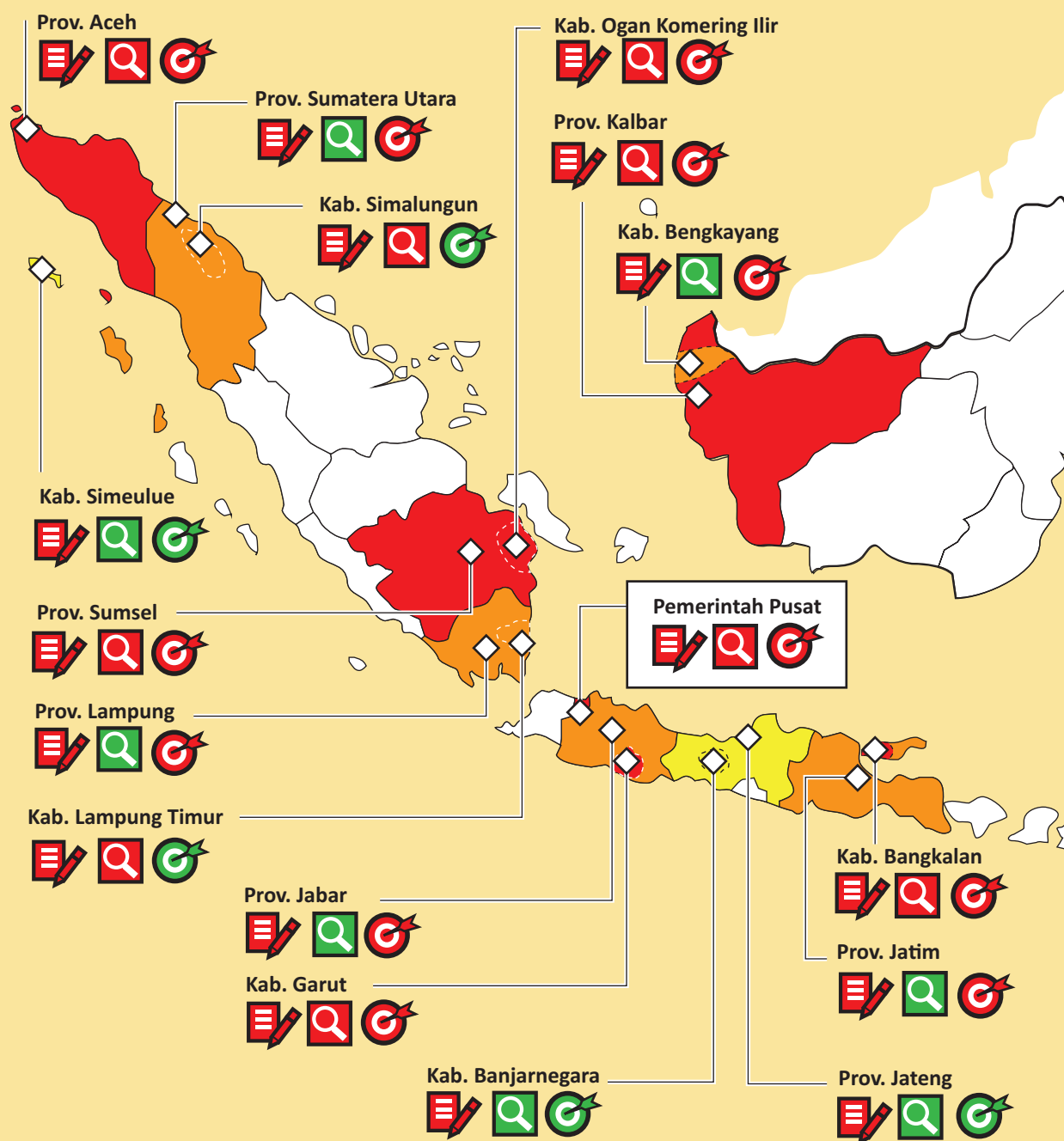
Pemeriksaan kinerja pengelolaan program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan pada pemerintah pusat, yang telah disajikan pada bab sebelumnya, Bab Pemerintah Pusat.

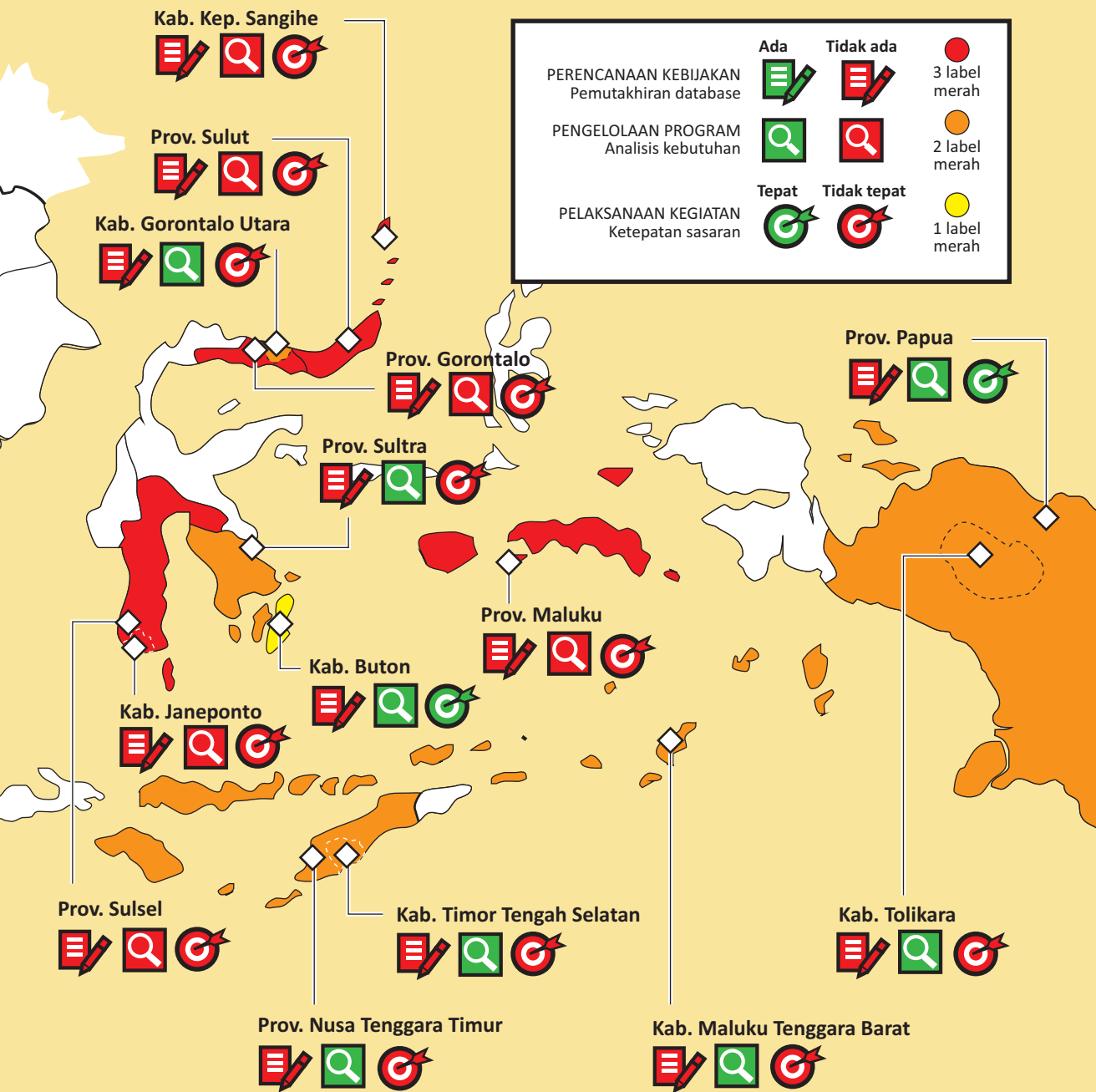
Pemeriksaan pada umumnya bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab tidak tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan yang didasarkan pada perencanaan kebijakan, pengelolaan program, dan pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada pemda yang terjadi pada tiga tahapan utama tersebut. Permasalahan tersebut di antaranya sebagai berikut:



Peta Perencanaan, Pengelolaan, & Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan





- *Perencanaan Kebijakan* - Pemerintah daerah tidak memiliki *database* nama dan alamat penduduk miskin yang valid dan mutakhir.

Hasil uji petik di 15 provinsi dan 15 kabupaten menunjukkan tidak ada pemda yang melakukan pemutakhiran data dalam basis data terpadu untuk menyesuaikan kebutuhan program tersebut dengan kondisi kemiskinan terakhir. Hal ini disebabkan tidak adanya arah kebijakan pengelolaan basis data yang jelas dengan melibatkan pemda.

Pemda juga tidak memanfaatkan basis data terpadu sebagai dasar penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Hasil uji petik pada 15 provinsi dan 15 kabupaten/ kota menunjukkan bahwa pemanfaatan basis data terpadu oleh pemda dalam menentukan penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan masih rendah.

Pemda yang tidak memanfaatkan basis data terpadu menetapkan penerima bantuan program menggunakan data dari usulan desa, data Badan Pembina Desa, data dinas terkait atau data penduduk miskin lain yang dianggap relevan. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemda tidak tepat sasaran dan tidak efektif serta tidak menjangkau seluruh masyarakat miskin.

- *Pengelolaan Program* - Program penanggulangan kemiskinan pemda tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan sesuai target. Hasil uji petik pada 15 provinsi dan 15 kabupaten menemukan permasalahan sebagai berikut.
 - ▶ Sasaran penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan belum diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kelemahan penetapan sasaran program di antaranya tidak adanya *database* penduduk miskin yang mengacu pada basis data terpadu atau data lain yang relevan. Selain itu, tidak adanya kriteria penduduk miskin yang berhak menerima bantuan program. Kondisi tersebut terjadi di 16 Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Provinsi Aceh; (2) Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Kabupaten Jenepono; (4) Kabupaten Simalungun; (5) Provinsi Kalimantan Barat; (6) Kabupaten Bengkayang; (7) Provinsi Sulawesi Utara; (8) Kabupaten Sangihe; (9) Provinsi Sulawesi Tenggara; (10) Kabupaten Buton; (11) Kabupaten Tolikara; (12) Provinsi Sumatera Selatan; (13) Kabupaten Ogan Komering Ilir; (14) Kabupaten Lampung Timur; (15) Provinsi Maluku; dan (16) Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - ▶ Program penanggulangan kemiskinan belum didasari analisis kebutuhan masyarakat di daerah setempat. Hal ini karena pemilihan program antara lain hanya mengikuti tren program-

program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Selain itu, hanya mengacu pada analisis penyusunan/ perencanaan anggaran pemerintah daerah. Permasalahan tersebut terjadi di 14 Pemerintah Daerah, yaitu: (1) Provinsi Aceh; (2) Provinsi Sulawesi Selatan; (3) Kabupaten Jeneponto; (4) Kabupaten Simalungun; (5) Kabupaten Bangkalan; (6) Provinsi Kalimantan Barat; (7) Provinsi Sulawesi Utara; (8) Kabupaten Sangihe; (9) Provinsi Gorontalo; (10) Kabupaten Garut; (11) Provinsi Sumatera Selatan; (12) Kabupaten Ogan Komering Ilir; (13) Kabupaten Lampung Timur; dan (14) Provinsi Maluku.

- *Pelaksanaan Kegiatan* - Kriteria penerima manfaat program belum secara jelas ditetapkan dalam dokumen yang resmi sehingga terdapat penerima bantuan program yang tidak tepat sasaran. Permasalahan tersebut terjadi di 23 pemerintah daerah, yaitu (1) Kabupaten Jeneponto; (2) Kabupaten Bangkalan; (3) Kabupaten Bengkayang; (4) Kabupaten Gorontalo Utara; (5) Kabupaten Tolikara; (6) Kabupaten Kepulauan Sangihe; (7) Kabupaten Ogan Komering Ilir; (8) Kabupaten Maluku Tenggara Barat; (9) Kabupaten Garut; (10) Kabupaten Timor Tengah Selatan; (11) Provinsi Aceh; (12) Provinsi Sumatera Utara; (13) Provinsi Sumatera Selatan; (14) Provinsi Lampung; (15) Provinsi Jawa Barat; (16) Provinsi Jawa Timur; (17) Provinsi Kalimantan Barat; (18) Provinsi Sulawesi Utara; (19) Provinsi Sulawesi Tenggara; (20) Provinsi Sulawesi Selatan; (21) Provinsi Gorontalo; (22) Provinsi Maluku; dan (23) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tujuan program penanggulangan kemiskinan untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak sepenuhnya tercapai.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Daerah menyatakan bahwa:

- Pengelolaan *database* penduduk miskin oleh pemda belum optimal karena basis data terpadu berdasarkan pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 belum mutakhir. Pemda tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemutakhiran basis data. Ke depan, pemda akan melakukan perbaikan dan pemutakhiran *database* penduduk miskin
- Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menyebabkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan masih sangat terbatas dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk miskin. Sasaran program tidak sepenuhnya mengacu kepada basis data terpadu pendataan program perlindungan sosial karena tiap-tiap SKPD pelaksana program memiliki data dan sasaran sendiri.

BPK merekomendasikan kepada masing-masing kepala daerah antara lain agar:

- Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pemutakhiran dan pemanfaatan *database* penduduk miskin dan peta wilayah kemiskinan yang valid dan digunakan untuk menetapkan penerima bantuan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPS, Kemensos, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Meningkatkan komitmen dalam pengalokasian anggaran untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan termasuk dana pendamping program pusat dengan memperhatikan kebutuhan pemenuhan target penurunan angka kemiskinan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan program penanggulangan kemiskinan mengungkapkan 258 temuan, yang memuat 2 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp363,78 juta dan 278 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp185,16 miliar.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 3 objek pemeriksaan pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 158 s.d. 160.

Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

PENDIDIK adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru.

Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

BPK telah memeriksa pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada 3 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas:

- Efektivitas pengelolaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun



pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau TA 2014.

- Efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Konawe dalam penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan TA 2014 dan semester I 2015.
- Kinerja pengelolaan tenaga pendidik pendidikan dasar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene.

Pemeriksaan pada umumnya bertujuan menilai efektivitas pemerintah dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Hasil pemeriksaan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan belum efektif. Secara umum, permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan adalah pengelolaan tenaga kependidikan dari sisi kuantitas dan kualitas.

Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, terdapat permasalahan pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai standar; kekurangan dan kelebihan tenaga guru sekolah dasar maupun SMP; terdapat guru PNS yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/ D-IV dan belum memiliki

sertifikasi; dan terdapat guru yang mengajar tidak sesuai kompetensinya. Akibatnya, belum terjaminnya mutu dan kualitas pelayanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan.

Permasalahan yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi juga terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sementara itu permasalahan terkait dengan pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik juga terjadi pada Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendidikan pada daerah-daerah tersebut akan berusaha maksimal untuk memperbaiki pengelolaan tenaga kependidikan.

BPK merekomendasikan antara lain kepada Bupati agar memerintahkan Kepala Dinas untuk memperbaiki sistem pengelolaan tenaga kependidikan dengan menyusun pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan mendistribusikannya berdasarkan kebutuhan masing-masing sekolah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan mengungkapkan 32 temuan yang memuat 36 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,09 miliar.

Kesehatan

UNDANG-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pada semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 10 objek pemeriksaan kesehatan yang terdiri atas 9 objek pelayanan kesehatan RSUD dan puskesmas dan 1 objek program kesehatan ibu dan anak. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran B no. 161 s.d. 170.

Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas

BPK telah memeriksa kinerja pengelolaan pelayanan rumah sakit dan puskesmas TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada 9 objek pemeriksaan,

yakni 3 objek pelayanan rawat inap, 3 objek pelayanan rawat Inap dan instalasi farmasi, 1 objek pelayanan rawat inap, kefarmasian, kesehatan lingkungan dan pemeliharaan sarana, 1 objek pelayanan rawat jalan dan rawat inap, serta 1 objek pelayanan rawat inap dan gawat darurat, pada:

- RSUD Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi
- Sembilan Puskesmas Kabupaten Tuban
- RSUD dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur
- RSUD S. K. Lerik Kota Kupang
- RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- RSUD DR. H. Chasan Boesoirie Provinsi Maluku Utara
- RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- RSUD Labuha Kabupaten Halmahera Selatan
- RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap, instalasi farmasi, rawat jalan, gawat darurat, kesehatan lingkungan dan pemeliharaan sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hal positif yang telah dilakukan oleh beberapa RSUD, antara lain:

- Telah memiliki unit dan uraian tugas organisasi untuk merencanakan serta mengorganisasikan dan menggerakkan tenaga keperawatan, sarana dan prasarana, dan perbekalan farmasi.
- Telah menyusun standar pelayanan minimal tahun 2014 dan 2015 dan menetapkan prosedur operasi standar untuk pelayanan rawat inap dan farmasi.
- Telah sesuai dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal di instalasi farmasi dan rawat inap, antara lain:
 - ▶ Pelayanan instalasi dilaksanakan satu pintu.
 - ▶ Waktu tunggu pelayanan farmasi telah diimplementasikan dengan baik.
- Telah memiliki rencana strategis, program kerja tahunan, dan rencana kegiatan pelayanan rawat inap yang memadai.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan pelayanan kesehatan umumnya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas di antaranya adanya kelemahan dalam pelayanan rawat inap dan pelayanan farmasi.

Pelayanan Rawat Inap

PELAYANAN rawat inap merupakan salah satu pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, dan rehabilitasi medik. Pemeriksaan atas pengelolaan pelayanan rawat inap dilakukan pada seluruh objek pemeriksaan. Permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap di antaranya:

- Sarana dan prasarana belum sepenuhnya mendukung pelayanan rawat inap. Hal ini terjadi di seluruh objek pemeriksaan. Belum memadainya sarana prasarana tersebut di antaranya:
 - Di puskesmas Kabupaten Tuban, ruangan dalam kondisi rusak, ruang rawat inap tidak dipisah antara pasien laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, dan penyakit menular atau tidak menular. Kondisi kebersihan lingkungan puskesmas secara keseluruhan belum bersih dan sarana pendukung yang tidak lengkap. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu kepada masyarakat.
 - Di RSUD Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, perbandingan luas ruang perawatan pasien dengan jumlah tempat tidur yang tersedia tidak sesuai dengan ketentuan, tempat tidur dalam kondisi kurang baik, dan peralatan medis kurang lengkap. Akibatnya, instalasi ruang rawat inap belum menunjang pemulihan kesehatan dan keamanan pasien.
- Jumlah, kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pelayanan rawat inap belum memadai. Hal ini terjadi pada 7 objek pemeriksaan, yaitu RSUD Dr. Achmad Mochtar Kota Bukittinggi, RSUD dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah, RSUD DR. H. Chasan Boesoirie Provinsi Maluku Utara, RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, RSUD Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, dan RSUD Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Tidak memadainya sumber daya manusia tersebut di antaranya kekurangan tenaga dokter, perawat, dan bidan. Pelayanan rawat inap belum sepenuhnya dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan yang memiliki keahlian, keterampilan dan kompetensi sesuai

dengan standar yang dipersyaratkan. Akibatnya, pelayanan kesehatan khususnya pelayanan rawat inap tidak optimal dan tidak sesuai dengan standar.

Atas permasalahan tersebut:

- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban menyatakan telah melaksanakan perencanaan kebutuhan alat kesehatan baik medis maupun nonmedis di puskesmas rawat inap yang dilaksanakan secara bertahap, mengingat terbatasnya ketersediaan dana untuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan untuk keseluruhan puskesmas Kabupaten Tuban. Demikian pula Direktur RSUD Labuha menjelaskan bahwa RSUD Labuha akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar dapat mengalokasikan anggaran di Bidang Keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- Direktur RSUD menjelaskan akan membangun komunikasi dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait masalah kekurangan tenaga pelaksana pelayanan di RSUD. SDM di instalasi rawat inap yang belum mendapat pelatihan yang cukup dan sesuai SPM rumah sakit, akan dilaksanakan pelatihan.

BPK merekomendasikan antara lain:

- Kepala Daerah agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas agar meningkatkan pengendalian atas kelayakan kondisi bangunan, alat-alat kesehatan (utama, penunjang dan pendukung), termasuk mengupayakan ketersediaan jumlah sarana/prasarana yang belum memadai, sesuai dengan standar; Kepala Daerah agar memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memberikan prioritas pemenuhan sarana prasarana pada instalasi rawat inap dalam menetapkan anggaran yang diusulkan RSUD.
- Kepala Daerah agar memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (medis dan nonmedis) yang diajukan RSUD; Direktur RSUD agar meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Pelayanan Farmasi

PELAYANAN kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah terkait obat. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit mencakup penyediaan sediaan

farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik. Pemeriksaan dilaksanakan untuk menilai efektivitas pengelolaan pelayanan farmasi pada empat rumah sakit umum daerah, yaitu:

- RSUD Masohi Kabupaten Maluku Tengah
- RSUD DR. H. Chasan Boesoirie Provinsi Maluku Utara
- RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
- RSUD Labuha Kabupaten Halmahera Selatan

Permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pelayanan farmasi antara lain pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan belum memadai. Hal ini terjadi di seluruh objek pemeriksaan. Tidak memadainya pelayanan farmasi tersebut di antaranya:

- Pengkajian resep belum dilaksanakan secara memadai. Pengkajian resep dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat. Di RSUD DR. H Chasan Boesoirie Maluku Utara, petugas loket pelayanan farmasi tidak melakukan pengkajian atas resep melainkan hanya memenuhi permintaan yang tertulis dalam resep yang diterima dari pasien. Petugas melakukan verifikasi umum sebatas pada persyaratan administrasi, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah maupun aturan dan cara penggunaan.
- Penyiapan, penyerahan dan pendistribusian (*dispensing*) obat belum dilaksanakan dan sudah dilaksanakan tetapi belum memadai. Belum memadainya kegiatan *dispensing* di antaranya, di RSUD Jailolo Halmahera Barat, ruang peracikan obat masih bercampur dengan ruang penyimpanan dan ruang administrasi, serta belum ada tempat khusus untuk mencuci/membersihkan peralatan apotek. Hal tersebut terutama mengakibatkan pasien belum mendapatkan pelayanan kefarmasian yang optimal.

Atas permasalahan tersebut:

- Direktur RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie memberikan tanggapan bahwa pengkajian resep dilaksanakan pada kasus-kasus tertentu (penyakit dengan komplikasi) dan kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh apoteker/ instalasi farmasi RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie sesuai prosedur kerja.
- Direktur RSUD menjelaskan akan menginstruksikan Kepala Instalasi Farmasi untuk meningkatkan sistem dan fungsi koordinasi baik

secara internal maupun dengan bagian-bagian atau unit-unit pelayanan yang lain di RSUD Jailolo.

BPK merekomendasikan antara lain:

- Direktur RSUD agar memerintahkan Kepala Instalasi Farmasi agar lebih optimal dalam melakukan pengkajian resep.
- Kepala Daerah agar menginstruksikan Direktur RSUD untuk berkoordinasi dengan TAPD dalam pemenuhan anggaran guna mendukung perbaikan sarana dan prasarana apotek farmasi sesuai dengan standar.

Hasil pemeriksaan BPK atas pelayanan RSUD dan Puskesmas mengungkapkan 169 temuan, yang memuat 195 permasalahan ketidakefektifan.

Program Kesehatan Ibu dan Anak

SALAH satu tujuan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam memelihara Kesehatan Ibu dan Anak. Dalam keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok yang paling rentan dan peka, terhadap berbagai masalah kesehatan, seperti: kejadian kesakitan (*morbiditas*) dan gangguan gizi (*malnutrisi*), yang seringkali berakhir dengan kecacatan (*disability*) atau kematian (*mortalitas*).

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mompowah TA 2014-semester I 2015. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Mompowah dalam Program Kesehatan Ibu dan Anak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Program Kesehatan Ibu dan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mompowah masih belum efektif. Kondisi signifikan yang perlu ditingkatkan yang berdampak pada belum efektifnya Program Kesehatan Ibu dan Anak, di antaranya:

- Kabupaten Mompowah belum memiliki peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kesehatan daerah sehingga pelaksanaan program-program kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Mompowah tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
- Belum semua puskesmas memiliki sarana prasarana yang memadai antara lain ketersediaan air bersih, ruang khusus persalinan, dan ruang pascapersalinan. Puskesmas terpaksa menggunakan ruangan lain



dengan kondisi yang kurang layak karena masih bercampur dengan dokumen dan barang-barang yang kurang bersih dan tidak steril. Akibatnya, pelayanan kesehatan ibu dan anak yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal dan mempengaruhi indikator capaian pelaksanaan program.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang berkenaan dengan Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Mempawah dan melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan program.

BPK telah merekomendasikan kepada Bupati Mempawah antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk:

- Membuat konsep peraturan daerah dan peraturan lain yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat dan Program Kesehatan Ibu dan Anak.
- Memerintahkan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan membuat pemetaan kebutuhan sarana prasarana di Dinas Kesehatan dan puskesmas secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas program kesehatan ibu dan anak mengungkapkan 19 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Perumahan

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 45 objek pemeriksaan perumahan terkait dengan penyediaan akses air bersih. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 171 s.d. 215.

Penyediaan Akses Air Bersih

AIR bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh besar terhadap kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Untuk itu, pemerintah merancang dan menerapkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), yang menyinergikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Arah kebijakan pengembangan SPAM dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN 2015-2019 menargetkan 100% penduduk Indonesia sudah memperoleh akses air bersih pada 2019. Target ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*).

Upaya pencapaian target itu menghadapi berbagai tantangan, di antaranya kelangkaan air bersih yang dipicu semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya air. Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja guna menilai upaya pemerintah daerah menyediakan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan.

Pemeriksaan kinerja tersebut dilaksanakan pada 45 Pemda di 25 Provinsi pada periode 2014-semester I 2015. Perincian hasil pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses bersih pada 45 Pemda tersebut dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai upaya pemda dalam penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan. Pemeriksaan diarahkan pada tiga aspek, yaitu: 1) Pemenuhan dan peningkatan cakupan, 2) Kelayakan air yaitu memenuhi syarat kualitas dan kuantitas, dan 3) Keberlanjutan SPAM berbasis masyarakat (SPAM BM).

Pemeriksaan menyimpulkan permasalahan utama yang sangat memengaruhi keberhasilan upaya pemda dalam menyediakan akses air



bersih adalah (1) Pemda belum memiliki konsep perencanaan yang baik untuk meningkatkan cakupan penyediaan akses air bersih, (2) Belum maksimalnya upaya pemda dalam mendorong penyediaan akses air bersih yang layak, dan (3) Kepedulian pemda dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan SPAM berbasis masyarakat kurang optimal.

- **Penyediaan Akses Air Bersih Belum Didukung Perencanaan yang Baik**

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kelemahan mendasar dalam peningkatan cakupan penyediaan akses air bersih berbasis masyarakat adalah pada aspek perencanaan. Sebanyak 45 pemda yang diuji petik menunjukkan seluruhnya belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM BM; 30 pemda (67%) belum mempunyai informasi tentang kebutuhan air bersih; 22 pemda (49%) belum mempunyai informasi tentang ketersediaan sumber air baku/ potensi air baku di wilayahnya; 41 pemda (91%) belum mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan air bersih, baik sumber daya finansial, kelembagaan, maupun sumber daya manusia (SDM) dan 44 Pemda (98%) belum memiliki data jumlah SPAM BM yang sudah dibangun dan cakupan SPAM BM sebagai dasar penyusunan target cakupan pelayanan. Daftar permasalahan penyediaan akses air bersih dapat dilihat pada Lampiran E.1 (Bagian A).

Lemahnya perencanaan ini disebabkan antara lain: (1) Kurang tersedianya data informasi mengenai kebutuhan air, peta rawan air, potensi air baku, ketersediaan sumber daya finansial, kelembagaan, serta sumber daya manusia, dan (2) Tidak adanya data berapa banyak jumlah SPAM berbasis masyarakat yang sudah dibangun.

Hal tersebut menghambat pemda dalam meningkatkan cakupan ketersediaan akses air bersih berbasis masyarakat, selain faktor tidak adanya keselarasan dokumen perencanaan seperti Rencana Induk SPAM, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan belum adanya target cakupan pelayanan akses air bersih yang berbasis masyarakat.

- **Peningkatan Kelayakan Air Bersih SPAM BM Belum Maksimal**

Hasil pemeriksaan menunjukkan dari aspek kualitas, upaya pemda secara umum belum dapat menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat atas kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan. Dari 45 pemda yang diuji petik, sebanyak 42 pemda (93%) telah melakukan pengujian kualitas air, namun belum sesuai dengan permenkes; sebanyak 3 pemda (7%) lainnya tidak melakukan pengujian kualitas air karena kendala anggaran dan skala prioritas pembangunan. Dari aspek kuantitas, pemda secara umum belum dapat melakukan pengawasan secara optimal atas pemenuhan kuantitas air untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal.

Dari 45 pemda yang diuji petik, sebanyak 41 pemda (91%) tidak memiliki data jumlah produksi air, pengguna air, dan jumlah konsumsi air masing-masing SPAM BM, sedangkan 4 pemda (9%) lainnya memiliki data namun tidak lengkap dan tidak mutakhir. Tidak tersedianya data ini umumnya karena belum adanya pedoman pendataan, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta keterbatasan dukungan yang diberikan pemda untuk pemenuhan kuantitas air SPAM BM. Hal tersebut mengakibatkan pemda tidak mempunyai gambaran kecukupan pemenuhan kuantitas kebutuhan air yang layak bagi masyarakat. Daftar permasalahan penyediaan akses air bersih dapat dilihat pada Lampiran E.1 (Bagian B).

- **Kepedulian pada keberlanjutan pengelolaan SPAM BM kurang optimal**

Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 44 dari 45 pemda yang diuji petik (98%) belum melaksanakan kegiatan pembinaan berupa edukasi, advokasi, sosialisasi, promosi, dan kampanye pentingnya keberlanjutan pengelolaan SPAM kepada masyarakat; sebanyak 39 Pemda (87%)

belum memiliki unit kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab menyediakan fasilitator atau pendamping kelompok masyarakat/pengelola SPAM BM; sebanyak 45 pemda (100%) belum sepenuhnya memberikan pembinaan teknis pemeliharaan sarana dan prasarana kelompok masyarakat/pengelola SPAM BM secara berkelanjutan; dan 44 pemda (98%) belum memberikan dukungan bantuan pemeliharaan untuk SPAM BM yang belum mandiri. Daftar permasalahan penyediaan akses air bersih dapat dilihat pada Lampiran E.1 (Bagian C).

Secara umum, atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.

BPK merekomendasikan kepada para Bupati terkait untuk:

- Mengompilasikan data tentang kebutuhan air bersih yang meliputi peta rawan air, kebutuhan air, sumber air baku, dan cakupan pelayanan air bersih, sehingga data dapat digunakan secara optimal sebagai bahan penyusun dokumen perencanaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
- Menetapkan target cakupan air bersih sebagai tolak ukur keberhasilan program penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.
- Menyelaraskan dokumen perencanaan yang meliputi dokumen RISPAM, RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan terkait lainnya, sehingga pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan optimalisasi SPAM BM lebih terarah dan tepat sasaran.
- Mengupayakan sumber daya yang memadai untuk tercapainya kualitas dan kuantitas air bersih yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- Merancang suatu tim kerja fungsional lintas sektoral yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan operasional kegiatan SPAM berbasis masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan, sehingga keberlanjutan SPAM BM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK atas upaya pemda dalam menyediakan akses air bersih mengungkapkan 345 temuan, yang memuat 406 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp24,57 miliar.

Pemerataan Antarwilayah

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 4 objek pemeriksaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta 1 objek pemeriksaan pengendalian pemanfaatan ruang. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 216 s.d. 220.

Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

DALAM rangka mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program, antara lain dengan program pemberdayaan masyarakat kampung dan pembangunan manusia di Provinsi Papua. Program tersebut antara lain meliputi bantuan pemberian uang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian kampung, menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan di Provinsi Papua, yaitu:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Provinsi Papua TA 2013 dan 2014 di Jayapura.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Keerom di Waris.
- Efektivitas Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat TA 2013-2014 pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke.
- Kinerja Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Yalimo TA 2013-2014.

Tujuan pemeriksaan pada umumnya untuk menilai efektivitas pengelolaan program pemberdayaan masyarakat tahun 2013 dan 2014. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya pengelolaan program pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya efektif. Permasalahan-permasalahan yang harus mendapat perhatian diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Provinsi Papua

PEMERINTAH Provinsi Papua pada tahun 2013 dan 2014 telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat kampung berupa program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) dan

Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek), kedua program tersebut merupakan program pemberdayaan yang menggunakan sebagian dana otonomi khusus Provinsi Papua. Pada pelaksanaannya kedua program pemberdayaan masyarakat kampung tersebut melibatkan beberapa SKPD Provinsi Papua maupun beberapa SKPD Kabupaten.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tahun Anggaran 2013 – 2014 pada Pemerintah Provinsi Papua meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi belum efektif.

Permasalahan yang mempengaruhi keefektifan program antara lain tidak terdapat tim koordinasi yang menjalankan fungsi secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terlaksananya tugas Tim Koordinasi, tidak terdapat Tim Koordinasi Provinsi, Kabupaten, dan Distrik yang memberikan dukungan teknis.

Akibatnya, pengendalian pelaksanaan program Respek/ Prospek menjadi lemah serta Kegiatan koordinasi perencanaan dan monitoring program pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten, dan distrik tidak berjalan dengan baik.

Atas permasalahan tersebut pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung memahami atas temuan tersebut dan akan memperbaiki kelemahan yang ada.

Terhadap permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua agar memerintahkan Kepala BPMK:

- Menyusun struktur organisasi Tim Koordinasi program pemberdayaan masyarakat kampung dan dikoordinasikan dengan Kepala Bappeda selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- Melakukan koordinasi dengan Kepala BPMK Kabupaten/ Kota



dalam menyusun Tim Koordinasi pada tingkat Kabupaten/ Kota, selanjutnya diusulkan kepada Bupati/ Wali Kota untuk ditetapkan.

Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Kabupaten Keerom

PEMERINTAH Kabupaten Keerom melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam bentuk Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3). Program BK3 merupakan kebijakan pemerintah kabupaten dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kemandirian kampung yang antara lain bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung. Program berupa pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah kampung dengan alokasi dana sebesar Rp1,00 miliar untuk tiap-tiap kampung.

Pemerintah Kabupaten Keerom telah melakukan upaya peningkatan program pemberdayaan kampung agar program dapat berjalan sesuai yang diharapkan antara lain melalui upaya kemandirian kampung, kebijakan dan rencana strategis penuntasan program pemberdayaan masyarakat. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung tidak efektif.

Permasalahan yang memengaruhi efektivitas program pemberdayaan masyarakat diantaranya belum memadainya pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung. Terdapat pencairan dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung yang tidak sesuai dengan prosedur. Selain itu, tidak terdapat koordinasi antara BPKM dengan dinas teknis terkait dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung.

Akibatnya, pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung tidak optimal sesuai tujuan kegiatan. Terjadi ketidakselarasan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kampung dengan program satuan kerja perangkat daerah teknis terkait. Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Keerom sependapat dan akan memperbaiki kelemahan yang ada.

BPK merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Tim Koordinasi Distrik BK3 dan Unit Kerja Program BK3 untuk meningkatkan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan BK3 kepada aparat kampung dan meningkatkan koordinasi antara pelaksana program BK3 dengan dinas teknis terkait.

Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Merauke

PROGRAM Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Merauke dilaksanakan dalam bentuk program pembangunan kampung dengan nama Gerakan Membangun Kampungku (GERBANGKU). GERBANGKU merupakan tindak lanjut dari upaya Pemerintah Kabupaten Merauke dalam meningkatkan peran Pemerintah Kampung memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. GERBANGKU juga merupakan tindak lanjut dari upaya menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Merauke telah melakukan upaya-upaya dalam mengelola GERBANGKU antara lain:

- Pada tahap perencanaan, adanya sinkronisasi antara Renstra Pemerintah Provinsi dengan Renstra Pemerintah Kabupaten Merauke.
- Pada tahap pelaksanaan, Komponen masyarakat telah dilibatkan secara optimal dalam pelaksanaan GERBANGKU. Selain itu, alokasi dana GERBANGKU telah disesuaikan dengan kebutuhan kampung.
- Pada kegiatan monitoring dan evaluasi, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan dan hasilnya telah dimanfaatkan untuk alokasi tahun berikutnya.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Merauke belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kelemahan terutama bantuan dana kegiatan GERBANGKU tidak langsung menyentuh ke masyarakat kampung.

Terdapat bantuan dana yang diberikan kepada kelompok usaha yang digunakan sebagai modal usaha bergulir. Namun, atas penggunaan dana tersebut belum tersedia mekanisme yang jelas dalam hal penggunaan dana maupun penerima bantuan. Sejauh mana dana dipakai dan dikelola tidak diketahui karena tidak ada laporan penggunaan maupun status penggunaan.

Bantuan sampai saat ini masih diperuntukkan bagi kelompok usaha penerima awal bantuan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kelompok usaha bukan bagi masyarakat kampung sesuai tujuan dari peruntukkan dana GERBANGKU yang telah ditetapkan oleh Bupati Merauke. Akibatnya, belum semua bantuan diterima dan dirasakan manfaatnya langsung ke masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung menjelaskan bahwa program GERBANGKU adalah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat kampung itu sendiri. Dengan demikian maka masyarakat akan merasakan langsung dampak dari program tersebut. Memang diakui bahwa pada tahun awal peluncuran program GERBANGKU adalah untuk lebih memenuhi sarana dan prasarana pemerintahan kampung sehingga aktivitas pemerintahan di kampung, sehingga anggaran untuk infrastruktur mencapai 50%. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat hanyalah 32,5% yang terdiri dari berbagai bidang.

Dengan demikian, dampak untuk pemberdayaannya belum dapat berjalan dengan maksimal karena keterbatasan alokasi dana dan banyaknya kebutuhan masyarakat kampung. Disinilah diperlukan keterkaitan antar SKPD dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Program GERBANGKU, sehingga untuk sosialisasi pemberdayaan masyarakat juga didukung oleh SKPD lain yang mempunyai tupoksi dimaksud.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Merauke agar melakukan pembinaan secara intens terkait kegiatan pelaksanaan program bantuan GERBANGKU kepada pihak-pihak pelaksana program.

Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Yalimo

RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Yalimo sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah telah menempatkan pembangunan manusia sebagai isu strategis untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten lain di Indonesia.

Pembangunan manusia berarti membangun sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pemberdayaan masyarakat.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan upaya Pemerintah Kabupaten Yalimo belum efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Hal ini di antaranya RPJMD Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2011 – 2016 belum disusun secara komprehensif dan sistematis untuk mendukung pembangunan manusia Yalimo.

Pemerintah Kabupaten Yalimo belum menetapkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai target capaian kinerja. Selain itu, terdapat beberapa inkonsistensi kebijakan dengan strategi pembangunan manusia dalam RPJMD. Akibatnya, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan tidak

memadai sehingga pencapaian visi dan misi kepala daerah tidak optimal. Bappeda memberikan tanggapan bahwa pihaknya sependapat dengan BPK dan akan lebih memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada.

Hasil pemeriksaan BPK atas pembangunan desa dan kawasan perdesaan mengungkapkan 51 temuan, yang memuat 59 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp16,45 miliar.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PADA semester II tahun 2015 BPK melaksanakan pemeriksaan atas penataan ruang TA 2014 s.d. Semester I 2015 pada Kota Gorontalo dengan tujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan pembangunan Kota Gorontalo yang berkelanjutan. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kegiatan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang oleh Pemkot Gorontalo belum efektif. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Pemkot Gorontalo belum menggunakan informasi berbasis spasial dalam pemberian rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) secara memadai. Penggunaan informasi spasial yang belum memadai pada saat pembahasan rekomendasi izin lokasi, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan), alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan terdapat pemberian IPR yang tidak sesuai dengan arahan ruang pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Gorontalo.
- Pemanfaatan ruang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain terdapat pembangunan perumahan yang memiliki izin alih fungsi lahan sawah serta IMB pada lokasi pertanian lahan basah. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW. Selain itu terdapat aspek pemanfaatan ruang yang belum diatur Pemkot Gorontalo yaitu IPR untuk kegiatan penambangan bahan galian C. Hasil analisis citra satelit dengan *software GIS (Geographic Information System)*, menunjukkan terdapat beberapa lokasi pertambangan bahan galian C yang berada pada kawasan lindung. Hal tersebut mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan.
- Pengawasan penataan ruang dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang belum memadai, antara lain mekanisme pengawasan penataan ruang belum diatur secara khusus baik dalam Perda RTRW Kota Gorontalo maupun dalam peraturan

daerah atau peraturan wali kota. Hal ini mengakibatkan Pemkot Gorontalo tidak dapat segera melihat penyimpangan penataan ruang yang terjadi untuk dapat segera melakukan upaya perbaikan penataan ruang dan revisi RTRW.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bappeda menyatakan bahwa:

- Penggunaan informasi berbasis spasial masih terkendala dengan fasilitas dan SDM yang mempunyai kemampuan teknis.
- Permasalahan tersebut terjadi karena Kota Gorontalo belum menetapkan regulasi teknis (Perwako) terkait IPR.
- Revisi Perda RTRW yang diantaranya mengatur tentang aspek-aspek pengawasan dalam penataan ruang akan segera dilakukan.

BPK merekomendasikan Wali Kota Gorontalo agar:

- Mengesahkan peraturan wali kota terkait dengan prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya yang di antaranya menyebutkan tentang penggunaan data spasial sebagai dasar dalam perolehan IPR;
- Memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW yaitu alih fungsi lahan pertanian, pemberian izin lokasi/ izin prinsip, pemberian IMB, penempatan reklame dan penambangan galian C;
- Menyusun usulan revisi atas Perda RTRW dengan memasukkan komponen pengawasan penataan ruang serta pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan penataan ruang.

Hasil pemeriksaan BPK atas penataan ruang pada Kota Gorontalo mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2015, BPK telah memeriksa 126 objek pemeriksaan tata kelola dan reformasi birokrasi yang terdiri atas 125 objek pemeriksaan reformasi keuangan daerah dan 1 objek pemeriksaan pelayanan perijinan.

Reformasi Keuangan

PEMERIKSAAN reformasi keuangan daerah terdiri atas 112 objek pemeriksaan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah, 7 objek pemeriksaan pengelolaan pajak dan pendapatan daerah, 4 objek pemeriksaan manajemen aset daerah, 1 objek pemeriksaan pelaksanaan tugas inspektorat daerah, dan 1 objek pemeriksaan pengelolaan anggaran RSUD. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 221 s.d. 346.

Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

PENERAPAN Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU tersebut mengamanatkan pertanggungjawaban APBN/ APBD berupa laporan keuangan yang berbasis akrual disampaikan pemerintah selambat-lambatnya mulai TA 2008. Namun, pelaksanaan ketentuan UU tersebut baru dapat dilaksanakan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP tersebut mengatur laporan keuangan pertanggungjawaban APBN/ APBD disusun berdasarkan basis akrual mulai TA 2010. Dalam hal pemerintah belum dapat menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun tersebut, pemerintah dapat menerapkan SAP berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual/ CTA*) paling lama 4 tahun setelah TA 2010.

Penerapan SAP berbasis akrual pada TA 2015 memerlukan persiapan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah yang integratif dan komprehensif, agar hasil yang telah dicapai sampai dengan pertanggungjawaban APBD 2014 dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan. Capaian ini dapat dilihat pada porsi perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014.

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan upaya keras pemerintah karena jumlah laporan yang bertambah banyak. Dengan standar baru ini, laporan keuangan yang harus disiapkan pemerintah bertambah menjadi 7 jenis dari basis sebelumnya yang hanya 4 jenis. Ke-7 jenis laporan itu meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk menghasilkan laporan-laporan tersebut diperlukan perubahan sistem akuntansi yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual, serta penyiapan migrasi saldo-saldo akun neraca untuk mengawali pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual pada 2015. Apabila tidak dipersiapkan dengan baik, perubahan standar akuntansi ini dapat memengaruhi capaian kualitas pertanggungjawaban APBD. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan pada Kemendagri dan 112 pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan kinerja Kemendagri terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual telah diuraikan pada Bab I Pemerintah Pusat. Pada bab ini, akan diuraikan hasil pemeriksaan kinerja atas upaya 112 pemerintah daerah dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Adapun, tujuan pemeriksaan kinerja tersebut adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi SAP berbasis akrual yang diarahkan pada tiga aspek, yaitu:

- Komitmen, regulasi dan kebijakan.
- Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan, aset dan teknologi informasi (TI).
- Pengelolaan TI.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pelaporan keuangan berbasis akrual belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya permasalahan terkait dengan kebijakan, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaporan keuangan tersebut. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- **Strategi komprehensif belum ada**

Dari 112 pemda yang diperiksa, sebanyak 35 (31%) pemda di antaranya telah menyusun strategi dan 77 (69%) pemda tidak menyusun strategi dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual.

Strategi yang disusun pemda masih bersifat parsial, yaitu hanya berupa penyediaan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) TA 2014 dan 2015.

BPK tidak menemukan strategi komprehensif yang dibuat oleh pemda yang memuat tahapan kegiatan, target dan *output* yang harus dicapai/dihasilkan, serta pihak-pihak yang terlibat pada setiap tahapan kegiatan

dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual itu. Dengan demikian, pemda tidak dapat mengukur tingkat capaian serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual.

- **SDM dan sistem aplikasi tidak siap**

Penerapan SAP berbasis akrual mengharuskan pemerintah menyiapkan SDM yang kompeten. Untuk itu, pemerintah harus memiliki perencanaan SDM guna memenuhi kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM, khususnya SDM pengelola keuangan, aset, dan teknologi informasi (TI).

- ▶ **Sumber Daya Manusia (SDM)**

- Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuangan, aset, dan TI tidak dilakukan

Dari 112 pemda, sebanyak 89 pemda (79%) tidak merencanakan kebutuhan kompetensi untuk tugas dan fungsi pengelola keuangan, aset dan TI serta Inspektorat selaku previu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sebanyak 91 pemda (81%) tidak memiliki *database* SDM yang lengkap dan mutakhir.

- Penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI tidak sesuai dengan bidangnya

Sebanyak 87 pemda (78%) melakukan penempatan pegawai pengelola keuangan, aset dan TI tanpa mempertimbangkan tugas, fungsi dan kompetensi sebagai pengelola keuangan, aset dan TI. Selain itu, sebanyak 96 pemda (86%) belum memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengatur tentang mutasi dan promosi pegawai yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual.

- Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai.

Sebanyak 84 pemda (75%) tidak merencanakan kebutuhan pelatihan SDM, sehingga sebagian pelatihan yang dilaksanakan oleh pemda tidak bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi SDM

- ▶ **Sistem Aplikasi**

Bagi pemda, aplikasi yang akan digunakan dapat dipilih sendiri. Aplikasi tersebut dapat berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari Kemendagri, sistem aplikasi yang dibangun sendiri, atau oleh pihak ketiga, untuk pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Pemda juga menggunakan sistem aplikasi untuk pengelolaan penggajian serta pendapatan pajak, rumah sakit, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang Milik Daerah.

Pada 88 pemda (79%), sistem aplikasi yang digunakan belum sepenuhnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang valid, akurat, dan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Selain permasalahan proses pemetaan akun dan input data yang belum selesai, sistem aplikasi yang digunakan pemda juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencatatan transaksi sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi.

● Perangkat regulasi belum lengkap

Untuk menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda, pemerintah menyusun kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan Bagan Akun Standar (BAS). Perangkat regulasi yang diterbitkan pemerintah baik berupa kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, maupun BAS belum mendukung penerapan SAP berbasis akrual karena masih ada yang belum lengkap atau tidak selaras. Ketidakselarasan ini dirasakan oleh 71 pemda (63%).

Beberapa permasalahan terkait perangkat regulasi yang digunakan pemerintah antara lain:

- ▶ Kebijakan perlakuan utang/ piutang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak selaras.
- ▶ Standar terkait dengan perlakuan akuntansi atas akun pendapatan dari transaksi pertukaran, transaksi *leasing* baik dari sisi *lessee* maupun *lessor* belum diatur, dan kriteria mengenai informasi setelah tanggal neraca belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, buletin teknis penyusunan neraca awal pemerintah juga belum diatur.
- ▶ Kebijakan pengaturan tentang kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya di luar Bendahara Umum Daerah, kebijakan penyusutan aset tetap pemerintah daerah, dan kebijakan penyisihan piutang pemerintah daerah, belum ada.

- ▶ Kode rekening penganggaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak selaras dengan kode rekening pelaporan menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, sehingga menimbulkan kendala dalam penyajian laporan keuangan.
- ▶ Perlakuan akuntansi atas penerimaan kembali piutang tak tertagih dan pengakuan atas pendapatan dividen yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tidak selaras dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Daerah menyatakan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensinya, BKD akan mengusulkan ke Kementerian PAN – RB tentang formasi yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan di SKPD berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, melakukan diklat, bintek, *workshop*, dan *inhouse training* dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Pengelola Keuangan, Aset, dan TI serta Inspektorat selaku Pereviu LKPD sehingga SDM Pengelola Keuangan, Aset dan TI serta Inspektorat selaku periviu LKPD dapat memahami tugas dan fungsinya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan SAP berbasis akrual. Pemerintah daerah juga akan menyempurnakan Peraturan yang berlaku dan akan segera mensosialisasikan serta melakukan langkah-langkah perbaikan.

BPK telah merekomendasikan kepada pemda untuk menyusun *roadmap* guna menyelesaikan permasalahan kebijakan dan regulasi, antara lain menyangkut keselarasan dan kelengkapan peraturan, perencanaan kebutuhan, penempatan, dan pelatihan SDM, serta sistem aplikasi yang terintegrasi dan mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil pemeriksaan BPK atas penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengungkapkan 641 temuan yang memuat 680 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Pajak Daerah

PADA semester II tahun 2015 BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pajak pada 7 objek pemeriksaan, yaitu:

- Pengelolaan pajak restoran pada Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau.
- Pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada Pemprov Kepulauan Riau;
- Pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

(PBB-P2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Timur, Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur dan Pemkot Banjarmasin.

Pajak Restoran

TUJUAN pemeriksaan atas pengelolaan pajak restoran TA 2014-triwulan III 2015 adalah untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan pajak restoran dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan pajak restoran.

Pemkot Tanjungpinang telah melakukan upaya pengelolaan pajak restoran yang ditunjukkan dengan capaian yang positif, yaitu:

- Penetapan target pendapatan telah dilakukan melalui pembahasan bersama DPRD.
- Tersedianya aplikasi dalam pengelolaan pajak restoran.
- Realisasi pendapatan pajak restoran sesuai target yang ditetapkan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan Pemkot Tanjungpinang cukup efektif dalam mengelola pajak restoran TA 2014-triwulan III 2015. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus diperhatikan, di antaranya:

- Ketentuan yang mengatur pajak restoran, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur (SOP) Bidang Pendapatan DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) belum sepenuhnya memadai, antara lain DPPKAD belum memiliki standar pelayanan atas pajak restoran. Akibatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pajak restoran tidak dapat dinilai karena tidak ada indikator penilaian sebagai standar.
- Proses pengelolaan pajak restoran belum sepenuhnya sesuai peraturan, antara lain penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tanpa melalui penerbitan surat teguran terlebih dahulu dan penyeteroran pajak restoran tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan tarif peraturan wali kota. Akibatnya, pendapatan dari pajak restoran belum dapat diperoleh secara optimal.

Atas permasalahan tersebut Kepala DPPKAD akan memperbaiki kelemahan yang ada.

BPK merekomendasi kepada Walikota Tanjungpinang agar memerintahkan Kepala DPPKAD untuk:

- Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta pihak terkait lainnya dalam penyusunan dan penetapan ketentuan yang diperlukan.
- Menginstruksikan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran, Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan, dan Kepala Seksi Penagihan, Pembukuan, dan Pemeriksaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

PKB dan BBNKB

PEMERIKSAAN atas pengelolaan PKB dan BBNKB bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Kepulauan Riau TA 2014-triwulan III 2015 dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan simpulan atas pengelolaan PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Kepulauan Riau.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Pemprov Kepulauan Riau cukup efektif dalam mengelola PKB dan BBNKB Riau ditunjukkan dengan telah dilakukannya berbagai upaya antara lain:

- Peraturan Daerah tentang PKB dan BBNKB telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang terkait.
- Pelaksanaan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB telah memiliki *front office* dan *back office* yang memadai, informasi pelayanan yang mudah diketahui masyarakat, dan kepastian biaya pelayanan sesuai ketentuan.
- Pelaporan, monitoring, dan evaluasi telah diselenggarakan secara berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Target peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB telah diusulkan, tetapi belum sepenuhnya didukung penghitungan dan perencanaan program intensifikasi dan ekstensifikasi yang memadai. Hal ini mengakibatkan usulan target penerimaan PKB dan BBNKB TA 2015 tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berisiko tidak tercapai.
- Proses pengelolaan PKB dan BBNKB pada Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Kepulauan Riau belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, antara lain nilai jual kendaraan bermotor yang diinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SIPAMOR) belum

sesuai dengan peraturan Gubernur. Hal ini mengakibatkan timbulnya potensi penerimaan PKB dan BBNKB tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak tercapai secara maksimal.

- Sistem aplikasi belum sepenuhnya mendukung pengelolaan PKB dan BBNKB, di antaranya data dalam SIPAMOR masih belum akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal ini mengakibatkan pelayanan dilaksanakan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan perbaikan terkait kelemahan yang ada.

BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk:

- Memerintahkan seluruh Kepala Bidang dan Kepala KPPD dalam penyusunan KAK kegiatan program intensifikasi dan ekstensifikasi PKB dan BBNKB untuk membuat dan mendokumentasikan pertimbangan hasil kegiatan yang dilaksanakan tahun sebelumnya, serta merumuskan tujuan kegiatan yang lebih jelas agar dapat dibedakan hasilnya dengan hasil dari kegiatan lain.
- Memerintahkan Kepala Bidang Pajak untuk menyesuaikan SOP Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan hasil identifikasi dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan PT Jasa Raharja agar SOP SAMSAT yang telah direvisi dapat disepakati bersama.
- Memerintahkan Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Pendapatan menyusun SOP tentang verifikasi data dalam aplikasi SIPAMOR untuk menjamin data telah lengkap, akurat dan mutakhir.

PBB-P2 dan BPHTB

MENURUT Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah nilai jual objek pajak (NJOP) yaitu perkiraan nilai pasar wajar atas tanah dan atau bangunan. UU No. 28 Tahun 2009 juga mengamanatkan selambat-lambatnya Tahun 2014 pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya dilakukan oleh kabupaten/kota.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas PBB-P2 dan BPHTB TA 2014 dan semester I TA 2015 pada Pemkab Lampung Timur dan Pemkab Lampung Selatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pendataan objek dan piutang PBB-P2 dan penelitian surat setoran pajak

daerah (SSPD) serta verifikasi pembayaran dan pelaporan BPHTB. Adapun, pemeriksaan kinerja PBB-P2 pada Pemkab Kotawaringin Barat, Pemkab Kotawaringin Timur, dan Pemkot Banjarmasin bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pendataan, pemutakhiran data dan penagihan PBB-P2.

BPK menyimpulkan pada umumnya kegiatan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB belum efektif. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- Pendataan dan pemutakhiran basis data PBB-P2 belum dilaksanakan secara memadai pada seluruh objek pemeriksaan antara lain koordinasi secara berkala atas pendataan, pendaftaran maupun pemutakhiran data objek PBB-P2 belum dilakukan dan data objek dan subjek PBB-P2 belum seluruhnya lengkap, andal, mutakhir, serta belum diverifikasi dan divalidasi. Hal ini mengakibatkan potensi penerimaan PBB-P2 tidak dapat direalisasikan secara optimal.
- Pengelolaan SSPD BPHTB atas pemindahan hak atas tanah dan bangunan belum memadai pada Pemkab Lampung Selatan, di antaranya penelitian SSPD BPHTB tidak sesuai dengan prosedur, misalnya terdapat SSPD BPHTB yang tidak diisi lengkap namun tetap ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil belum pernah dilakukan. Hal tersebut berakibat Dipenda tidak dapat menyusun laporan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan secara lengkap dan akurat.
- Verifikasi pembayaran BPHTB belum dilaksanakan secara memadai pada Pemkab Lampung Timur, antara lain koordinasi internal antara Bidang Penagihan dan Administrasi Penerimaan selaku pihak yang melakukan verifikasi dengan Bidang Pendataan dan Penetapan selaku pihak yang menyediakan basis data tidak pernah dilakukan, dan dokumen-dokumen terkait verifikasi yang telah dilakukan tidak diarsipkan dengan baik. Hal ini mengakibatkan potensi tidak diterimanya BPHTB dari SSPD yang telah diterbitkan.

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah akan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada:

- Bupati dan Wali Kota agar melakukan koordinasi secara berkala dengan KPP dan BPN serta melakukan pengawasan pemutakhiran data PBB-P2 secara optimal.

- Bupati Lampung Selatan agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan prosedur pemungutan BPHTB serta menyusun tata cara penelitian lapangan dan menganggarkan biaya penelitian lapangan.
- Bupati Lampung Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun dan mengajukan rancangan POS mengenai tata cara verifikasi pembayaran BPHTB.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pajak daerah pada 7 objek pemeriksaan mengungkapkan 75 temuan yang memuat 82 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,81 miliar.

Manajemen Aset

DALAM rangka pengamanan barang daerah, perlu dilakukan penetapan administrasi pengelolaan secara profesional. Untuk itu, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas penatausahaan aset TA 2014 dan semester I TA 2015 yang bertujuan menilai efektivitas penatausahaan aset pada 4 entitas, yaitu Pemkab Poso, Pemkot Bekasi, Pemkab Karawang dan Pemkab Cirebon.

Pemkab Poso

PEMERIKSAAN bertujuan untuk menilai apakah proses penatausahaan dan pengamanan aset tetap pada Pemkab Poso pada TA 2014-semester I 2015 telah dilakukan secara efektif. Hasil pemeriksaan menyimpulkan proses penatausahaan dan pengamanan aset tetap Pemkab Poso belum efektif.

Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

- Tidak ada mekanisme atau prosedur penatausahaan dan pengamanan aset tetap yang memadai. Hal ini disebabkan belum lengkapnya pedoman teknis penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan belum adanya SOP penatausahaan dan pengamanan aset tetap. Akibatnya, pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan aset tidak berjalan efektif dan menghambat tertib administrasi pengelolaan BMD.
- Pelaksanaan kegiatan pelaporan aset tetap belum sepenuhnya memadai. Hal ini disebabkan pelaporan BMD yang belum dilakukan secara periodik dan tepat waktu. Akibatnya, informasi yang tersedia tidak dapat diandalkan sebagai bahan pertimbangan kebijakan.
- Pejabat pengelola BMD belum melakukan pemantauan atas kegiatan penatausahaan aset tetap. Hal ini disebabkan tidak adanya laporan

hasil pemantauan atas kegiatan penatausahaan dan pengamanan aset. Akibatnya, tujuan pemantauan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan aset tetap tidak tercapai.

Atas permasalahan tersebut Bupati Poso menyatakan akan memperbaiki kelemahan yang ada.

BPK merekomendasikan Bupati Poso melalui Sekretaris Daerah supaya melakukan pengelolaan dan pengamanan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemkab Cirebon, Pemkab Karawang, dan Pemkot Bekasi

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan BMD yang menjadi pengecualian. Hasil pemeriksaan menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh ketiga pemda tersebut belum efektif. Secara umum, permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

- Belum ada kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam penatausahaan BMD yang memadai. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan BMD tidak berjalan efektif dan menghambat tertib administrasi pengelolaan BMD.
- Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terkait dengan pengelolaan BMD juga belum memadai. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya kegiatan pencatatan dan inventarisasi BMD.

Atas permasalahan tersebut, Pemda akan berupaya memperbaiki kelemahan dalam melakukan pengelolaan dan pengamanan BMD.

BPK memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Bekasi, Bupati Karawang dan Bupati Cirebon untuk segera memperbaiki proses penatausahaan dan pengamanan aset tetap di lingkungannya. Hal itu dilakukan antara lain dengan:

- Merencanakan dan menyusun aturan pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah terkait dengan pengamanan BMD dan menyusun SOP terkait penatausahaan dan pengamanan BMD.
- Meningkatkan kompetensi SDM pengelola BMD.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan manajemen aset pada 4 objek pemeriksaan mengungkapkan 34 temuan yang memuat 34 permasalahan ketidakefektifan.

Efektivitas Audit dan Reviu Inspektorat

BERDASARKAN Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008 jo Perda Nomor 2 Tahun 2014, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap Inspektorat Kepulauan Sangihe TA 2014 dan semester I TA 2015 untuk menilai efektivitas fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Inspektorat Kepulauan Sangihe telah memiliki kemandirian dalam memilih maupun pengawasan atas seluruh SKPD di Kepulauan Sangihe dan telah memiliki pejabat fungsional melalui penyesuaian yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Namun, secara umum hasil pemeriksaan menyimpulkan pemeriksaan atas efektivitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe kurang efektif. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain:

- Regulasi dan Kebijakan Kegiatan Audit dan Reviu LK.
 - ▶ Regulasi tentang struktur organisasi Inspektorat belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksesuaian antara Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang uraian tugas inspektorat dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan belum optimal.
 - ▶ Peraturan pelaksanaan audit dan reviu laporan keuangan belum memadai karena belum ada SOP yang memadai dan standar audit yang dijadikan sebagai pedoman. Akibatnya, kualitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan tidak memadai.
- Struktur dan Tata Kelola Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Uraian tugas inspektorat, pedoman kerja, jumlah dan kompetensi tenaga pengawas serta infrastruktur penunjang dan pendukung untuk menjalankan fungsi audit dan reviu laporan keuangan belum memadai. Akibatnya, kegiatan reviu laporan keuangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, laporan hasil pengawasan belum sepenuhnya mencapai tujuan audit dan kualitas kegiatan audit dan reviu laporan keuangan juga tidak optimal.

- Audit dan Reviu LK

- ▶ Rencana audit dan reviu LK tahunan yang komprehensif belum disusun. Permasalahan utamanya adalah rencana kegiatan audit dan reviu tidak mengacu kepada renstra 5 tahunan dan kebijakan pengawasan nasional serta standar atau pedoman audit. Akibatnya, perencanaan yang disusun tidak dapat mendukung kebijakan pengawasan daerah dan tidak mempertimbangkan kondisi senyatanya dalam menunjang pelaksanaan audit dan reviu LK.
- ▶ Inspektorat belum melakukan upaya tindak lanjut atas temuan yang berindikasi merugikan keuangan daerah. Inspektorat belum melaporkan temuan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan memantau penyelesaiannya. Akibatnya, temuan berindikasi kerugian keuangan daerah dapat berulang karena tidak ada efek jera bagi pelakunya.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Sangihe melalui Inspektorat akan melakukan pembenahan atas permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Sangihe antara lain agar:

- Meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun dan menetapkan standar kegiatan audit dan reviu laporan keuangan serta memerintahkan inspektur untuk menyusun dan menetapkan kelengkapan peraturan pelaksanaan kegiatan audit dan reviu laporan keuangan.
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang tugas dan fungsi inspektorat, memenuhi kebutuhan tenaga pengawas baik kuantitas maupun kualitas dan memberikan dukungan anggaran bagi tersedianya sarana dan prasarana.
- Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Program Kerja Pengawasan Tahunan serta SOP Perencanaan Reviu LK.
- Menyusun SOP tindak lanjut dan memerintahkan Inspektur untuk berkoordinasi dengan APH mengenai temuan audit yang terindikasi merugikan keuangan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas Inspektorat Kepulauan Sangihe mengungkapkan 24 temuan yang memuat 24 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan anggaran dan keuangan RSUD Haji Makassar tahun anggaran 2014 dan semester I tahun 2015 bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan anggaran dan keuangannya, melalui penilaian efektivitas terhadap penyusunan rencana strategis, perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahunan, dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahunan dan pencapaian atas rencana strategis.

Hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan anggaran dan keuangan belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan rumah sakit. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa permasalahan yang dihadapi RSUD Haji Makassar. Permasalahan tersebut antara lain:

- Perencanaan kegiatan dan anggaran pendapatan serta belanja tahunan kurang memadai.

Hal ini mengakibatkan tidak adanya pedoman yang memadai bagi Kepala Unit Kerja untuk merumuskan usulan anggaran, dan bagi Kepala Bidang Program RSUD Haji Makassar untuk mengevaluasi usulan anggaran tersebut. Selain itu, kebijakan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) juga tidak dipahami, sehingga kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan kegiatannya tidak mengacu pada RBA rumah sakit. Akibat lainnya, fungsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen perencanaan anggaran juga tidak memadai.

- Pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahunan belum diselenggarakan secara memadai.

Hal ini mengakibatkan fungsi DPA/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebagai dokumen perencanaan tidak optimal, sehingga pengelolaan anggaran dan kegiatan RSUD menjadi tidak optimal. Selain itu, terbuka peluang penyalahgunaan anggaran kegiatan dan kesalahan perhitungan biaya jasa pelayanan. Akibat lainnya, pengembangan kompetensi pegawai dan sarana prasarana RSUD Haji Makassar tidak memiliki arah yang jelas dan terukur. Manajemen RSUD Haji Makassar juga belum mengidentifikasi permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan anggaran tersebut.

Terhadap permasalahan ini, Direktur RSUD Haji Makassar menyatakan akan melakukan langkah-langkah perbaikan.

BPK merekomendasikan kepada Direktur RSUD Haji Makassar agar:

- Memperbaiki proses perencanaan kegiatan dan penganggaran pendapatan serta belanja dengan melakukan rapat kerja anggaran dan sosialisasi anggaran yang ditetapkan dalam RBA.
- Memperbaiki tata tertib dalam mengadministrasikan dokumen usulan penganggaran dan mengevaluasi proses penganggaran dokumen RBA RSUD Haji Makassar.
- Menginstruksikan unit-unit pelaksana agar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA dan DPPA yang telah ditetapkan.
- Menetapkan SOP untuk penghitungan jasa pelayanan, serta menyusun rencana jangka panjang untuk pengembangan kompetensi dan sarana prasarana.
- Menetapkan mekanisme formal dalam pembahasan permasalahan pelaksanaan anggaran dan kegiatan dan mengimplementasikan mekanisme tersebut.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan anggaran dan keuangan RSUD Haji Makassar mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp462,25 juta.

Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN pelayanan publik pada 1 objek pemeriksaan yaitu terkait pelayanan perizinan terpadu pada Pemkab Tojo Una-Una. (*Lampiran B no. 346*).

Pelayanan Perizinan Terpadu

MENGHADIRKAN pelayanan publik yang profesional merupakan kewajiban aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan perizinan, Pemkab Tojo Una-Una telah membentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD). KP2TD bertugas menyinergikan sekaligus mengoordinasikan berbagai macam perizinan dalam satu tempat pelayanan terpadu.

BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pelayanan perizinan pada Pemkab Tojo Una-Una TA 2014 dan Semester I TA 2015 untuk menilai keberhasilan kinerja pelayanan perizinan ditinjau dari aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atas kegiatan sosialisasi, pelayanan administrasi, pengujian kelayakan teknis, pelayanan pengaduan, dan pengawasan ketaatan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pelayanan perizinan pada Pemkab Tojo Una-Una kurang efektif dan kurang efisien. Permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Informasi perizinan dan pelayanan perizinan kepada masyarakat sangat terbatas.

KP2TD tidak menganggarkan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan, dan media informasi pelayanan perizinan belum memadai. Informasi yang disajikan dalam brosur dan *website* tidak *update* dan informatif. Akibatnya, informasi yang diterima masyarakat tentang perizinan masih terbatas, sehingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus izin menjadi tidak optimal.

- Administrasi pelayanan perizinan KP2TD pada tahap pemrosesan belum memadai.

Permasalahan pokoknya adalah pelayanan perizinan belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan belum memiliki prosedur operasi standar (*standar operating procedure/ SOP*) yang memadai. Akibatnya, tidak terjaminnya hak setiap warga untuk mendapatkan mutu pelayanan. Selain itu, citra pelayanan perizinan menjadi kurang baik, sehingga menimbulkan keengganan masyarakat mengurus perizinan.

- Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU) belum dapat diandalkan.

SIMYANDU belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai *database* administrasi perizinan. Terdapat aplikasi spesifik yang belum dilaksanakan dalam pengadaannya. Selain itu, juga ada kelemahan dalam aplikasi lainnya. Akibatnya, aplikasi tersebut belum dapat diandalkan dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

- Pemungutan dan penyetoran retribusi izin gangguan tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur penerimaan daerah.

Belum ada pedoman yang menentukan besaran nilai indeks perhitungan biaya retribusi, juga pedoman perhitungan luas tempat usaha. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penerapan rumus perhitungan karena masih mengacu peraturan daerah yang lama, yaitu Perda Nomor 15 tahun 2006. Akibatnya, perhitungan biaya retribusi izin gangguan tidak konsisten dan adil. Pemkab Tojo Una-Una pun kehilangan potensi penerimaan dari warga yang tidak mengurus izin gangguan.

- Pengujian kelayakan teknis lapangan tidak dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh peraturan daerah dan di bawah koordinasi Kepala KP2TD.

Hal tersebut ditunjukkan dengan belum ditetapkannya sistem koordinasi yang terintegrasi dalam tata kerja kelembagaan dan belum dilaksanakannya pelimpahan *database* dan arsip perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait kepada KP2TD secara memadai. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan mudah menjadi sulit tercapai dan kinerja pelayanan perizinan terkait pengujian teknis lapangan menjadi terhambat.

- Penetapan dan pelaksanaan mekanisme pengaduan belum memadai.

Uraian tugas dan fungsi KP2TD tidak secara jelas mengatur fungsi pelayanan pengaduan masyarakat. Selain itu, belum ada SOP pelayanan pengaduan masyarakat dan fasilitas penunjang pelayanan pengaduan belum disosialisasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, antara lain pengaduan masyarakat tidak jelas penyelesaiannya, berpotensi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dapat dimonitor, dan tidak dapat diawasi tindak lanjut penanganannya.

- Pengawasan KP2TD terhadap ketaatan perizinan pelaku usaha tidak optimal.

KP2TD belum menyusun SOP pengawasan ketaatan perizinan, sehingga pelaku usaha tetap beroperasi meski belum meregistrasi/memperpanjang kembali izinnya. Akibatnya, antara lain terdapat potensi pendapatan daerah yang hilang.

Terhadap permasalahan tersebut, Bupati Tojo Una-Una menyatakan akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terpadu.

BPK merekomendasikan Bupati Tojo Una-Una antara lain agar:

- Mendukung pembiayaan untuk kegiatan sosialisasi dan menyediakan sarana dan prasarana informasi yang update dan lebih informatif.
- Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menyusun SOP yang memadai.
- Memerintahkan Kepala KP2TD untuk memperbaiki aplikasi yang ada.
- Membuat peraturan bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, khususnya pedoman penggunaan indeks.

- Bersama jajarannya menjalankan komitmen pelaksanaan fungsi pelayanan perizinan terpadu dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- Mereviu Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2013 dan membentuk Tim Pengaduan dan Pengawasan.
- Meningkatkan pengendalian atas kegiatan usaha dan menertibkan kegiatan usaha tanpa izin melakukan sosialisasi dan menyusun SOP pengawasan.

Hasil pemeriksaan BPK atas Pelayanan Perizinan pada Pemkab Tojo Una-Una mengungkapkan 8 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Bank Pembangunan Daerah

BANK Pembangunan Daerah (BPD) adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian BPD adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efisiensi BPD dan efektivitas program BPD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah tahun 2014-semester I 2015 pada 21 BPD, yaitu BPD 1) Sumatera Barat, 2) Riau Kepri, 3) Sumatera Selatan dan Babel, 4) Bengkulu, 5) Jambi, 6) Lampung, 7) D.I. Yogyakarta, 8) Jawa Timur, 9) Sulawesi Selatan dan Barat, 10) Sulawesi Tengah, 11) Sulawesi Tenggara 12) Sulawesi Utara dan Gorontalo, 13) Kalimantan Selatan, 14) Kalimantan Tengah, 15) Kalimantan Barat, 16) Kalimantan Timur, 17) Bali, 18) Nusa Tenggara Barat, 19) Nusa Tenggara Timur, 20) Maluku-Malut, 21) Papua dan Papua Barat, serta instansi terkait lainnya. Daftar laporan hasil pemeriksaan dapat dilihat pada *Lampiran B* no. 347 s.d. 367.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efisiensi produksi dan operasional BPD, serta menilai efektivitas program BPD, dalam rangka melaksanakan tugas utama meningkatkan perekonomian daerah.

Lingkup pemeriksaan meliputi aspek kuantitas dan kualitas, yakni beban SDM, modal, beban bunga, DPK, dan pinjaman dalam rangka pencapaian efisiensi. Untuk penilaian efektivitas, pemeriksaan meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring atas program BPD dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Aspek Efisiensi

BERDASARKAN analisis *Data Envelopment Analysis Program* (DEAP) atas efisiensi fungsi produksi dan fungsi operasional terhadap 21 BPD menunjukkan hasil sebagai berikut:

● Efisiensi Fungsi Produksi

Terdapat 5 BPD yang telah efisien secara relatif terhadap BPD lainnya, 5 BPD cukup efisien secara relatif terhadap BPD lainnya dan 11 BPD yang tidak/ belum efisien secara relatif terhadap BPD lainnya.

Tabel 2.9 Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Produksi

No	BPD Efisien	BPD Cukup Efisien	BPD Tidak/ Belum Efisien
1	Riau Kepri	Kalimantan Selatan	Sumatera Barat
2	Sulawesi Tengah	Maluku-Malut	Jambi
3	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Nusa Tenggara Timur
4	Kalimantan Timur	Jawa Timur	Nusa Tenggara Barat
5	Papua dan Papua Barat	Bali	Sulawesi Selatan dan Barat
6	-	-	Sulawesi Tenggara
7	-	-	Sumatera Selatan dan Babel
8	-	-	D.I. Yogyakarta
9	-	-	Sulawesi Utara dan Gorontalo
10	-	-	Bengkulu
11	-	-	Lampung

● Efisiensi Fungsi Operasional

Terdapat 10 BPD yang telah efisien secara relatif terhadap BPD lainnya, 6 BPD cukup efisien secara relatif terhadap BPD lainnya dan 5 BPD yang tidak/ belum efisien secara relatif terhadap BPD lainnya.

Tabel 2.10 Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Operasional

No	BPD Efisien	BPD Cukup Efisien	BPD Tidak/ Belum Efisien
1	Kalimantan Tengah	Riau Kepri	Sumatera Barat
2	Jawa Timur	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara dan Gorontalo
3	Jambi	Papua dan Papua Barat	Sumatera Selatan dan Babel
4	Nusa Tenggara Timur	Maluku-Malut	Kalimantan Selatan
5	Lampung	Bengkulu	D.I. Yogyakarta

No	BPD Efisien	BPD Cukup Efisien	BPD Tidak/ Belum Efisien
6	Sulawesi Tenggara	Kalimantan Barat	-
7	Bali	-	-
8	Kalimantan Timur	-	-
9	Sulawesi Selatan dan Barat	-	-
10	Nusa Tenggara Barat	-	-

Hasil pemeriksaan atas aspek kualitatif terkait *input* dan *output* fungsi produksi dan operasional BPD menunjukkan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian dan diperbaiki manajemen BPD guna meningkatkan efisiensinya. Kelemahan itu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

► Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM dalam hal perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan dan monitoring belum dilakukan oleh Direksi dan Komisaris BPD secara memadai. Hal ini mengakibatkan:

- Formasi kebutuhan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- Kenaikan gaji, perolehan *reward* dan jasa produksi yang diterima pegawai belum didasarkan atas kinerja yang diberikan oleh pegawai, sehingga efek motivasi yang ditimbulkan kepada pegawai belum optimal untuk memenuhi target yang ditetapkan.

► Aktivitas Promosi

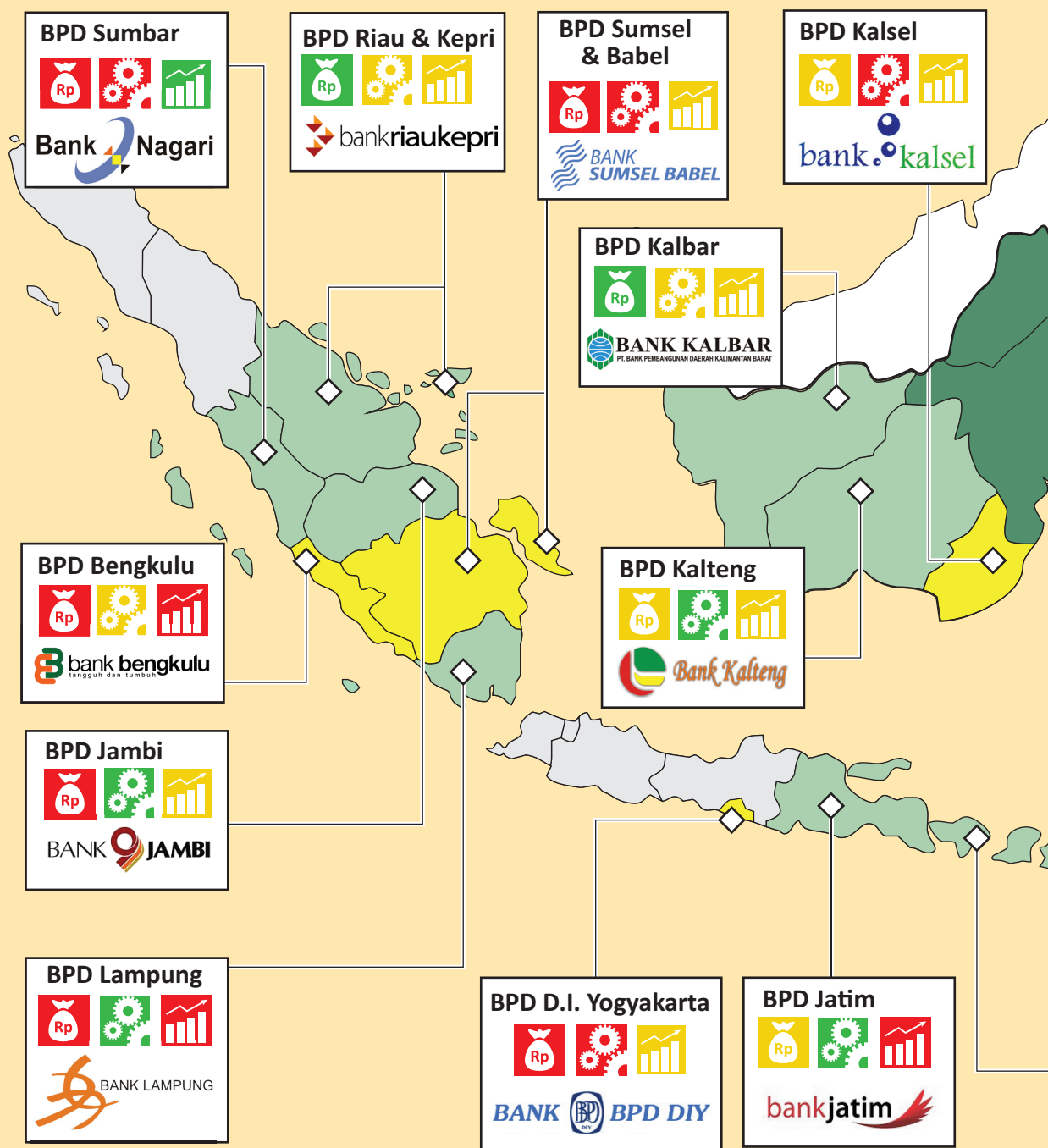
Aktivitas promosi yang dilakukan oleh manajemen BPD belum merespons perkembangan bisnis dan kompetisi yang dinamis. Hal ini mengakibatkan:

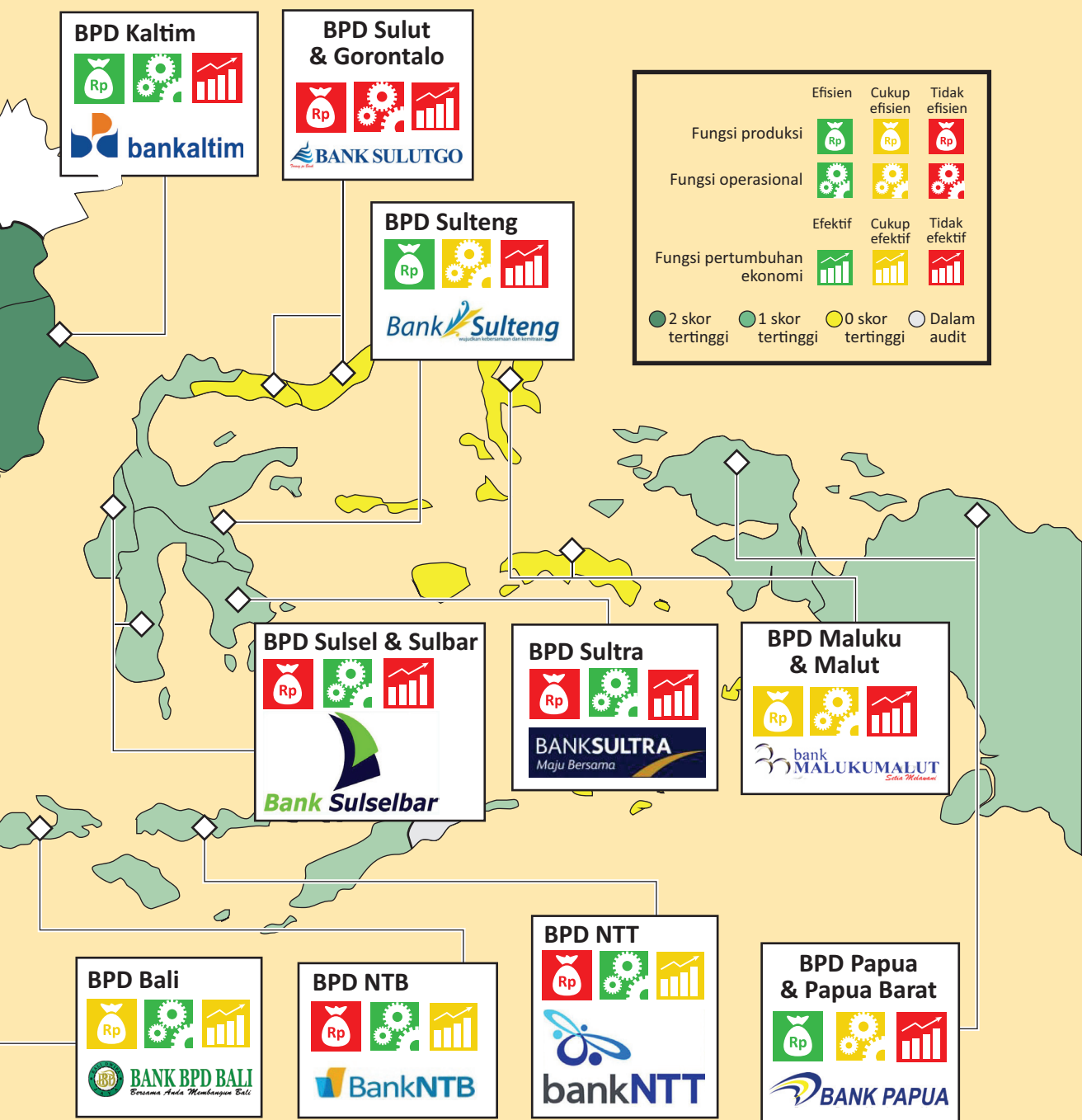
- Aktivitas pemasaran tidak terarah dan kurang mendukung keberhasilan strategi yang telah ditentukan.
- Inefisiensi pengeluaran biaya terkait dengan aktivitas pemasaran, karena kurang terukur dan tidak dapat diperbandingkan dengan keberhasilan BPD untuk meningkatkan penghimpunan DPK dan penyaluran kredit.

► Kualitas Layanan Nasabah

Kualitas layanan yang diberikan manajemen BPD belum memiliki *service level agreement* (SLA) yang memadai untuk transaksi simpanan dan pinjaman, belum memiliki standar layanan nasabah

Peta Efisiensi & Efektivitas Kinerja Bank Pembangunan Daerah





BPD prioritas dan pegawai pemasar (*AO/ sales person/ mantri/ FO*), dan belum optimal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar layanan. Hal ini mengakibatkan:

- Pelayanan kepada nasabah tidak optimal, sesuai dengan kualitas layanan yang diharapkan.
- Tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan tidak dapat diketahui, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah tidak dapat dievaluasi.
- Potensi kehilangan nasabah potensial.

► Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Target penghimpunan dana yang dilakukan manajemen BPD belum berdasarkan potensi kantor cabang, evaluasi atas *performance* produk dan kegiatan pemasaran produk belum memadai, likuiditas DPK BPD sangat bergantung pada deposit inti dan tren komposisi DPK BPD lebih banyak berasal dari deposit dengan suku bunga tinggi. Hal ini mengakibatkan:

- Penghimpunan DPK tidak sesuai dengan target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
- BPD kurang dapat bersaing dalam memperoleh nasabah giro dan tabungan yang merupakan sumber dana murah (*low cost deposit*).
- Beban bunga yang tinggi akan memengaruhi besaran suku dasar bunga kredit (SDBK).

► Struktur Permodalan

Strategi peningkatan modal dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) dan RBB belum memadai dan belum sepenuhnya didukung dalam APBD karena pemerintah daerah sebagai pemegang saham tidak memenuhi komitmen penyetoran modal sesuai dengan hasil RUPS, walaupun dividen yang diterima sudah melampaui jumlah modal disetor. Hal ini mengakibatkan:

- Keterbatasan BPD dalam melakukan ekspansi usaha untuk melaksanakan fungsi perbankan.

- Sulit bersaing dengan bank umum lain yang permodalannya lebih kuat.

Aspek Efektivitas

BPK menyimpulkan dari 21 BPD yang diperiksa, hanya 1 BPD yang telah efektif yaitu BPD Sumatera Barat, 10 BPD cukup efektif dan 10 BPD tidak/ belum efektif dalam mendorong perekonomian daerah.

Tabel 2.11 Penilaian terhadap BPD Menurut Efektivitas Ekonomi

No	BPD Efektif	BPD Cukup Efektif	BPD Tidak/ Belum Efektif
1	Sumatera Barat	Bali	Bengkulu
2	-	Kalimantan Barat	Sulawesi Utara dan Gorontalo
3	-	Sumatera Selatan dan Babel	Lampung
4	-	D.I. Yogyakarta	Jawa Timur
5	-	Jambi	Kalimantan Timur
6	-	Nusa Tenggara Barat	Sulawesi Selatan dan Barat
7	-	Riau Kepri	Sulawesi Tenggara
8	-	Kalimantan Selatan	Maluku - Malut
9	-	Nusa Tenggara Timur	Papua dan Papua Barat
10	-	Kalimantan Tengah	Sulawesi Tengah

Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang perlu mendapatkan perhatian dan diperbaiki manajemen BPD guna meningkatkan perannya mendorong perekonomian daerah. Kelemahan itu diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- **Pengelolaan Rekening Kas Daerah, BLUD dan BUMD**

Keikutsertaan BPD dalam penyimpanan rekening kas daerah, BLUD, dan BUMD belum optimal. Hal ini mengakibatkan:

- ▶ Fungsi BPD sebagai pemegang kas daerah dan atau menyimpan uang daerah tidak optimal.
- ▶ BPD kehilangan potensi memperoleh likuiditas dari DPK pemerintah daerah/ BLUD/ BUMD beserta bisnis/ produk turunannya.

- **Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Segmen Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah**

- ▶ Direksi dan komisaris BPD belum menetapkan strategi perencanaan kebutuhan untuk pengembangan dan penguatan segmen UMKM.

- ▶ Upaya koordinasi dan kerja sama untuk meningkatkan potensi UMKM dengan pihak-pihak terkait juga belum optimal.
- ▶ SOP tentang pengembangan dan penguatan kapasitas segmen ekonomi mikro, kecil dan menengah belum ditetapkan, sementara KPI yang terkait dengan pengelolaan pencapaian kinerja pengembangan dan penguatan kapasitas sektor ekonomi mikro dan sektor produktif lainnya belum memadai.

Hal tersebut mengakibatkan, BPD belum turut serta berperan aktif dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM.

- Peran BPD dalam pelaksanaan/ realisasi belanja modal daerah

Direksi dan komisaris BPD belum menetapkan kebijakan dan strategi, serta belum mengalokasikan sumber dayanya untuk ikut serta membiayai belanja modal pemda. Hal ini mengakibatkan, BPD belum turut serta berperan meningkatkan perekonomian daerah melalui belanja modal daerah.

Terhadap permasalahan – permasalahan tersebut, para Direksi BPD akan melakukan upaya untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi BPD antara lain untuk:

- Menyusun analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai dan memenuhinya serta melakukan pelatihan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan rencana pengembangan perusahaan sesuai rencana perusahaan (*corporate plan*).
- Melakukan pengukuran kinerja pegawai dengan target yang sejalan (*in line*) dengan rencana pengembangan perusahaan sesuai *corporate plan* serta menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai komponen pemberian *reward*.
- Menyusun dan menetapkan program pemasaran dan standar layanan, termasuk standar waktu pelayanan yang terukur dan *in line* dengan rencana pengembangan perusahaan sesuai dengan *corporate plan* serta mensosialisasikannya kepada unit-unit terkait.
- Melakukan penyetoran tambahan modal sesuai dengan keputusan RUPS terkait kebutuhan permodalan bank, dan mencari alternatif pemenuhan modal dari sumber lain apabila setoran modal dari pemegang saham tidak dapat terpenuhi.

- Menyusun/ menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pengelolaan aktivitas penyimpanan rekening kas daerah, BUMD, dan BLUD.
- Menyusun/ menetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan aktivitas pembiayaan pada UMKM serta aktivitas pembiayaan/ pemberian jaminan belanja modal pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi BPD dan efektivitas program BPD dalam rangka peningkatan perekonomian daerah mengungkapkan 314 temuan yang mengungkap 3 permasalahan ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan senilai Rp7,88 miliar, 52 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp53,51 miliar dan 271 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp83,47 miliar. Selain itu terdapat 3 permasalahan kerugian senilai Rp3,02 miliar, 2 permasalahan potensi kerugian senilai Rp163,54 miliar, 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp1,20 miliar, dan 2 permasalahan kelemahan SPI.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan dimensi dalam RPJMN 2015-2019 meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait: (1) Pendidikan, (2) Pemerataan antarwilayah; serta (3) Tata kelola dan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah. Pemeriksaan dilakukan atas 280 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan 16 objek pemeriksaan pada 18 BUMD. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 2.494 temuan yang memuat 3.570 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1.132 kelemahan sistem pengendalian intern dan 2.438 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,96 triliun.

Pendidikan

PADA semester II tahun 2015 BPK telah memeriksa 36 objek pemeriksaan terkait pendidikan khususnya terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban tunjangan guru pada pemerintah daerah.

Tunjangan Guru

SEBAGAI pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya itu, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan

kesejahteraan sosial.

Terkait dengan hal tersebut, PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, mengatur komponen biaya personalia satuan pendidikan selain gaji pokok bagi guru antara lain adalah tunjangan fungsional guru (TFG) dan tunjangan profesi guru (TPG).

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dana tambahan penghasilan (DTP) guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) adalah penambahan penghasilan bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi dan masih aktif melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Adapun, program subsidi tunjangan fungsional guru adalah program pemberian subsidi kepada guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Tahun Anggaran (TA) 2013 dan semester I 2014 pada 36 objek pemeriksaan di 36 pemda, di antaranya Pemkab Deli Serdang, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Timor Tengah Selatan, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Tual. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no. 368 s.d 403*.

Tabel 2.12 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan & Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	9
2	Jawa	9
3	Kalimantan	6
4	Nusa Tenggara & Bali	6
5	Sulawesi	3
6	Maluku	3
Jumlah		36

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Guru TA 2013 sampai dengan semester I 2014 bertujuan untuk menilai apakah kegiatan penyaluran tunjangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penganggaran, penetapan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan rancangan dan implementasi SPI atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG, dan DTP Guru TA 2013 sampai dengan semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota belum mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Guru TA 2013 sampai dengan semester I 2014, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Guru TA 2013-semester I 2014 adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, SOP tidak ditaati, SOP belum disusun, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	103	31
Keterlambatan penyaluran TP dan DTP guru PNSD dari rekening kas daerah kepada guru minimal Rp46,70 miliar.	--	Pemkab Lahat
Terdapat kekurangan pembayaran TP guru minimal Rp22,16 miliar karena belum dilakukan penyesuaian gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah.	--	Pemkot Medan
Jumlah TP guru TA 2013 yang diterima rekening kas umum daerah lebih kecil dari jumlah yang ditetapkan/ dialokasikan dalam PMK sebesar Rp675,26 juta.	--	Pemkab Kutai Kartanegara

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP tidak ditaati	44	18
Terdapat keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan keterlambatan Bagian Keuangan Dinas Pendidikan menerima SKTP yang mengakibatkan terlambatnya pencairan TP yang akan disalurkan kepada guru penerima.	--	Pemkab Timor Tengah Selatan
Dinas Pendidikan kurang optimal melakukan verifikasi data guru calon penerima tunjangan profesi yang akan diusulkan kepada Kemendikbud untuk diterbitkan SKTP/ Surat Keputusan Tunjangan Fungsional (SKTF), sehingga terdapat guru yang tidak memenuhi persyaratan/ tidak diusulkan tetapi diterbitkan SKTP/ SKTF.	--	Pemkot Banjarbaru
Pemerintah daerah tidak melaporkan realisasi pembayaran atau penyaluran TP setiap triwulan secara tepat waktu serta tidak membuat daftar perincian penerima tambahan penghasilan, khususnya yang langsung disalurkan melalui sekolah-sekolah.	--	Pemkot Kupang
SOP belum disusun	32	26
SOP mengenai monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran TP dan DTP belum disusun.	--	Pemkab Bandung
SOP tentang tata cara penyaluran tunjangan profesi guru yang antara lain memuat tahapan pengajuan usulan penerima tunjangan dan proses verifikasi dan validasi data, beserta batas waktu penyaluran belum disusun.	--	Pemkab Tangerang
Lain-lain kelemahan SPI	32	21
Penganggaran TP dan DTP pada APBD TA 2013 dan 2014 belum mengacu pada besaran dana yang dibutuhkan dengan memperhatikan jumlah guru penerima.	--	Pemkot Samarinda
Pemkot Palembang menyampaikan laporan realisasi penyaluran TP dan DTP guru PNSD TA 2013 dan semester I 2014 melewati batas waktu yang diatur dalam PMK, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga belum menyusun dan melaporkan laporan realisasi penyaluran TP dan DTP guru PNSD semester I 2014 sesuai dengan juknis.	--	Pemkot Palembang

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Guru TA 2013-semester I 2014 adalah belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan,

penyimpangan peraturan bidang tertentu, pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	65	13,29	32
Pembayaran TPG kepada guru yang tidak berhak karena guru tersebut sedang cuti di luar cuti tahunan, tugas belajar, telah pensiun, meninggal, dan menerima TPG ganda. Selain itu, terdapat guru PNSD yang menerima TPG juga menerima DTP.		1,93	Pemkot Tangerang
Pembayaran TPG tidak sesuai dengan revisi petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi tahun 2013 dan 2014, yaitu memperhitungkan kenaikan gaji yang disebabkan oleh kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat atau golongan yang terbit pada tahun berjalan. Kemudian terdapat guru yang telah menerima TPG masih mendapatkan DTP.		1,49	Pemkab Deli Serdang
Pembayaran TPG kepada guru yang tidak berhak, karena tidak memiliki sertifikat, sudah pensiun, cuti di luar cuti tahunan, tugas belajar, dan menerima TPG ganda. Selain itu, terdapat guru PNSD menerima TPG juga menerima DTP/ TFG.		1,15	Pemkab Tangerang
TPG PNSD dibayarkan kepada guru yang tidak berhak (cuti di luar cuti tahunan, meninggal dan tidak memenuhi jam mengajar) serta DTP PNSD diterima oleh guru penerima TPG. Selain itu, besaran gaji pokok yang digunakan sebagai dasar pembayaran TPG PNSD lebih tinggi dari <i>database</i> data gaji pokok di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.		1,14	Pemkab Bandung
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	32	--	12
TPG atas SKTP yang telah diterbitkan tahun 2013 belum dapat dibayarkan sesuai dengan periode pembayarannya karena gangguan jaringan internet.		--	Pemkot Tual
Terdapat guru yang layak menerima TPG dan telah diusulkan mendapatkan TPG tetapi tidak tercantum dalam SKTP. Kemudian terdapat rincian data atas 26 SKTP tahun 2013 dan 22 SKTP tahun 2014 tidak valid seperti kesalahan lokasi dan nominal gaji pokok.		--	Pemkab Kupang
Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	7	0,11	7
Bendahara Pengeluaran kurang memotong PPh Pasal 21 atas penyaluran TPG dan DTP.		0,07	Pemkab Langkat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	20	1,71	11
Bendahara Pengeluaran terlambat melakukan penyeteroran PPh Pasal 21 atas penyaluran TPG dan DTP sebesar Rp274,26 juta.		--	Pemkab Timor Tengah Selatan
Sisa kelebihan pencairan penyaluran TPG belum disetorkan kembali ke kas daerah dan masih tersimpan di brankas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (PPO).		--	Pemkot Kupang

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Guru PNSD terlambat menerima haknya dan berisiko terjadi penyalahgunaan dana TPG dan DTP Guru.
- Kekurangan pembayaran atas TPG yang belum memperhatikan PP Nomor 22 Tahun 2013 dan PP Nomor 34 Tahun 2014 terkait penyesuaian gaji pokok.
- Risiko terbayarnya tunjangan profesi dan tunjangan fungsional kepada guru yang tidak memenuhi persyaratan.
- Kelebihan pembayaran TPG, TFG dan DTP Guru yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Kepala Dinas PPO kurang cermat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TPG, TFG dan DTP Guru.
- Tim pengelola/ tim verifikasi kurang cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima TPG dan TFG.
- Dinas PPO belum memiliki pedoman yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TPG dan TFG.
- Dinas PPO kurang berkoordinasi dengan bagian anggaran DPKAD dalam penyusunan anggaran.
- Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran lalai melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Atas permasalahan tersebut pada umumnya entitas akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyaluran TPG dan TFG, menyusun pedoman atau peraturan internal yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TPG dan TFG.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk memerintahkan Kepala Dinas PPO agar:

- Lebih cermat dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran TPG dan TFG, termasuk verifikasi dan validasi data guru calon penerima tunjangan.
- Menegur tim pengelola/ tim verifikasi agar cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima TPG dan TFG.
- Menyusun pedoman yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi data serta pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran TPG dan TFG.
- Meningkatkan koordinasi dengan BPKAD dalam proses penganggaran TPG dan DTP Guru.

- Menverifikasi data guru yang telah menerima tunjangan dan selanjutnya memperhitungkan kelebihan pembayaran baik TPG dan DTP pada periode pembayaran berikutnya.
- Menarik kelebihan pembayaran atas TPG yang diterima oleh guru yang telah pensiun, meninggal, dan ganda.
- Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Subbagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya.
- Berkoordinasi dengan kanwil Ditjen Pajak atau kantor pelayanan pajak setempat terkait adanya kekurangan dan kelebihan potong pajak penghasilan TPG.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban TPG, TFG dan DTP Guru pada 36 pemda mengungkapkan 289 temuan yang memuat 335 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 211 kelemahan sistem pengendalian intern dan 124 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,12 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti masalah ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyertor ke kas negara/daerah senilai Rp769,94 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban TP, TF dan DTP guru pada pemda disajikan selengkapnya pada *Lampiran F.1 dan F.2*.

Pemerataan Antarwilayah

PADA Semester II Tahun 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 8 objek pemeriksaan terkait pemerataan antarwilayah khususnya terkait dana otonomi khusus pada 8 pemda di wilayah Papua dan Papua Barat.

Dana Otonomi Khusus

OTONOMI Khusus (Otsus) adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemerintah akan mengalokasikan Dana Otsus

yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai memperoleh Dana Otsus pada 2002.

Otsus bagi Provinsi Papua Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Peraturan ini kemudian diundangkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Pemprov Papua Barat mulai memperoleh Dana Otsus pada tahun 2008.

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus pada 8 Pemda di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu Pemprov Papua, Pemprov Papua Barat, Pemkab Jayapura, Pemkab Keerom, Pemkab Mimika, Pemkab Nabire, Pemkab Fakfak dan Pemkot Sorong. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no. 404 s.d 411*.

Tabel 2.15 Sebaran Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus

Wilayah	Jumlah Pemda yang diperiksa
1. Provinsi Papua	5
2. Provinsi Papua Barat	3
Jumlah	8

Pemeriksaan atas pengelolaan Dana Otsus bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, apakah kebijakan yang ditetapkan serta perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan monitoring Dana Otsus telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kebijakan, sistem pengendalian intern serta pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otsus belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai dan sesuai dengan ketentuan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terjadi dalam pengelolaan Dana Otsus. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam dalam pengelolaan Dana Otsus antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum disusun, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.16 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	16	6
Pemda belum sepenuhnya memiliki perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur arah, target dan indikator dalam rangka tercapainya penyelenggaraan otonomi khusus.		Pemprov Papua
Regulasi dan kebijakan yang disusun belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan, di antaranya pemda baru menyusun 1 Perdasus dari 31 Perdasus yang harus disusun, serta kebijakan penganggaran belum didukung dengan rencana definitif dari masing-masing SKPD dan tidak mengacu sepenuhnya pada UU otsus.		Pemprov Papua Barat
Penyusunan rencana definitif penggunaan Dana Otsus belum mengacu pada pedoman, sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan pedoman pengelolaan otsus.		Pemkab Mimika
SOP belum disusun	13	5
Perdasus yang mengatur mekanisme pembagian alokasi Dana Otsus untuk setiap kabupaten/kota belum disusun.		Pemprov Papua Barat
Kebijakan dan mekanisme yang jelas dalam pengembangan sumber daya manusia terkait bantuan pendidikan atau beasiswa belum disusun.		Pemkab Mimika
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	8	5
Dana Otsus digunakan untuk pembentukan dana cadangan dalam bentuk deposito dan penyertaan modal ke perusahaan daerah.		Pemprov Papua
Besaran alokasi dana PNPM Mandiri Rencana Strategi Pemberdayaan Kampung (RESPEK) per distrik/kelurahan/ kampung ditetapkan sama, dan tidak mengacu pada SK Gubernur Papua Barat yang mengatur alokasi harus berdasarkan indikator jumlah penduduk, lokasi dan kondisi geografis.		Pemprov Papua Barat

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain kelemahan SPI	7	5
Pemkab Nabire belum mempedomani prinsip-prinsip, arah dan kebijakan penggunaan dana otonomi khusus yang telah ditetapkan dalam pedoman pengelolaan dana Otsus Provinsi Papua.		Pemkab Nabire
Pemprov Papua belum melakukan monitoring penggunaan Dana Otsus dan tidak menganalisa laporan kinerja yang disampaikan Pemkab/Pemkot.		Pemprov Papua

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Dana Otsus antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.17 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	11	20,21	4
Kekurangan volume pekerjaan/barang atas pelaksanaan pekerjaan, di antaranya pembangunan pengamanan dan pengendalian abrasi pantai Raise serta pembangunan gedung kantor MRP.		9,20	Pemprov Papua Barat
Kekurangan volume atas pekerjaan pembangunan infrastruktur, peningkatan jalan lingkungan serta pengadaan obat.		10,70	Pemprov Papua
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	6	3,46	4
Kelebihan pembayaran biaya personil dan nonpersonil pada kontrak jasa konsultan, serta adanya pembayaran ganda atas tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung.		2,31	Pemprov Papua Barat
Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembinaan siswa unggul dan terdapat pembayaran <i>fee</i> untuk penggunaan nama perusahaan dalam paket pengadaan obat-obatan, sehingga membebani keuangan daerah.		1,11	Pemprov Papua

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	11	--	7
Pengeluaran untuk kegiatan penyaluran dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3), kegiatan pentas seni budaya dan pengelolaan asrama siswa dan mahasiswa tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai.		--	Pemkab Keerom
Pembayaran biaya personil dan nonpersonil pada kontrak jasa konsultan tidak sesuai ketentuan.		--	Pemkab Fakfak
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	42	588,26	7
Saldo dana PNPM Mandiri RESPEK yang dikelola oleh Bank Papua belum dikembalikan ke kas daerah, dan terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga dan potensi kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan jembatan.		584,75	Pemprov Papua
Kerugian daerah disebabkan karena rekanan tidak menyelesaikan kontrak dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan yang belum dipungut.		1,10	Pemprov Papua Barat
Pemborosan keuangan daerah dan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut.		1,66	Pemkab Fakfak

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Alokasi dan pengelolaan Dana Otsus yang tidak sesuai ketentuan akan memperlambat dan menghambat tujuan pencapaian kesejahteraan rakyat di wilayah Papua dan Papua Barat.
- Kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga akan menimbulkan kerugian bagi daerah.
- Penerimaan daerah yang belum dipungut akan mengurangi perolehan pendapatan daerah untuk dimanfaatkan.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Kepala Daerah belum menyusun dan menetapkan perangkat aturan tentang pengelolaan Dana Otsus secara memadai.
- Perencanaan penggunaan Dana Otsus belum memadai.

- Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang dibiayai dari Dana Otsus belum optimal.

Pemerintah Daerah secara umum akan meningkatkan koordinasi antara SKPD pengelola Otsus dengan koordinator pengendali di daerah dan pemerintah provinsi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dana otsus.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar:

- Menyusun perencanaan dan kebijakan penggunaan Dana Otsus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas kelebihan pembayaran dan/atau denda keterlambatan pekerjaan serta menyetorkan ke kas daerah.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Dana Otsus.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan dana otonomi khusus pada 8 pelda mengungkapkan 66 temuan yang terdiri atas 114 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 44 kelemahan sistem pengendalian intern dan 70 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp611,94 miliar.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah senilai Rp2,22 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas dana otonomi khusus dapat dilihat pada *Lampiran F.3 dan F.4*.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA Semester II Tahun 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan atas 238 objek pemeriksaan terkait tata kelola dan reformasi birokrasi khususnya terkait reformasi keuangan daerah.

Reformasi Keuangan Daerah

HASIL pemeriksaan terkait reformasi keuangan daerah mencakup 3 objek pemeriksaan atas penyusunan RPJMD, 30 objek pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, 167 objek pemeriksaan atas pengelolaan belanja, 30 objek pemeriksaan atas manajemen aset, dan 8 objek pemeriksaan atas operasional RSUD.

Penyusunan RPJMD

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi pemda dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun dan ditetapkan dengan peraturan daerah. RPJMD disusun untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan program pembangunan yang efektif, efisien dan terpadu sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah.

Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas RPJMD pada Provinsi Papua Barat dan Rencana Pembangunan Daerah Pemkab Teluk Bintuni dan Pemkab Tambrau. Pemeriksaan difokuskan pada proses penyusunan dan evaluasi RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B* No. 412 s.d 414.

Pemeriksaan RPJMD bertujuan untuk menilai kesesuaian penyusunan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kesesuaian Renstra dan Renja SKPD dengan RPJMD, dan menilai apakah penyusunan RPJMD telah mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah, mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta menilai efektivitas pengendalian dan evaluasi RPJMD. Hasil pemeriksaan tersebut menyimpulkan:

- Pemprov Papua Barat telah menyusun RPJMD 2012–2016 mengacu pada RPJMN 2010–2014 dan proses penyusunan RPJMD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Renja SKPD, Renstra SKPD dan RRPD belum sepenuhnya sesuai dengan RPJMD; penyusunan RPJMD belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi dan karakteristik daerah; serta pengendalian dan evaluasi RPJMD belum efektif dan tanggap terhadap perubahan dan belum dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antara RPJMD kabupaten/ kota dengan RPJMD provinsi serta RPJMD provinsi dengan RPJMN 2015–2019.
- Pemkab Teluk Bintuni telah menyusun RPJMD berdasarkan RPJMN 2009–2014, tetapi belum dilakukan evaluasi dan perubahan untuk menjamin kesesuaian dengan RPJMN 2015–2019 dan RPJMD Provinsi Papua Barat 2012–2016; RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni 2011–2015 belum sepenuhnya dijadikan acuan SKPD dalam merencanakan program dan kegiatan dalam Renstra, Renja maupun DPA. Selain itu, masih terdapat kelemahan-kelemahan pengendalian intern dalam perencanaan dan pengawasan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni yang

dapat mengakibatkan risiko tidak diprogramkan dan dianggarkannya kegiatan prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat kampung/ kelurahan dan distrik serta pemangku kepentingan lainnya dan terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

- Pemkab Tambrau telah menyusun RPJMD sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua Barat 2012-2016 dan RPJMN 2009-2014, tetapi belum dilakukan evaluasi dan perubahan untuk menjamin kesesuaian dengan RPJMN 2015-2019; RPJMD Kabupaten Tambrau 2012-2016 belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD; dan karena keterbatasan dokumen musrenbang, BPK tidak dapat menilai apakah RPJMD Kabupaten Tambrau 2012-2016 telah mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyusunan RPJMD baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penyusunan RPJMD adalah SOP tidak ditaati, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan SOP belum disusun.

Tabel 2.18 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas RPJMD

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP tidak ditaati	7	3
• Pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi, pembinaan dan koordinasi rencana pembangunan daerah belum optimal, karena belum didukung tenaga peneliti dan perencana yang memadai.		Pemprov Papua Barat
• Pelaksanaan musrenbang dalam rangka penyusunan RPJMD tidak sesuai ketentuan, yaitu musrenbang belum dilakukan pada seluruh kampung, belum melibatkan partisipasi aktif seluruh organisasi masyarakat, dan hasilnya belum dituangkan dalam berita acara.		Pemkab Teluk Bintuni
• Penyusunan RPJMD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di antaranya beberapa sasaran memiliki indikator yang sama dan ada indikator yang sulit diukur.		Pemkab Tambrau

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	1	1
Indikator dan target kinerja program belum sepenuhnya ditetapkan dalam RPJMD		Pemprov Papua Barat
SOP belum disusun	1	1
Kebijakan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi RPJMD terkait misi menanamkan amanat otonomi khusus sebagai paradigma baru pembangunan belum sepenuhnya diatur dalam Perdasus.		Pemprov Papua Barat

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RPJMD adalah tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik, dan pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan.

Tabel 2.19 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas RPJMD

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik	3	2
Penyusunan program dan kegiatan dalam RKPd tidak konsisten dengan RPJMD.		Pemprov Papua Barat
Penyelenggaraan musrenbang belum optimal.		Pemkab Teluk Bintuni
Kegiatan evaluasi atas rencana pembangunan dan pencapaian kinerja tidak dilakukan.		Pemkab Teluk Bintuni
Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan	1	1
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan tidak memerhatikan indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2012, karena renstra tersebut sudah dibuat tahun 2011.		Pemkab Teluk Bintuni

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Adanya risiko tidak diprogramkan dan dianggarkannya kegiatan prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat kampung/ kelurahan dan distrik serta pemangku kepentingan lainnya.

- RPJMD sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan pembangunan daerah menjadi sulit diukur tingkat pencapaiannya.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) belum optimal dalam melaksanakan pengendalian kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi RPJMD.
- Kepala Bappeda belum optimal dalam melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
- Kepala SKPD belum tertib dalam menyusun dan menyampaikan LAKIP kepada Bappeda sebagai bahan evaluasi.

Atas permasalahan tersebut pada umumnya entitas menjelaskan bahwa Bappeda telah berupaya melaksanakan fungsi pengendalian, evaluasi dan koordinasi pembangunan. Kendati demikian hasilnya disadari masih belum optimal. Hal ini disebabkan keterbatasan kapasitas SDM SKPD dalam memahami dan menerjemahkan substansi RPJMD secara utuh, disamping itu dalam tahap pelaksanaan pemanfaatan APBD 2014 sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada Bappeda tidak terlepas dari *impact* perubahan kebijakan pada tataran implementasi ditingkat nasional sebagaimana perubahan kepemimpinan nasional yang berimplikasi terhadap transformasi kebijakan di tingkat daerah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda agar dalam menyusun RPJMD selalu berpedoman pada RPJMN, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta lebih optimal dalam melakukan asistensi dan verifikasi penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
- Memerintahkan Kepala Bappeda untuk melakukan evaluasi atas RPJMD guna menjamin kesesuaian dengan RPJMN/ RPJMD Provinsi.
- Menginstruksikan Kepala SKPD untuk melakukan pengendalian atas Renstra SKPD serta menyusun dan menyampaikan LAKIP kepada Bappeda secara tertib.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas RPJMD mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI dan 4 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan RPJMD menurut entitas disajikan pada *Lampiran F.5 dan F.6*.

Pengelolaan Pendapatan

PENDAPATAN daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan daerah dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai perwujudan asas desentralisasi, setiap daerah diberikan keleluasaan untuk menggali sumber pendanaan daerah. Pemerintah daerah (pemda) dituntut lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan memperkecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah terhadap 30 objek pemeriksaan di 30 pemda, di antaranya Pemprov Aceh, Pemprov Bali, Pemkab Batang Hari, Pemkab Bekasi, Pemkot Pekalongan dan Pemkot Manado. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B* no. 415 s.d 444.

Tabel 2.20 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	8
2	Jawa	14
3	Sulawesi	4
4	Bali dan Nusa Tenggara	3
5	Papua	1
Jumlah		30

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan PAD, antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak dan retribusi daerah lainnya serta pelaksanaan perizinan.

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan pendapatan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan apakah kegiatan pengelolaan pendapatan daerah telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan SPI terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah belum sepenuhnya dilakukan secara memadai dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian. Di samping itu, pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan perizinan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.21 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	115	27
Potensi pendapatan yang hilang karena Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) belum ditetapkan, serta adanya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan reklame dan pembangunan, perubahan atau penambahan bangunan yang tidak dipungut.		Pemkab Bekasi
Pajak dan retribusi daerah belum ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), yaitu berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame serta pajak mineral bukan logam dan batuan.		Pemkab Jayapura
Wajib pajak (WP) yang sudah tidak beroperasi belum melaporkan omzet kegiatan usahanya selama Mei-Agustus 2015 dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).		Pemkot Cilegon
Pendapatan pajak restoran tidak dapat direalisasikan karena WP membayar pajak bukan berdasarkan omzet yang sebenarnya, tetapi berdasarkan kesanggupan. Selain itu, ada 65 restoran yang belum terdaftar dan ditetapkan sebagai WP.		Pemkab Subang
Kekurangan penghitungan pajak hotel dan hiburan serta adanya potensi pajak hiburan yang belum digali oleh Dispenda.		Pemkab Badung
SOP belum disusun	44	20
Peraturan walikota dan SOP terkait dengan pengelolaan pajak hotel belum disusun dan diterbitkan.		Pemkot Pekalongan

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pemda belum memiliki peraturan tentang tata cara pembayaran retribusi dan permohonan izin sewa tanah dan bangunan kios terminal.		Pemkab Banjarnegara
Pemda belum mempunyai peraturan tentang pemberian sanksi bagi WP reklame yang masih memasang reklame, meskipun tidak memperpanjang izinnya.		Pemkab Badung
Pemda belum memiliki ketentuan intern tentang pelaksanaan jaminan asuransi yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan pajak reklame, antara lain terkait dengan klasifikasi reklame yang wajib didukung dengan jaminan asuransi.		Pemkot Batam
Mekanisme pengelolaan Penerimaan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan	16	9
Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan serta penagihan pajak hotel tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.		Pemkab Banjarnegara
Pencatatan, pelaporan, pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sepenuhnya dilakukan dan diverifikasi oleh Dispenda, serta terdapat penandatanganan/ penerbitan akta sebelum dilakukan pembayaran BPHTB oleh WP.		Pemkot Bitung
Lain-lain kelemahan SPI	48	17
Aplikasi SAMSAT <i>Online</i> belum dapat diandalkan sepenuhnya sebagai basis data untuk penentuan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.		Pemprov Aceh
Pengenaan tarif biaya diklat serta kerja sama penyelenggaraan diklat tidak berdasarkan Keputusan Gubernur.		Pemprov DIY
Pelayanan penerbitan perizinan IMB tidak sesuai ketentuan.		Pemkot Magelang
Verifikasi dan validasi data piutang PBB-P2 belum dilaksanakan secara optimal.		Pemkab Lombok Barat

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, penyeteroran penerimaan daerah terlambat, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.22 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	112	578,40	24
Kekurangan penerimaan karena adanya WP yang belum membayar pokok dan denda PKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pengelola aset Bangun, Guna, Serah (<i>Built, Operate and Transfer</i>. BOT) belum membayar kontribusi, serta terdapat retribusi laboratorium belum disetor oleh bendahara penerimaan ke kas daerah.		509,92	Pemprov Jambi
Retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) belum dipungut, serta pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah tahun 2014, PKB dan BBNKB, belum diterima.		15,13	Pemprov Sumatera Selatan
Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame beserta denda/ bunganya, dan sanksi denda kepada pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/ notaris belum diterima dan disetorkan ke kas daerah.		11,82	Pemkot Bandung
Pendapatan dan denda atas pajak hotel dan restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak reklame kurang disetor, serta belum ada penetapan dan pemungutan atas IMB dan retribusi izin gangguan.		7,33	Pemkab Tangerang
Denda atas keterlambatan penyampaian SPTPD, pembayaran pajak hotel dan restoran serta retribusi IMB belum dikenakan. Selain itu, terdapat pajak reklame yang belum dipungut.		6,49	Pemkot Batam
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	17	--	9
Dinas Pelayanan Pajak tidak konsisten dalam menerapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) kepada seluruh WP BPHTB, yaitu atas satu kali transaksi atau atas seluruh transaksi.		--	Pemkot Bandung
Pemeriksaan terhadap WP hiburan tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak didukung oleh data dan kertas kerja yang memadai.		--	Pemkab Lamongan
Pengenaan tarif PKB terhadap kendaraan angkutan umum tidak sesuai dengan ketentuan.		--	Pemprov Bali
Penyetoran penerimaan daerah terlambat	10	--	8
Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disetorkan terlambat ke kas daerah		--	Pemprov Bali
Penyetoran penerimaan daerah terlambat karena digunakan langsung untuk biaya operasional kantor.		--	Pemkab Mamuju

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Retribusi pelayanan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api terlambat disetor.		--	Pemprov Sumatera Selatan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	15	2,57	11
Pengenaan dan penetapan tarif pajak hotel dan restoran serta pajak mineral bukan logam lebih rendah dari ketentuan.		1,00	Pemkab Banyuwangi
Penjualan produksi usaha daerah melalui pihak ketiga yang bertindak sebagai agen penjual, tidak dituangkan dalam perjanjian kerja sama.		--	Pemprov DIY
Pemberian dan pengiriman surat peringatan kepada WP PKB tidak diikuti dengan usaha penagihan lebih lanjut.		--	Pemprov Sumbar

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pemda kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan pajak dan retribusi.
- Pemda tidak dapat memberikan pelayanan optimal kepada wajib pajak.
- Penerimaan daerah yang tidak segera disetor berisiko untuk disalahgunakan.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Kepala Daerah belum menetapkan pedoman/ peraturan internal dan kurang optimal dalam mengintensifkan potensi penerimaan daerah.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan daerah.
- WP belum sepenuhnya memahami dan patuh terhadap peraturan pajak dan retribusi daerah.

Atas permasalahan tersebut pada umumnya entitas akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyusun pedoman atau peraturan internal untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan serta menagih kekurangan penerimaan pokok dan denda pajak/ retribusi daerah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah terkait agar:

- Menyusun dan menetapkan pedoman atau peraturan internal untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- Melakukan pendataan, pendaftaran dan penetapan potensi pajak, serta meningkatkan fungsi verifikasi dan validasi atas data yang disampaikan WP.
- Menagih kekurangan penerimaan pokok dan denda pajak/retribusi daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada 30 pemda mengungkapkan 255 temuan yang memuat 377 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 223 kelemahan SPI dan 154 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp580,97 miliar.

Entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan dana ke kas daerah senilai Rp2,59 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan pendapatan daerah dapat dilihat pada *Lampiran F.7 dan F.8*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 167 objek pemeriksaan pada 164 pemda, antara lain Pemprov Kalimantan Timur, Pemprov Sumatera Selatan, Pemkab Malang, Pemkab Kutai Kartanegara, dan Pemkab Mamberamo Tengah. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no. 445 s.d 611*.

Tabel 2.23 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	52
2	Jawa	37
3	Bali dan Nusa Tenggara	13
4	Kalimantan	19
5	Sulawesi	27
6	Maluku dan Papua	19
Jumlah		167

Pada umumnya, lingkup pemeriksaan pengelolaan belanja daerah mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pemeriksaan pengelolaan belanja daerah bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern (SPI) atas pengelolaan belanja daerah telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan belanja daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pemda belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan SPI secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan belanja.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja daerah adalah perencanaan kegiatan tidak memadai, penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, SOP belum disusun, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.24 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	67	43
Penganggaran untuk pekerjaan pemeliharaan jalan yang menambah nilai ekonomis dan umur manfaat jalan (belanja modal) pada akun belanja barang dan jasa tidak tepat.		Pemkab Malang
Penganggaran untuk pengadaan aset tetap (belanja modal) dan hibah berupa honorarium untuk imam, mudin, dan ustadz/ ustadzah (belanja hibah) pada akun belanja barang dan jasa tidak tepat.		Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
Pemda tidak melakukan pengkajian dan analisis dalam menyusun anggaran belanja subsidi biaya tiket penerbangan perintis kategori khusus (pegawai pemda, orang sakit dan tidak mampu) TA 2012 untuk Perusahaan Daerah Witeltram.		Pemkab Kutai Barat - Belanja Daerah
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	66	37
Pemberian hibah kepada Forum Komunikasi Penyuluh Penghulu dan Pencatat Nikah (FK-P3N) tidak sesuai dengan ketentuan, karena ormas tersebut belum 3 tahun terdaftar pada pemda, dan penganggarannya tidak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD.		Pemprov Sumatera Selatan-Belanja Bansos dan Hibah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pemberian hibah kepada instansi vertikal tidak dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.		Pemkab Buru Selatan
Pembayaran atas pekerjaan konstruksi tidak didukung oleh <i>back up quantity</i> dan <i>as built drawing</i>, serta belum dilakukan <i>Final Hand Over</i> (FHO) setelah masa pemeliharaan berakhir.		Pemkab Sigi
SOP belum disusun	43	34
Belum ada SOP tentang pengelolaan kas, yang mengatur tentang perencanaan kas, saldo minimum pada rekening Bendahara Umum Daerah (BUD), dan pemanfaatan <i>idle cash</i> oleh BUD.		Pemprov DKI Jakarta
SOP terkait dengan proses pencairan dan pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) belum disusun.		Pemkab Lampung Timur
Peraturan tentang pengadaan barang/ jasa desa belum ditetapkan, namun dalam bimbingan teknis sudah ditekankan kepada perangkat desa untuk mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013.		Pemkab Tabanan
Lain-lain kelemahan SPI	62	42
Perhitungan pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah masih menggunakan metode <i>lump sum</i>.		Pemkab Halma-hera Barat
Dinas Kebersihan dan Pertamanan membayar tagihan listrik penerangan jalan umum atas fasilitas sosial dan fasilitas umum beberapa kompleks perumahan yang belum diserahkan ke pemda, sehingga membebani keuangan daerah.		Pemkot Tangerang
Tarif uang harian perjalanan dinas menurut Peraturan Bupati melebihi tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.		Pemkab Muko-Muko

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja adalah kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.25 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	311	131,34	145
Kekurangan volume pekerjaan pengadaan barang pada 10 SKPD, di antaranya atas pembangunan gedung, rumah jabatan, pasar tradisional serta sarana dan prasarana rumah sederhana sehat.		11,12	Pemkab Mam-beramo Tengah

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan pengadaan barang pada 9 paket pekerjaan gedung dan bangunan serta 18 paket pekerjaan jalan dan jembatan.		9,03	Pemkab Kutai Kartanegara
Kelebihan pembayaran atas volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pada 14 paket pekerjaan jalan dan jembatan serta gedung dan bangunan.		7,08	Pemprov Kalimantan Timur
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	298	147,16	126
Kelebihan pembayaran pada 4 paket pekerjaan jalan dan jembatan serta 4 paket pekerjaan gedung dan bangunan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran.		18,02	Pemkab Kutai Barat – Belanja Daerah
Kekurangan volume pekerjaan pada 2 paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan, namun pembayaran belum dilakukan seluruhnya.		11,97	Pemkab Kutai Kartanegara
Kelebihan pembayaran pada 36 paket pekerjaan fisik dan pekerjaan jasa konsultasi, namun pemda belum melakukan pelunasan pembayaran.		9,61	Pemprov Sumsel – Belanja Daerah
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	173	841,03	106
Pekerjaan pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru Paket III dan 10 kontrak lainnya yang mengalami keterlambatan penyelesaian, belum dikenakan denda.		821,69	Pemprov Kalimantan Timur
4 paket pekerjaan pada 2 SKPD yang mengalami keterlambatan penyelesaian, belum dikenakan denda.		2,45	Pemkot Lubuk-Linggau
8 paket pekerjaan pada 3 SKPD yang mengalami keterlambatan penyelesaian, belum dikenakan denda.		1,45	Pemprov Sulawesi Tenggara
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	836	264,02	152
Pengalihan dan penguasaan dana deposito milik Pemda oleh pihak lain serta hibah tidak sesuai ketentuan senilai Rp35 miliar, peralatan MRI 1,5T RSUD A. Wahab Sjahranie senilai Rp14,89 miliar yang didatangkan rekanan rusak, jaminan pekerjaan senilai Rp6,18 miliar tidak bisa dicairkan karena kedaluwarsa, serta pemborosan keuangan daerah Rp2,03 miliar. Selain itu, belanja tidak sesuai ketentuan Rp2,45 miliar, jaminan pekerjaan belum dicairkan Rp1,39 miliar, dan permasalahan lainnya Rp2,39 miliar.		64,33	Pemprov Kalimantan Timur
Dana hibah Rp20,12 miliar diberikan kepada 66 organisasi dan perusahaan swasta yang tidak berhak serta tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah. Selain itu, terdapat belanja hibah fiktif senilai Rp301,69 juta.		20,42	Pemprov Sumsel – Belanja Bansos dan Hibah
Pengadaan 43 unit mobil minibus operasional senilai Rp11,13 miliar melebihi rencana kebutuhan barang. Selain itu, terdapat kelebihan/ potensi kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi, keuntungan tidak wajar dan kelebihan perhitungan harga satuan senilai Rp234,46 juta.		11,37	Pemprov Kep. Bangka Belitung

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kerugian atas kelebihan pembayaran kepada rekanan, serta potensi kerugian atas kelebihan pembayaran, namun pekerjaan belum dibayar seluruhnya dan atas aset pemda yang dikuasai pihak lain.
- Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan/ dipungut.
- Belanja yang tidak tepat sasaran berpotensi disalahgunakan dan membebani keuangan daerah.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja, TAPD tidak cermat dalam menyusun anggaran, pejabat pelaksana belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku, belum adanya SOP, dan para pelaksana kegiatan serta bendahara kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya.

Selain itu, rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang direncanakan, serta konsultan pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan.

Pada umumnya, pemda akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada penanggungjawab kegiatan, menyusun peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa yang akan menjadi pedoman bagi desa dalam pengadaan barang/jasa di desa, serta menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran/ denda keterlambatan ke kas daerah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Menyusun dan menetapkan SOP untuk mendukung pelaksanaan belanja.
- Memerintahkan TAPD untuk menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan.
- Menarik kelebihan pembayaran, menagih denda keterlambatan dan indikasi kerugian daerah serta menyetorkan ke kas daerah.

- Memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada 164 pemda mengungkapkan 1.269 temuan yang memuat 1.856 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 238 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.618 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1.383,57 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp947,17 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah menurut entitas disajikan pada *Lampiran F.9 dan F.10*.

Manajemen Aset

ASET tetap merupakan salah satu aset yang strategis yang dimiliki oleh pemda. Pada umumnya, aset tetap merupakan aset yang memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan akun lain dalam laporan keuangan. Di samping itu, aset tetap memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern yang andal sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset yang berakibat merugikan keuangan daerah.

Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan manajemen aset terhadap 30 objek pemeriksaan pada 30 pemda, di antaranya Pemkab Lima Puluh Kota, Pemkab Indragiri Hilir, Pemkab Karangasem, Pemkot Baubau, dan Pemkab Konawe Selatan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 612-639*.

Tabel 2.26 Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset
pada Pemerintah Daerah

No	Wilayah	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	13
2	Jawa	5
3	Kalimantan	1
4	Bali	3
5	Sulawesi	7
6	Papua	1
Jumlah		30

Lingkup pemeriksaan manajemen aset meliputi penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan.

Pemeriksaan manajemen aset bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern secara efektif, dan apakah manajemen aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pemerintah daerah belum merancang SPI yang dapat mencegah dan memitigasi risiko kehilangan aset dan belum mematuhi secara keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengelola aset.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset daerah antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, SOP belum disusun, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.27 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	78	20
Hibah hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kota Sawahlunto TA 2011 senilai Rp8,36 miliar belum dicatat karena naskah hibah BMN belum diperoleh dari BNPB.		Pemkot Sawahlunto
Penyajian nilai aset tetap tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti belanja honor panitia/ pejabat pengadaan dan biaya peningkatan bukti kepemilikan tanah tidak dikapitalisasi.		Pemkab Solok Selatan
Biaya pemeliharaan yang sudah dikapitalisasi ke aset tetap tidak diatribusikan ke aset induknya tetapi dicatat terpisah sebagai unit aset baru sebesar Rp64,03 miliar.		Pemkab Merangin
Pencatatan aset peralatan dan mesin secara gabungan pada 4 SKPD serta kesalahan pencatatan aset yang seharusnya merupakan persediaan pada 1 SKPD.		Pemkab Musi Rawas Utara

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap dan belum menyajikan informasi yang memadai, seperti perincian barang tidak jelas, tidak ada alamat/ letak, luas dan keterangan. Selain itu, aset tetap belum dicatat dalam KIB.		Pemkab Kebumen
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	27	9
Pengguna barang tidak menyampaikan Laporan Barang Pengguna kepada pengelola barang secara tertib dan Pemkab Kepulauan Anambas tidak menyusun Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2014.		Pemkab Kepulauan Anambas
Saldo aset tetap neraca konsolidasi berbeda dengan saldo aset KIB pada 32 SKPD serta belum dapat ditelusuri.		Pemkab Sukoharjo
Perbedaan nilai aset di neraca dengan KIB sebesar minimal Rp918,99 miliar.		Pemkab Supiori
SOP belum disusun	27	16
Tata cara penentuan kebutuhan dan penganggaran BMD belum ditetapkan dalam peraturan bupati.		Pemkab Limapuluh Kota
Standardisasi sarana dan prasarana (sarpras) kerja belum ditetapkan dalam peraturan bupati.		Pemkab Natuna
Kebijakan penggunaan aset tetap belum ditetapkan dalam peraturan bupati.		Pemkab Bangli
Pengelolaan BMD dan pedoman teknis terkait dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja belum ditetapkan dalam peraturan bupati.		Pemkab Morowali Utara
Lain-lain kelemahan SPI	84	18
Penyewaan BMD kepada pihak ketiga dan pemanfaatan BMD dalam bentuk bangun guna serah tidak sesuai dengan ketentuan berakibat hilangnya potensi pendapatan.		Pemkot Pangkal Pinang
Pengelola BMD belum menyusun rencana kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD.		Pemkab Lingga
Sistem aplikasi SIMDA BMD belum terintegrasi antara SKPD dan Dinas PPKAD secara <i>real time</i> dan <i>online</i>.		Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir
Belum seluruh pengurus barang SKPD melakukan input data dalam aplikasi sistem informasi manajemen aset (Simaset) serta terdapat kelemahan pada aplikasi Simaset.		Pemkab Brebes

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset antara lain aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.28 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Aset dikuasai pihak lain	18	17,77	14
Kendaraan, bangunan, peralatan dan mesin dikuasai PNS yang telah mutasi ke instansi lain, meninggal dunia, dan pensiun, serta tanah pemda seluas 5.113 m² dikuasai masyarakat.		5,89	Pemkab Mamasa
80 unit peralatan mesin pada 21 SKPD dalam penguasaan pihak lain atau belum dikembalikan.		2,79	Pemkab Bengkalis
156 unit mesin dalam penguasaan pihak lain atau belum dikembalikan.		2,01	Pemkab Indragiri Hilir
Tanah hibah dari masyarakat untuk pembangunan RSUD Banggai dikuasai pihak ketiga seluas 20.373 m².		1,62	Pemkab Banggai Laut
Aset tidak diketahui keberadaannya	14	173,82	12
BMD tidak diketahui keberadaannya pada 13 SKPD dan dua kelurahan.		49,47	Pemkot Baubau
1.066 kendaraan tidak diketahui keberadaan fisiknya.		32,49	Pemkab Kolaka
677 unit peralatan/ mesin pada 21 SKPD dan 567 unit kendaraan pada 22 SKPD tidak dapat dihadirkan fisiknya.		30,79	Pemkab Konawe Selatan
Aset tetap peralatan mesin sebanyak 675 unit pada 8 SKPD yang belum dapat diyakini keberadaannya. Selain itu, aset berupa buku, barang kesenian, dan tanaman tidak diketahui keberadaannya.		22,90	Pemkab Indragiri Hilir
Aset tetap pada sekolah-sekolah di 8 kecamatan tidak ditemukan keberadaannya.		21,16	Pemkab Karangasem
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	165	--	30
Pemanfaatan pinjam pakai 3 unit kendaraan kepada instansi pemerintah tidak didukung dengan berita acara peminjaman serta penggunaan 14 unit kendaraan oleh SKPD lain belum dialihkan status penggunaannya.		--	Pemprov Jawa Timur
Barang inventaris yang sudah diserahkan kepada pihak ketiga masih tercantum dalam KIB.		--	Pemkab Pati
Pemkab belum melakukan penghapusan atas BMD yang rusak berat/ telah dihibahkan kepada masyarakat, dan BMD yang telah digunakan untuk penyertaan modal.		--	Pemkab Hulu Sungai Utara
Panitia Penghapusan BMD tidak dibentuk dan Berita Acara Hasil Penelitian Penghapusan BMD tidak didukung lembar kerja dan dokumentasi kegiatan.		--	Pemkab Buton

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	71	28,23	29
Pasar Bertingkat Sungai Guntung Kecamatan Kateman tidak dimanfaatkan sejak selesai dibangun tahun 2009, karena gugatan dari kontraktor terkait dengan tidak terealisasinya eskalasi harga pada saat pembangunan. Selain itu, Pemkab Indragiri Hilir belum menerima hasil penjualan kios Pasar Indragiri/ Pasar Rakyat dan Pasar Bertingkat Gedung Plaza, serta terdapat alat laboratorium belum dimanfaatkan.		16,63	Pemkab Indragiri Hilir
Alat kesehatan belum dimanfaatkan antara lain karena instalasi gas medik belum terpasang. Selain itu, gedung puskesmas belum dimanfaatkan karena dokter dan peralatan belum ada.		5,20	Pemkab Klungkung
Pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 23 unit untuk dipinjam-pakaikan pada anggota DPRD tidak sesuai dengan PP No.24 Tahun 2004 yang mengatur kendaraan dinas hanya untuk unsur pimpinan DPRD.		5,12	Pemkab Karangasem
152 bidang tanah minimal seluas 2.246.100,60 m² dengan nilai Rp347,69 miliar belum memiliki bukti kepemilikan		---	Pemkab Bengkalis

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan :

- Saldo aset tetap dan persediaan dalam neraca dan laporan BMD berpotensi belum dapat menyajikan kondisi BMD yang sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan daerah atas pemanfaatan BMD.
- BMD berpotensi hilang karena tidak diketahui keberadaannya dan dikuasai pihak lain.
- Penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum diterima.
- Potensi permasalahan kepemilikan tanah dan/atau resiko hilangnya aset tanah.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Sekretaris daerah (Sekda) selaku pengelola barang dan Kepala SKPD selaku pengguna barang/ kuasa pengguna kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Pengurus barang/ penyimpan barang SKPD/ unit kerja yang terkait lalai menatausahakan BMD.
- Pemda belum menyusun dan menetapkan peraturan daerah terkait pengelolaan BMD.

- Pemda kurang cermat merencanakan kebutuhan BMD serta kurang optimal dalam melakukan pensertifikatan tanah.

Pemerintah daerah secara umum akan menindaklanjuti sesuai ketentuan antara lain akan mengurus sertifikat tanah dan melakukan pengamanan atas aset yang dikuasai pihak lain.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memerintahkan Sekda dan Kepala SKPD untuk menarik kembali BMD yang dikuasai/ belum dikembalikan pihak lain, serta menyusun rencana kebutuhan BMD dan menatausahakan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan rekonsiliasi dan inventarisasi BMD guna menelusuri keberadaan aset serta memproses aset tetap yang hilang.
- Menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk mendukung pengelolaan BMD, serta melakukan pensertifikatan tanah-tanah milik pemda.
- Mencatat seluruh BMD dalam KIB serta menertibkan administrasi peminjaman BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan sanksi kepada Sekda dan Kepala SKPD yang lalai dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan BMD.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas manajemen aset pada 30 pemda mengungkapkan 318 temuan yang memuat 484 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 216 kelemahan sistem pengendalian intern dan 268 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp219,83 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas manajemen aset pada pemda disajikan selengkapnya pada *Lampiran F.11 dan F.12*.

Operasional RSUD

PEMERIKSAAN operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dilakukan terhadap 8 objek pemeriksaan di 7 pemda, yaitu Pemkot Palembang, Pemkot Tanjung Pinang, Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Blora, Pemkab Sragen, Pemkab Polewali Mandar dan Pemkab Dompu. Ke-8 RSUD tersebut berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B No. 640 s.d 647*.

Tabel 2.29 Sebaran Pemeriksaan Operasional RSUD

No	Wilayah	Jumlah RSUD yang Diperiksa
1	Sumatera	2
2	Jawa	4
3	Sulawesi	1
4	Nusa Tenggara	1
Jumlah		8

Pemeriksaan operasional RSUD difokuskan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja.

Pemeriksaan operasional RSUD bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas kegiatan operasional RSUD telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan apakah kegiatan operasional RSUD telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan RSUD Palembang Bari di Pemkot Palembang telah merancang SPI secara memadai, namun belum dilaksanakan secara efektif. Adapun 7 RSUD lainnya belum merancang SPI secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Di samping itu, pengelolaan operasional 8 RSUD tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional RSUD baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional RSUD antara lain SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP tidak ditaati, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.30 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional RSUD

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Pemda
SOP belum disusun	13	5
Struktur organisasi dan tata kerja RS yang dilengkapi dengan uraian tugas serta kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Tanjung Pinang belum ditetapkan.		Pemkot Tanjung Pinang

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Pemda
Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi BLUD RSUD dr. Soehadi Prijonegoro belum disusun.		Pemkab Sragen
SOP tentang operasional pelayanan kesehatan pada RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu belum disusun.		Pemkab Blora
SOP tentang pertanggungjawaban atas pelayanan ambulans pada RSUD Polewali belum disusun.		Pemkab Polewali Mandar
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	8	5
Penerbitan perjanjian kerja sama pengelolaan parkir RSUD Cengkareng tidak berdasarkan analisis dan kajian yang memadai, serta tidak melalui izin prinsip dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga berpotensi tidak memberikan bagi hasil yang optimal minimal Rp1,43 miliar.		Pemprov DKI Jakarta
Tarif pelayanan medis perinatal belum diatur dalam perda dan pengenaan tarif untuk penggunaan jasa ambulans bervariasi dan tidak sesuai dengan perda.		Pemkab Polewali Mandar
Penerimaan dari pelayanan parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga belum optimal serta sewa lahan foto copy belum ditetapkan dengan surat perjanjian.		Pemkab Dompu
SOP tidak ditaati	5	5
Penghapusbukuan Piutang JKN Tahun 2013 tidak melalui prosedur pengajuan penghapusan piutang kepada kepala daerah.		Pemkot Palembang
Pengelolaan piutang (pencatatan, monitoring atas tagihan, rekonsiliasi secara berkala dengan BPJS, serta penagihan atas piutang) pada RSUD Pasar Rebo tidak dilakukan secara optimal.		Pemprov DKI Jakarta
Pelaksanaan pembayaran pembagian jasa pelayanan dan jasa medis serta insentif belum sepenuhnya mengacu pada peraturan bupati.		Pemkab Dompu
Lain-lain kelemahan SPI	28	7
Pengenaan tarif asuhan gizi dan tarif pemeriksaan laboratorium penunjang RSUD DR. R. Soeprapto Cepu melebihi Peraturan Bupati Blora No.29 Tahun 2011.		Pemkab Blora
Klaim program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dompu (JAKKAD) TA 2014-2015 belum dibayarkan Pemkab Dompu kepada RSUD Dompu senilai Rp4,40 miliar.		Pemkab Dompu

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan operasional RSUD antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, pemborosan/ kemahalan harga, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.31 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional RSUD

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Pemda
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	7	687,80	5
Kekurangan penerimaan atas pemanfaatan lahan/ ruang untuk ATM, bagi hasil pengelolaan parkir dan pembayaran pajak parkir pada RSUD Pasar Rebo.		359,37	Pemprov DKI Jakarta
Kekurangan penerimaan atas pemanfaatan lahan/ ruang untuk kantor dan ATM, bunga deposito serta sisa dana pada rekening pengelolaan Jamkesmas.		165,82	Pemkab Sragen
Kekurangan penerimaan atas jaminan penawaran yang tidak dicairkan pada RSUD Cengkareng.		85,00	Pemprov DKI Jakarta
Pemborosan/ kemahalan harga	4	4.765,92	1
Selisih harga antara harga distributor dengan harga kontrak dalam pengadaan 12 alat kedokteran umum dan 19 alat kedokteran bedah serta pemborosan pengadaan UPS Sentral pada RSUD Cengkareng.		3.782,90	Pemprov DKI Jakarta
Pengadaan alat kesehatan tidak diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan dan HPS disusun terlalu tinggi pada RSUD Pasar Rebo.		983,02	Pemprov DKI Jakarta
Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	2	383,13	2
Pembangunan sistem informasi rumah sakit terintegrasi belum dapat dimanfaatkan, karena ada penyempurnaan sistem dan modul.		383,13	Pemkot Palembang
Pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu, karena tidak sesuai spesifikasi dan perlu penyempurnaan.		--	Pemkab Polewali Mandar

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Pemda
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	43	899,18	7
Obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) kadaluarsa pada RSUD Tanjungpinang belum diusulkan penghapusan.		--	Pemkot Tanjung Pinang
Pemalahan harga dalam pengadaan genset pada RSUD Cengkareng. Selain itu, RSUD belum menerima penggantian biaya listrik atas penggunaan peralatan telekomunikasi oleh pihak ketiga serta terdapat pemberian honor tim teknis tidak sesuai ketentuan		257,05	Pemprov DKI Jakarta

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan:

- Kekurangan penerimaan negara/ daerah/ RSUD atas pajak – pajak yang belum disetor, pendapatan bagi hasil yang belum diterima dan bagian laba pemda yang belum disetor ke kas daerah.
- Tujuan pengadaan barang tidak tercapai dan tidak dapat dimanfaatkan.
- Pemborosan keuangan RSUD.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Direktur RSUD belum menetapkan pedoman/ peraturan internal dan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta lalai dalam menaati dan memedomani ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya RSUD akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan memedomani peraturan bupati dalam pengenaan tarif layanan kesehatan dan membuat perjanjian kerjasama untuk pemanfaatan aset/ lahan oleh pihak lain. Dari sisi pencatatan dan pelaporan akan dilakukan perbaikan dengan membuat dan menetapkan prosedur. RSUD berusaha menyelesaikan tunggakan klaim kepada pemerintah daerah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur RSUD terkait agar:

- Menyusun dan menetapkan pedoman/ peraturan internal untuk mendukung pelaksanaan operasional RSUD.
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan seperti perikatan perjanjian pengelolaan parkir

dan pemanfaatan lahan/ ruangan, penghapusan piutang, pembayaran pembagian jasa pelayanan dan medis, serta penggunaan tarif pelayanan medis.

- Berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penyelesaian tagihan JAKKAD.
- Menagih kekurangan pembayaran atas pemanfaatan lahan/ ruang RSUD, piutang sewa, bunga deposito dan menarik kelebihan pembayaran dari rekanan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab yang kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan operasional RSUD pada 7 pmda mengungkapkan 86 temuan yang memuat 110 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 54 kelemahan sistem pengendalian intern dan 56 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 6,73 miliar. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan dengan menyerahkan aset dan/ atau menyeteror ke kas daerah/ perusahaan sebesar Rp611,08 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional RSUD dapat dilihat pada *Lampiran F.13 dan F.14*.

Operasional BUMD

BADAN usaha milik daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pada semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas operasional BUMD pada 16 objek pemeriksaan di 18 BUMD.

Ke-18 BUMD itu antara lain PT Andalas Tuah Sakato, PD Pasar Palembang Jaya, PT Jakarta Tourisindo, PDAM Tirta Alam Kota Tarakan, dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no. 648 s.d 663*.

Tabel 2.32 Sebaran Pemeriksaan atas Operasional BUMD

No	Wilayah	Jumlah BUMD yang Diperiksa
1	Sumatera	11
2	Jawa	5
3	Kalimantan	1
4	Papua	1
Jumlah		18

Pemeriksaan operasional BUMD difokuskan pada pengelolaan pendapatan, biaya, dan aset perusahaan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai guna mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya rancangan dan implementasi SPI belum mampu secara efektif menjamin tercapainya tujuan pengendalian, dan kegiatan operasional perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terjadi dalam pengelolaan operasional BUMD. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam kegiatan operasional BUMD antara lain SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP tidak ditaati dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.33 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	26	11
Perusahaan belum memiliki kebijakan akuntansi dan SOP untuk penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan piutang dan utang, serta alur dokumennya.		PT Andalas Tuah Sakato - Sumatera Barat
SOP mengenai standar pelayanan publik belum ditetapkan dan menimbulkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang.		PD Pasar Palembang Jaya

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perusahaan belum menyusun SOP pengelolaan keuangan, aset, dan aspek teknis lainnya.		Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari (BP THR) Jakarta
Pengelolaan barang belum tertib karena pedoman pengelolaan dan penatausahaan persediaan belum ditetapkan.		PDAM Trunojoyo - Kab. Sampang
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	25	13
Tingkat kehilangan air melebihi batas toleransi karena indikasi terjadi pencurian air, tingginya tingkat kebocoran pipa, kerusakan <i>water meter</i>, serta pembacaan <i>water meter</i> kurang akurat.		PDAM Tirta Alam - Kota Tarakan
Perusahaan berpotensi kehilangan penerimaan dari jasa pengelolaan harian, bulanan, dan tahunan atas kios/ petak yang kosong atau tidak disewa.		PD Pasar Palembang Jaya
Pendapatan parkir di Hotel Balairung berkurang karena tidak dilakukan pungutan biaya parkir kepada pengguna ruas parkir.		PT Balairung Citra Jaya - Sumatera Barat
Bank tidak pernah melakukan pengambilalihan agunan untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah, hingga mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan perusahaan.		PD BPR Bank Pasar - Kota Bandar Lampung
Kebijakan pemberian kredit dengan tingkat bunga rendah kepada pensiunan, istri/ janda pegawai, dan mantan pegawai mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bunga.		PT BPD Papua
SOP tidak ditaati	25	8
Pemberian kredit kepada debitur tidak memperhatikan kajian dari divisi manajemen risiko dan terindikasi tidak menggunakan hasil <i>appraisal</i> yang sah.		PT BPD Papua
Pengelolaan tabungan dan deposito tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya tabungan dengan saldo minimal tidak ditutup dan pemberian nisbah spesial tanpa persetujuan direksi.		PT BPRS - Kota Bandar Lampung
Pembukuan transaksi keuangan belum tertib, pembayaran jasa pengelolaan pasar tidak didukung bukti, serta pendapatan unit pelaksana pasar disetor berdasarkan target.		PD Pasar Palembang Jaya
Hapus buku (<i>write off</i>) dan hapus tagih piutang pembiayaan tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan perusahaan.		PT BPRS Rajasa - Kab. Lampung Utara
Lain-lain kelemahan SPI	61	16
Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atas transaksi penjualan <i>High Speed Diesel</i> tidak pernah disetorkan ke kas daerah karena perusahaan tidak terdaftar sebagai wajib pungut.		PT Bojonegoro Bangun Sarana

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perusahaan belum mencatat dan melaporkan utang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).		PT Andalas Tuah Sakato - Sumatera Barat
Perusahaan memberikan suku bunga deposito yang melebihi suku bunga wajar yang dijamin oleh LPS.		PT BPD Papua

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan operasional BUMD antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, pemborosan/kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.34 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	20	17,56	9
Perusahaan belum melakukan pembayaran pajak hotel dan restoran serta PBB dan BPHTB, lalai melakukan pemotongan PPh, serta terdapat tunggakan konsumen yang belum dilunasi.		8,94	PT Balairung Citrajaya – Sumatera Barat
Pendapatan bagi hasil proyek kerja sama operasional dengan pihak ketiga belum diterima, serta terdapat PPh dan PPN yang kurang/ belum dipungut dan disetor.		3,92	PT Bojonegoro Bangun Sarana
Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB atas 2 paket pengadaan tanah kurang/ belum disetor ke kas negara dan daerah.		2,66	PT Jasa Sarana – Jawa Barat
Perusahaan belum menyetor bagian laba pemda ke kas daerah dan belum memungut dan menyetorkan PPN atas sewa lahan kios ke kas negara.		1,11	BP THR Lokasari – Jakarta
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	20	--	11
Penerbitan sertifikat deposito dengan suku bunga melebihi suku bunga wajar dan pengenaan pajak atas bunga rekening deposito milik pemerintah daerah tidak sesuai dengan peraturan bidang perbankan.		--	PT BPD Papua

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Air bersih hasil produksi PDAM belum memenuhi standar dan persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan Menteri Kesehatan.		--	PDAM Tirta Alam - Kota Tarakan
Proses hapus buku kredit macet tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.		--	PD BPR Bank Pasar - Kota Bandar Lampung
Pemborosan/ kemahalan harga	11	61,99	7
Pemborosan keuangan perusahaan karena pemberian THR kepada pegawai pada hari raya yang bukan hari raya keagamaannya.		60,55	PT BPD Papua
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	93	65,87	17
Proses akuisisi saham 3 perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan potensi kerugian bagi perusahaan. Selain itu, PPh dan BPHTB atas pengadaan tanah kurang setor serta biaya pengurusan sertifikat tidak diyakini kewajarannya.		43,39	PT Jasa Sarana – Jawa Barat
Perusahaan belum melakukan pengembalian ke kas negara/ daerah atas kelebihan penerimaan dari instansi pemerintah. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas tantiem, biaya pengurusan perijinan <i>billboard</i> yang tidak dilaksanakan, serta kekurangan volume pekerjaan renovasi kamar dan gedung.		8,29	PT Jakarta Tourisindo
Penghapusbukuan piutang belum sesuai dengan ketentuan dan menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran uang pengabdian (dana kesejahteraan).		2,82	PT BPRS Tanggamus
Penghapusan, pemusnahan serta pelelangan peralatan kantor dan gedung Pasar 10 Ulu tidak ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.		--	PD Pasar Palembang Jaya

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan:

- Kekurangan penerimaan negara/ daerah/ BUMD atas pajak – pajak yang belum disetor, pendapatan bagi hasil yang belum diterima, dan bagian laba pemda yang belum disetor ke kas daerah.
- Potensi kerugian perusahaan karena pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan.
- Pemborosan keuangan BUMD.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Direktur BUMD belum menetapkan pedoman/ peraturan internal dan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lalai dalam menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami ketentuan perpajakan.

Pada umumnya BUMD akan menindaklanjuti temuan BPK terkait permasalahan potensi penerimaan dari pemanfaatan aset oleh pihak ketiga, serta akan memperbaiki pengelolaan aset BUMD dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan, serta melakukan pemungutan PPN.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMD terkait agar:

- Menyusun dan menetapkan pedoman/ peraturan internal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional BUMD.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, dan agar lebih cermat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan operasional pada 18 BUMD mengungkapkan 201 temuan yang memuat 281 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 137 kelemahan sistem pengendalian intern dan 144 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp145,43 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyerahan aset/ penyetoran ke kas daerah/ perusahaan sebesar Rp2,18 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan operasional BUMD selengkapnya disajikan pada *Lampiran F.15 dan F.16*.

Hasil pemeriksaan atas 571 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah mengungkapkan 5.095 temuan yang memuat 6.736 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1.608 kelemahan sistem pengendalian

intern dan 5.128 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,74 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp957,82 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2. 35 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD

Keterangan	Keuangan		Kinerja		PDTT		Total	
	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI								
1. SPI	474	-	2	-	1.132	-	1.608	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
2. Kerugian	208	198.295,44	7	3.148,66	976	330.667,26	1.191	532.111,36
3. Potensi kerugian	23	19.195,37	2	163.541,20	356	443.953,22	381	626.689,79
4. Kekurangan penerimaan	66	22.097,70	3	1.212,61	391	2.017.471,92	460	2.040.782,23
Sub Total 1 (berdampak finansial)	297	239.588,51	12	167.902,47	1.723	2.792.092,40	2.032	3.199.583,38
5. Penyimpangan Administrasi	210	-	-	-	569	-	779	-
6. Ketidakhematan	-	-	5	8.240,87	66	122.567,12	71	130.807,99
7. Ketidakefisienan	-	-	52	53.518,03	-	-	52	53.518,03
8. Ketidakefektifan	-	-	2.114	313.029,22	80	48.976,68	2.194	362.005,90
Sub Total 2	210	-	2.171	374.788,12	715	171.543,80	3.096	546.331,92
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	507	239.588,51	2.183	542.690,59	2.438	2.963.636,20	5.128	3.745.915,30
Total	981	239.588,51	2.185	542.690,59	3.570	2.963.636,20	6.736	3.745.915,30
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas daerah		2.260,23		6,08		955.557,95		957.824,26
Jumlah LHP		35		240		296		571
Jumlah Temuan		613		1.988		2.494		5.095



IHPS II TAHUN 2015

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2015

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan terhadap 41 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya. Pemeriksaan tersebut meliputi 9 objek pemeriksaan kinerja, dan 32 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada Lampiran A.3¹. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 *Softcopy* LHP selengkapnya dapat dilihat pada *flash disk* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IHPS II Tahun 2015

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 8 objek pemeriksaan BUMN dan 1 objek pemeriksaan Badan Lainnya. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 119 temuan yang antara lain memuat 2 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp1,87 miliar, 23 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp89,14 miliar dan 108 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp182,92 miliar. Selain itu, terdapat 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp55,52 miliar.

BUMN

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 8 objek pemeriksaan pada BUMN terdiri atas 3 objek pemeriksaan pengelolaan keuangan, 3 objek pemeriksaan transportasi laut dan 2 objek pemeriksaan pengelolaan perkebunan. Daftar laporan hasil pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B* no 664 s.d. 671.

Pengelolaan Keuangan

Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan pada 3 objek pemeriksaan BUMN dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pengelolaan Proyek PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 dan 2014 di Jakarta, Bandung dan Mataram;
- Pengelolaan Proyek dan Piutang Tahun Buku 2013 dan 2014 pada Segmen Infrastruktur dan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Surabaya;
- Efisiensi Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2014 dan 2015 (Semester I) di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Pengelolaan Proyek

PT Brantas Abipraya (Persero) atau ABIPRAYA adalah BUMN yang bergerak dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan bidang konstruksi, dan teknologi informasi.

Dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2014–2018, ABIPRAYA mempertahankan bidang jasa konstruksi sebagai kegiatan utama



perusahaan. Bidang usaha sumber daya air dipertahankan sebagai keunggulan perusahaan, infrastruktur dikembangkan menjadi andalan yang akhirnya menjadi keunggulan perusahaan. Secara umum, ABIPRAYA mengarahkan kegiatan utamanya pada bidang pemasaran, produksi, keuangan dan SDM.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan proyek dan piutang. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan proyek dan piutang ABIPRAYA belum sepenuhnya efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Pengesahan perencanaan proyek belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Terdapat berbagai ketidakcermatan dalam proses perencanaan, antara lain dalam menyiapkan dokumen penawaran, mengevaluasi harga, menentukan metode kerja sebagai dasar pemasukan penawaran, analisis risiko, kontrak reviu, dan penyusunan rencana biaya pelaksanaan.

Selain itu, terjadi keterlambatan penyerahan lokasi pekerjaan yang berdampak pada berlarut-larutnya penyelesaian pekerjaan, klausul

Surat Perintah Kerja (SPK) tidak standar, pelaksanaan pekerjaan tanpa didukung SPK, dan ketidakcermatan penyusunan jadwal pelaksanaan proyek dan jadwal pembayaran. Hal tersebut mengakibatkan proyek menjadi tidak efisien, terlambat dan mengalami kerugian.

- Pelaksanaan, pengendalian, dan penyerahan proyek belum efektif dan efisien.

Hal ini ditunjukkan oleh pembelian material untuk stok yang berlebih, pekerjaan cacat yang membutuhkan pekerjaan ulang, terjadi penggantian material oleh *owner* atas material yang sudah terpasang dan karena pengurangan pengakuan kemajuan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak dituangkan dalam berita acara.

Selain itu, terdapat penurunan pendapatan, pengelolaan administrasi dan pelaporan yang belum optimal, adanya proyek waktu kontrak sudah habis namun belum diterbitkan amandemen kontrak. Kemudian adanya perbedaan pencatatan antarlaporan, pencatatan proyek berbeda yang digabungkan, proyek tidak dapat diselesaikan 100% dan terdapat pemutusan kontrak oleh pemberi kerja serta masuk *black list*. Hal tersebut mengakibatkan proyek tidak efisien, mengalami kerugian dan kehilangan potensi pendapatan.

- Pengelolaan piutang usaha dan asuransi belum efektif.

Hal ini ditunjukkan oleh adanya piutang termin yang belum dibayarkan sebesar Rp47,41 miliar, ketidakcermatan pencatatan piutang usaha, analisis kemampuan keuangan *owner* yang tidak mendalam. Selain itu, tidak ada penyusunan *aging schedule* dan *collection period* atas piutang pada klausul kontrak terkait dengan skema pembayaran dan jaminan pembayaran pada perusahaan yang lemah, serta masih kurangnya sinergi antarpemangkujawab. Hal tersebut mengakibatkan likuiditas perusahaan terganggu.

Adapun, pengelolaan asuransi yang belum efektif itu terlihat dari ketidakcermatan dalam mempelajari klausul-klausul *agreement* asuransi, sehingga kerugian usaha tidak dapat di-backup oleh klaim asuransi, prosedur penutupan asuransi Contractor's All Risk (CAR) tidak dilaksanakan pada masa perpanjangan waktu pelaksanaan. Hal tersebut mengakibatkan klaim asuransi tidak dapat dicairkan.

- Evaluasi dan *monitoring* yang diterapkan untuk meminimalkan risiko belum memadai.

Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan proyek yang tidak dapat dinilai. Akibatnya, target kontribusi laba tidak tercapai.

- Penilaian kinerja perusahaan, divisi dan proyek, secara umum masih belum memadai.

Akibatnya pencapaian indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dari masing-masing unit belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi ABIPRAYA akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Direksi ABIPRAYA agar melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan atas pengelolaan proyek antara lain:

- Membuat monitoring penyelesaian proyek, merevisi dan melengkapi prosedur sesuai kebutuhan, dan meningkatkan efektifitas satuan pengawas intern.
- Membentuk tim piutang usaha yang dilengkapi *job description* yang jelas untuk melakukan kompilasi perhitungan kinerja unit kerja sebagai tugas dari unit kerja yang sudah ada.

Pengelolaan Proyek dan Piutang

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang telah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. WIKA bergerak utamanya dalam bidang industri konstruksi dengan segmen infrastruktur dan gedung merupakan salah satu pilar bisnisnya.

BPK melakukan pemeriksaan untuk menilai penggunaan sumber daya, biaya, dan usaha yang optimal dalam rangka mencapai efisiensi pengelolaan proyek dan efektivitas pengelolaan piutang serta penilaian *key performance indicators* (KPI). BPK menyimpulkan atas kegiatan perencanaan, perolehan dan penyusunan kontrak; pelaksanaan, pengendalian dan penyerahan proyek; evaluasi dan *monitoring* serta penilaian KPI, WIKA belum sepenuhnya efisien dan efektif karena masih ditemukan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- Tahap perencanaan, perolehan dan penyusunan kontrak belum memadai, yaitu penyelidikan atas kredibilitas pemberi kerja; kesempatan *aanwijzing*; survei lapangan; manajemen risiko dan perhitungan pencadangan biaya risiko; tahapan *review*/ tinjauan kontrak; ketidakcermatan dalam melakukan perhitungan nilai penawaran serta struktur organisasi.



Kondisi tersebut mengakibatkan WIKA harus menanggung terlebih dahulu pembiayaan atas pelaksanaan pekerjaan, mengalami permasalahan berupa tunggakan tagihan pembayaran pada akhir pelaksanaan pekerjaan, harus menanggung penambahan biaya di luar biaya yang sudah direncanakan, kehilangan kesempatan untuk menambah nilai penjualan dari eskalasi dan klaim *overhead* serta mengalami pengurangan nilai penjualan karena adanya penghentian pelaksanaan pekerjaan.

- Tahap pelaksanaan, pengendalian dan penyerahan proyek belum efisien antara lain yaitu pekerjaan proyek mengalami peningkatan biaya sebesar Rp87,02 miliar; keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp613,92 juta dan potensi denda keterlambatan maksimal sebesar Rp360,00 juta; kehilangan peluang untuk segera dapat memanfaatkan penerimaan pembayaran tagihan dan retensi sebesar Rp101,58 miliar; berpotensi tidak dapat memperoleh klaim yang diajukan kepada pemberi kerja Rp201,25 miliar; pemutakhiran informasi terkait dengan risiko dan mitigasi risiko tidak dilakukan; dan pengadaan jasa subkontraktor belum dilaksanakan sesuai dengan *master schedule* pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan proyek tidak efisien dan berpotensi mengalami rugi usaha.

- Pengelolaan piutang belum efektif, yaitu saldo piutang yang berumur lebih dari 12 bulan mengalami peningkatan; klaim *Contractor's All Risk* (CAR) yang telah diajukan dan memperoleh persetujuan *loss adjuster* sebesar Rp5,77 miliar berpotensi tidak dapat diterima; serta ketidakcermatan dalam pencatatan nilai piutang, mengakibatkan likuiditas dan kelancaran kegiatan operasional WIKA menjadi terganggu.
- Tahap evaluasi dan monitoring belum efektif yaitu proyek belum atau sudah menyusun laporan proyek selesai namun belum disahkan departemen, mengakibatkan permasalahan yang dihadapi oleh proyek selama pelaksanaan pekerjaan belum dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pelaksanaan proyek sejenis di masa mendatang dan *knowledge management* atas proyek tersebut belum dapat dilaksanakan.
- Tahap penilaian kinerja perusahaan, departemen dan proyek belum memadai karena didasarkan pada perhitungan *scorecard* yang tidak didukung data yang valid dan tidak sesuai dengan prosedur WIKA serta kontrak manajemen, mengakibatkan pencapaian KPI belum menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi WIKA menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan Direksi WIKA agar melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain:

- Merevisi dan melengkapi prosedur yang sudah ada sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek berikutnya.
- Mengingatkan tim tender dan manajer proyek pada masing-masing proyek untuk meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan SOP serta klausul dalam kontrak.
- Melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk penagihan atas piutang dan melakukan pencatatan dan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memadai terkait piutang.
- Merevisi prosedur WIKA dengan memasukkan sanksi keterlambatan kepada manajer proyek dan mengatur jangka waktu pengesahan laporan serta menyosialisasikan prosedur tersebut.
- Menyempurnakan sistem *scorecard online* sehingga sesuai dengan kebutuhan WIKA dalam melakukan penilaian KPI.

Efisiensi Kantor Cabang

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) adalah bank BUMN terbuka yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit, terutama di sektor perumahan. Persaingan ketat di industri perbankan menuntut bank BUMN beroperasi lebih efisien. Oleh karena itu, efisiensi berperan penting dalam mendukung pencapaian target bisnis, sehingga dapat tetap bersaing dalam industri perbankan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efisiensi fungsi intermediasi, yaitu penghimpunan dana pihak ketiga (*funding*) dan penyaluran kredit (*lending*) pada BTN tahun 2014-semester I 2015. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan Kantor Cabang BTN dalam menjalankan fungsi intermediasi berupa penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran kredit secara umum cukup efisien.

Akan tetapi, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain dalam hal penetapan dan implementasi strategi serta target yang belum optimal, pengelolaan SDM dan kelemahan *monitoring* dan evaluasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan perencanaan SDM (*man power planning*) dan analisis beban kerja (*workload analysis*) dalam pemenuhan pegawai dan pengembangan kapasitasnya (*human capital*) belum optimal.

Pada 2015, BTN melakukan perubahan struktur organisasi dan struktur di divisi dan kantor cabang. Hal ini mengakibatkan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai tidak berjalan optimal, karena standar jumlah minimal pegawai per kelas kantor cabang BTN menjadi tidak relevan.

- Komposisi DPK di Kantor Cabang BTN masih didominasi DPK *high cost* (Batara Prima dan Deposito).

Pada 2014 dan 2015 BTN merumuskan strategi peningkatan DPK murah (*low cost*) dengan menetapkan rasio dana murah (*Current Account Saving Account/ CASA*) 2014 dan 2015 masing-masing 48% dan 49%. Namun, realisasi komposisi dana murah BTN terhadap DPK hanya 47% dan 47%. Hal ini mengakibatkan daya saing BTN menurun dalam memasarkan produknya dengan berdasarkan strategi harga (*pricing*). Pada saat yang sama, margin bunga bersih (*net interest margin*) yang diperoleh BTN pun menjadi tidak optimal.

- Penggunaan aplikasi *iCustomer* untuk mendukung kegiatan *commercial funding* pada kantor cabang BTN belum optimal.



BTN telah mengembangkan sistem aplikasi *iCustomer* untuk membantu *regional office* (RO) dan kantor cabang (KC) dalam *monitoring* kegiatan *marketing*, perjanjian kerja sama nasabah dan forum diskusi untuk kegiatan pencapaian target dan pengelolaan kegiatan *funding* komersial. Hasil pemeriksaan uji petik terhadap 10 KC dan *outlet* diketahui penggunaan aplikasi *iCustomer* itu belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan tujuan pengembangan aplikasi *iCustomer* tidak tercapai.

- Penggunaan aplikasi *iPlanning and Performance Management* untuk mendukung operasional kantor cabang BTN belum berjalan sesuai dengan rencana.

BTN mengembangkan sistem *iPlanning & Performance Management* (iPPMA) dan *go live* pada Februari 2013. Hasil pemeriksaan terhadap 10 KC dan *outlet* yang diuji petik, diketahui penggunaan aplikasi iPPMA belum optimal. Hal tersebut mengakibatkan aplikasi iPPMA tidak dapat dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan rencana strategis dan pengembangan bisnis bank.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi BTN menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan Direksi BTN agar segera memformulasikan kembali standar kompetensi dan jumlah kebutuhan pegawai, melakukan sosialisasi dan implementasi strategi *change paradigm*, mengimplementasikan aplikasi *iCustomer* dan mereviu pengembangan aplikasi iPPMA.

Hasil pemeriksaan 3 objek pemeriksaan pada BUMN atas pengelolaan keuangan mengungkapkan 35 temuan, yang memuat 5 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp37,65 miliar, dan 35 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp64,60 milyar. Selain itu terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp29,61 miliar.

Transportasi Laut

HASIL pemeriksaan atas pengelolaan transportasi laut pada 3 objek pemeriksaan BUMN dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyeberangan dan Pelabuhan Tahun Buku 2013 s.d. 2015 pada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero);
- Kegiatan Penyediaan dan Operasional pada PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) TA 2012-2014;
- Pembangunan Kapal Baru PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) yang Selesai dan Masih Dilaksanakan pada Tahun 2014 dan 2015 di Jakarta dan Batam.

Pelayanan Penyeberangan dan Pelabuhan

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan jasa pelabuhan, jasa angkutan sungai, danau, laut dan penyeberangan. Untuk mengetahui peran pelabuhan penyeberangan sebagai salah satu pilar transportasi nasional, BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada penumpang atas kegiatan penyeberangan baik untuk penumpang, kendaraan dan barang yang diselenggarakan ASDP.

Lingkup pemeriksaan meliputi pelayanan penyeberangan dan pelabuhan yang diselenggarakan ASDP untuk tahun buku 2013-2015, terutama pada area Kantor Pusat serta Kantor Cabang Merak, Bakauheni, Lembar dan Ternate yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan kegiatan pelayanan penyeberangan dan pelabuhan pada ASDP belum efektif dalam rangka mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan baik untuk penumpang, kendaraan dan barang. Terdapat temuan ketidakefektifan antara lain:

- Armada kapal dalam melayani aktivitas penyeberangan belum memadai antara lain karena pemeliharaan rutin kapal belum dilaksanakan sesuai dengan SOP dan realisasi beberapa pekerjaan *docking* kapal penyeberangan tahun 2013, 2014 dan 2015 terlambat atau tidak sesuai dengan kontrak.

Hal tersebut mengakibatkan risiko tidak terdeteksinya kerusakan mesin kapal, sehingga *trip* tidak tercapai sesuai ketentuan dan armada tidak dapat segera dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan di antaranya dari Kapal Portlink VII minimal sebesar Rp3,28 Miliar.

- Subsidi lintasan perintis yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan belum memperhitungkan biaya secara memadai. Ditjen Perhubungan Darat belum memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh ASDP di lintasan perintis, sehingga ASDP menanggung kelebihan biaya atas kegiatan angkutan penyeberangan perintis. Perbedaan perhitungan tersebut terjadi karena Kementerian Perhubungan menggunakan standar biaya umum (SBU) dan standar biaya khusus (SBK).



- Penyusunan jadwal penyeberangan pada Lintas Merak dan Bakauheni, Cabang Lembar dan Ternate belum dilakukan secara memadai. Salah satu penyebabnya antara lain karena belum memiliki SOP penyusunan jadwal penyeberangan sehingga perencanaan penjadwalan menjadi tidak akuntabel, belum adil dan proporsional serta pengguna jasa tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terlayani dengan baik.
- Pelaksanaan Pelayanan di atas Kapal ASDP belum memadai. Permasalahan pelayanan yang ditemukan oleh BPK antara lain masalah keselamatan penumpang. Berdasarkan observasi, BPK menemukan pada KMP Jatra 2 yang dikelola oleh Cabang Merak mesin penggerak pada sekoci penolongnya tidak berfungsi karena terhalang oleh besi untuk menggantung kapal di tengah-tengah buritan *rescue boat* dan sekoci tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Demikian juga yang terjadi pada kedua cabang lainnya. Kapal Maming dan Bobara di Cabang Ternate tidak memiliki sampan dan rakit penolong, sedangkan pada Kapal Rodhita dan Portlink II di Cabang Lembar tidak terdapat sampan.

Permasalahan lainnya adalah tidak semua nama penumpang terdaftar dalam *manifest*. Sebagai contoh berdasarkan observasi BPK pada ASDP cabang Merak, untuk penumpang pejalan kaki rombongan, kartu identitas yang dipindai hanya 1 orang yang mewakili, demikian juga untuk kendaraan yang tercatat hanya nama sopir sehingga data *manifest* tidak akurat.

Hal tersebut dapat mengakibatkan antara lain adanya potensi penumpang tidak tertangani dengan baik apabila terjadi kondisi dalam bahaya/ darurat dikarenakan tidak adanya peralatan penyelamatan yang memadai dan data *manifest* belum akurat

- Fasilitas pokok dan pendukung pelabuhan di Cabang Merak, Bakauheni, Ternate dan Lembar belum memadai.

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Hubdat No.2681./AP.005/DRJD/2006 tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan, seluruh cabang ASDP harus memiliki seluruh fasilitas pokok dan penunjang. Namun demikian, ada beberapa fasilitas yang belum dimiliki keempat cabang tersebut, antara lain belum adanya jalan penumpang keluar/ masuk kapal (*gangway*), tempat penampungan limbah, perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan untuk keperluan darurat dan perairan untuk kapal pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi terjadinya gangguan pelayanan pelabuhan.

- Penanganan atas keluhan pelanggan terkait pelayanan di pelabuhan belum memadai.

Penanganan keluhan pelanggan dilakukan melalui tahapan proses penerimaan dan identifikasi informasi pelanggan, penanganan informasi pelanggan dan tindak lanjut penanganan keluhan pelanggan. Namun, berdasarkan laporan rekapitulasi keluhan pelanggan periode Januari-Oktober 2015, masih terdapat keluhan yang belum ditindak lanjuti terkait dengan calo, fasilitas, dan pelayanan pada Cabang Merak, Bakauheni, Ternate dan Lembar. Hal tersebut mengakibatkan keluhan tersebut berpotensi terjadi kembali di masa yang akan datang.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi ASDP menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Direksi ASDP agar:

- Menyiapkan mekanisme pemantauan kegiatan pemeliharaan kapal secara terpadu dengan melibatkan Satuan Pengawas Intern (SPI), sehingga kegiatan pemeliharaan berjalan secara efektif dan menyelesaikan keterlambatan penyelesaian *docking* kapal dan menerapkan kontrak secara konsisten.
- Berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan studi banding terhadap BUMN lain yang mendapatkan penugasan dari pemerintah khususnya dalam hal pembebanan biaya.
- Meminta kepada Menteri Perhubungan agar menyusun dan menetapkan SOP tentang penjadwalan kapal penyeberangan dan penyusunan laporan pengawasan operasional pelayanan penyeberangan serta merekomendasikan General Manager untuk menyusun SOP jadwal penyeberangan khususnya untuk cabang yang jadwal penyeberangannya tidak ditetapkan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
- Menyiapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai guna menjamin pemenuhan peralatan standar keselamatan dan kelaikan kapal dan menginstruksikan SPI untuk memantau pelaksanaannya secara berkala.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka penyediaan seluruh fasilitas pelabuhan sesuai dengan ketentuan.
- Menginstruksikan kepada Bagian *Customer Care* agar lebih proaktif melakukan pengawasan atas penanganan keluhan pelanggan dan berkoordinasi dengan cabang dalam menindaklanjuti keluhan pelanggan.

Penyediaan dan Operasi Kapal

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) adalah salah satu anak perusahaan BUMN migas PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang pelayaran dan jasa maritim. Hampir seluruhnya saham PTK dimiliki Pertamina dan sisanya dimiliki PT Pertamina Training & Consulting.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyediaan dan operasi kapal PT. Pertamina Trans Kontinental (PTK). Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan penyediaan dan operasi kapal pada PTK TA 2012-2014 secara umum kurang efektif dan efisien. Beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- Panitia pengadaan PB 06 'Danio' dan MB 09 'Cobia' tidak cermat dalam melakukan pengadaan, sehingga kualitas kapal diindikasikan kurang memenuhi syarat.
- PTK belum mengimplementasikan mekanisme inspeksi (*vetting*) kapal sesuai dengan standar khusus *best practice* bidang migas. Akibatnya, kapal PTK berpotensi terjadinya kecelakaan dan tidak mendapatkan kontrak karena tidak memenuhi kualitas standar keselamatan umum dan yang berlaku pada perusahaan minyak.
- Kurangnya keandalan kapal dan pengendalian risiko operasi mengakibatkan PTK kehilangan pendapatan minimal sebesar US\$228.135.
- Kurang optimalnya *Plan Maintenance System* (PMS) dan penentuan spesifikasi barang mengakibatkan hilangnya pendapatan *charter* sebesar US\$1,50 juta dan timbulnya biaya tambahan bunker sebesar Rp3,33 miliar.
- Pelaksanaan *docking repair* melanggar pedoman pengadaan barang dan jasa PTK No.PDM-001/F0000/2011-SO dan TKO-04/D3000/2014 mengenai persiapan dan pelaksanaan *docking repair* kapal-kapal milik.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi PT PTK menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Direksi PT PTK antara lain agar:

- Meningkatkan keahlian dan pengetahuan tim teknis dalam pengadaan dengan cara memberikan pelatihan/training terkait aspek teknis dan konstruksi kapal.
- Menetapkan kebijakan pelaksanaan *internal vetting* berupa instruksi direksi, pedoman, tata kerja, *shchedule*, alokasi anggaran, dan personal,

serta penetapan standar *vetting* yang mengacu kepada standar *best practice* migas.

- Melakukan pengelolaan risiko secara komprehensif atas kontrak penyewaan kapal yang memberlakukan skema *reduction rate* dan menyusun rencana mitigasinya.
- Memberikan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut untuk *Owner Superintendent* (OS) dan kru terkait dengan keahlian dalam lingkup pekerjaan PMS.
- Membuat pedoman penyusunan OE *docking repair*.

Pembangunan Kapal Baru

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB) didirikan pada 1990, yang merupakan hasil penggabungan dari 4 industri galangan kapal yaitu PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero), PT Kodja (Persero), PT Pelita Bahari (Persero), dan PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero).

Pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai efektivitas pembangunan kapal baru yang selesai dan masih dilaksanakan pada 2014 dan 2015. BPK menyimpulkan aspek perencanaan, pengadaan, produksi dan penyelesaian pekerjaan belum efektif. Permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

- Aspek perencanaan belum memadai.

Tidak ada dokumentasi yang memadai atas tinjauan persyaratan produk, perubahan spesifikasi peralatan navigasi khusus kapal perang dilakukan saat proyek sudah berjalan, kompetensi SDM kurang pada unit kerja yang membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), kelemahan desain pembangunan kapal, proses desain masih dilaksanakan dan berkelanjutan saat pelaksanaan produksi, RAB dan Rencana Anggaran Produksi (RAP) tidak disusun berdasarkan survei harga yang cermat, serta adanya kesalahan perencanaan awal terkait dengan jumlah kebutuhan material yang mengakibatkan bertambahnya beban pokok produksi dan mengurangi laba.

- Proses pengadaan material dan jasa untuk proyek pembangunan kapal baru belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

Realisasi pengadaan belum mengikuti *masterschedule* yang ada, realisasi pengadaan melebihi nilai RAP baik harga item material maupun kuantitasnya, serta tidak memperhatikan struktur desain kapal.



Selain itu, permintaan penawaran kepada *supplier* dilakukan tanpa memperhatikan spesifikasi yang ada dalam kontrak, evaluasi rekanan dilakukan sebelum kontrak pembangunan kapal ditandatangani, *factory acceptance test* tidak dilakukan pada material yang diharuskan, perubahan *main engine* dilakukan tanpa melihat spesifikasi kontrak, dan pengadaan material tertentu tidak memperhatikan ketentuan/peraturan khusus yang ada, serta penyedia barang dan jasa yang terikat kontrak belum terdaftar dalam Tanda Daftar Rekanan (TDR). Kondisi tersebut mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pembangunan kapal, rugi usaha dan berpotensi timbulnya masalah hukum.

- Proses produksi tidak didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai.

Terdapat alat berat yang rusak dan menjadi kendala pada saat proses produksi, serta perawatan sarana dan fasilitas tidak dilakukan secara berkala. Selain itu, peralatan yang diperbaiki di luar perusahaan tidak dapat diambil dan material kapal yang belum tiba karena permasalahan pembayaran, pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja subkontraktor (jasa) terhenti karena belum dibayarnya prestasi pekerjaan, proses produksi tidak dapat dilaksanakan sesuai *master schedule* karena pengadaan material dan jasa tidak sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan, yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan terlambat.

- Mekanisme penyelesaian pekerjaan dan keuangan atas proyek kapal baru tidak dilaksanakan secara efektif.

Penerimaan hasil pekerjaan pembangunan kapal tidak melalui rekening bank penerimaan (tunai), kantor pusat dan galangan tidak dapat membandingkan penerimaan dan pengeluaran dana pembangunan kapal, catatan pengeluaran pembangunan kapal yang dibuat tidak dapat dibandingkan dengan RAB, penundaan pembayaran uang muka dan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) mengakibatkan mundurnya item pekerjaan tertentu dan menghambat pembangunan kapal.

Atas permasalahan ini Direksi PT DKB secara umum menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan Direksi PT DKB agar melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan atas pengelolaan pembangunan kapal baru.

Hasil pemeriksaan 3 objek pemeriksaan pada BUMN atas pengelolaan transportasi laut mengungkapkan 48 temuan, yang memuat 1 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp1,81 miliar, 4 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp12,50 miliar, dan 49 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp92,23 miliar. Selain itu, terdapat 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp25,91 miliar.

Perkebunan

HASIL pemeriksaan atas pemanenan, pengelolaan dan optimalisasi pabrik kelapa sawit, serta program revitalisasi perkebunan pada 2 objek pemeriksaan BUMN dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemanenan dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2014 dan 2015 pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI di Jambi dan Sumatera Barat.
- Pemanenan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pabrik Kelapa Sawit, serta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014 dan 2015 pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII di Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.

Pemanenan dan Pengelolaan Kelapa Sawit

TUJUAN utama pengolahan kelapa sawit di PTPN VI adalah menghasilkan minyak sawit atau *crude palm oil* dan inti sawit. Pengolahan kelapa sawit di PTPN VI dilakukan di 7 unit pabrik kelapa sawit, yaitu Sei Bahar I, II, III, Aur Gading, Rimbo II, Ophir, dan Solok Selatan. Proses bisnis di pabrik kelapa sawit PTPN VI secara garis besar terdiri atas empat tahapan, dimulai dari perolehan tandan buah segar, penerimaan dan sortasi, proses produksi, sampai pengelolaan *output*.

Pemeriksaan pada PTPN VI bertujuan untuk menilai efektivitas pemanenan kelapa sawit dan efisiensi pengelolaan pabrik kelapa sawit. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pemanenan belum efektif dan pengelolaan pabrik kelapa sawit belum sepenuhnya efisien. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah permasalahan antara lain:

- Pemeriksaan mutu hasil panen belum dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar. Pengujian atas laporan pemeriksaan hasil panen di kebun dan laporan sortasi pabrik kelapa sawit PKS tahun 2014 dan 2015, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan atas jumlah tandan buah segar fraksi 00 (sangat mentah) dan fraksi 6 (tandan kosong) yang dilaporkan oleh manajemen kebun dengan manajemen pabrik kelapa sawit.

Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan manajemen kebun atas hasil panen. Akibatnya, tujuan kebun inti untuk menghasilkan tandan buah segar yang sesuai dengan kriteria matang panen belum sepenuhnya tercapai. Selain itu, kualitas tandan buah segar yang diolah pabrik kelapa sawit belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PTPN VI.

- Kerusakan *fibre cyclone* di Pabrik Kelapa Sawit Sei Bahar III, *as thresher* di Pabrik Kelapa Sawit Solok Selatan, dan *boiler* di Pabrik Kelapa Sawit Aur memengaruhi realisasi produksi minyak sawit dan inti sawit pada ketiga pabrik tersebut.

Hal ini karena tingginya jam stagnasi periode tersebut. Jumlah jam stagnasi di Pabrik Kelapa Sawit Aur Gading sebanyak 430 jam, Pabrik Kelapa Sawit Solok Selatan pada 8, 15, dan 18 Desember 2014 tidak mengolah tandan buah segar, dan Pabrik Kelapa Sawit Aur Gading tidak mengolah minimal selama 10 hari selama Januari, Mei, dan Juni 2014.

Permasalahan ini terjadi karena manajemen pabrik tidak cermat dalam mengidentifikasi dan melakukan upaya pencegahan atas potensi kerusakan peralatan dan mesin. Hal ini mengakibatkan inefisiensi biaya pengiriman tandan buah segar ke pihak ketiga sebesar Rp154,23

juta dan potensi kehilangan pendapatan dari penjualan minyak sawit dan inti sawit sebesar Rp2,17 miliar.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi PTPN VI menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK telah merekomendasikan kepada Direksi PTPN VI antara lain agar:

- Melalui manajemen kebun melakukan pemeriksaan hasil panen sesuai dengan aturan yang berlaku; dan membuat mekanisme pengawasan yang dapat memastikan hasil sortasi tandan buah segar di kebun dan pabrik kelapa sawit.
- Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan pemeliharaan rutin dan non rutin di pabrik kelapa sawit; dan memerintahkan manajemen pabrik kelapa sawit untuk mencatat dan melaporkan kondisi alat sehingga dapat dilakukan upaya antisipatif atas potensi permasalahan di kemudian hari.

Pemanenan, Pengelolaan, dan Optimalisasi Pabrik serta Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit

PTPN VII memiliki wilayah kerja di tiga provinsi, yaitu Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Proses bisnis budidaya kebun kelapa sawit PTPN VII meliputi penyediaan lahan, *land clearing* dan *land preparation*, pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman panen dan angkut. Adapun proses bisnis pengolahan minyak sawit pada pabrik kelapa sawit yaitu jembatan timbangan, *loading ramp*, proses perebusan tandan



buah segar, pemisahan brondolan dari tandan buah segar, pengolahan minyak sawit, dan pengolahan minyak inti sawit.

Pemeriksaan pada PTPN VII bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemanenan, pengelolaan dan optimalisasi pabrik kelapa sawit, serta program revitalisasi perkebunan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hasil pemeriksaan menyimpulkan kegiatan pemanenan, pengelolaan dan optimalisasi pabrik kelapa sawit, serta program revitalisasi perkebunan belum sepenuhnya efisien dan efektif. Hal tersebut karena adanya permasalahan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan pemanenan belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut antara lain masih terdapat panen tandan buah segar dengan dengan fraksi 0 (mentah) dan fraksi 00 (sangat mentah). Selain itu, pengawasan mutu panen tidak didukung jumlah petugas Pengawas Mutu Panen (PMP) dan *quality control* yang memadai.

Hal tersebut mengakibatkan pabrik kelapa sawit tidak memperoleh jaminan kualitas mutu tandan buah segar panen sesuai dengan kriteria, sehingga berpotensi tidak tercapainya output berupa minyak kelapa sawit yang berkualitas.

- Proses pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit pada beberapa pabrik kelapa sawit PTPN VII belum sepenuhnya optimal dalam menekan *losses* sehingga terjadi inefisiensi sebesar Rp6,66 miliar. Inefisiensi terjadi sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 30 November 2015 karena unit pabrik kelapa sawit di lingkungan PTPN VII masih menerima dan mengolah tandan buah segar yang mentah dan sangat mentah.
- PTPN VII tidak melaksanakan kewajiban pencatatan administrasi keuangan secara terpisah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan revitalisasi perkebunan. Selain itu, PTPN VII dalam melakukan pemisahan biaya pembangunan kebun Rawapitu tidak menggunakan dasar dan pertimbangan yang tepat. Akibatnya, PTPN VII harus menanggung biaya sebesar Rp6,01 miliar yang seharusnya menjadi beban Kerja Sama Usaha Sejahtera Bersama (KSU-SB) dan PTPN VII tidak dapat menagih biaya tersebut kepada KSU-SB.

Atas permasalahan tersebut secara umum Direksi PTPN VII menyatakan akan melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PTPN VII antara lain agar:

- Melakukan sosialisasi secara intensif dan berkala tentang kriteria matang panen, memetakan risiko pencurian TBS dan mengalokasikan tambahan biaya pengamanan lahan kepada unit kebun yang memiliki profil risiko pencurian tinggi, melakukan revisi instruksi kerja (IK) terkait kegiatan pemanenan, dan menyempurnakan struktur organisasi *quality control* (QC) dengan meletakkan unit QC dibawah koordinasi General Manager Distrik.
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada unit PKS untuk secara tegas menolak dan mengembalikan bahan baku TBS fraksi 00 (sangat mentah), menyempurnakan IK penempatan TBS di *Loading Ramp* dengan menerapkan *ramp management* mengidentifikasi kondisi mesin dan peralatan pabrik yang berkontribusi terhadap tingginya *losses* pengolahan, dan merencanakan penggantian mesin dan peralatan yang sudah rusak secara bertahap.
- Mencatat seluruh biaya, pendapatan dan administrasi keuangan lainnya dalam pengelolaan kebun Rawapitu secara terpisah dari kebun induk, membuat evaluasi dan *addendum* komponen biaya langsung dan tidak langsung yang dapat dibebankan kepada KSU-SB dan PTPN VII, dan memulihkan biaya umum beban KSU-SB sebesar Rp2,66 miliar sebagai piutang KSU-SB.

Hasil pemeriksaan BPK atas pemanenan, pengelolaan, optimalisasi pabrik kelapa sawit, serta program revitalisasi perkebunan tahun 2014- 2015 pada 2 objek mengungkapkan 24 temuan, yang memuat 1 permasalahan ketidakekonomisan senilai Rp54,76 juta, 14 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp38,98 miliar, 12 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp26,07 miliar.

Badan Lainnya

PADA semester II tahun 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek pemeriksaan Badan Lainnya yaitu pemeriksaan atas penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik pada Lembaga Penyimpan Simpanan (LPS) Tahun 2013 s.d. Triwulan 3 2015. (*Lampiran B no. 672*)

Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

SESUAI dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan UU

Nomor 7 Tahun 2009, LPS mempunyai fungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya, salah satu tugas LPS adalah merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.

Jumlah bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang dicabut izin usahanya (CIU) oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) per 31 Desember 2012 adalah sebanyak 47 bank, yang terdiri dari satu Bank Umum (BU) dan 46 Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/ BPRS) dengan total biaya klaim penjaminan sebesar Rp655,03 miliar dan total pengembalian klaim (*recovery claim*) sebesar Rp190,29 miliar (29%). Pada periode 2013-triwulan III 2015, jumlah bank gagal yang tidak berdampak sistemik yang CIU oleh LPP adalah sebanyak 18 BPR/ BPRS dengan total biaya klaim Rp106,94 miliar dan *recovery claim* sebesar Rp41,36 miliar (39%). Dengan demikian, jumlah bank yang CIU sebanyak 65 Bank dengan biaya klaim Rp761,97 miliar dan *recovery claim* Rp231,65 miliar.

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Kriteria/ indikator pemeriksaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik telah memadai.

Selama periode 2013-triwulan III 2015, LPS telah berupaya meningkatkan efektivitas penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilaksanakan secara tepat serta penanganan klaim penjaminan dan likuidasi bank telah dilaksanakan secara cepat dan tepat. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh LPS di antaranya:

- Perencanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik
 - ▶ LPS telah menetapkan peraturan dan kebijakan yang mendukung tugas dan fungsinya dalam rangka penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik serta terus-menerus melakukan evaluasi agar peraturan dan kebijakan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik dan sesuai kebutuhan.
 - ▶ Untuk meningkatkan pemahaman bank peserta dan nasabah terkait hak dan kewajibannya serta pemahaman pihak terkait lainnya yang ditunjuk LPS untuk penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun dengan menggunakan media lain, antara lain melalui surat menyurat, telepon, *email*, dan *website*.



- ▶ Dalam rangka menunjang tugas dan fungsinya, LPS melakukan kerja sama dengan beberapa pihak, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman Nomor PRJ-30/D.01/2014 - MoU-1/DK/VII/2014; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui Nota Kesepahaman Nomor MOU-001/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007; dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Nota Kesepahaman Nomor 1/KE/2014 - B/36/X/2014.
- ▶ LPS telah melakukan beberapa kali reorganisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional. Reorganisasi terakhir dilakukan pada 2015 dengan Peraturan Dewan Komisioner LPS (PDK) Nomor 8 Tahun 2015 dan Uraian Jabatan sesuai dengan PDK Nomor 9 Tahun 2015.
- ▶ Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, LPS setiap tahun melakukan pelatihan yang disesuaikan dengan standar kompetensi yang diperlukan.
- ▶ LPS telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Bank Dalam Likuidasi (SIK BDL) dan aplikasi *Payment Channeling System* (PCS).

- Pelaksanaan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik
 - ▶ Dalam rangka meningkatkan kualitas keputusan, LPS telah melakukan evaluasi atas metodologi yang digunakan dalam analisis penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
 - ▶ Untuk mencapai target kecepatan dan ketepatan dalam pembayaran klaim penjaminan serta kegiatan rekonsiliasi dan verifikasi, Group Penanganan Klaim Penjaminan LPS melakukan kerja sama dengan pihak lain yang ditunjuk LPS untuk melaksanakan rekonver. Penunjukan dilakukan dengan pertimbangan kompleksitas permasalahan BDL dan sumber daya manusia yang tersedia di LPS.
 - ▶ Group Likuidasi setiap tahun melakukan pertemuan dengan seluruh TL BDL untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap TL BDL.
- Pelaporan dan evaluasi penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik
 - ▶ Setiap group yang terkait dengan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik melaporkan kegiatannya dalam laporan berkala. Laporan tersebut menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan serta kendala yang dihadapi. Telah dilakukan reviu secara berjenjang serta evaluasi yang dilakukan pada internal group, evaluasi secara kelembagaan seperti *Gap Analysis*, pembahasan oleh pimpinan dalam Rapat Pimpinan maupun Rapat Dewan Komisioner serta reviu yang dilaksanakan oleh pengawas internal (Group Audit Internal).
 - ▶ LPS telah membangun sistem manajemen kinerja melalui strategy map menggunakan metode *balanced scorecard* untuk melakukan perbaikan atas kinerja LPS yang terdiri dari kinerja lembaga, kinerja unit kerja, dan kinerja individu. Selain itu, menetapkan target pencapaian sasaran kinerja sebagai indikator keberhasilan yang akan dihitung dan dievaluasi setiap tahun disesuaikan dengan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Dengan memperhatikan upaya yang telah dilaksanakan oleh LPS, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik telah dilaksanakan cukup efektif. Namun demikian, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari LPS terkait dengan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik antara lain:

- Terdapat peraturan yang belum sepenuhnya lengkap dan selaras dalam rangka mendukung penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, yaitu:
 - LPS belum menetapkan pedoman pemeriksaan bersama (*due diligence*), penanganan keberatan, pembayaran secara bertahap atas kewajiban BDL kepada kreditur dan aturan lebih lanjut terkait evaluasi besaran maksimal nilai simpanan yang dijamin dalam Peraturan LPS (PLPS) sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU LPS.
 - Terdapat aturan yang kurang selaras dengan UU LPS, antara lain terkait dengan penundaan pembayaran kepada nasabah yang diindikasikan menyebabkan bank gagal, pelaksanaan kompensasi bunga kepada nasabah yang keberatannya diterima serta penawaran aset nontunai kepada LPS dan kreditur lainnya. Selain itu, terdapat ketidakselarasan penentuan batas waktu pengambilan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan pada Nota Kesepahaman LPS - OJK dan PKE Nomor 17 Tahun 2014 dengan PLPS.
- Kerja sama antara LPS dan OJK yang dituangkan dalam nota kesepahaman belum didukung dengan petunjuk pelaksanaan untuk mengatur secara terperinci teknis kerja sama antara kedua lembaga tersebut.
- Reorganisasi khususnya pada Group Likuidasi dengan mengembangkan group dari dua divisi menjadi tiga divisi belum didukung analisis beban kerja dan praktek pelaksanaan likuidasi pada Group Likuidasi.
- Analisis penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik belum sepenuhnya didukung dengan kertas kerja analisis penilaian prospek usaha bank.
- LPS belum optimal dalam menggunakan kewenangannya untuk memperoleh data atau informasi dari pihak lain, terutama dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi serta dalam rangka evaluasi besaran simpanan yang dijamin.
- LPS belum menyelesaikan penanganan keberatan nasabah Bank IFI.
- Penerimaan aset nontunai dari BDL akan berpengaruh terhadap pengelolaan atas aset tersebut. Bila pengelolaan aset tidak cermat dan tidak sejalan dengan ketentuan akan mempengaruhi kinerja dan reputasi LPS.

- Penetapan sasaran kinerja lembaga (*Key Performance Index/ KPI* lembaga) yang belum mempertimbangkan faktor kualitas untuk kegiatan analisis resolusi bank, belum mengakomodir BDL dalam bentuk bank umum dan belum mempertimbangkan koordinasi antargroup dalam penentuan penanggung jawab penanganan keberatan nasabah.
- Parameter *LPS Rate Coverage* sebagai alat ukur untuk mengevaluasi besaran nilai simpanan yang dijamin belum sesuai dengan UU LPS dimana parameternya berdasarkan rekening bukan nasabah.

Atas hal-hal yang menjadi perhatian tersebut, pihak LPS memberikan tanggapan antara lain:

- Draft pedoman pemeriksaan bersama dalam proses penyusunan yang nantinya akan diselaraskan dengan PLPS.
- Diperlukan adanya *updating* data Bank Gagal dari OJK yang digunakan dalam perhitungan LCT sehingga batas waktu satu hari kerja oleh LPS dinilai tidak memadai.
- Penyusunan Juklak atas Nota Kesepahaman antara LPS dengan OJK masih dalam proses pembahasan antara tim teknis LPS dan OJK.
- Penilaian prospek usaha merupakan salah satu materi yang akan dikaji ulang oleh konsultan sebagaimana telah tercantum dalam rencana kerja Group ARB Tahun 2016 berupa kegiatan *review* metodologi analisis resolusi bank dan amandemen terhadap SOP Analisis Resolusi Bank (PKE Nomor 17 Tahun 2014).
- LPS menggunakan pendekatan jumlah rekening simpanan untuk mengukur *coverage* besaran nilai simpanan yang dijamin.
- Pada saat pelaksanaan rekonver Bank IFI, LPS memang belum mengatur secara jelas *cashback/fundraising* dalam UU LPS maupun PLPS.
- LPS mendapatkan dokumen baru dalam penanganan keberatan nasabah Bank IFI berupa surat kuasa dan dokumen surat dari audit internal yang ditindaklanjuti oleh LPS dengan melakukan penelitian terhadap keberatan dimaksud yang hasilnya yaitu sebanyak enam rekening simpanan nasabah tetap dinyatakan sebagai Simpanan Tidak Layak Dibayar dan sebanyak enam rekening simpanan yang telah dicairkan dan dijadikan setoran modal.

- Permasalahan terkait aset non tunai yang diterima LPS dari BPR Tripanca Setiadana (terlikuidasi) telah diupayakan untuk dapat diselesaikan dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk menilai efektivitas program penjaminan pada bank yang masih hidup umumnya digunakan indikator batas nilai penjaminan dan indikator lainnya sesuai dengan *legal system* di suatu negara yang dalam hal ini LPS menggunakan *LPS rate coverage* sebagai *proxy* dari efektivitas program penjaminan pada bank yang masih hidup

BPK merekomendasikan kepada Kepala Eksekutif LPS antara lain agar:

- Mengkaji dan menetapkan peraturan-peraturan yang belum sepenuhnya lengkap dan selaras dalam rangka mendukung penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
- Meningkatkan monitoring atas pembahasan juklak serta upaya koordinasi dengan OJK terkait PLPS pemeriksaan, sehingga juklak dan pedoman pemeriksaan bersama dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
- Melakukan evaluasi pengembangan struktur organisasi LPS agar sesuai dengan analisis beban kerja dan disesuaikan dengan praktik pelaksanaan likuidasi pada Group Likuidasi.
- Segera memperbaiki kelemahan penilaian indikator prospek usaha dalam analisis penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik untuk pengambilan keputusan.
- Mengumpulkan data dan informasi dari pihak selain bank gagal, terutama dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi serta dalam rangka evaluasi besaran nilai simpanan yang dijamin.
- Memerintahkan Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank agar menyelesaikan penanganan keberatan sesuai dengan ketentuan.
- Segera melakukan langkah-langkah pengelolaan aset nontunai dari BDL agar dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
- Mengkaji dan melakukan revisi atas KPI lembaga yang belum mempertimbangkan faktor kualitas untuk kegiatan analisis resolusi bank, belum mengakomodir BDL dalam bentuk bank umum dan belum mempertimbangkan koordinasi antarunit dalam penentuan penanggung jawab penanganan keberatan nasabah.

- Memperbaiki parameter *LPS Rate Coverage* agar sesuai dengan ketentuan dalam rangka mengevaluasi besaran nilai simpanan yang dijamin.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektifitas penyelesaian bank gagal mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemeriksaan atas 32 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 24 objek pemeriksaan pada BUMN dan 8 objek pemeriksaan pada badan lainnya. Hasil pemeriksaan itu mengungkapkan 387 temuan yang memuat 505 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 191 kelemahan sistem pengendalian intern dan 314 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,19 triliun.

BUMN

HASIL pemeriksaan pada BUMN mencakup 21 objek pemeriksaan atas operasional BUMN dan 3 objek pemeriksaan atas pengelolaan lahan.

Operasional BUMN

PADA semester II 2015, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap pengelolaan operasional pada 21 BUMN yang terdiri atas 3 perum dan 18 persero, di antaranya Perum Perhutani, Perum Jasa Tirta II, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Pemeriksaan operasional BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2013, 2014 dan semester I tahun 2015. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no. 673 s.d 693*.

Pemeriksaan kegiatan operasional BUMN bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya BUMN telah merancang dan menyusun SPI secara memadai, namun penerapannya belum optimal dalam rangka mengamankan kekayaan perusahaan, dan

pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan operasional BUMN antara lain SOP belum disusun, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP tidak ditaati, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun	33	12
Perusahaan belum memiliki kebijakan strategis terkait dengan perluasan pangsa pasar dan SOP penutupan rute penerbangan.		PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan belum memiliki SOP tentang penyusunan HPS dalam proses pengadaan.		PT Semen Padang
Perusahaan belum memiliki mekanisme dan kebijakan yang baku dalam penghapusan piutang ragu-ragu.		PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Perusahaan belum memiliki prosedur sebagai data pembeding manifest jumlah penumpang final yang menjadi subjek pelayanan jasa pesawat udara (PJPU), sehingga pendapatan PJPU yang diterima hanya didasarkan atas manifest final yang disahkan pejabat perusahaan penerbangan.		PT Angkasa Pura II (Persero)
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	27	15
Perusahaan belum menerapkan Perdirjen Minerba terkait penyesuaian jarak angkut atas penjualan batu bara ke PLN Grup tahun 2013 dan 2014 yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan perusahaan.		PT Bukit Asam (Persero) Tbk.
Perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan karena tidak dapat memenuhi target produksi air minum dalam kemasan sesuai perjanjian dengan pihak ketiga.		Perum Perhutani
Proses pengambilalihan agunan yang diambil alih (AYDA) tidak sesuai dengan ketentuan di antaranya AYDA tidak didukung dengan dokumen legalitas yang memadai, sehingga perusahaan tidak bisa menjualnya.		PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero)

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP tidak ditaati	33	11
Proses pengalihan aset dari PT AP I dan PT AP II kepada Perum LPPNPI tidak memadai, di antaranya belum dilakukan inventarisasi sebelum diserahkan dan tidak diketahui asal aset yang diserahkan, apakah dari investasi PT AP, PMN atau Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS).		Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI)
Pembayaran kepada mitra kerja atas pekerjaan/proyek yang nilainya relatif besar tidak menggunakan cek/ giro bank tetapi dilakukan secara tunai sehingga berisiko disalahgunakan.		PT Pos Indonesia (Persero)
Pengelolaan dan pencairan kredit modal kerja tidak sesuai dengan ketentuan, di antaranya pengelola kredit tidak melakukan konfirmasi langsung ke lapangan pada saat pencairan kredit.		PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk
Lain-lain kelemahan SPI	71	19
PT Telkomsel belum menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya retribusi pengendalian menara kepada beberapa pmda.		PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan tidak cermat dalam melakukan analisis risiko pekerjaan sebelum menyetujui kontrak, sehingga perusahaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan menanggung denda pemutusan kontrak.		PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Laporan <i>outstanding</i> klaim kredit usaha rakyat (KUR) yang dijadikan dasar perhitungan pembentukan cadangan klaim pada Kantor Cabang Cikini dan Kemayoran disajikan terlalu besar, karena data status klaim tidak dilakukan <i>update</i> secara berkala, klaim dicatat ganda dan klaim yang sudah ditolak, namun masih tercatat dalam daftar <i>outstanding</i> klaim.		PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BUMN antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	26	85,19	6
Piutang usaha yang berpotensi tidak tertagih, di antaranya karena tidak didukung dokumen penagihan, perjanjian kerja sama, serta penyelesaian piutang atas kecurangan pegawai yang berlarut-larut.		34,13	PT Pos Indonesia (Persero)
Utang PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PJT II atas biaya jasa pengelolaan sumber daya air tahun 2011-2015 berpotensi tidak dilunasi.		21,27	Perum Jasa Tirta II (PJT II)
Piutang berpotensi tidak tertagih, di antaranya karena perusahaan melakukan pemutusan kontrak namun atas prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan belum seluruhnya dibayar oleh pemberi kerja.		3,52	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	17	49,65	9
Perusahaan belum mengenakan sanksi denda keterlambatan, di antaranya atas pelaksanaan pekerjaan pembuangan limbah <i>Fly Ash</i> dan <i>Bottom Ash</i> dan pekerjaan EPC Of Tarahan Port Expansion Phase 5 kepada pihak ketiga.	2	38,33	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Perusahaan belum mengenakan sanksi denda keterlambatan, di antaranya atas pengadaan dan pemasangan <i>automatic change over switch</i> serta pekerjaan <i>Upgrade ATC System Eurocat-X</i> yang waktu pelaksanaan diperpanjang dengan alasan yang tidak jelas.		3,38	Perum LPPNPI
Perusahaan belum mengenakan sanksi denda keterlambatan, di antaranya atas pengadaan suku cadang dan keterlambatan kedatangan batubara.		1,87	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	26	--	12
Perusahaan belum menyusun dokumen amdal untuk wilayah penambangan DU 956 di Kabupaten Kepulauan Meranti meskipun telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi di wilayah tersebut.		--	PT Timah (Persero) Tbk
Perusahaan melakukan perjanjian pengelolaan terminal peti kemas dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (Persero) yang belum memiliki izin usaha sebagai badan usaha pelabuhan dari Kementerian Perhubungan.		--	PT Pelindo II (Persero)

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Perma- salahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Perusahaan belum melunasi pajak pembangunan I (pajak hotel dan restoran) beserta sanksinya, atas unit Inna Simping Surabaya dan Head Quarter Bali.		--	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	115	1,038,61	19
Penerimaan PT Pelindo II (Persero) dari PT Hutchison Ports Jakarta PTE Limited (HPI) atas pembayaran diterima di muka/ <i>Up front fee</i> perpanjangan perjanjian PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT) belum optimal karena pemotongan pajak penghasilan oleh Otoritas Pajak Singapura masih dapat dihindarkan dan PT Pelindo II belum menerima pendapatan sewa atas penggunaan 4 unit <i>Rubber Tyred Gantry</i> (RTG) dari PT JICT.		450,40	PT Pelindo II (Persero)
Pemborosan karena penyediaan pesawat dilakukan menggunakan metode <i>sale and lease back</i>, dan pengembangan <i>passenger service system</i> tidak memadai, serta terjadi kelebihan pembayaran premi asuransi pesawat.		249,26	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Jaminan pelaksanaan dan jaminan pembayaran uang muka tidak dapat dicairkan, ketidakhematan dalam pemakaian batu bara serta harga satuan dalam nilai kontrak pekerjaan yang melebihi HPS.		86,13	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Inefisiensi karena biaya pengangkutan kapal curah dan hasil pengadaan kertas tidak memenuhi standar, barang yang dibeli belum dimanfaatkan, serta pembelian barang yang sama tidak dapat dibatalkan.		63,89	PT Semen Tonasa
Pembelian tanah untuk proyek The Canggü Condotel yang dilakukan sejak 2011 belum dimanfaatkan, dan terdapat pendapatan sewa gedung beserta dendanya yang belum diterima dari pihak ketiga.		82,99	PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero)

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Perusahaan belum memiliki SOP sesuai dengan kebutuhan dan menyusun perencanaan kegiatan operasional secara efektif.
- Sistem pengendalian internal perusahaan belum dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk dapat mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan perusahaan.

- Direksi belum melakukan pengawasan dan pengendalian yang optimal terhadap operasional perusahaan.

Secara umum BUMN akan lebih cermat dalam memedomani ketentuan, serta menyusun prosedur yang belum disusun. Denda keterlambatan akan di hitung dan ditagihkan kepada pihak ketiga dalam pembayaran termin berikutnya. Selain itu, terkait kredit yang bermasalah, manajemen telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit yaitu diantaranya dengan melakukan penagihan kepada debitur dan melelang barang agunan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMN pada 21 BUMN mengungkapkan 264 temuan yang memuat 348 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 164 kelemahan sistem pengendalian intern dan 184 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN terkait agar:

- Menyusun prosedur atau mekanisme yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.
- Melakukan upaya penagihan atas kerugian dan kekurangan penerimaan perusahaan serta mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan.

Atas permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas perusahaan sebesar Rp2,13 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas operasional BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran G.1 dan G.2*.

Pengelolaan Lahan

BPK melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan lahan tahun 2012, 2013 dan 2014 terhadap 3 BUMN perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II di Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta, PTPN VIII di Jawa Barat dan DKI Jakarta serta PTPN XIV di Sulawesi Utara, DKI

Jakarta dan Maluku Utara. Daftar laporan hasil pemeriksaan mengenai pengelolaan lahan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B* No. 694 s.d 696.

Pemeriksaan pengelolaan lahan bertujuan untuk menilai kecukupan desain dan implementasi pengendalian intern dalam pengelolaan lahan yang dimiliki PTPN dan menemukan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat berdampak material terhadap pengelolaan lahan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan lahan PTPN II, VIII dan XIV tahun 2012, 2013 dan 2014 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan lahan baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan lahan PTPN antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, SOP tidak ditaati, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Lahan

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	4	1
Perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan belum mendapat persetujuan dari pemegang saham, dan terdapat kesalahan perhitungan kompensasi sehingga perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan kompensasi.		PTPN VIII
Perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan tidak mencantumkan klausul denda keterlambatan dan klausul yang menjelaskan kewajiban pembayaran minimal yang mengakibatkan perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar Rp30,03 miliar.		PTPN VIII
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	2	2
Perusahaan tidak dapat mencatat nilai tanah pada laporan keuangan karena tidak memiliki data tentang nilai perolehan tanah atas lahan yang dikuasainya.		PTPN II

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Aset tetap tanah dan beban tangguhan hak atas tanah masing-masing sebesar Rp28,53 miliar dan Rp2,32 miliar tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.		PTPN XIV
SOP tidak ditaati	1	1
Perusahaan belum memanfaatkan secara optimal jasa advokat HWLF dalam menangani gugatan sesuai perjanjian kerjasama.		PTPN VIII
Lain-lain kelemahan SPI	4	2
Penyelesaian permasalahan lahan Eks HGU seluas 5.873,06 ha berlarut-larut sehingga perusahaan tidak dapat mengoptimalkan lahan tersebut dan menimbulkan permasalahan dengan pihak lain.		PTPN II
Perusahaan belum memiliki pedoman pelaksanaan kerja sama kemitraan dalam upaya pengamanan lahan dan penyelesaian okupasi/sengketa lahan.		PTPN VIII
Pencatatan akuntansi atas Hak Guna Usaha (HGU) tidak mencerminkan nilai aset yang dikuasai perusahaan.		PTPN VIII

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lahan antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima, pembelian aset yang berstatus sengketa, kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Lahan

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda belum dipungut/diterima	4	1,71	2
Perusahaan belum memperoleh ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan arteri akses Bandara Kuala Namu.		1,42	PTPN II

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Perusahaan kurang menagih denda keterlambatan atas pembayaran pinjam pakai lahan sebesar Rp144,58 juta, belum menagih pembayaran PBB atas lahan yang dikerjasamakan sebesar Rp64,50 juta, serta kompensasi sewa lahan sebesar Rp79,20 juta.		0,28	PTPN VIII
Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	3,44	1
Lahan hasil tukar guling dengan Pemerintah Kabupaten Luwu diklaim oleh masyarakat sehingga berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp3,44 miliar.		3,44	PTPN XIV
Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	5	--	2
Terdapat sertifikat HGU atas lahan yang dikuasai perusahaan sudah berakhir masa berlakunya dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.		--	PTPN VIII
Sebanyak 9 lahan yang dikelola perusahaan seluas 20.542,20 Ha belum memiliki legalilias yang memadai di antaranya belum pernah diterbitkan HGU.		--	PTPN XIV
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	6	--	3
Kerja sama pemanfaatan lahan kebun Bekala menjadi kawasan perumahan antara PTPN II dengan Perumnas belum berjalan dan berpotensi gagal, karena belum dilakukan upaya pembebasan lahan.		--	PTPN II
Proses penandatanganan <i>master agreement</i> pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan antara PTPN II dengan PT Ciputra KPSN berlarut-larut,		--	PTPN II
PTPN XIV dan Pemkab Luwu tidak mempunyai dokumen kesepakatan dan berita acara tukar guling lahan seluas ±412 Ha, kajian legal, kajian ekonomis dan laporan pelaksanaan pemindahtanganan aktiva tetap kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Permen BUMN.		--	PTPN XIV
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	--	1

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Per-masalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Keberadaan lahan seluas 99,15 Ha di Sub Unit Jeneponto tidak dapat ditunjukkan.		--	PTPN XIV
Perjanjian <i>Built Operate Transfer</i> (BOT) pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit belum melindungi kepentingan perusahaan.		--	PTPN XIV

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Perusahaan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan kompensasi atas perjanjian pinjam pakai lahan serta berpotensi mengalami kerugian karena adanya klaim masyarakat atas tukar guling lahan.
- Perusahaan belum menerima pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan, kompensasi serta pembayaran PBB atas lahan yang dikerjasamakan.
- Pelaksanaan perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan dan tukar guling lahan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena Direksi belum mengelola lahan secara optimal khususnya dalam menuntaskan permasalahan pengamanan lahan, tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam melakukan kerjasama pengelolaan lahan/kemitraan dan tukar guling, serta belum melakukan upaya yang efektif dalam melakukan penertiban aset tetap tanah dan penagihan ganti rugi lahan, kompensasi serta denda keterlambatan.

PTPN menanggapi bahwa Direksi akan berusaha menagih kekurangan perhitungan denda keterlambatan dan kekurangan perhitungan nilai kompensasi, serta berupaya mengamankan lahan, dan meningkatkan status kepemilikan lahan.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PTPN terkait untuk:

- Melakukan inventarisasi dan penertiban aset tetap tanah serta menyelesaikan permasalahan hukum dan legalitas lahan.
- Melakukan penagihan atas ganti rugi lahan, kompensasi serta denda keterlambatan.

- Mempertanggungjawabkan dan meminta persetujuan kepada RUPS atas perikatan kerjasama pinjam pakai lahan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan lahan pada 3 PTPN mengungkapkan 26 temuan yang memuat 30 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan sistem pengendalian intern dan 19 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,15 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan lahan pada 3 BUMN dapat dilihat pada *Lampiran G.3 dan G.4*.

Badan Lainnya

PDTT pada badan lainnya meliputi pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas pada Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKK Migas), pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta beban dan pengelolaan aset tetap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perhitungan Bagi Hasil Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas itu dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah.



Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja.

Perhitungan bagi hasil adalah perhitungan antara pemerintah dalam hal ini SKK Migas dan KKKS dimana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Pelaksanaan perhitungan bagi hasil tiap-tiap tahun dihitung dari *lifting* setelah dikurangi biaya operasi.

BPK melakukan pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas tahun 2014 pada SKK Migas di 7 wilayah kerja yang dilaksanakan oleh 7 KKKS. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran B no 697 s.d 702*. Wilayah kerja KKKS yang diperiksa BPK yaitu:

Tabel 3.5 Wilayah Kerja KKKS yang Diperiksa BPK
dalam Rangka Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2014

	Wilayah Kerja	KKKS
1.	South Natuna Sea "B"	ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.
2.	Corridor	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
3.	Rokan	PT Chevron Pacific Indonesia
4.	Eks Pertamina Block	PT Pertamina EP
5.	South East Sumatra	CNOOC SES LTD
6.	Mahakam	Total E & P Indonesie dan INPEX Corporation
7.	Natuna Sea A	Premier Oil Natuna Sea B.V

Pemeriksaan perhitungan bagi hasil migas bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan bagi hasil meliputi perhitungan volume dan nilai *lifting* minyak mentah dan gas, biaya yang dimintakan penggantian (*cost recovery*), termasuk pembebanan biaya dari *home office*, PPh migas, serta perhitungan bagi hasil bagian pemerintah dan bagian kontraktor. Selain itu, untuk menilai kepatuhan KKKS terhadap PSC/ KKS, peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern dalam kegiatan produksi dan *lifting* migas.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2014. Simpulan tersebut didasarkan atas koreksi-koreksi perhitungan bagi hasil migas serta ditemukannya kelemahan-kelemahan pengendalian intern serta peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

BERDASARKAN hasil pemeriksaan dijumpai permasalahan pengendalian intern, yaitu KKKS CNOOC SES Ltd. tidak memiliki *flowmeter* tanker penerima sehingga realisasi volume HSD Fuel yang diterima dari PT Pertamina melebihi batas *toleransi loss* 0,5% yang mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas pembelian HSD Fuel.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perhitungan bagi hasil migas tahun 2014 antara lain koreksi atas perhitungan bagi hasil antara pemerintah dengan KKKS, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid, dan penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	KKKS
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS	54	4.005,24	6
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Klaim <i>investment credit</i> dan interest <i>cost recovery</i> tidak sesuai persetujuan SKK Migas. - Pembebanan bea masuk, PPh Pasal 22 Impor dan PPN Impor tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM/ Menteri Keuangan. - Pemberian tunjangan ekspatriasi kepada tenaga kerja asing (TKA) belum mendapat persetujuan SKK Migas. - Ketidaktepatan pembebanan biaya-biaya di antaranya atas <i>day rate</i> ASV, mobilisasi dan demobilisasi ASV, serta <i>supply vessel</i> pada proyek <i>Engineering, Procurement, Construction and Intallation</i> (EPCI) South Belut. - Pencadangan dana pesangon lebih kecil dari nilai yang telah dibebankan dalam <i>cost recovery</i>.		2.234,02	KKKS Conoco PhillipsIndonesia & KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	KKKS
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Biaya amandemen kontrak terkait dengan penyesuaian upah minimum subsektor migas Provinsi Riau 2013 tidak sesuai PP 79 Tahun 2010. - Denda keterlambatan kurang/ belum dikenakan. - Biaya pekerjaan aplikasi Ariba yang tidak disetujui SKK Migas. - Biaya personel seperti <i>goods & service supplement</i>, <i>spouse allowance</i>, <i>automobile sale loss allowance</i>, <i>expatriate premium</i> dan <i>housing allowance</i> tidak sesuai Pedoman Tata Kerja Nomor 018/PTK/X/2008		312,34	KKKS Chevron Pacific Indonesia
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Biaya atas kegiatan pemboran dan <i>workover</i> yang telah dibatalkan. - Biaya <i>toll fee</i>, pembelian aset harta benda modal tanpa melalui kapitalisasi, serta biaya asuransi yang seharusnya ditanggung mitra KSO. - Realisasi biaya <i>Authorization for Expenditure</i> (AFE) yang melebihi <i>Close Out Report</i> (COR) yang telah disetujui SKK Migas. - Biaya administrasi yang tidak sesuai dengan PP No.79 Tahun 2010.		365,62	KKKS PT Pertamina EP
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Biaya rental/ sewa pipa bor yang seharusnya menjadi tanggung jawab kontraktor. - Realisasi biaya AFE yang melebihi COR yang telah disetujui SKK Migas. - Pengenaan <i>daily workover rate</i> atas sewa <i>workover rig</i> tidak mengacu pada <i>daily workover report</i>.		65,91	KKKS CNOOC SES Ltd.
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Biaya <i>development drilling</i> tidak memiliki dasar pembebanan. - Klaim <i>investment credit</i> tahun 2014 tidak sesuai dengan persetujuan Work Program & Budget dari SKK Migas. - Pajak atas diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. - Biaya penanganan insiden semburan gas dangkal (<i>shallow gas release</i>) karena kekeliruan implementasi prosedur pemboran dan telah masuk pertanggungan asuransi.		936,29	KKKS Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation

Permasalahan Utama & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	KKKS
- Biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam <i>cost recovery</i>: - Denda keterlambatan pekerjaan tidak dikenakan. <i>Reimbursable cost</i> yang tidak sesuai kontrak, di antaranya berupa pembayaran <i>cost of adjustment of personal</i> yang tidak didukung surat permintaan penambahan personil, dan peralatan dan jasa yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab kontraktor. - Biaya personel tidak sesuai Surat Persetujuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. - Biaya personel <i>Senior Concept Engineer</i> dan <i>Senior Petroleum System Geologist</i> tidak sesuai ketentuan.		91,06	KKKS Premier Oil Natuna Sea BV
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	1	--	1
Pembayaran biaya <i>services for company</i> tidak dilengkapi dengan bukti pendukung/dokumentasi terkait lainnya yang dapat mendukung kebenaran pengeluaran biaya.			KKKS Premier Oil Natuna Sea BV
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	2	--	2
ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (COPI) belum melakukan kewajiban untuk melakukan pencadangan dana kegiatan pasca operasi (KPO) untuk Wilayah Kerja South Natuna Sea BV.			KKKS ConocoPhillips Indonesia
11 (sebelas) tenaga kerja asing PT Premier Oil Natuna Sea BV (PONDSBV) tidak menjalankan kewajiban memberikan <i>general lecture</i> sebagai bagian dari pengembangan tenaga nasional.			KKKS Premier Oil Natuna Sea BV

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut mengakibatkan:

- Pembebanan biaya-biaya yang seharusnya tidak layak diperhitungkan dalam *cost recovery* mengakibatkan kekurangan bagian negara dari perhitungan bagi hasil migas.
- Fasilitas kerja terkait *service for company* yang diterima oleh PONDSBV tidak diyakini sesuai dengan kontrak.
- Terhambatnya program alih teknologi berkaitan dengan pengenalan teknologi baru untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- Timbulnya risiko tidak terjaminnya penyediaan dana dan pelaksanaan KPO setelah COPI mengembalikan WK South Natuna Sea B kepada Pemerintah.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi antara lain karena:

- KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.

- Perbedaan persepsi dan simpulan atas interpretasi hak untuk klaim *investment credit* lapangan gas antara SKK Migas dan KKKS.
- COPI tidak mengindahkan ketentuan PSC dan selain PSC untuk memenuhi kewajiban pemulihan wilayah kerja pascaoperasi.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.
- Pejabat terkait tidak melaksanakan verifikasi dan pembayaran sesuai ketentuan dalam kontrak dan lalai dalam pengelolaan TKA.

SKK Migas menanggapi akan melakukan kajian lebih lanjut dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, sedangkan temuan biaya yang tidak sesuai dengan isi Peraturan Tata Kerja (PTK) tentang pengelolaan sumber daya manusia, seharusnya tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya operasi yang dapat di *cost recovery* oleh kontraktor kontrak kerja sama.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada SKK Migas agar memerintahkan KKKS untuk:

- Melakukan koreksi klaim *investment credit* pada *Financial Quarterly Report* (FQR) tahun 2015, dan jika tidak dilakukan koreksi agar melakukan upaya hukum untuk memulihkan hak negara atas *investment credit* yang diklaim KKKS, sesuai jalur penyelesaian yang diatur dalam PSC.
- Melakukan koreksi *cost recovery* pada FQR tahun 2015 serta memperhitungkan tambahan bagian negara.
- Memberikan peringatan kepada pejabat yang bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Segera melakukan komitmen formal untuk mencadangkan dana KPO mulai tahun 2015 dengan membuka rekening bersama dan melakukan penyetoran sesuai kesepakatan nilai yang telah disetujui oleh SKK Migas.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pelaksanaan perhitungan bagi hasil migas mengungkapkan 58 temuan yang memuat 58 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 kelemahan sistem pengendalian intern dan 57 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,00 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan perhitungan bagi hasil migas disajikan selengkapnya pada *Lampiran G.5* dan *G.6*.

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

LPEI atau Indonesia Eximbank merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI. Lembaga ini merupakan transformasi dari PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) atau Bank BEI yang tujuan pendiriannya untuk melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi dan jasa konsultasi pada badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah LPEI di Surabaya dan Medan (Lampiran B No. 703). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai desain dan implementasi sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi LPEI.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI pada tahun 2014 sampai dengan semester I 2015 belum sepenuhnya didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI adalah SOP belum disusun dan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.

Tabel 3.7 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

Permasalahan Utama & Contohnya
SOP belum disusun
LPEI belum mempunyai kebijakan analisis pembiayaan terhadap debitur/ perusahaan yang tidak dapat dibiayai oleh perbankan namun mempunyai potensi untuk mendukung ekspor nasional serta kebijakan batasan pembiayaan antara eksportir langsung dan eksportir penunjang ekspor.

- Tidak terdapat kebijakan/ peraturan mengenai status dana eks program kemitraan Bank BEI yang masih dikelola LPEI.
- Penetapan tarif premi asuransi proteksi piutang dagang dan tarif premi asuransi *marine cargo* LPEI serta kebijakan pemberian *no claim bonus* belum didukung dengan peraturan internal LPEI.

Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja

- Skema pembiayaan *two step loan* diberikan debitur kepada *end user* yang tidak memiliki kegiatan usaha terkait ekspor baik langsung maupun tidak langsung, serta LPEI tidak melaksanakan monitoring terhadap penyaluran pembiayaan dengan metode *two step loan*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan kepatuhan LPEI dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain, penyimpangan peraturan bidang tertentu serta pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan.

Tabel 3.8 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

Permasalahan Utama & Contohnya
Penyimpangan peraturan bidang tertentu • Pengikatan dan penilaian agunan belum sesuai ketentuan seperti agunan yang diberikan debitur belum dilakukan pengikatan secara sempurna, nilai agunan tidak meng-cover nilai pembiayaan, dan penurunan nilai agunan tetapi belum dimintakan penambahan agunan. • Pemberian fasilitas pembiayaan kredit sindikasi kepada 2 debitur senilai US\$100 juta digunakan bukan untuk modal kerja atau investasi debitur yang dapat menunjang ekspor, melainkan untuk membayar hutang. • Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan memberikan penurunan tingkat suku bunga di bawah <i>base lending rate</i> kepada debitur yang telah mencapai kolektibilitas 2 pascarestrukturisasi, serta memberikan penurunan tingkat suku bunga di bawah <i>base lending rate</i> dan pemberian fasilitas Bunga yang Ditangguhkan (BYDT) secara bersamaan. • Pemberian pembiayaan kepada perusahaan yang baru saja berdiri dan dijamin oleh perusahaan yang kondisi keuangannya tidak baik. • Terdapat pencairan dan penggunaan fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian serta adanya penarikan fasilitas pembiayaan sebelum kewajiban dan syarat efektif fasilitas pembiayaan terpenuhi, yang akhirnya pembiayaan pada 3 debitur menjadi macet senilai Rp47,92 miliar.
Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan • Metode penentuan tingkat kolektibilitas yang digunakan LPEI belum sepenuhnya mengakomodasi pedoman penilaian kolektibilitas sesuai dengan Lampiran I PMK Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan:

- Pemberian fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan oleh LPEI berisiko tidak tepat sasaran dan tidak jelas peruntukan serta kaitannya dengan kegiatan ekspor.
- Pencairan dan penggunaan fasilitas pembiayaan tidak memiliki dasar yang memadai dan menjadi pembiayaan macet yang merugikan LPEI.
- Hilangnya potensi penerimaan LPEI yang berasal dari pendapatan bunga.
- Potensi risiko hukum dan keuangan bagi LPEI karena agunan belum diikat sempurna dan tidak meng-cover pembiayaan.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- LPEI belum memiliki SOP atau kebijakan yang mengatur analisis pembiayaan yang memungkinkan debitur *nonbankable* untuk memperoleh pembiayaan, dan belum adanya kebijakan tentang status dana eks Program Kemitraan Bank BEI yang masih dikelola LPEI secara ekstrakomptabel serta peraturan internal terkait dengan besaran tarif premi asuransi proteksi piutang dagang dan *marine cargo* serta *no claim bonus*.
- Pengendalian atas fasilitas pembiayaan kredit transaksional kurang memadai dan belum ada mekanisme untuk memastikan bahwa kewajiban dan syarat efektif kontrak telah terpenuhi.
- Divisi Pembiayaan, Divisi Analisa Risiko dan Bisnis, dan Komite Pembiayaan dalam melakukan analisis dan keputusan pembiayaan sindikasi kurang mempertimbangkan pembiayaan LPEI yang bertujuan menunjang kegiatan ekspor, tidak cermat dalam mengusulkan agunan, belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan terkait pengenaan bunga serta dalam melakukan analisis terhadap *buyers* yang baru.
- Kepala Divisi Pembiayaan, Kepala Divisi Analisa Risiko dan Bisnis dan Komite Pembiayaan kurang cermat dalam mempertimbangkan seluruh informasi mengenai debitur dalam penentuan tingkat kolektibilitas debitur serta belum menyesuaikan tingkat kolektibilitas debitur secara optimal.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Direktur LPEI menyatakan penggunaan mekanisme *two step loan* yang dilaksanakan LPEI dalam pemberian fasilitas pembiayaan merujuk kepada ketentuan yang diatur tentang kebijakan pembiayaan. Kemudian untuk kredit macet, masih

dalam proses penyelesaian maka belum dapat dikatakan kredit macet merugikan LPEI namun berupa potensi kerugian. Selanjutnya perbedaan penentuan kolektibilitas antara LPEI dengan pihak KAP terjadi diantaranya karena adanya perbedaan penafsiran atas kondisi.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Dewan Direktur LPEI untuk:

- Berkoordinasi dengan pemerintah agar merumuskan kembali dan menetapkan secara jelas kebijakan analisis pembiayaan atas calon debitur yang memiliki pangsa untuk mendukung ekspor nasional namun tidak dapat dibiayai oleh perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip *good corporate governance*.
- Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk menetapkan status dana eks Program Kemitraan PT BEI (Persero) termasuk mekanisme pelaporannya dikaitkan dengan tugas, fungsi dan wewenang LPEI.
- Menetapkan peraturan internal terkait dengan besaran tarif premi asuransi Proteksi Piutang Dagang dan tarif premi asuransi *Marine Cargo* serta *no claim bonus*.
- Menetapkan kebijakan tentang mekanisme pengawasan pembiayaan melalui skema *two step loan* kepada *end user*
- Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembiayaan macet pada PT SCC, CV AP dan PT JI dalam rangka memulihkan kerugian LPEI termasuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum terkait indikasi pelanggaran hukum.
- Memerintahkan Direktur Eksekutif melakukan pembinaan kepada Kepala Divisi Pembiayaan, Kepala Divisi Analisa Risiko dan Bisnis dan Komite Pembiayaan supaya cermat dalam mempertimbangkan tujuan pembiayaan LPEI dalam pemberian pembiayaan sindikasi, cermat dalam mengusulkan agunan, supaya memperhatikan ketentuan LPEI terkait dengan pengenaan suku bunga serta cermat dalam melakukan analisis terhadap *buyers* yang baru.
- Memerintahkan Direktur Eksekutif agar melakukan pembinaan kepada Kepala Divisi Pembiayaan, Kepala Divisi Analisa Risiko dan Bisnis, dan Komite Pembiayaan supaya cermat dalam mempertimbangkan seluruh informasi tentang debitur dalam penentuan tingkat kolektibilitas

debitur serta melakukan penyesuaian tingkat kolektabilitas sesuai dengan kondisi debitur.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI mengungkapkan 17 temuan yang memuat 18 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan sistem pengendalian intern dan 12 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan LPEI disajikan selengkapnya pada *Lampiran G.7 dan G.8*.

Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Otoritas Jasa Keuangan

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

BPK melakukan pemeriksaan atas beban dan pengelolaan aset tetap OJK pada Kantor Pusat dan Kantor Regional OJK di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar (*Lampiran B No. 704*).



Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban beban dan pengelolaan aset tetap selama 2014-2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas beban dan pengelolaan aset tetap OJK difokuskan pada penetapan standar biaya, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi OJK, kewajaran harga pengadaan aset dan jasa, serta keterjadian kegiatan yang dibiayai dan keberadaan aset yang dibeli.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban beban dan pengelolaan aset tetap Tahun 2014 dan 2015 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban beban dan pengelolaan aset tetap baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas beban dan pengelolaan aset tetap OJK antara lain SOP belum disusun, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, perencanaan kegiatan tidak memadai, lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK

Permasalahan Utama & Contohnya
SOP belum disusun
- Fungsi Departemen Keuangan (DKEU) OJK dalam kegiatan monitoring dan verifikasi kebenaran pembebanan dan angka realisasi beban belum diatur secara jelas. - Standar mengenai komponen biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen belum dimiliki - Tidak terdapat pedoman mengenai pencatatan aset di satuan kerja
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
Terdapat selisih antara pengeluaran menurut bank dengan pencatatan beban menurut aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan (SISKA) karena tidak dilakukan rekonsiliasi secara periodik

- Pelaksanaan rekonsiliasi aset belum memadai, terdapat perbedaan nilai antara laporan aset semester I 2015 dengan master data pengadaan Departemen Logistik (DLOG) dan dengan Laporan Aset dari Kantor OJK, adanya inkonsistensi pencatatan aset pengadaan oleh DLOG, serta terdapat aset pengadaan tahun 2014 yang dicatat pada 2015.

Perencanaan kegiatan tidak memadai

- OJK belum memiliki informasi yang lengkap mengenai rencana pengadaan di seluruh satker OJK beserta monitoringnya.

Lain-lain kelemahan SPI

- Pencairan uang muka yang telah dikembalikan dan/ atau dipertanggungjawabkan, namun belum dikoreksi pada aplikasi SISKAS.
- Proses penginputan data SISKAS masih memiliki kelemahan, yaitu fitur “penyesuaian” dalam SISKAS mengakomodasi penambahan beban dan tanggal Formulir Pencairan Dana diinput secara manual.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan OJK terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam beban dan pengelolaan aset tetap antara lain proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, pemborosan atau kemahalan harga, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK

Permasalahan Utama & Contohnya
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan
• Biaya langsung personil dalam pengadaan jasa konsultan ditetapkan tanpa melalui proses evaluasi, klarifikasi dan negosiasi yang memadai. • Penyusunan HPS dalam pengadaan jasa pelaksanaan kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen tidak didukung sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima
• Penyelesaian pekerjaan pengadaan peralatan Teknologi Informasi (TI) OJK mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp824,68 juta. • Penyelesaian pekerjaan jasa konsultasi penataan organisasi OJK tahun 2014 mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda sebesar Rp285,00 juta.
Pemborosan atau kemahalan harga
• Pemborosan atas pengadaan langsung barang cetakan tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp1,40 miliar karena harga satuan barang cetakan melalui pengadaan langsung lebih tinggi dibandingkan dengan harga satuan kontrak melalui pelelangan.

Permasalahan Utama & Contohnya
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume
• Terdapat selisih harga sewa dalam perjanjian sewa gedung kantor regional 6 dengan Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) senilai Rp8,16 miliar dan gedung tersebut belum dapat dimanfaatkan, sehingga menimbulkan kerugian sewa sebesar Rp477,00 juta. • Pembebanan PPh oleh penyedia barang dalam dokumen penawaran sehingga lebih bayar sebesar Rp221,88 juta.
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan
• Pembayaran biaya penginapan melebihi standar biaya OJK sebesar Rp556,90 juta. • Penyedia pengadaan barang cetakan TA 2015 tidak memenuhi kriteria kualifikasi karena dokumen penawaran tidak sesuai dengan dokumen pengadaan serta terdapat indikasi pemecahan kontrak pengadaan barang cetakan tahun 2014 dan 2015. • Panitia pengadaan meubelair tidak cermat dalam melakukan evaluasi atas spesifikasi barang yang ditawarkan dan barang yang diterima OJK berindikasi tidak sesuai spesifikasi teknis.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- OJK belum menyusun dan menetapkan SOP yang memadai terkait pencairan dana, pencatatan beban, dan penatausahaan aset.
- Kelemahan sistem aplikasi SISKAS dan ketidaktertiban dalam pelaksanaan rekonsiliasi beban secara periodik.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lalai dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian atas pengadaan barang dan jasa.
- Panitia pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan pengadaan barang serta pejabat penerima hasil pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas barang yang diterima.

OJK akan memperbaiki aturan dan sistem informasi terkait pencairan dana, pencatatan beban dan penatausahaan aset. Saat ini OJK tengah melakukan penelusuran dan penyelesaian selisih rekonsiliasi yang terjadi. OJK juga memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner OJK agar:

- Memperbaiki sistem informasi dan ketentuan terkait pencairan dan pertanggungjawaban dana serta pencatatan dan penatausahaan beban dan aset.
- Memberikan sanksi kepada PPK, Panitia Pengadaan, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaannya.
- Menginstruksikan PPK untuk memerintahkan rekanan untuk menyetorkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan ke kas/rekening OJK.
- Memerintahkan Audit Intern Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) untuk melakukan audit investigasi/ audit menyeluruh terutama atas kesesuaian spesifikasi meubelair.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan beban dan pengelolaan aset tetap OJK mengungkapkan 22 temuan yang memuat 51 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern dan 42 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp13,12 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas beban dan pengelolaan aset tetap OJK disajikan pada *Lampiran G.9 dan G.10*.

Hasil pemeriksaan atas 41 objek pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya mengungkapkan 506 temuan yang memuat 644 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 194 kelemahan sistem pengendalian intern dan 450 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,52 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp2,13 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya disajikan pada Tabel 3.11.

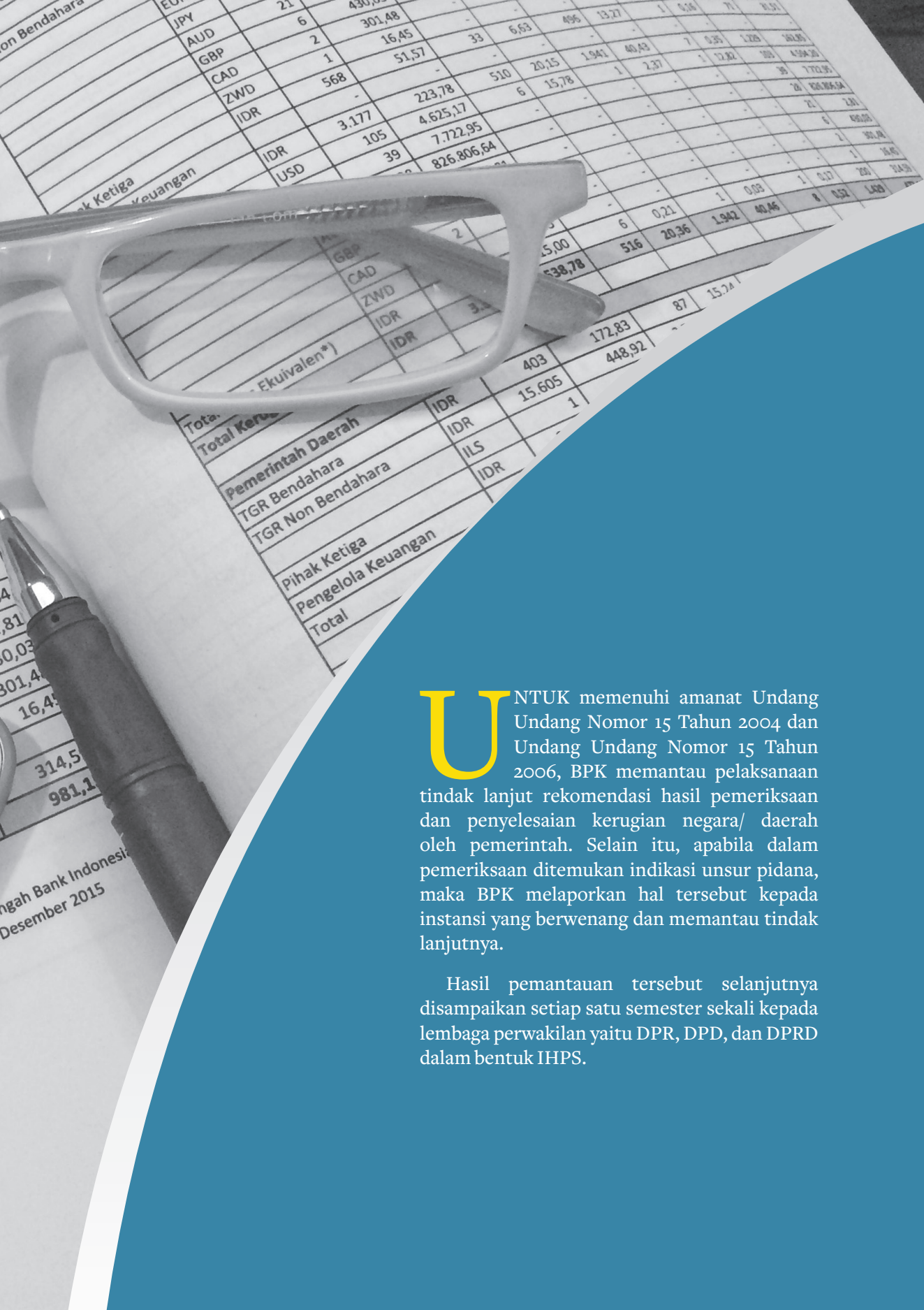
Tabel 3.11 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Kinerja		PDTT		Total	
	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)	Perma salahan	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI						
1. SPI	3	-	191	-	194	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan						
2. Kerugian	-	-	29	87.101,49	29	87.101,49
3. Potensi kerugian	-	-	34	95.300,80	34	95.300,80
4. Kekurangan penerimaan	3	55.527,44	105	4.560.302,59	108	4.615.830,03
Sub Total 1 (berdampak finansial)	3	55.527,44	168	4.742.704,88	171	4.798.232,32
5. Penyimpangan Administrasi	-	-	110	-	110	-
6. Ketidakhematan	2	1.872,41	17	292.625,81	19	294.498,22
7. Ketidakefisienan	23	89.143,67	4	30.005,50	27	119.149,17
8. Ketidakefektifan	108	182.920,24	15	131.667,68	123	314.587,92
Sub Total 2	133	273.936,32	146	454.298,99	279	728.235,31
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)	136	329.463,76	314	5.197.003,87	450	5.526.467,63
Total	139	329.463,76	505	5.197.003,87	644	5.526.467,63
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara (Rp juta)	-	-		2.135,28		2.135,28
Jumlah LHP	-	9		32		41
Jumlah Temuan		119		387		506

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS.

Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) 2010-2014 dan tahun 2015 yang disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pemantauan tindak lanjut dilakukan setelah BPK menerima jawaban atau penjelasan dari pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian

peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan.

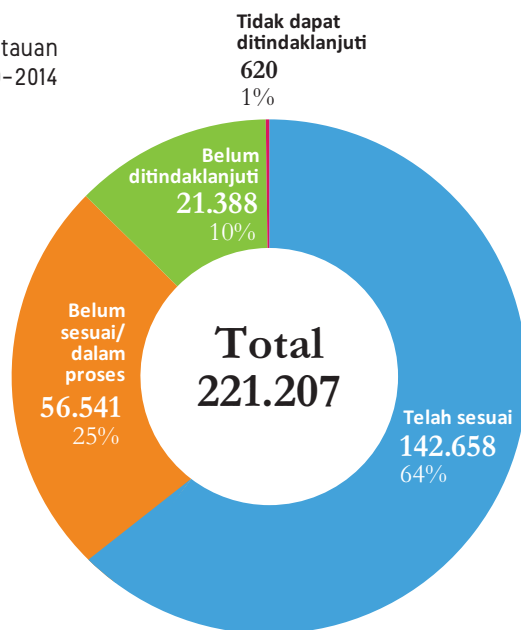
Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 221.207 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010–2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp100,56 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 142.658 rekomendasi (64%) senilai Rp46,33 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 56.541 rekomendasi (25%) senilai Rp49,31 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 21.388 rekomendasi (10%) senilai Rp4,15 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 620 rekomendasi (1%) senilai Rp771,94 miliar.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010–2014



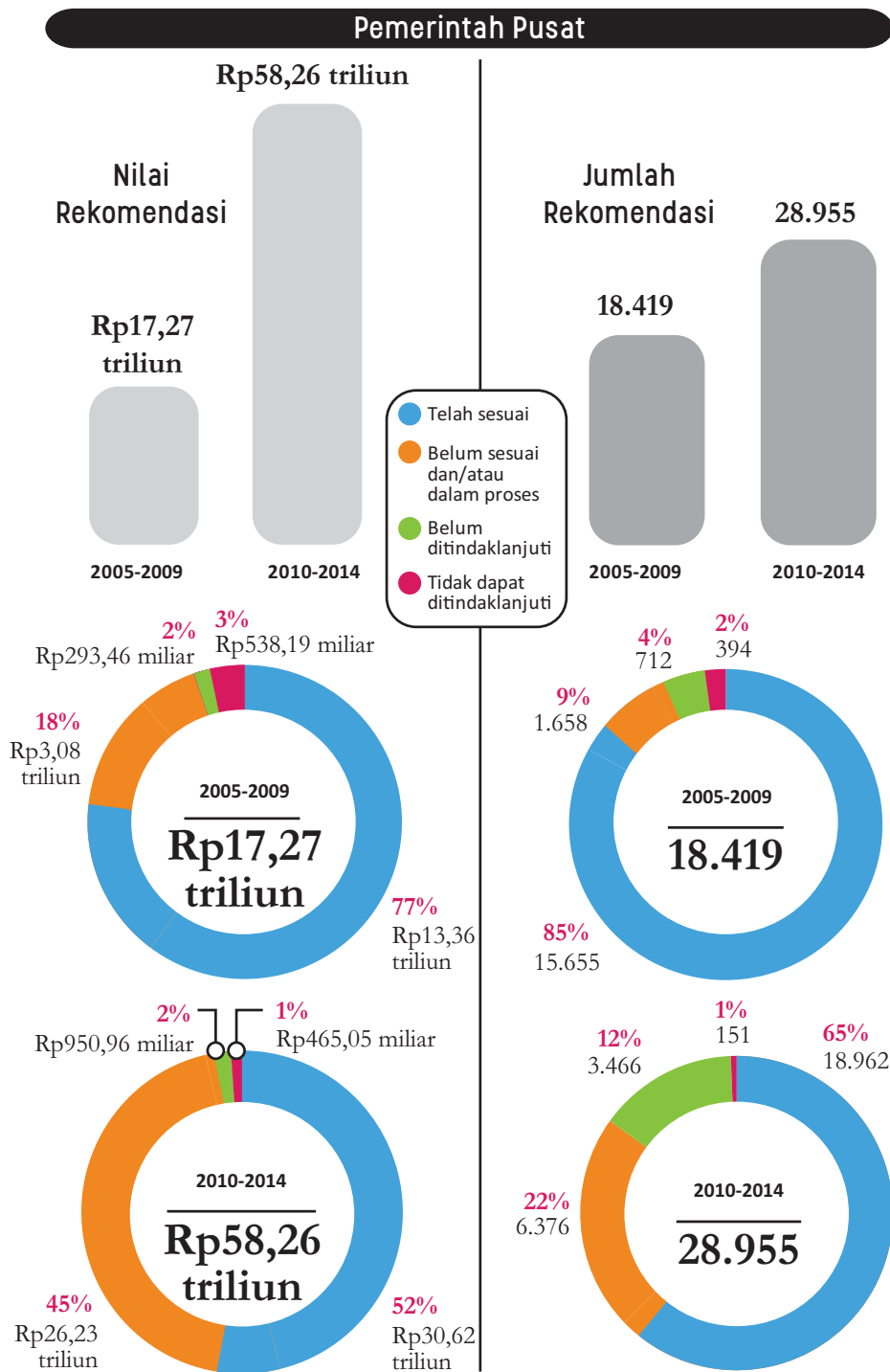
Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (64%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Adapun, dalam periode 2005-2009 masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 19.624 rekomendasi senilai Rp12,88 triliun dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 6.373 rekomendasi senilai Rp1,22 triliun.

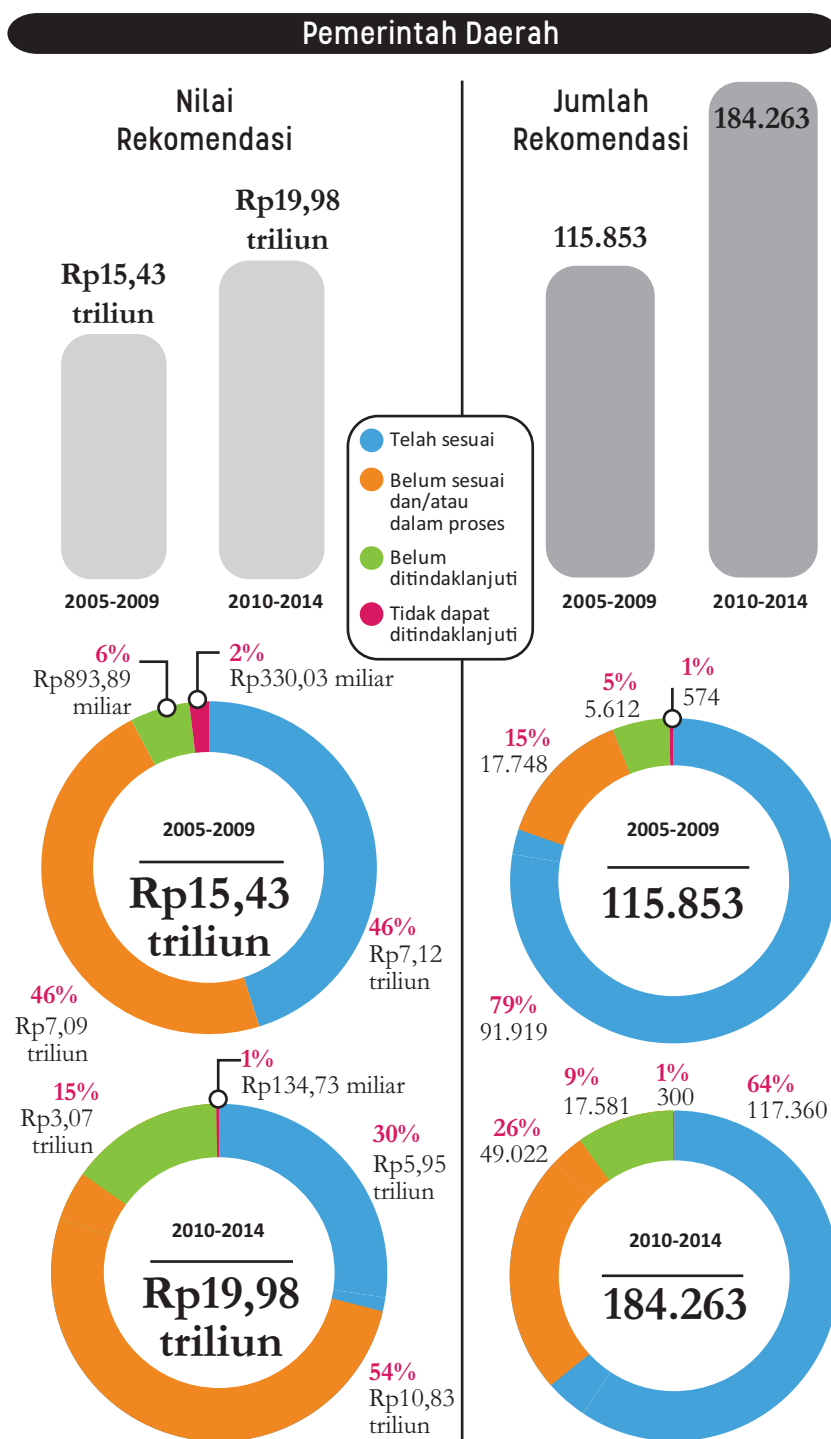
Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp34,28 triliun. Sedangkan untuk periode 2010-2014 sebesar Rp32,56 triliun.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut.

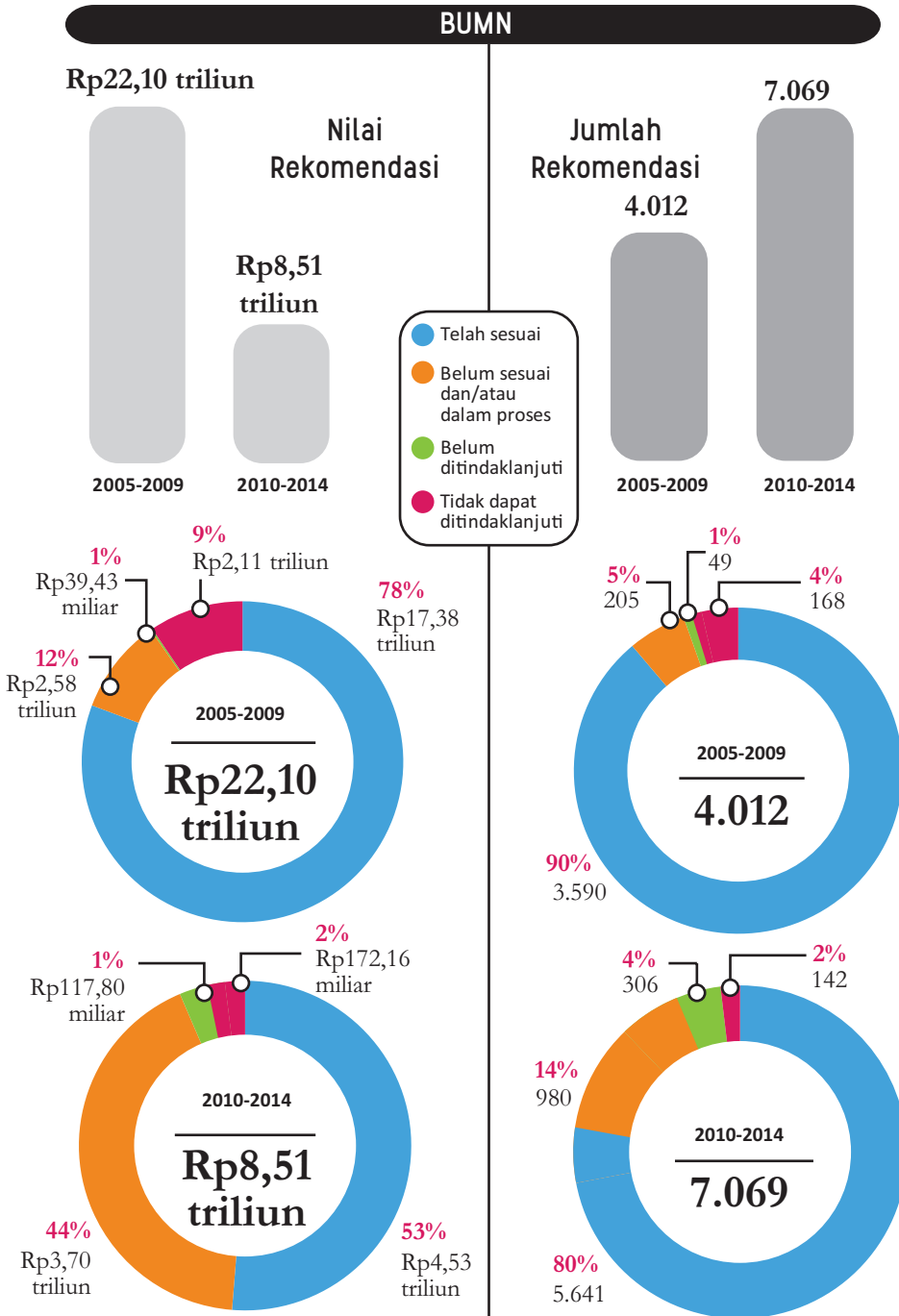
Grafik 4.2. Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat



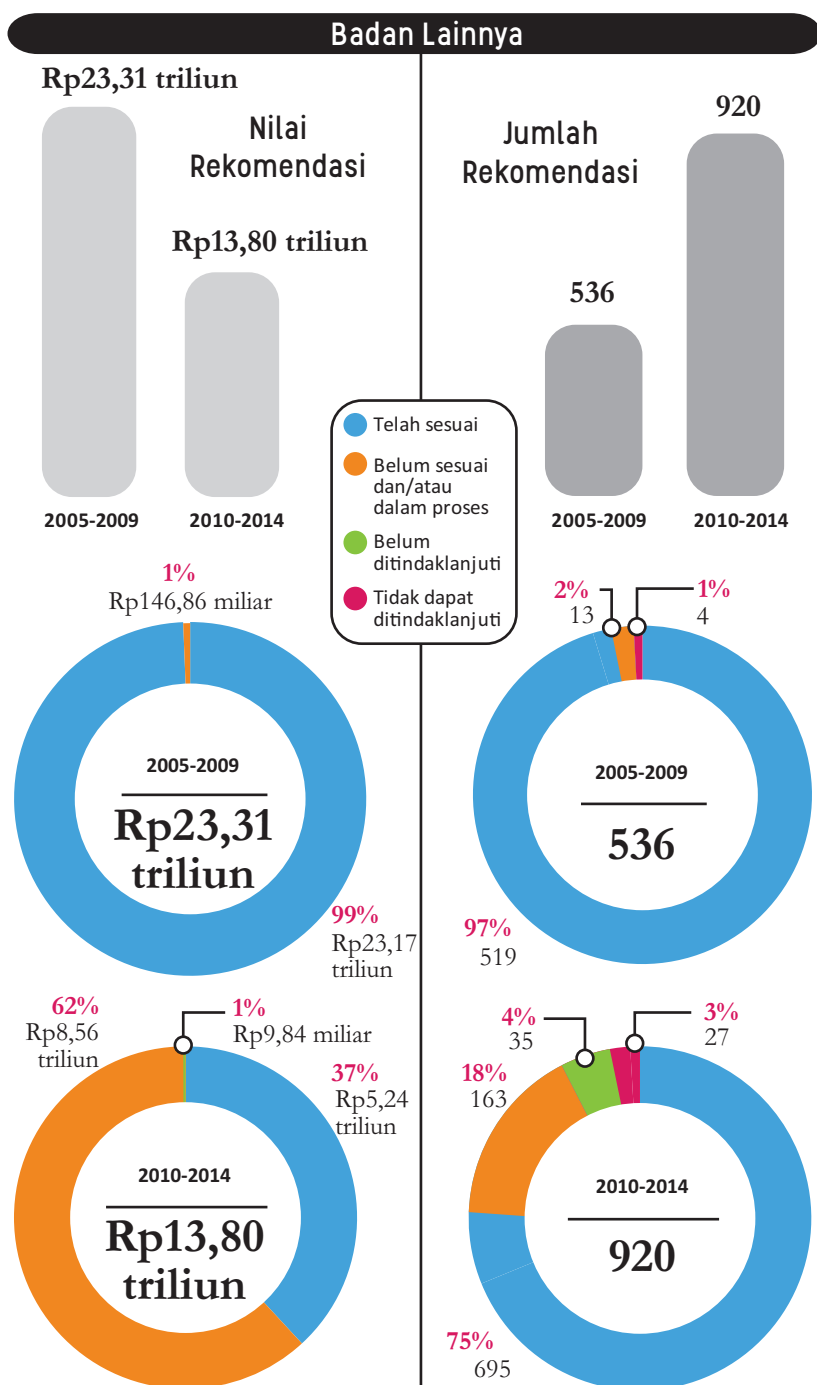
Grafik 4.3. Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah



Grafik 4.4. Perkembangan Data TLRHP BUMN



Grafik 4.5. Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya

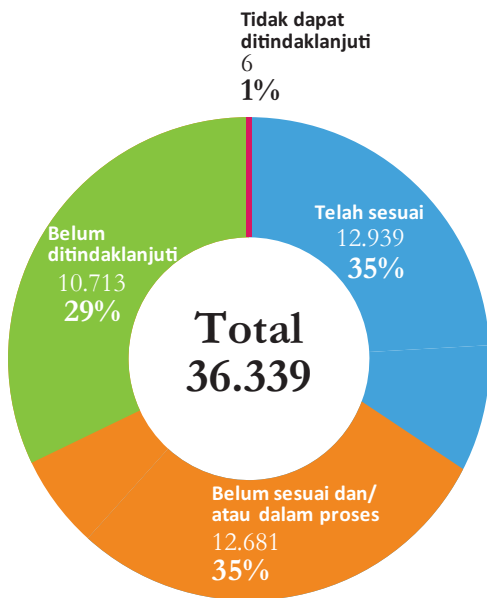


Pemantauan TLRHP Tahun 2015

MENGAWALI tahun pertama RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 36.339 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2015 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp121,64 triliun.

Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 12.939 rekomendasi (35%) senilai Rp1,05 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 12.681 rekomendasi (35%) senilai Rp7,75 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 10.713 rekomendasi (29%) senilai Rp112,84 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi (1%) senilai Rp1,26 miliar.

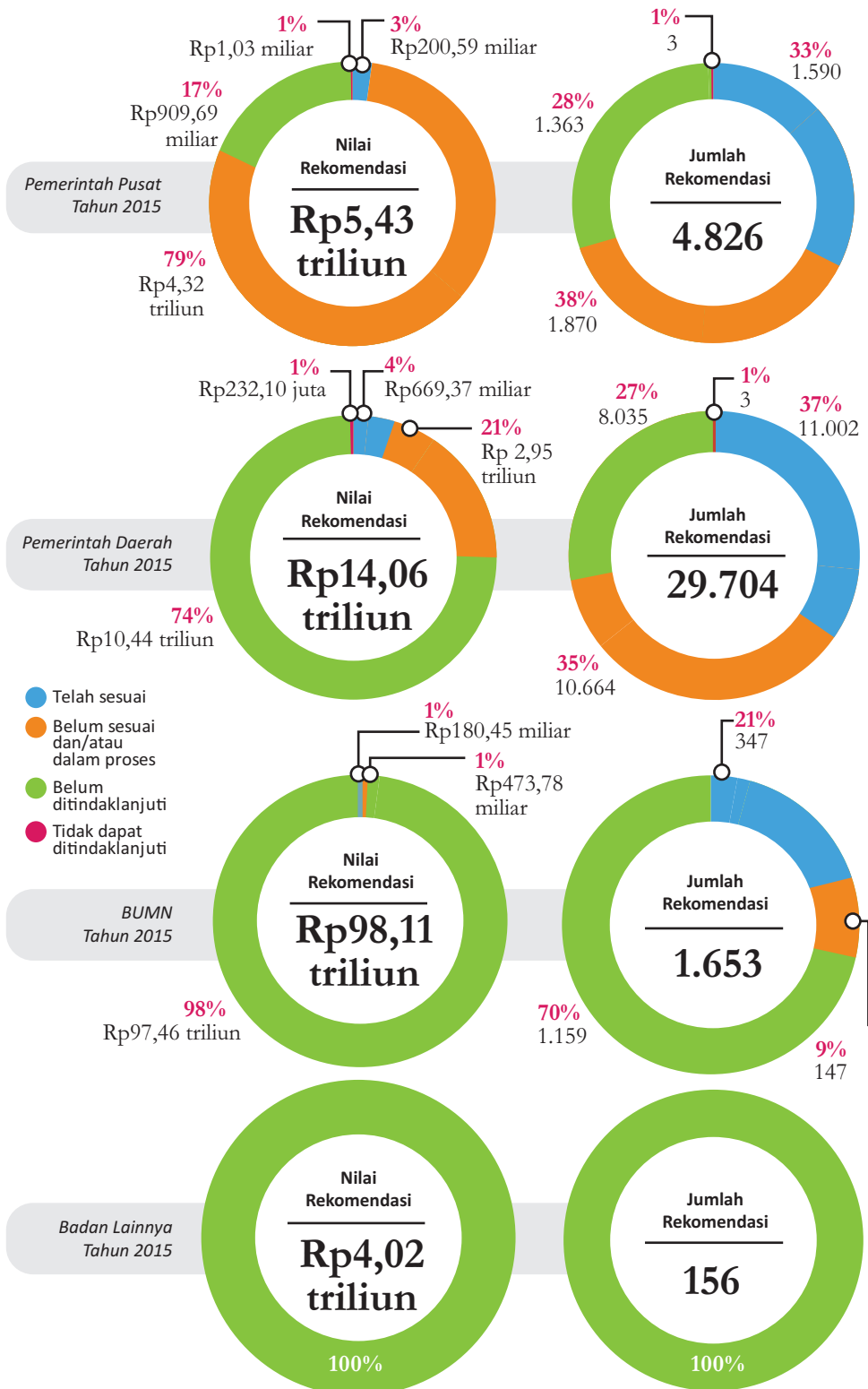


Grafik 4.6 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2015

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2015, sebanyak 4 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dewan Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Intelijen Negara. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan pada tahun 2015 sebesar Rp989,14 miliar.

Grifik 4.7. Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

PADA periode tahun 2015, BPK menyampaikan 4.826 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp5,43 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/ lembaga.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.590 rekomendasi (33%) senilai Rp200,59 miliar. Sebanyak 1.870 rekomendasi (38%) senilai Rp4,32 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 1.363 rekomendasi (28%) senilai Rp909,69 miliar belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 3 rekomendasi (1%) senilai Rp1,03 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp165,70 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada Lampiran 4.1 *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK menyampaikan 29.704 rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2015 senilai Rp14,06 triliun kepada 539 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 11.002 rekomendasi (37%) senilai Rp669,37 miliar. Sebanyak 10.664 rekomendasi (35%) senilai Rp2,95 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 8.035 rekomendasi (27%) senilai Rp10,44 triliun belum ditindaklanjuti. Sebanyak 3 rekomendasi (1%) senilai Rp232,10 juta tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp673,93 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada Lampiran 4.2 *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

HASIL pemantauan TLRHP BPK pada BUMN mengungkapkan dalam periode tahun 2015 terdapat 1.653 rekomendasi senilai Rp98,11 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 347 rekomendasi (21%) senilai Rp180,45 miliar. Sebanyak 147 rekomendasi (9%) senilai Rp473,78 miliar belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak

1.159 rekomendasi (70%) senilai Rp97,46 triliun belum ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp149,50 miliar.

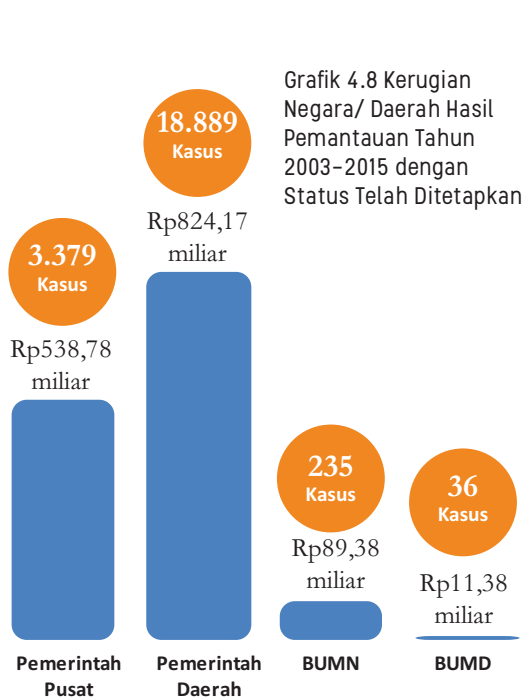
Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada Lampiran 4.3 *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

HASIL pemantauan TLRHP BPK pada Badan Lainnya mengungkapkan bahwa dalam periode tahun 2015 terdapat 156 rekomendasi senilai Rp4,02 triliun. Dari jumlah tersebut, seluruh rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada Lampiran 4.4 *flash disk* terlampir.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah



IHPS II Tahun 2015 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-2015 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 22.539 kasus senilai Rp1,46 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 4.8

Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2003-2015 dengan status telah ditetapkan yang terbesar merupakan

nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp824,17 miliar (56%) dari total nilai kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp1,46 triliun.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

TINGKAT penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran sebanyak 4.847 kasus senilai Rp143,76 miliar (10%), pelunasan sebanyak 11.864 kasus senilai Rp282,98 miliar (19%), dan penghapusan sebanyak 156 kasus senilai Rp8,42 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.527 kasus senilai Rp1,02 triliun (70%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2003–2015 disajikan dalam Lampiran H.1 dan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD dapat dilihat pada Lampiran H.2 dan Grafik 4.9

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat terdapat sebanyak 3.379 kasus senilai Rp538,78 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 516 kasus senilai Rp 20,36 miliar (4%), pelunasan sebanyak 1.942 kasus senilai Rp40,46 miliar (7%), dan penghapusan sebanyak 8 kasus senilai Rp520 juta (1%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebanyak 1.430 kasus senilai Rp477,44 miliar (88%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah terdapat kerugian daerah sebanyak 18.889 kasus senilai Rp824,17 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 4.275 kasus senilai Rp119,11 miliar (14%), pelunasan sebanyak 9.853 kasus senilai Rp 216,05 miliar (26%) dan penghapusan sebanyak 47 kasus senilai Rp800 juta (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebanyak 8.996 kasus senilai Rp488,21 miliar (59%).

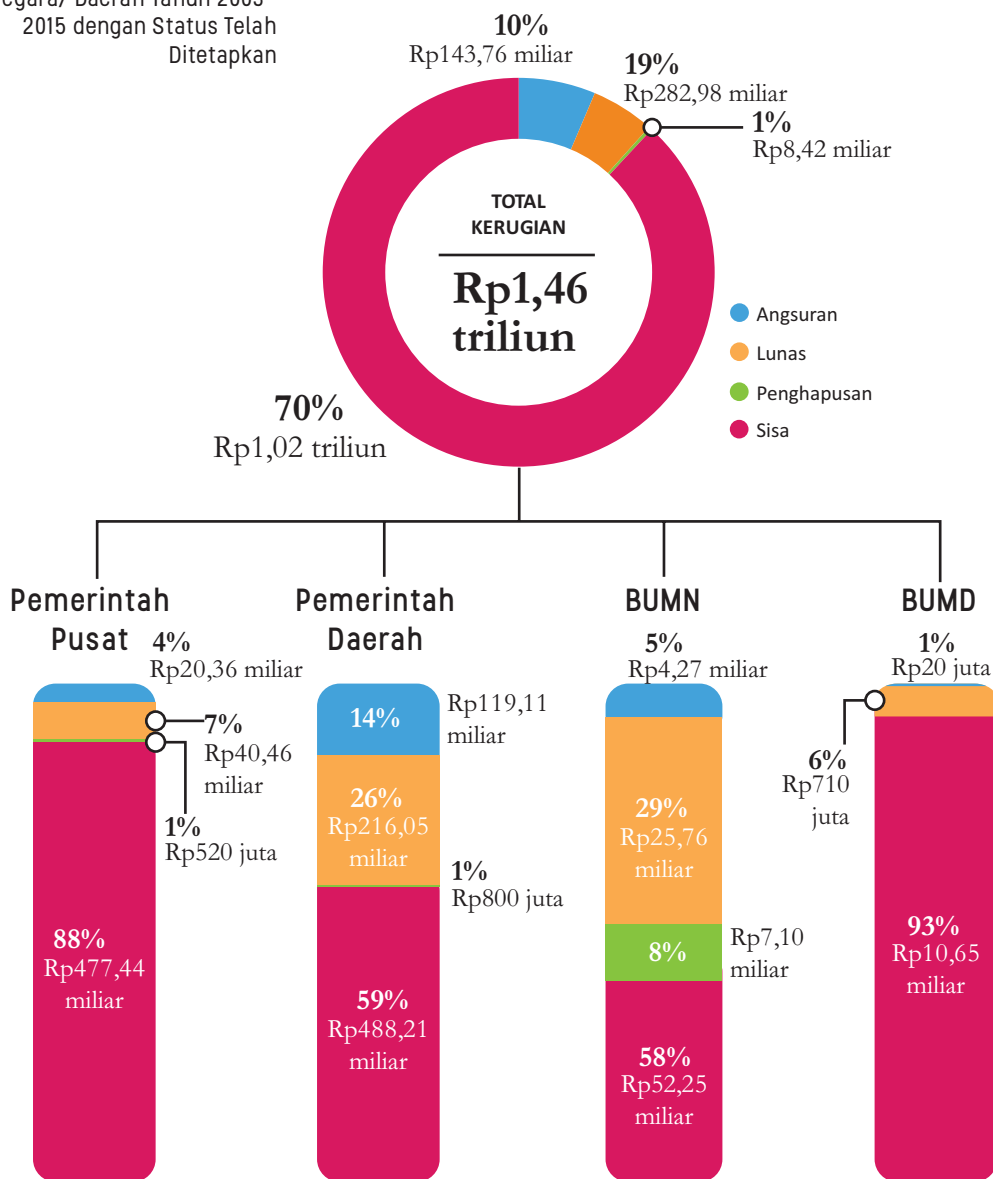
BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN terdapat kerugian sebanyak 235 kasus senilai Rp89,38 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 50 kasus senilai Rp4,27 miliar (5%), pelunasan sebanyak 56 kasus senilai Rp25,76 miliar (29%) dan penghapusan sebanyak 101 kasus senilai Rp7,10 miliar (8%). Sisa kerugian pada BUMN sebanyak 78 kasus senilai Rp52,25 miliar (58%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD terdapat kerugian sebanyak 36 kasus senilai Rp11,38 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 6 kasus senilai Rp20 juta (1%), pelunasan sebanyak 13 kasus senilai Rp710 juta (6%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebanyak 23 kasus senilai Rp10,65 miliar (93%).

Grafik 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003–2015 dengan Status Telah Ditetapkan



Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

BERDASARKAN data-data di atas dapat disimpulkan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah masih rendah. Dari total kerugian yang telah ditetapkan senilai Rp1,46 triliun, yang telah diselesaikan baru 30% setara dengan Rp435,16 miliar, sehingga masih terdapat kerugian negara/ daerah yang belum diselesaikan sebesar Rp1,02 triliun.

BPK juga masih menemukan permasalahan dalam penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Permasalahan tersebut pernah diungkap dalam IHPS I tahun 2015 yang lalu, antara lain:

- Pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sehingga penyelesaian kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain belum sepenuhnya efektif.
- Instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/ daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pencatatan dan pendokumentasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.
- Pemahaman pengelola penyelesaian kerugian negara/ daerah di instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya belum sama.
- Koordinasi antarinstitusi dengan BPK dan/ atau Kementerian Keuangan terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah belum dapat dicapai.

- Instansi belum secara optimal mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Kinerja Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) atau Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan fungsi pengadministrasian dokumentasi kasus-kasus kerugian negara/ daerah belum optimal.

Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan:

- Pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara/ pejabat lain yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang diikuti dengan tindakan koordinatif antara Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian BUMN untuk memberikan pemahaman bersama bagi instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara dalam mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara/ daerah.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Satuan Pengawas Intern BUMN/ BUMD mendorong penyelesaian kerugian negara/ daerah pada instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, serta lembaga atau badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR melakukan validasi dan akurasi atas data kasus kerugian negara/ daerah beserta perkembangannya serta menertibkan pengelolaan dokumen kerugian negara/ daerah

berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah oleh BPK.

- Pimpinan instansi mendorong peningkatan dan penyamaan pemahaman atas kerugian negara/ daerah dan penyelesaiannya kepada pengelola keuangan, aparat pengawas, fungsi kesekretariatan, dan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.
- Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara instansi dengan Kementerian Keuangan dan atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TGR baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian, belum terjalin dengan baik, sehingga optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah dapat dicapai.
- Pimpinan instansi memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dan Aparat Pengawasan Internal untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara/ daerah dengan mengenakan jaminan dalam hal penyelesaian menggunakan SKTJM dan fungsi penagihan terhadap kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan.
- Pimpinan instansi memerintahkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah/ Satuan Pengawasan Internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan TP/ TGR dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/daerah.

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

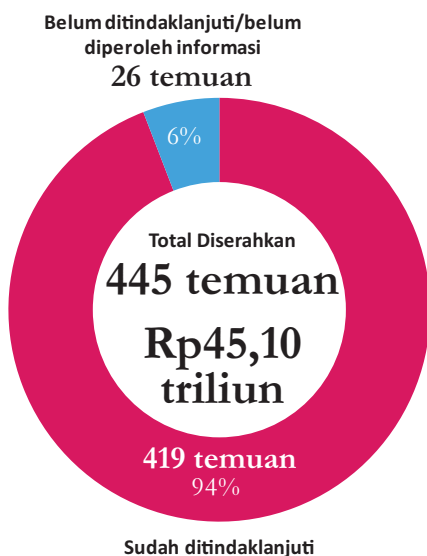
BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Selama periode 2003 sampai dengan Desember 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 230 surat yang memuat 445 temuan pemeriksaan mengandung unsur pidana senilai Rp33,48 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp45,10 triliun.

Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian sebanyak 64 temuan senilai Rp20,74 triliun dan US\$14,03 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,93 triliun, Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US\$218,76 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,72 triliun dan KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,03 triliun dan US\$609,07 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,44 triliun.

Penanganan temuan pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang adalah 419 temuan (94%) senilai Rp42,66 triliun. Temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi yang berwenang sebanyak 26 temuan (6%). Perincian hasil pemantauan tindak lanjut penanganan temuan BPK yang mengandung unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang tahun 2003-2015 disajikan pada Lampiran H.3 dan Grafik 4.10.

Grafik 4.10 Temuan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2015



Selama tahun 2015, BPK telah menyampaikan tiga surat atas temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada Kepolisian RI, yang memuat 3 temuan senilai Rp73,46 miliar yang terdiri atas 1 temuan senilai Rp2,20 miliar pada semester I tahun 2015 dan 2 temuan senilai Rp71,26 miliar pada semester II tahun 2015.



IHPS II TAHUN 2015

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2015

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABIPRAYA	: PT Brantas Abipraya (Persero)
AFE	: <i>Authorization for Expenditure</i>
ALPP	: Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan
AMC	: <i>Annual Manajemen Contract</i>
AO	: <i>Account Officer</i>
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APC	: <i>Annual Performance Contract</i>
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
Askes	: Asuransi Kesehatan
ASV	: <i>Accommodation and Support Vessel</i>
Athan RI	: Atase Pertahanan Republik Indonesia
ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
AUG	: <i>ASEAN University Games</i>

B

Babinmin-vetcaddam	: Badan Pembinaan Administrasi Veteran Republik Indonesia dan Cadangan TNI Komando Daerah Militer
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BDT	: Basis Data Terpadu
BEI	: Bursa Efek Indonesia
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BK3	: Bantuan Keuangan Kepada Kampung
BKC	: Barang Kena Cukai

BKCHT	:	Barang Kena Cukai Hasil Tembakau
BKP/JKP	:	Barang kena pajak/ jasa kena pajak
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMHP	:	Bahan medis habis pakai
BMN	:	Barang Milik Negara
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOT	:	<i>Built Operate Transfer</i>
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPMK	:	Badan Pemerintahan Masyarakat Kampung
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPP TMII	:	Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah
BPR/ BPRS	:	Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPSDM	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
BTN	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
BU	:	Bank Umum
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

C

CAR	: <i>Contractor's All Risk</i>
CASA	: <i>Current Account Saving Account</i>
CEISA	: <i>Customs Excise Information System and Automation (2012)</i>
CIO	: <i>Chief Information Officer</i>
CIU	: Cabut Izin Usaha
COPI	: ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd
COR	: <i>Close Out Report</i>
CPO	: Crude Palm Oil

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DC	: <i>Data Center</i>
DEAP	: <i>Data Envelopment Analysis Program</i>
Diklat	: Pendidikan dan Latihan
Dispenda	: Dinas Pendapatan Daerah
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat IKC	: Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai
Dirjen BC	: Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Ditjen	: Direktorat Jenderal
Dikti	: PendidikanTinggi
Ditjen Dikdas	: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Ditjen Dikmen	: Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Ditjen Paudni	: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Ditjen Pothan	: Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJSN	: Dewan Jaminan Sosial Nasional
DKB	: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPPKAD	: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DRC	:	<i>Disaster Recovery System</i>
DSP	:	Dana Siap Pakai
DTP	:	Dana Tambahan Penghasilan

E

ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
EPC	:	<i>Engineering, Procurement and Construction</i>
EPCI	:	<i>Engineering, Procurement, Construction and Installation</i>

F

Faspel	:	Fasilitas Pelabuhan
FKTL	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FO	:	<i>Front Officer</i>
FQR	:	<i>Financial Quarterly Report</i>

G

GB PNS	:	Guru bukan pegawai negeri sipil
GERBANGKU	:	Gerakan Membangun Kampungku
GIS	:	<i>Geographic Information System</i>
GPS	:	Gedung Prof. Dr. Soelarto

H

ha	:	Hektare
HGU	:	Hak Guna Usaha
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPI	:	PT Hutchison Ports Indonesia
HPJ	:	PT Hutchison Ports Jakarta
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HSD	:	<i>High Speed Diesel</i>
HWLF	:	Herman Wijaya Law Firm

I

ICOFR	:	<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>
ICT	:	<i>Information and Communication Technology</i>
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IK	:	Instruksi Kerja
IKK	:	Indikator Kinerja Kegiatan
IKP	:	Indikator Kinerja Program
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
INSW	:	<i>Indonesia National Single Window</i>
IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
iPPM	:	<i>iPlanning and Performance Management</i>
IPR	:	Izin Pemanfaatan Ruang
IRJ	:	Instalasi Rawat Jalan
IRNA GPS	:	Instalasi Rawat Inap Gedung Prof. Dr. Soelarto
IS	:	Inti Sawit
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan

J

JAKKAD	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat Dompus
Jamkesmas	:	Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jamsostek	:	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JICT	:	PT Jakarta International Container Terminal
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JKP	:	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

Kanim	:	Kantor Imigrasi
Kantor OPU	:	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama
Kanwil Ke- menkumham	:	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KAP	:	Kantor Akuntan Publik
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia

KC	:	Kantor Cabang
KDK	:	Keputusan Dewan Komisiner
Kejati	:	Kejaksaan Tinggi
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	:	Kementerian Keuangan
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenristek-dikti	:	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KIA	:	Kesehatan Ibu dan Anak
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KK	:	Kepala Keluarga
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKS	:	Kontrak Kerja Sama
KL	:	Kementerian Lembaga
Kopertis	:	Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
KP2TD	:	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPI	:	<i>Key Performance Index</i>
KPI	:	<i>Key Performance Indicators</i>
KPO	:	Kegiatan Pasca Operasi
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPD	:	Kantor Pelayanan Pajak Daerah
KPSN	:	PT Karya Panca Sakti Nugraha
KSO	:	Kerja Sama Operasi
KUR	:	Kredit Usaha Rakyat

L

LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
Lanud	:	Lapangan Udara
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

LK	: Laporan Keuangan
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
<i>Log Backup</i>	: Laporan pelaksanaan pemindahan data
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPP	: Lembaga Pengawas Perbankan
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
LPPNPI	: Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LVRI	: Legiun Veteran Republik Indonesia

M

MK	: Modal Kerja
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MRP	: Majelis Rakyat Papua
MS	: Minyak Sawit

N

NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
NPOPTKP	: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
NRG	: Nomor Registrasi Guru
NSP	: Nilai Sortasi Panen
NTPN	: Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUPTK	: Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

O

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Otsus	: Otonomi Khusus

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan

PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PCHT	:	Pita Cukai Hasil Tembakau
PCMMEA	:	Pita Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol
PCS	:	<i>Payment Chanelling System</i>
PDK	:	Peraturan Dewan Komisioner
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perda	:	peraturan daerah
Perdasus	:	Peraturan Daerah Khusus
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
Perum	:	Perusahaan Umum
Perumnas	:	Perum Perumahan Nasional
PEN	:	Pembiayaan Ekspor Nasional
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umrah
PIHK	:	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PJPU	:	Pelayanan Jasa Pesawat Udara
PJT	:	Perum Jasa Tirta
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKP2B	:	Kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara
PKE	:	Peraturan Kepala Eksekutif
PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKN	:	Pusat Kegiatan Nasional
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PLPG	:	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru
PLPS	:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
PLTS	:	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PME	:	Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMP	:	Pengawas Mutu Panen
PN	:	Prioritas Nasional

PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM-MP	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan
PNPM-MPkt	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
Polri	:	Kepolisian Republik Indonesia
PONDSBV	:	PT Premier Oil Natuna Sea BV
POS	:	Prosedur Operasi Standar
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPAT	:	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPH	:	Pajak Penghasilan
PPIU	:	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPK GBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Gelora Bung Karno
PPLS	:	Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPO	:	Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Prospek	:	Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung
PSC	:	<i>Production Sharing Contract</i>
PT	:	Perseroan Terbatas
PTK	:	Peraturan dan Tata Kerja
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTPN	:	PT Perkebunan Nusantara
PTRI	:	Perutusan Tetap Republik Indonesia
Pusdik	:	Pusat Pendidikan

Q

QC	:	<i>Quality Control</i>
----	---	------------------------

R

Raskin	:	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
RBA	:	Rencana Bisnis dan Anggaran

RBB	:	Rencana Bisnis Bank
Regina	:	Registrasi Kepabeanaan
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
Respek	:	Rencana Strategis Pembangunan Kampung
RISPAM	:	Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum
RJP	:	Rencana Jangka Panjang
RKA	:	Rencana Kerja dan Anggaran
RKAT	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RO	:	<i>Regional Office</i>
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RSJPD Harkit	:	Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
RS	:	Rumah Sakit
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP Fat-mawati	:	Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
RSUPN RSCM	:	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
Rutan	:	Rumah Tahanan
RUU	:	Rancangan Undang-undang

S

SAC	:	Sistem Aplikasi Cukai
SACS	:	Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi
Samsat	:	Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap
SAPP	:	Sistem Aplikasi Piutang Perbendaharaan
Sarpras	:	Sarana dan Prasarana
Satker	:	Satuan Kerja
SDBK	:	Suku Dasar Bunga Kredit
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Sekda	:	Sekretaris Daerah

SIDJP	:	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIK BDL	:	Sistem Informasi Keuangan Bank Dalam Likuidasi
Simyandu	:	Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMASET	:	Sistem Informasi Manajemen Aset
SIMRS	:	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
Sipamor	:	Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SKTF	:	Surat Keputusan Tunjangan Fungsional
SKTP	:	Surat Keputusan Tunjangan Profesi
SKRD	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
SLA	:	<i>Service Level Agreement</i>
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2DK	:	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan
SP3DRI	:	Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPAM BM	:	Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPK	:	Surat Perintah Kerja
SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
SPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
SSPD	:	Surat Setoran Pajak Daerah



TA	:	Tahun Anggaran
TAA	:	Tanjung Api-API
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TBS	:	Tandan Buah Segar
TBTI	:	Taman Bhinneka Tunggal Ika
TF	:	Tunjangan Fungsional
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIKE	:	Theater Imax Keong Mas
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TL	:	Tim Likuidasi
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TP	:	Tunjangan Profesi
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
Tupoksi	:	Tugas Pokok dan Fungsi
Trust	:	<i>complete</i> (lengkap), <i>Reliable</i> (handal), <i>Up to date</i> (terkini), <i>Secure</i> (aman), <i>accurate</i> (akurat).

U

UKL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan
ULP	:	Uang Lauk Pauk
UMR	:	Upah Minimum Regional
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Undip	:	Universitas Diponegoro
Unej	:	Universitas Negeri Jember
UNM	:	Universitas Negeri Malang
UNS	:	Universitas Sebelas Maret
Unsri	:	Universitas Sriwijaya
UPL	:	Upaya Pemantauan Lingkungan
UPN	:	Universitas Pembangunan Nasional
URIT	:	Unit Rawat Inap Terpadu
URJT	:	Unit Rawat Jalan Terpadu
UU	:	Undang-Undang
UUD	:	Undang Undang Dasar

W

WIKA	:	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
WP	:	Wajib Pajak

Daftar Istilah

A

<i>Abandonment & Site Restoration (ASR)</i>	:	Kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
Agunan	:	Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya rumah, tanah, surat berharga, dan lain-lain. Dalam hal debitur tidak mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (wanprestasi), maka agunan kredit digunakan sebagai alternatif terakhir untuk pelunasan kredit yang diberikan (lelang).
<i>Automobile Sale Loss Allowance</i>	:	Tunjangan yang diberikan saat tenaga kerja asing harus melakukan repatriasi karena suatu penugasan dan harus menjual mobil/ motor di negara asal (<i>home country</i>). Tunjangan ini diberikan untuk menggantikan pengeluaran yang timbul karena kerugian penjualan mobil/ motor yang dilakukan secara mendadak.
Authorization for expenditure (AFE)		Mekanisme pengendalian pembelanjaan berbasis proyek yang menyediakan informasi bagi SKK Migas
<i>Ash (fly ash & bottom ash)</i>	:	Limbah dari hasil pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
<i>Dayrate ASV</i>	:	Biaya sewa harian atas penggunaan kapal untuk akomodasi dan pendukung

B

<i>Back Office</i>	:	Unit kerja di bagian belakang yang bertanggungjawab terhadap pendokumentasian dokumen layanan
Biaya	:	Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Biaya <i>Services for Company</i>	:	Biaya yang timbul dari penyediaan fasilitas kerja oleh kontraktor untuk KKKS yang berlokasi di kantor ataupun <i>workshop</i> kontraktor yang berlokasi di DKI Jakarta dalam rangka pengawasan dan monitoring proyek selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.
BUMN	:	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. (<i>UU No.19 Tahun 2003</i>)

C

<i>Close out report</i>	:	Berisi semua kejadian-kejadian penting dan cara menyelesaikannya yang dapat disajikan acuan untuk pelaksanaan pekerjaan dimasa yang akan datang. Umumnya, sebuah <i>close-out report</i> berisi semua dokumentasi proyek yang disusun secara sistematis sehingga mudah untuk mempelajari dan menggunakannya.
<i>Cost of adjustment of personal</i>	:	Penyesuaian biaya atas beban personal
<i>Cost recovery</i>	:	Penggantian biaya operasi oleh pemerintah kepada kontraktor sesuai perjanjian (<i>Kontrak Kerja sama/ Production Sharing Contract</i>), biasanya dibayar dalam bentuk hasil produksi, di mana hasil produksi tersebut dinilai dengan <i>Weighted Average Price</i> .

<i>Current Account</i>	:	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan
------------------------	---	---

D

<i>Data Envelopment Analysis Program</i>	:	Metodologi pemeriksaan yang digunakan dalam penilaian efisiensi yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan hasil analisis data
Debitur	:	Orang yang mendapatkan fasilitas kredit/ pinjaman dari bank.
Demobilisasi ASV	:	Biaya-biaya yang diperlukan untuk memindahkan ASV dari lokasi instalasi, dan dinyatakan selesai atau komplit apabila semua tambat/ jangkar sudah dilepaskan dan ASV telah keluar dari lokasi instalasi.
<i>Development drilling</i>	:	Kegiatan pemboran untuk menentukan ukuran-ukuran kandungan dan gangguan-gangguan geologi endapan batu bara atau bahan-bahan galian lainnya.
drilling	:	Pemboran

E

Eksplorasi	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
Eksplotasi	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
<i>e-purchasing</i>	:	Tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik

F

<i>Financial Quarterly Report (FQR)</i>	:	Laporan yang menggambarkan perhitungan Bagi hasil operasi minyak dan gas bumi dari satu KKS/ PSC. FQR berisi antara lain informasi <i>lifting</i> dan <i>cost recovery</i> . FQR disusun oleh KKKS dan kemudian dievaluasi dan dirangkum oleh BPMIGAS dalam suatu Konsolidasi Laporan Keuangan/Laporan Manajemen.
Flowmeter	:	Merupakan instrumen guna mengukur aliran dari suatu fluida baik <i>liquid (liquid flowmeter)</i> , <i>sludge (sludge flow meter)</i> maupun gas (<i>flow meter gas</i>), baik bertemperatur rendah maupun temperatur tinggi.
<i>Front Office</i>	:	Unit kerja di bagian depan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat
<i>Funding</i>	:	Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yaitu dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan

G

<i>General lecture</i>	:	Seminar/ kuliah umum
------------------------	---	----------------------

H

<i>Housing Allowance</i>	:	Fasilitas perumahan yang diberikan selama masa penugasan tenaga kerja asing
<i>Human Capital</i>	:	Konsep yang menjelaskan bahwa manusia dalam organisasi dan bisnis merupakan aset yang penting dan beresensi, yang memiliki sumbangan terhadap pengembangan dan pertumbuhan

I

Indonesia National Single Window (INSW)	:	Sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (<i>single submission of data and information</i>), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (<i>single and synchronous processing of data and information</i>), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (<i>single decision-making for custom release and clearance of cargoes</i>)
---	---	---

<i>Investment credit</i>	:	Suatu paket insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa suatu prosentase yang ditetapkan dalam kontrak dari investasi yang dilakukan untuk <i>direct production oil facilities</i> .
--------------------------	---	---

J

Jaminan	:	Suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
---------	---	--

K

Kedaluwarsa	:	Sudah lewat (habis) jangka waktu berlakunya (ditiadakannya suatu tuntutan)
-------------	---	--

Katalog elektronik (<i>e-catalogue</i>)	:	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/ jasa tertentu dari penyedia barang/ jasa pemerintah
---	---	---

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	:	Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.
---	---	--

Klaim	:	Permintaan ganti rugi dari terjamin atau bertanggung, kepada perusahaan penjamin atau penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi tersebut.
-------	---	--

Koasuransi	:	Asuransi bersama beberapa perusahaan asuransi
------------	---	---

Kolektibilitas	:	Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus (<i>special mention</i>), kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.
----------------	---	--

Kontrak Kerja Sama (KKS)	:	Kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
--------------------------	---	---

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	:	Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan BP Migas.
--------------------------------------	---	---

L

<i>Lending</i>	:	Suatu kegiatan menyatukan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat
<i>Lifting</i>	:	Produksi atau pengiriman produk petroleum yang umumnya diperlakukan sebagai <i>cost of sale</i> dalam perhitungan bagi hasil, untuk <i>lifting oil</i> diperhitungkan berdasarkan <i>Indonesian Crude Price</i> (ICP) sedangkan <i>lifting gas</i> berdasarkan persentase yang ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati.
<i>Log backup</i>	:	Laporan pelaksanaan pemindahan data
<i>Log file</i>	:	Sebuah <i>file</i> yang berisi daftar tindakan, kejadian (aktivitas) yang telah terjadi di dalam suatu sistem komputer
<i>Low cost deposit</i>	:	Sumber dana murah

M

<i>Man Power Planning</i>	:	Suatu proses perencanaan jumlah dan mutu sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang serta menetapkan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
Minyak dan gas bumi (migas)	:	Sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.
Mobilisasi ASV	:	Biaya-biaya yang diperlukan untuk memindahkan ASV dari lokasi awal ke lokasi instalasi yang telah disetujui dan telah ditambatkan di lokasi tersebut untuk dapat mendukung sepenuhnya pekerjaan.

N

<i>Net Interest Margin</i>	:	Ukuran perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan lain dan nilai bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman mereka (misalnya deposito), relatif terhadap jumlah aset mereka
NTPN generator		Aplikasi yang tertanam dalam suatu mesin yang berfungsi menyusun NTPN berdasarkan kombinasi data inputan tertentu

O

<i>Outstanding</i>	:	Sisa utang/ piutang yang belum dilunasi
--------------------	---	---

P

Pajak Restoran	:	Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
Penjaminan kredit	:	Penjaminan kredit otomatis yang diberikan oleh penjamin kepada bank atas Kredit Usaha Rakyat yang diberikan bank kepada debitur tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh penjamin, sepanjang memenuhi persyaratan.
Persero	:	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Persero Terbuka (Tbk)	:	Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
Perum (Perusahaan Umum)		BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
Piutang	:	Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.
<i>Plafond</i>	:	Batas tertinggi (biaya, kredit, dsb) yang disediakan.

Premi	:	Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu perlindungan/ jaminan asuransi atas risiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi.
Principal	:	Perusahaan pemegang lisensi

R

<i>Reimbursable cost</i>		Realisasi biaya yang sudah dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan
<i>Regional Office (RO)</i>	:	Unit kerja di wilayah yang mengelola Kantor cabang dan secara struktural berada di bawah direksi
Restrukturisasi	:	Penataan kembali supaya struktur atau tatanannya baik
<i>Roadmap Supply Side</i>	:	Dokumen yang disusun oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Ditjen BUK Kementerian Kesehatan untuk memberikan arah dan acuan dalam penyediaan dan pengembangan FKTP di seluruh Indonesia.

S

<i>Sale and lease back</i>	:	Transaksi penjualan aset tetap dari penjual (pemilik aset) kepada pihak ketiga, di mana kemudian penjual menyewa kembali aset tersebut dari pihak ketiga.
<i>Saving Account</i>	:	Rekening tabungan di bank
<i>Service Level Agreement</i>	:	Bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas untuk peningkatan kinerja atau waktu pengiriman harus di perbaiki selama masa kontrak
<i>Shallow Gas Release</i>	:	Semburan gas dangkal
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), adalah badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
<i>Spouse allowance</i>	:	Tunjangan yang diberikan kepada pasangan tenaga kerja asing yang ikut pindah menemani dalam penugasannya di Indonesia Business Unit. Tunjangan ini diberikan sebagai pengganti atau kompensasi apabila pasangannya meninggalkan pekerjaannya di negara asal (<i>home country</i>)

<i>Supply vessel</i>	:	Salah satu jenis kapal <i>supply (supply ship)</i> yang berfungsi untuk mendukung kegiatan di laut
----------------------	---	--

T

Tantiem	:	Penghasilan yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris perseroan terbatas setiap tahun sebagai penghargaan apabila perusahaan memperoleh laba.
<i>Toll fee</i>	:	Biaya sewa atas penggunaan jaringan pipa untuk pengiriman gas.
Tunjangan ekspatriasi (<i>expatriate premium</i>)	:	Salah satu bentuk tunjangan untuk tenaga kerja asing yang bertugas ke Indonesia (melakukan ekspatriasi) untuk jangka pendek/ panjang sebagai kompensasi atas: • Penugasan ke lokasi kerja dengan kondisi kerja yang sulit atau situasi tidak aman. • Kompensasi atas perbedaan standar biaya hidup antara <i>home country</i> dengan <i>host country</i> yang biaya hidupnya lebih tinggi.

W

Wanprestasi	:	Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.
Wilayah kerja	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.
<i>Workload Analysis</i>	:	Suatu pendekatan dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja dan jumlah serta spesifikasi tenaga kerja untuk setiap unit kerja
<i>Workover</i>	:	Pekerjaan untuk mempertahankan atau memperbaiki / menambah produksi dengan cara - cara mengubah atau mengolah zona produksi atau mengganti zona produksi
<i>Work program and budget (WP&B)</i>	:	Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) merupakan usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan kondisi, komitmen, efektivitas, dan efisiensi pengoperasian KKKS di suatu wilayah kerja.

Lampiran



Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Pusat

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi I				
1	1	Kementerian Pertahanan	1	Pemanfaatan dan Pengamanan serta Pengalihan Status Penggunaan Aset (Barang Milik Negara) TA 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI serta Instansi Terkait
	2		1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan
2	3	Markas Besar TNI	1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag
	4		1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma
	5		1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria
3	6	TNI Angkatan Udara	1	Manajemen Aset pada Lingkungan TNI AU
4	7	TNI Angkatan Laut	1	Pemanfaatan Barang Milik Negara Tanah dan Bangunan pada TNI Angkatan Laut dan Jajaran Terkait
5	8	TNI Angkatan Darat	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah serta Aset Gedung dan Bangunan s.d. Semester II Tahun 2015 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat
6	9	Kementerian Luar Negeri	1	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Stockholm di Jakarta dan Swedia
	10		1	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada PTRI Jenewa di Swiss
	11		1	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Oslo di Jakarta dan Norwegia
	12		1	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Wina di Austria
	13		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan PNB Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Bratislava di Slovakia
	14		1	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Athena di Yunani
	15		1	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan
	16		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia
	17		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat
	18		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Washington D.C. di Amerika Serikat
	19		1	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	20		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brusselss di Belgia
	21		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda
	22		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko
		Jumlah	22	
Komisi II				
1	23	Kementerian Dalam Negeri	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA 2010-2014 dalam Rangka Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional pada Kementerian dalam Negeri dan Instansi Terkait
	24		1	Kinerja atas Efektivitas Pembinaan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri serta Instansi Terkait
	25		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Kementerian dalam Negeri di Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah
2	26	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Kinerja Prona pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) TA 2013, 2014, dan Semester I 2015
3	27	Ombudsman Republik Indonesia	1	Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas TA 2013, 2014, 2015 pada Ombudsman RI di Jakarta
4	28	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Gelora Bung Karno di Jakarta
	29		1	Pendapatan, Biaya, Investasi dan Kerja Sama Tahun 2012 s.d. Semester I 2015 pada Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII) di Jakarta
		Jumlah	7	
Komisi II dan V				
1	30	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
		Jumlah	1	
Komisi III				
1	31	Mahkamah Konstitusi	1	Kinerja Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum TA 2013 dan 2014 pada Mahkamah Konstitusi di Jakarta

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	32	Kepolisian Negara RI	1	Kinerja atas Kegiatan Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik TNI/Polri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015
	33		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto Kepolisian Negara Republik Indonesia
	34		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk.II Samsoeri Mertojoso Surabaya, Bhayangkara Tk III Pusdik Sabhara Porong dan Bhayangkara Tk III Tulungagung Kepolisian Negara Republik Indonesia
	35		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk.II Mappaoudang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	36	Kejaksaan RI	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Instansi Terkait
	37		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta Instansi Terkait
	38		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait
	39		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait
	40		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung serta Instansi Terkait
	41		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait
4	42	Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat di Bandung
	43		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya
	44		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara di Medan

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	45		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung di Bandar Lampung
	46		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu di Bengkulu
5	47	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Badan Peradilan di Bawah MA di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara
6	48	Majelis Per-musyawaratan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 pada MPR di Jakarta
		Jumlah	18	
Komisi IV				
1	49	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan TA 2013 s.d. Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Jumlah	1	
Komisi IV dan VII				
1	50	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan TA 2015 (Semester 1) pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	1	
Komisi V				
1	51	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013, 2014 dan 2015 pada Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara
	52		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara serta TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara
	53		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan dan TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan
		Jumlah	3	
Komisi VI				
1	54	Kementerian Perindustrian & Kementerian Perdagangan	1	Kinerja Efektivitas Penerbitan Perizinan Impor Garam pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014 s.d. Semester I 2015 di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur
		Jumlah	1	

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI dan XI				
1	55	Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pemberian Fasilitas Penjaminan KUR untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
		Jumlah	1	
Komisi VII				
1	56	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan dengan Sasaran Penduduk Miskin TA 2012 s.d. 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua
2	57	LIPI	1	Kinerja atas Efektivitas Program Penelitian Prioritas Nasional dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
3	58	Kementerian Riset dan Teknologi (Bidang Ristek)	1	Travel Expenditures Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM IPTEK atas Pelaksanaan Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2013 dan 2014 pada <i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i> Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta
		Jumlah	3	
Komisi VIII				
1	59	Kementerian Sosial	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
	60		1	Kinerja atas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan Nasional TA 2010 – 2014 pada Kementerian Sosial, Unit-Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku
2	61	Kementerian Agama	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru TA (TA) 2014 dan Semester I TA 2015 pada Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan
	62		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Perguruan Tinggi Agama Negeri Kementerian Agama di Jambi, Jateng, Jatim, Sulsel dan Maluku
	63		1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1436 H/2015 M pada Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal RI dan Instansi Terkait Lainnya
3	64	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2013, 2014 dan 2015 (Semester I) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		Jumlah	6	

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi IX				
1	65	BPJS Kesehatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan TA 2014 s.d. TA 2015
2	66	Kementerian Kesehatan	1	Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
	67		1	Kinerja atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
	68		1	Kinerja Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo TA 2014 dan Semester I 2015
	69		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
	70		1	Kinerja Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1436 H/2015 M pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Lainnya
3	71	BPOM	1	Kinerja atas Efektivitas Koordinasi Pengawasan Obat dan/atau Makanan oleh Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) TA 2014 dan Semester I TA 2015
4	72	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Kinerja atas Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Skema <i>Private to Private</i> Tahap Masa Penempatan
	73		1	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta
		Jumlah	9	
Komisi X				
1	74	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kinerja Pelayanan Pendidikan Terkait Buku, Buku Berbasis Kurikulum 2013 dan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I)
	75		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (Semester I)
2	76	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	Efektivitas Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. Oktober 2015 di Jakarta
3	77	Kementerian Riset dan Teknologi (Bidang Pendidikan Tinggi)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sebelas Maret di Jakarta dan Surakarta
	78		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Jember di Jakarta dan Jember
	79		1	Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sriwijaya di Jakarta dan Palembang

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	80		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Agustus 2015) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Negeri Malang di Malang
	81		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti), Kopertis Wilayah III dan Kopertis Wilayah IV di Jakarta dan Bandung
	82		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Diponegoro di Jakarta dan Semarang
4	83	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Kemenpora
		Jumlah	10	
Komisi XI				
1	84	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Penyusunan dan Penetapan APBN/P TA 2014 s.d. 2016 dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	85		1	Pengendalian Internal Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrua (<i>Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR</i>) pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	86		1	Efektivitas Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Impor dan Cukai untuk Menjamin Integrasi, Akurasi, Kelengkapan dan Validitas Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Instansi Vertikal di Bawahnya
	87		1	Efektivitas Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Penerimaan dan Piutang Pajak serta Penyajiannya dalam Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di Bawahnya
	88		1	Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Keuangan Tahun 2012-2015 dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan di Jakarta
	89		1	Penerimaan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Mineral dan Batu bara TA 2010 s.d. Semester I 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait
	90		1	Program <i>Sunset Policy</i> TA 2008 dan 2009 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait

Nomor Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	91		1	Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol TA 2011 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus, Pasuruan, Kediri, Tangerang, Ngurah Rai, dan Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, dan KPP Madya Malang serta Instansi Terkait (*)
2	92	LKPP	1	Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) TA 2014 s.d. 2015 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi Terkait
		Jumlah	9	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			92	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh				
1	1	93	Provinsi Aceh	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 - 2014 pada Pemerintah Aceh, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh dan Provinsi Aceh
		94		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh
		95		1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Aceh TA 2014 dan Semester I TA 2015
	2	96	Kabupaten Aceh Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
	3	97	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blang Pidie
	4	98	Kabupaten Aceh Besar	1	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho
	5	99	Kabupaten Aceh Tamiang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
	6	100	Kabupaten Aceh Utara	1	Belanja Modal Pemerintah Aceh Utara 2014 dan 2015 (s.d. Oktober 2015) di Lhoksukon.
	7	101	Kabupaten Bireuen	1	Kinerja atas Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bireuen di Bireuen
	8	102	Kabupaten Simeulue	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2012 s.d. Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simeulue, Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue dan Instansi Terkait Lainnya di Sinabang

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	9	103	Kota Banda Aceh	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d.Triwulan III) pada Pemerintah Kota Banda Aceh
	10	104	Kota Langsa	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa
			Jumlah	12	
II	Provinsi Sumatera Utara				
2	1	105	Provinsi Sumatera Utara	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010 – 2014
		106		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
		107		1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	2	108	Kabupaten Asahan	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
	3	109	Kabupaten Batu Bara	1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Batu Bara
	4	110	Kabupaten Dairi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Dairi di Sidikalang
	5	111	Kabupaten Deli Serdang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
		112		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuk Pakam
	6	113	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2014

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	114	Kabupaten Langkat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Tri Wulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Langkat
		115		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Instansi Terkait Lainnya di Stabat
	8	116	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal TA 2014
		117		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
		118		1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
	9	119	Kabupaten Nias	1	Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Nias di Gunung Sitoli
	10	120	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat TA 2014
	11	121	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2014
	12	122	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2014
	13	123	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2014
	14	124	Kabupaten Simalungun	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010-2014
		125		1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun
	15	126	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
	16	127	Kabupaten Toba Samosir	1	LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2014
	17	128	Kota Medan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III 2015 Pemerintah Kota Medan
		129		1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kota Medan di Medan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		130		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya
	18	131	Kota Tanjung Balai	1	LKPD Kota Tanjung Balai TA 2014
			Jumlah	27	
III	Provinsi Sumatera Barat				
3	1	132	Provinsi Sumatera Barat	1	Kinerja Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi
		133		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
		134		1	Pajak Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	2	135	Kabupaten Agam	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 Pemerintah Kabupaten Agam di Lubuk Basung
	3	136	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
	4	137	Kabupaten Padang Pariaman	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang
		138		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
	5	139	Kabupaten Pasaman	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2014 dan 2015 di Lubuk Sikaping
	6	140	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
		141		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2014 dan 2015 di Painan
	7	142	Kabupaten Sijunjung	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sijunjung TA 2014 dan 2015 di Muaro Sijunjung

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	8	143	Kabupaten Solok	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok
		144		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Solok TA 2014 dan 2015 di Arosuka
	9	145	Kabupaten Solok Selatan	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
	10	146	Kabupaten Tanah Datar	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2014 dan 2015 di Batusangkar
	11	147	Kota Pariaman	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Pariaman
	12	148	Kota Payakumbuh	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
	13	149	Kota Sawahlunto	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Sawahlunto
	14	150	PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya	1	Kegiatan Operasional TB 2014 dan Semester I 2015 pada PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya di Padang
	15	151	Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat TB 2014 dan Semester I 2015 di Padang
	16	152	PT Balairung Citrajaya	1	Operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar TB 2014 dan Semester I 2015
			Jumlah	21	
IV	Provinsi Riau				
4	1	153	Provinsi Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Riau
	2	154	Kabupaten Bengkalis	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
	3	155	Kabupaten Indragiri Hilir	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
	4	156	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	157	Kabupaten Kampar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
	6	158	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
	7	159	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
	8	160	Kota Dumai	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Dumai di Dumai
	9	161	PT Bank Riau Kepri	1	Efisiensi BPD dan Efektivitas Program BPD dalam Peningkatan Perekonomian Daerah TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT Bank Riau Kepri
			Jumlah	9	
V	Provinsi Jambi				
5	1	162	Provinsi Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jambi
		163		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
		164		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	2	165	Kabupaten Batang Hari	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
		166		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	3	167	Kabupaten Bungo	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	4	168	Kabupaten Merangin	1	Pengelolaan Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	169	Kabupaten Muaro Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015) pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
		170		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
	6	171	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal TA 2014 dan Semester I 2015
		172		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	7	173	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	8	174	Kabupaten Tebo	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
	9	175	Kabupaten Sarolangun	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
	10	176	Kota Jambi	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
	11	177	Kota Sungai Penuh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
	12	178	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi di Jambi
			Jumlah	17	
VI	Provinsi Bengkulu				
6	1	179	Provinsi Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
		180		1	Belanja Barang dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	181	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
	3	182	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur
	4	183	Kabupaten Kaur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kaur
	5	184	Kabupaten Kepahiang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
	6	185	Kabupaten Lebong	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebong
		186	Kabupaten Mukomuko	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan Instansi Terkait Lainnya di Mukomuko
	7	187	Kota Bengkulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu
		188		1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
	8	189	PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya
			Jumlah	11	
VII	Provinsi Sumatera Selatan				
7	1	190	Provinsi Sumatera Selatan	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
		191		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		192		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
		193		1	Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan TA 2014 s.d. Semester I TA 2015
		194		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
	2	195	Kabupaten Banyuasin	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait di Pangkalan Balai
	3	196	Kabupaten Lahat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait di Lahat
		197		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Lahat
	4	198	Kabupaten Muara Enim	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
		199		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait di Muara Enim
		200		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (Semester I)
	5	201	Kabupaten Musi Rawas	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
	6	202	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
		203		1	Belanja Daerah dan Manajemen Aset TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
	7	204	Kabupaten Ogan Ilir	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
	8	205	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Kayuagung

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	9	206	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
	10	207	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
	11	208	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
	12	209	Kota Lubuklinggau	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi Terkait Lainnya di Lubuklinggau
	13	210	Kota Palembang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palembang
		211		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
	14	212	Kota Prabumulih	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi Terkait di Prabumulih
	15	213	Bank Sumselbabel	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada Bank Sumselbabel di Palembang
	16	214	PD Pasar Palembang	1	Operasional PD Pasar Palembang Jaya TB 2014 s.d. Semester I TB 2015 di Palembang
	17	215	RSUD Palembang	1	Operasional RSUD Palembang Bari TB 2014 s.d. Semester I TB 2015 di Palembang
Jumlah				26	
VIII	Provinsi Lampung				
8	1	216	Provinsi Lampung	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung
		217		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Lampung TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
		218		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
	2	219	Kabupaten Lampung Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		220		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Liwa
	3	221	Kabupaten Lampung Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
		222		1	Kinerja Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
		223		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
	4	224	Kabupaten Lampung Tengah	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
		225		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Lampung Tengah.
	5	226	Kabupaten Lampung Timur	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
		227		1	Kinerja PBB dan BPHTB TA 2014 pada Kabupaten Lampung Timur
		228		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Sukadana
		229		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Lampung Timur.
	6	230	Kabupaten Lampung Utara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
		231		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
	7	232	Kabupaten Pesisir Barat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui
	8	233	Kabupaten Pringsewu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pringsewu

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		234		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Pringsewu
		235		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Pringsewu.
	9	236	Kabupaten Tanggamus	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus
	10	237	Kabupaten Tulang Bawang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang di Menggala
	11	238	Kota Bandar Lampung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung
		239		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi Terkait di Bandar Lampung
		240		1	Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	12	241	Kota Metro	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Metro
	13	242	PT Bank Pembangunan Daerah Lampung	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
	14	243	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	15	244	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Lampung Utara	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi Lampung Utara TB 2013, 2014 dan s.d. 31 Maret 2015
	16	245	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
	17	246	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus TB 2013, 2014 dan s.d. 31 Maret 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	18	247	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan TB 2013, 2014 dan s.d. 31 Maret 2015 Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
			Jumlah	32	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
9	1	248	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
		249		1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, Tanjungpandan, Toboali, dan Muntok
	2	250	Kabupaten Bangka	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat
		251		1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait Lainnya di Sungailiat
	3	252	Kabupaten Bangka Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok
		253		1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok
	4	254	Kabupaten Bangka Selatan	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali
	5	255	Kabupaten Bangka Tengah	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba
	6	256	Kabupaten Belitung	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2014 dan Semester I 2015 di Tanjungpandan
		257		1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjungpandan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	258	Kota Pangkalpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang
		259		1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
		260		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
			Jumlah	13	
X	Provinsi Kepulauan Riau				
10	1	261	Provinsi Kepulauan Riau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
		262		1	Kinerja Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2014 dan 2015
	2	263	Kabupaten Bintan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
		264		1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2014 & 2015 di Bandar Seri Bentan
	3	265	Kabupaten Karimun	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Karimun
		266		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2014 dan 2015
	4	267	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Tarempa
	5	268	Kabupaten Lingga	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Daik
	6	269	Kabupaten Natuna	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2014 dan 2015 di Ranai
		270		1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	271	Kota Batam	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batam di Batam
		272		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III)
	8	273	Kota Tanjungpinang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
		274		1	Kinerja Pengelolaan Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Triwulan III)
	9	275	Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang	1	Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Agustus 2015) di Tanjungpinang
			Jumlah	15	
XI	Provinsi DKI Jakarta				
11	1	276	Provinsi DKI Jakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
		277		1	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	2	278	BP THR Lokasari	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset pada BP THR Lokasari TB 2014 dan 2015 di Jakarta
	3	279	PT Jakarta Tourisindo	1	Pengelolaan PT Jakarta Tourisindo Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 di Jakarta dan Jawa Barat
	4	280	RSUD Cengkareng	1	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Cengkareng TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	5	281	RSUD Pasar Rebo	1	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Pasar Rebo di Jakarta
			Jumlah	6	
XII	Provinsi Jawa Barat				
12	1	282	Provinsi Jawa Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
		283		1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 - 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Bandung

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		284		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	2	285	Kabupaten Bandung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bandung
		286		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung
	3	287	Kabupaten Bekasi	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
	4	288	Kabupaten Bogor	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Bogor
		289		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong
	5	290	Kabupaten Cianjur	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
	6	291	Kabupaten Cirebon	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
		292		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
	7	293	Kabupaten Garut	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Garut dan Instansi Terkait Lainnya di Garut
		294		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
	8	295	Kabupaten Karawang	1	Manajemen Aset TA 2014 dan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
	9	296	Kabupaten Pangandaran	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Parigi
	10	297	Kabupaten Subang	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang
	11	298	Kabupaten Sukabumi	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	12	299	Kabupaten Sumedang	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang
	13	300	Kota Bandung	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
		301		1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
		302		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Bandung
	14	303	Kota Banjar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Banjar
		304		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Banjar di Banjar
	15	305	Kota Bekasi	1	Kinerja atas Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
	16	306	Kota Bogor	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
		307		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I 2014 di Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya
	17	308	Kota Cirebon	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon
	18	309	Kota Depok	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Depok
		310		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Depok di Depok
	19	311	Kota Tasikmalaya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Tasikmalaya
	20	312	PT Jasa Sarana	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Jasa Sarana Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) di Bandung
			Jumlah	31	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIII	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
13	1	313	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
		314		1	Belanja (Non Infrastruktur) dan Dana Keistimewaan pada Pemerintah D.I. Yogyakarta
		315		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
	2	316	Kabupaten Bantul	1	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Bantul serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
		317		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bantul
	3	318	Kabupaten Gunungkidul	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
	4	319	Kabupaten Sleman	1	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Sleman serta Instansi Terkait Lainnya di Sleman Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
		320		1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2015 (s.d. Triwulan III)
	5	321	Kota Yogyakarta	1	Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
		322		1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
	6	323	PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TB 2014 dan Semester 1 2015 di Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates
			Jumlah	11	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XIV	Provinsi Jawa Tengah				
14	1	324	Provinsi Jawa Tengah	1	Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2010–2014 di Semarang
		325		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang
		326		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang
	2	327	Kabupaten Banjarnegara	1	Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2010–2014 di Banjarnegara
		328		1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2015 di Banjarnegara
	3	329	Kabupaten Batang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Batang
	4	330	Kabupaten Boyolali	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Boyolali
	5	331	Kabupaten Brebes	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2015 di Brebes
	6	332	Kabupaten Karanganyar	1	Belanja Modal TA 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Karanganyar
	7	333	Kabupaten Kebumen	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2015 di Kebumen
	8	334	Kabupaten Kendal	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
	9	335	Kabupaten Klaten	1	Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
	10	336	Kabupaten Pati	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pati TA 2015 di Pati
	11	337	Kabupaten Pekalongan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Kaje
	12	338	Kabupaten Pemalang	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2015 di Pemalang

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	13	339	Kabupaten Purworejo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
		340		1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo TA 2015 di Purworejo
	14	341	Kabupaten Semarang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Semarang
	15	342	Kabupaten Sukoharjo	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo TA 2015
	16	343	Kabupaten Tegal	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tegal TA 2015
	17	344	Kabupaten Wonogiri	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri TA 2014 dan Semester I 2015
	18	345	Kabupaten Wonosobo	1	Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2015 di Wonosobo
	19	346	Kota Magelang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Magelang
		347		1	Perizinan Kota Magelang Tahun 2014 dan 2015 di Magelang
	20	348	Kota Pekalongan	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2015 di Pekalongan
	21	349	Kota Salatiga	1	Belanja Modal Pemerintah Kota Salatiga TA 2015
	22	350	Kota Semarang	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kota Semarang TA 2015 di Semarang
	23	351	Kota Surakarta	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pemerintah Kota Surakarta
	24	352	Kota Tegal	1	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kota Tegal TA 2015
	25	353	RSUD DR. R.Soeprapto Cepu	1	Operasional RSUD DR. R.Soeprapto Cepu TA 2015 (s.d. Agustus 2015) pada Pemkab Blora
	26	354	RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen	1	Operasional RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen
			Jumlah	31	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XV	Provinsi Jawa Timur				
15	1	355	Provinsi Jawa Timur	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2011 – 2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya
		356		1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
		357		1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
	2	358	Kabupaten Bangkalan	1	Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Instansi Terkait Lainnya
	3	359	Kabupaten Banyuwangi	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Banyuwangi
	4	360	Kabupaten Bondowoso	1	Pelaksanaan Belanja Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Bondowoso
	5	361	Kabupaten Blitar	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar
	6	362	Kabupaten Gresik	1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
	7	363	Kabupaten Jember	1	Pelaksanaan Belanja Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Jember di Jember
	8	364	Kabupaten Jombang	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Jombang
	9	365	Kabupaten Kediri	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
	10	366	Kabupaten Lamongan	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) di Lamongan
	11	367	Kabupaten Lumajang	1	Pelaksanaan Belanja Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang di Lumajang
	12	368	Kabupaten Magetan	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2015 (s.d. November 2015) pada Pemerintah Kabupaten Magetan di Magetan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	13	369	Kabupaten Malang	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Malang
		370		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	14	371	Kabupaten Mojokerto	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
	15	372	Kabupaten Ngawi	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2015 (s.d. November 2015) pada Pemerintah Kabupaten Ngawi di Ngawi
	16	373	Kabupaten Pacitan	1	Belanja Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kabupaten Pacitan di Pacitan
	17	374	Kabupaten Pasuruan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pasuruan
		375		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	18	376	Kabupaten Probolinggo	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
	19	377	Kabupaten Sampang	1	Operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang TB 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
	20	378	Kabupaten Tuban	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Sembilan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Tuban TA 2014 dan Semester I 2015 di Tuban
	21	379	Kota Batu	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Batu
	22	380	Kota Malang	1	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintahan Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Malang

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	23	381	Kota Pasuruan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Pasuruan
	24	382	Kota Surabaya	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	25	383	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk, TB 2014 dan Semester I 2015 di Provinsi Jawa Timur
	26	384	PT Bojonegoro Bangun Sarana	1	Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Bojonegoro
			Jumlah	30	
XVI	Provinsi Banten				
16	1	385	Provinsi Banten	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
		386		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
	2	387	Kabupaten Lebak	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak
		388		1	Belanja Daerah Kabupaten Lebak TA 2015 di Rangkasbitung
	3	389	Kabupaten Pandeglang	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
	4	390	Kabupaten Tangerang	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
		391		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
		392		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	5	393	Kota Cilegon	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	6	394	Kota Serang	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
	7	395	Kota Tangerang	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang
		396		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
		397		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	8	398	Kota Tangerang Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
		399		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
			Jumlah	15	
XVII	Provinsi Bali				
17	1	400	Provinsi Bali	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali
		401		1	Pendapatan Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
	2	402	Kabupaten Badung	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
		403		1	Pendapatan Daerah Kabupaten Badung TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober 2015)
	3	404	Kabupaten Bangli	1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli
	4	405	Kabupaten Buleleng	1	Belanja Dana Desa TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng di Singaraja
	5	406	Kabupaten Gianyar	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gianyar

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		407		1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Gianyar
		408		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	6	409	Kabupaten Karangasem	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem
		410		1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
	7	411	Kabupaten Klungkung	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura
		412		1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2014 s.d. 2015 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura
	8	413	Kabupaten Tabanan	1	Belanja Dana Desa TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tabanan di Tabanan
		414		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	9	415	Kota Denpasar	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar
		416		1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar
		417		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
	10	418	BPD Bali	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada BPD Bali, Pemda di Provinsi Bali, dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
			Jumlah	19	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat				
18	1	419	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2015
	2	420	Kabupaten Bima	1	Belanja Daerah Kabupaten Bima TA 2015 (s.d. November)
	3	421	Kabupaten Dompu	1	Operasional RSUD Kabupaten Dompu
	4	422	Kabupaten Lombok Barat	1	Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus)
	5	423	Kabupaten Lombok Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
		424		1	Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2015 (s.d. 30 November)
	6	425	Kabupaten Lombok Timur	1	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Gawat Darurat pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Agustus)
		426		1	Belanja Barang/ Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus 2015)
	7	427	Kabupaten Sumbawa Barat	1	Belanja Barang dan Jasa, Hibah, dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Agustus)
	8	428	Kota Bima	1	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)
	9	429	Kota Mataram	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram
	10	430	Bank Nusa Tenggara Barat	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Nusa Tenggara Barat TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 di Mataram
			Jumlah	12	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
19	1	431	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
		432		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		433		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
	2	434	Kabupaten Flores Timur	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur
	3	435	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang TA 2014
		436		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang
	4	437	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata TA 2014
	5	438	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka TA 2014
	6	439	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo TA 2014
	7	440	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao TA 2014
	8	441	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka TA 2014
		442		1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sikka di Maumere
	9	443	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
	10	444	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
		445		1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Minum Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
		446		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan
	11	447	Kota Kupang	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD S. K. Lerik TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Kota Kupang

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	12	448	Bank Nusa Tenggara Timur	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Bank Nusa Tenggara Timur TB 2014 dan Semester I 2015 di Kupang
			Jumlah	18	
XX	Provinsi Kalimantan Barat				
20	1	449	Provinsi Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
		450		1	Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	2	451	Kabupaten Bengkayang	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang
		452		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang
	3	453	Kabupaten Kayong Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
	4	454	Kabupaten Ketapang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang
	5	455	Kabupaten Kubu Raya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
	6	456	Kabupaten Melawi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Melawi
	7	457	Kabupaten Mempawah	1	Kinerja atas Efektivitas Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Mempawah
	8	458	Kabupaten Sanggau	1	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Sanggau
	9	459	Kota Pontianak	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Pontianak
	10	460	PT. BPD Kalimantan Barat	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT. BPD Kalimantan Barat TB 2014 dan Semester I 2015 di Pontianak
			Jumlah	12	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah				
21	1	461	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
	2	462	Kabupaten Barito Selatan	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
	3	463	Kabupaten Barito Utara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara
	4	464	Kabupaten Katingan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Katingan
	5	465	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
	6	466	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
		467		1	Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
	7	468	Kota Palangka Raya	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Palangka Raya
		469		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Palangka Raya
	8	470	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TB 2014 dan Semester I 2015 di Palangka Raya
			Jumlah	10	
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan				
22	1	471	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		472		1	Belanja Daerah TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
	2	473	Kabupaten Banjar	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Banjar di Martapura
		474		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Banjar
	3	475	Kabupaten Barito Kuala	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
	4	476	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
	5	477	Kabupaten Kotabaru	1	Belanja Daerah TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
	6	478	Kabupaten Tanah Bumbu	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
	7	479	Kabupaten Tanah Laut	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
	8	480	Kabupaten Tapin	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau
	9	481	Kota Banjarbaru	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Banjarbaru
		482		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarbaru
	10	483	Kota Banjarmasin	1	Kinerja Pengelolaan Kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) pada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2014 dan TA 2015
		484		1	Belanja Modal Infrastruktur dan Pengadaan Tanah TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		485		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarmasin
	11	486	PT BPD Kalimantan Selatan	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Kalimantan Selatan TB 2014 dan Semester I 2015 di Banjarmasin
			Jumlah	16	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur				
23	1	487	Provinsi Kalimantan Timur	1	Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
		488		1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
	2	489	Kabupaten Kutai Barat	1	Belanja Daerah TA 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
		490		1	Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September 2015) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
	3	491	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
		492		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
	4	493	Kabupaten Kutai Timur	1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
		494		1	Belanja Infrastruktur Daerah pada Kabupaten Kutai Timur TA 2014 & TA 2015
	5	495	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
	6	496	Kota Balikpapan	1	Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		497		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan
	7	498	Kota Samarinda	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda
	8	499	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur TB 2014 dan Semester I 2015 di Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Tarakan, dan Berau
			Jumlah	13	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara				
24	1	500	Provinsi Kalimantan Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Tanjung Selor Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
	2	501	Kabupaten Malinau	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Malinau Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
	3	502	Kabupaten Nunukan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Nunukan Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
	4	503	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2014
	5	504	Kota Tarakan	1	Operasional PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2014 dan 2015
			Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara				
25	1	505	Provinsi Sulawesi Utara	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
		506		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
	2	507	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 – 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
		508		1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Tahuna

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	3	509	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
	4	510	Kabupaten Minahasa Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
		511		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi
	5	512	Kota Bitung	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bitung
		513		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Kota Bitung
	6	514	Kota Kotamobagu	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kota Kotamobagu di Kotamobagu
	7	515	Kota Manado	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kota Manado
	8	516	Kota Tomohon	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Tomohon
	9	517	PT Bank Sulutgo	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT Bank Sulutgo
			Jumlah	13	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah				
26	1	518	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
		519		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	2	520	Kabupaten Banggai	1	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
	3	521	Kabupaten Banggai Laut	1	Manajemen Aset Pemekaran untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	4		Kabupaten Banggai Kepulauan	0	Manajemen Aset Pemekaran untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
		522		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
	5	523	Kabupaten Buol	1	Belanja Daerah Kabupaten Buol TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol
	6	524	Kabupaten Donggala	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 November 2015) pada Pemerintah Kabupaten Donggala
	7	525	Kabupaten Morowali	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
		526		1	Manajemen Aset Pemekaran untuk Pembentukan Kabupaten Morowali Utara pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale dan Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
	8	527	Kabupaten Parigi	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
	9	528	Kabupaten Poso	1	Kinerja atas Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015
	10	529	Kabupaten Sigi	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sigi TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September 2015) di Sigi
	11	530	Kabupaten Tojo Una-Una	1	Kinerja Pelayanan Perizinan TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
	12	531	Kabupaten Tolitoli	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
	13	532	Kota Palu	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Palu di Palu
		533		1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2014 dan 2015 di Kota Palu
	14	534	PT Bank Sulteng	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada PT Bank Sulteng di Palu
			Jumlah	17	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan				
27	1	535	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010-2014
		536		1	Kinerja atas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar TA 2014 dan 2015 (Semester I)
		537		1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	2	538	Kabupaten Bantaeng	1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng
	3	539	Kabupaten Enrekang	1	Belanja Barang/ Jasa, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang
	4	540	Kabupaten Jeneponto	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kabupaten Jeneponto dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010-2014
	5	541	Kabupaten Luwu Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
	6	542	Kabupaten Maros	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Maros
	7	543	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	8	544	Kabupaten Pinrang	1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pinrang
	9	545	Kabupaten Takalar	1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Takalar
	10	546	Kabupaten Wajo	1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Wajo
	11	547	Kota Palopo	1	Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	12	548	PT Bank Sulselbar	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Sulselbar TB 2014 dan Semester I 2015
			Jumlah	14	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara				
28	1	549	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 - 2014
		550		1	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
	2	551	Kabupaten Buton	1	Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Buton dan Instansi Terkait Lainnya di Pasarwajo
		552		1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buton di Pasarwajo
		553		1	Manajemen Aset Kabupaten Buton TA 2014 dan Semester I 2015
	3	554	Kabupaten Buton Utara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara
	4	555	Kabupaten Kolaka	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
		556		1	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
		557		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka.
	5	558	Kabupaten Konawe	1	Efektivitas Peran Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TA 2014 dan Semester I 2015 di Unaaha
	6	559	Kabupaten Konawe Selatan	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Kabupaten Konawe Selatan
	7	560	Kabupaten Konawe Utara	1	Belanja Modal Kabupaten Konawe Utara
	8	561	Kabupaten Muna	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha.
	9	562	Kota Baubau	1	Pengelolaan Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Baubau

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	10	563	Kota Kendari	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua TA 2014 s.d. Triwulan III TA 2015 Pemerintah Kota Kendari
		564		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari.
	11	565	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara TB 2014 dan Semester I 2015
			Jumlah	17	
XXIX	Provinsi Gorontalo				
29	1	566	Provinsi Gorontalo	1	Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
		567		1	Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2015 di Gorontalo
	2	568	Kabupaten Bone Bolango	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2015 di Suwawa
	3	569	Kabupaten Gorontalo	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gorontalo
		570		1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2015 di Limboto
	4	571	Kabupaten Gorontalo Utara	1	Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 - 2014 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Lainnya
	5	572	Kabupaten Pohuwato	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2015 di Marisa
	6	573	Kota Gorontalo	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Gorontalo
		574		1	Pemeriksaan Kinerja atas Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun 2015
			Jumlah	9	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat				
30	1	575	Provinsi Sulawesi Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	576	Kabupaten Majene	1	Kinerja Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
	3	577	Kabupaten Mamasa	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa
	4	578	Kabupaten Mamuju	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
		579		1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2014 dan 2015 di Mamuju
	5	580	Kabupaten Mamuju Tengah	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah TA 2014 dan 2015 di Tobadak
	6	581	Kabupaten Mamuju Utara	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara TA 2014 dan 2015 di Pasangkayu
	7	582	Kabupaten Polewali Mandar	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Polewali TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali
			Jumlah	8	
XXXI	Provinsi Maluku				
31	1	583	Provinsi Maluku	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Maluku TA 2010-2014
		584		1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku TA 2015
	2	585	Kabupaten Buru	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buru
	3	586	Kabupaten Buru Selatan	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan TA 2015
	4	587	Kabupaten Kepulauan Aru	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru TA 2015
	5	588	Kabupaten Maluku Tengah	1	Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi pada RSUD Masohi di Kabupaten Maluku Tengah
	6	589	Kabupaten Maluku Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lainnya di Kab. Maluku Tenggara

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	7	590	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	Kinerja Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010-2014
	8	591	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2014
	9	592	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2014
	10	593	Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon TA 2014
		594		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 Kota Ambon
	11	595	Kota Tual	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lainnya di Kota Tual
	12	596	PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara	1	Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara
			Jumlah	14	
XXXII	Provinsi Maluku Utara				
32	1	597	Provinsi Maluku Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
		598		1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Ternate
	2	599	Kabupaten Halmahera Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Jailolo
		600		1	Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015
	3	601	Kabupaten Halmahera Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Labuha
	4	602	Kabupaten Halmahera Utara	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara TA 2014 dan Semester I 2015 di Tobelo

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	603	Kabupaten Pulau Morotai	1	Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
	6	604	Kota Tidore Kepulauan	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
			Jumlah	8	
XXXIII	Provinsi Papua				
33	1	605	Provinsi Papua	1	Kinerja Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia TA 2013 s.d. TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
		606		1	Kinerja atas Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Provinsi Papua TA 2013 dan 2014 di Jayapura
		607		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Provinsi Papua
	2	608	Kabupaten Asmat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Kabupaten Asmat Tahun 2014
	3	609	Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor TA 2014
	4	610	Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel TA 2014
	5	611	Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai TA 2014
	6	612	Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2014
	7	613	Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2014
		614		1	Belanja Kabupaten Intan Jaya TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
	8	615	Kabupaten Jayapura	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Kabupaten Jayapura Tahun 2014
		616		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kabupaten Jayapura
		617		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Jayapura
	9	618	Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom TA 2014
		619		1	Kinerja atas Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Keerom di Waris

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		620		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Keerom
	10	621	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2014
	11	622	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2014
		623		1	Belanja Modal dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2014 dan 2015 (s.d. Nopember)
	12	624	Kabupaten Mappi	1	Belanja Kabupaten Mappi TA 2014 dan 2015
	13	625	Kabupaten Merauke	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat TA 2013-2014 pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke
	14	626	Kabupaten Mimika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Mimika
	15	627	Kabupaten Nabire	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Nabire
	16	628	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga TA 2014
		629		1	Belanja Pemerintah Kabupaten Nduga TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) di Kenyam
	17	630	Kabupaten Paniai	1	Belanja Daerah Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Paniai
	18	631	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014
		632		1	Belanja Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) di Oksibil
	19	633	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak TA 2014
	20	634	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi TA 2014
	21	635	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori TA 2014
		636		1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiweri
	22	637	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara TA 2014
		638		1	Kinerja Penanggulangan Kemiskinan 2015 pada Kabupaten Tolikara di Karubaga
	23	639	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen TA 2014
	24	640	Kabupaten Yalimo	1	Kinerja Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Yalimo TA 2013 s.d. 2014

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	25	641	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura
		642		1	Operasional Bank Tahun 2012, 2013 dan Triwulan I 2014 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua
			Jumlah	38	
XXXIV	Provinsi Papua Barat				
34	1	643	Provinsi Papua Barat	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
		644		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Provinsi Papua Barat
		645		1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat
	2	646	Kabupaten Fakfak	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2015
		647		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kabupaten Fakfak
	3	648	Kabupaten Kaimana	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2015
	4	649	Kabupaten Manokwari	1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kabupaten Manokwari TA 2015 di Manokwari
	5	650	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan TA 2014
	6	651	Kabupaten Maybrat	1	Belanja Infrastruktur Kabupaten Maybrat TA 2015 di Kumurkek
	7	652	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2014
	8	653	Kabupaten Raja Ampat	1	Belanja Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waisai
	9	654	Kabupaten Sorong	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sorong
		655		1	Belanja Infrastruktur Pemda Kabupaten Sorong Tahun 2015
	10	656	Kabupaten Sorong Selatan	1	Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		657		1	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 Di Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
		658		1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan TA 2015
	11	659	Kabupaten Tambrau	1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tambrau
	12	660	Kabupaten Teluk Bintuni	1	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
	13	661	Kabupaten Teluk Wondama	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2015
	14	662	Kota Sorong	1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sorong TA 2015
		663		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Sorong
			Jumlah	21	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD				571	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada BUMN dan Badan lainnya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	664	PT Brantas Abipraya (Persero)	1	Kinerja atas Pengelolaan Proyek PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 dan 2014 di Jakarta, Bandung dan Mataram
2	665	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1	Kinerja Terinci atas Pengelolaan Proyek dan Piutang Tahun Buku 2013 dan 2014 pada Segmen Infrastruktur dan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Surabaya
3	666	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	Kinerja Pembangunan Kapal Baru PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang Selesai dan Masih Dilaksanakan pada Tahun 2014 dan 2015 di Jakarta dan Batam
4	667	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyeberangan dan Pelabuhan Tahun Buku 2013 s.d. 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara serta Instansi Terkait Lainnya
5	668	PT Perkebunan Nusantara VI	1	Kinerja Kegiatan Pemanenan dan Pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2014 dan 2015 pada PTPN VI di Jambi dan Sumatera Barat
6	669	PT Perkebunan Nusantara VII	1	Kinerja Kegiatan Pemanenan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pabrik Kelapa Sawit, serta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014 dan 2015 pada PT Perkebunan Nusantara VII di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu
7	670	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan TA 2013 s.d. 2014
8	671	PT Timah (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan pada PT Timah (Persero) Tbk., Anak Perusahaan , dan Instansi Terkait
9	672	PT Pertamina Trans Kontinental	1	Kegiatan Penyediaan dan Operasi Kapal pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun 2012-2014 di Jakarta, Batam, dan Jawa Timur
10	673	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. beserta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Gresik, Tuban dan Banyuwangi
11	674	PT Semen Tonasa	1	Biaya, Investasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Tonasa di Pangkep
12	675	PT Semen Padang	1	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Padang di Indarung dan Lampung

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	676	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	1	Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
14	677	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Seluler dan PT Telekomunikasi Indonesia International dan Instansi Terkait
15	678	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan kegiatan Investasi Tahun 2013 dan 2014 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Cengkareng, Amsterdam, Jepang dan Amerika Serikat
16	679	PT Pelindo II (Persero)	1	Proses Perpanjangan Pengelolaan/pengoperasian PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PELINDO II (Persero), Kemenhub, Kemen BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
17	680	Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV)	1	Pengelolaan Aset pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV) dan Instansi Terkait
18	681	PT Angkasa Pura II (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya TA 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada PT Angkasa Pura II (Persero) beserta Anak Usaha dan Instansi Terkait
19	682	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	1	Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan
20	683	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya TB 2013 dan 2014 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
21	684	PT Perkebunan Nusantara II	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta
22	685	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan DKI Jakarta
23	686	PT Perkebunan Nusantara XIV	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara XIV di Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Maluku Utara
24	687	Perum Perhutani	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2014 dan 2015 (s.d Semester I) pada Perum Perhutani di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua Barat
25	688	PT Petrokimia Gresik	1	Biaya, Investasi dan Penjualan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Tahun Buku 2014 dan 2015 (Semester I) pada PT Petrokimia Gresik
26	689	PT Kertas Leces (Persero)	1	Program Restrukturisasi pada PT Kertas Leces (Persero) di Probolinggo, Surabaya, dan Jakarta

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
27	690	Perum Jasa Tirta II	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Jasa Tirta II
28	691	PT Pos Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pos Indonesia (Persero)
		Jumlah	28	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	692	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	Kinerja atas Efisiensi Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2014 dan 2015 (Semester I) di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
2	693	PT Bahana PUI (Persero)	1	Pendapatan dan Biaya Operasional, Penyertaan dan Pembiayaan serta Aktivitas Terkait TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bahana PUI (Persero)
3	694	PT Askrindo (Persero)	1	Pengelolaan Penjaminan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendapatan, Asuransi Kredit, Investasi, Biaya Operasional, dan Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan Tahun 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada PT Askrindo (Persero)
4	695	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.	1	Pengelolaan Kredit TB 2014 dan 2015 (Semester I) pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan Rantau Prapat serta Instansi Terkait
		Jumlah	4	
Komisi VII				
1	696	SKK Migas	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas, KKKS Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur
	697		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja <i>South East Sumatra</i> pada SKK Migas, KKKS CNOOC SES LTD serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Seribu
	698		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Eks Pertamina Block Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Cirebon
	699		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South Natuna Sea "B" & Corridor pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips Indonesia Inc. Lt. & KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Riau
	700		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea A Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea BV serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Riau

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	701		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Riau
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	702	Lembaga Penjamin Simpanan	1	Kinerja atas Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2013 s.d. Triwulan III Tahun 2015
2	703	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2014 dan 2015 (s.d Semester II) pada LPEI serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Surabaya dan Medan
3	704	Otoritas Jasa Keuangan	1	Pemeriksaan PDDT atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 - 2015 (periode 1 Januari s.d 30 September 2015) pada Kantor Pusat dan Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			41	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema IHPS II Tahun 2015

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
BAB I HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH PUSAT					
A	PEMERIKSAAN KINERJA				
I	Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan/Ekonomi				
	1	Penanggulangan Kemiskinan			
	1	1	Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan TA 2010-2014 dalam Rangka Mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait
	2	2	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan dengan Sasaran Penduduk Miskin TA 2012 s.d. 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Papua
	3	3	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	Efektivitas Pemberian Fasilitas Penjaminan KUR untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan Bagi UMKM dalam Rangka Mendukung Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah
	4	4	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		5		1	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan Nasional TA 2010–2014 pada Kementerian Sosial, Unit-Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan dan Instansi Lain yang Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku
	Jumlah LHP Terkait Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan/Ekonomi			5	
II	Pendidikan				
	1	Tunjangan Profesi Guru Kementerian Agama			
	1	6	Kementerian Agama	1	Efektivitas Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan
	2	Pelayanan Pendidikan			
	1	7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pelayanan Pendidikan Terkait Buku, Buku Berbasis Kurikulum 2013 dan Sarana Prasarana Pendidikan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I)
	Jumlah LHP Terkait Pendidikan			2	

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
III	Kesehatan				
	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional			
	1	8	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan TA 2014 s.d. TA 2015
	2	9	Kementerian Kesehatan	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Kementerian Kesehatan
		10		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo TA 2014 dan Semester I 2015
		11		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati
		12		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional atas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
		Jumlah		5	
	2	Badan Pengawas Obat dan Makanan			
	1	13	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	Efektivitas Koordinasi Pengawasan Obat dan/atau Makanan oleh Pemerintah Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) TA 2014 dan Semester I TA 2015
		Jumlah		1	
	Jumlah LHP Terkait Kesehatan			6	
IV	Ketahanan Pangan				
	1	Penelitian Prioritas Pangan			
	1	14	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	Efektivitas Program Penelitian Prioritas Nasional dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
	Jumlah LHP Terkait Ketahanan Pangan			1	
V	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi				
a	Reformasi Keuangan Negara				
a.1	Pengelolaan Keuangan				
	1	Pembinaan Implementasi SAP Berbasis Akrua			
	1	15	Kementerian Dalam Negeri	1	Efektivitas Pembinaan Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Pemda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Intansi Terkait
	2	Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua			
	1	16	Kementerian Keuangan	1	Pengendalian Internal terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Berbasis Akrua (Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR) pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Daerah

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3		Penyusunan dan Penetapan APBN/P TA 2014-2016		
1	17	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Penyusunan dan Penetapan APBN/P TA 2014 s.d. 2016 dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah pada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
		Jumlah	3	
a.2 Pengelolaan Sistem Informasi				
1		Tata Kelola Teknologi Informasi Keuangan		
1	18	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Tata Kelola Teknologi Informasi Keuangan Tahun 2012-2015 dalam Rangka Mendukung Visi dan Misi Kementerian Keuangan pada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan di Jakarta.
2		Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Dirjen Bea Cukai		
1	19	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Impor dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Instansi Vertikal di Bawahnya
3		Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pajak		
1	20	Kementerian Keuangan	1	Efektivitas Kegiatan Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Penerimaan dan Piutang Pajak serta Penyajiannya dalam Laporan Keuangan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal di Bawahnya
4		Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik (<i>e-Catalogue</i>)		
1	21	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik (E-Catalogue) TA 2014 s.d. 2015 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dan Instansi Terkait
		Jumlah	4	
b Pelayanan Publik				
1		Legalisasi Aset Program Nasional Agraria		
1	22	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1	Prona pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) TA 2013, 2014, dan Semester I 2015
2		Peradilan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum		
1	23	Mahkamah Konstitusi	1	Pelayanan Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum TA 2013 dan 2014 pada Mahkamah Konstitusi
3		Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api		
1	24	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Kegiatan Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api Non Organik TNI/Polri Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
4		Perizinan Impor Garam		
1	25	Kementerian Perdagangan	1	Efektivitas Penerbitan Perizinan Impor Garam pada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5		Pelayanan Kesehatan Haji		
1	26	Kementerian Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 1436 H / 2015 M pada Kementerian Kesehatan dan Instansi Lainnya
6		Penempatan dan Perlindungan TKI		
1	27	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Skema <i>Private to Private</i> Tahap Masa Penempatan
7		Pelayanan Bahan Pustaka		
1	28	Perpustakaan Nasional	1	Efektivitas Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka pada Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 s.d. Oktober 2015 di Jakarta
		Jumlah	7	
		Jumlah LHP Terkait Bidang Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	14	
		Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Pusat	28	
B PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU				
I Pendidikan				
1		Tunjangan Guru		
1	29	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (Semester I)
		Jumlah	1	
2		Pengelolaan Pendidikan Tinggi		
1	30	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti), Kopertis Wilayah III dan Kopertis Wilayah IV di Jakarta dan Bandung
	31		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Diponegoro di Jakarta dan Semarang
	32		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Jember di Jakarta dan Jember
	33		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Agustus 2015) pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Negeri Malang di Malang
	34		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satker Ditjen Dikti (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sebelas Maret di Jakarta dan Surakarta

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		35		1	Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2014 dan 2015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Sebelum dan Sesudah Penggabungan dengan Kemenristekdikti) dan Universitas Sriwijaya di Jakarta dan Palembang
		Jumlah		6	
	Jumlah LHP Terkait Pendidikan Jumlah			7	
II	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi				
a	Reformasi Keuangan Negara				
	1	Pengelolaan Pendapatan			
	1	36	Kejaksaan RI	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Instansi Terkait
		37		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta Instansi Terkait
		38		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait
		39		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait
		40		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait
		41		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung serta Instansi Terkait
	2	42	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan TA 2013 s.d. Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan
	3	43	Kementerian Keuangan	1	Penerimaan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Mineral dan Batu bara TA 2010 s.d. Semester I 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait
		44		1	Program <i>Sunset Policy</i> TA 2008 dan 2009 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya, serta Instansi Terkait

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	45		1	Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol TA 2011 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tanjung Priok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus, Pasuruan, Kediri, Tangerang, Ngurah Rai, dan Jakarta, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Dua, KPP Madya Semarang, KPP Madya Surabaya, dan KPP Madya Malang serta Instansi Terkait
4	46	Kementerian Luar Negeri	1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Praha di Republik Ceko
	47		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan PNBPN Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Bratislava di Slovakia
	48		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Brussels di Belgia
	49		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Den Haag di Belanda
	50		1	Pengelolaan PNBPN, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Athena di Yunani
	51		1	Pengelolaan PNBPN, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Oslo di Jakarta dan Norwegia
	52		1	Pengelolaan PNBPN, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Stockholm di Jakarta dan Swedia
	53		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Roma di Italia
	54		1	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan
	55		1	Pengelolaan PNBPN, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa di Swiss
	56		1	Pengelolaan PNBPN, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Wina di Austria
	57		1	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan
	58		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Washington D.C.. di Amerika Serikat
	59		1	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat
	Jumlah		24	
2	Pengelolaan Belanja			

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
1	60		Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2013, 2014 dan 2015 (Semester I) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
2			Kejaksaan RI	0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Instansi Terkait
				0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung serta Instansi Terkait
				0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat serta Instansi Terkait
				0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan 2015 (s.d. Juni 2015) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur serta Instansi Terkait
				0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali serta Instansi Terkait
				0	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung serta Instansi Terkait
3	61		Kementerian Agama	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Perguruan Tinggi Agama Negeri Kementerian Agama di Jambi, Jateng, Jatim, Sulsel dan Maluku
4	62		Kementerian Dalam Negeri	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah
5	63		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6	64		Kementerian Hukum dan HAM	1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara di Medan
	65			1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya
	66			1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung di Bandar Lampung

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		67		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu di Bengkulu
		68		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat di Bandung
7	69	Kementerian Ling-kungan Hidup	1	Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan TA 2015 (Semester 1) pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Selatan	
8		Kementerian Luar Negeri	0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Praha di Republik Ceko	
			0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan PNBP Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Bratislava di Slovakia	
			0	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Brussels di Belgia	
			0	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Den Haag di Belanda	
			0	Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Athena di Yunani	
			0	Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Oslo di Jakarta dan Norwegia	
			0	Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Stockholm di Jakarta dan Swedia	
			0	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Roma di Italia	
			0	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan	
			0	Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Perwa-kilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa di Swiss	
			0	Pengelolaan PNBP, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Wina di Austria	
			0	Pengelolaan Aset, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tahun 2014 dan 2015 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan	
			0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pa-jak Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Washington D.C. di Amerika Serikat	
			0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat	
9	70	Kementerian Pemu-da dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 (Se-semester I) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	10	71	Kementerian Perhubungan	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013, 2014 dan 2015 pada Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara
		72		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan dan TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan
		73		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan TA 2013 dan 2014 pada Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara serta TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Utara Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara
	11	74	Kementerian Pertahanan	1	Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal TA 2013, 2014, dan 2015 pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan
	12	75	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	<i>Travel Expenditures</i> Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM IPTEK atas Pelaksanaan <i>Loan International Bank for Reconstruction and Development</i> (IBRD) Nomor 8245-ID Tahun 2013 dan 2014 pada <i>Research and Innovation in Science and Technology</i> Project Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta
	13	76	Mahkamah Agung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Badan Peradilan di Bawah MA di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara
	14	77	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014 dan 2015 pada MPR di Jakarta
	15	78	Markas Besar TNI	1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag
		79		1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma
		80		1	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria
	16	81	Ombudsman Republik Indonesia	1	Pertanggungjawaban Pengelolaan Kas TA 2013, 2014, 2015 pada Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta
		Jumlah		22	
	3	Manajemen Aset			
	1	82	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta
	2		Kementerian Luar Negeri	0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Praha di Republik Ceko
				0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan PNBPA Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Bratislava di Slovakia

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
				0	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Brussels di Belgia
				0	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Den Haag di Belanda
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Athena di Yunani
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Oslo di Jakarta dan Norwegia
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Stockholm di Jakarta dan Swedia
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Roma di Italia
				0	Pengelolaan Aset, Belanja dan PNB, Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa di Swiss
				0	Pengelolaan PNB, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Wina di Austria
				0	Pengelolaan Aset, Belanja dan PNB, Tahun 2014 dan 2015 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan
				0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KBRI Washington D.C.. di Amerika Serikat
				0	Pengelolaan Kas, Aset Tetap, Belanja dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2014 dan 2015 pada KJRI Chicago di Amerika Serikat
3	83	Kementerian Pertahanan	1	Pemanfaatan dan Pengamanan serta Pengalihan Status Penggunaan Aset (Barang Milik Negara) TA 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI serta Instansi Terkait	
			0	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag	
			0	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma	
			0	Pelaksanaan Belanja dan Pengelolaan Aset pada Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria	
4	84	TNI Angkatan Darat	1	Manajemen Aset (Pengelolaan Barang Milik Negara) Khusus Aset Tanah serta Aset Gedung dan Bangunan s.d. Semester II Tahun 2015 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat	
5	85	TNI Angkatan Laut	1	Pemanfaatan Barang Milik Negara Tanah dan Bangunan pada TNI Angkatan Laut dan Jajaran Terkait	
6	86	TNI Angkatan Udara	1	Manajemen Aset pada Lingkungan TNI AU di di Jakarta, Malang, Bandung, Medan dan Lampung	
		Jumlah	5		
4	Pengelolaan Badan Layanan Umum				

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	1	87	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Gelora Bung Karno di Jakarta
		88		1	Pendapatan, Biaya, Investasi dan Kerja Sama Tahun 2012 s.d. Semester I 2015 pada Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (BPP TMII) di Jakarta
	2	89	Kepolisian Negara RI	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto Kepolisian Negara Republik Indonesia
		90		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk.II Samsoeri Mertojoso Surabaya, Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong dan Bhayangkara Tk. III Tulungagung Kepolisian Negara Republik Indonesia
		91		1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Badan Layanan Umum Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2015 pada RS Bhayangkara Tk. II Mappaoudang Kepolisian Negara Republik Indonesia
		Jumlah		5	
b	Pelayanan Publik				
	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus			
	1	92	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1436 H/2015 M pada Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Konsulat Jenderal RI dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah		1	
	Jumlah LHP Terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi			57	
	Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu Pemerintah Pusat			64	
	Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			92	
BAB II. HASIL PEMERIKSAAN PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD					
A	PEMERIKSAAN KEUANGAN				
PEMERINTAH DAERAH					
	1	Provinsi Sumatera Utara			
		93	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara TA 2014
		94	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal TA 2014
		95	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat TA 2014
		96	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2014

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	97	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2014
	98	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas TA 2014
	99	Kabupaten Toba Samosir	1	LKPD Kabupaten Toba Samosir TA 2014
	100	Kota Tanjung Balai	1	LKPD Kota Tanjung Balai TA 2014
2	Provinsi Kalimantan Utara			
	101	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung TA 2014
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	102	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang TA 2014
	103	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata TA 2014
	104	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka TA 2014
	105	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo TA 2014
	106	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao TA 2014
	107	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka TA 2014
4	Provinsi Maluku			
	108	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2014
	109	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur TA 2014
	110	Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon TA 2014
5	Provinsi Papua			
	111	Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor TA 2014
	112	Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel TA 2014
	113	Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai TA 2014
	114	Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai TA 2014
	115	Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya TA 2014
	116	Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom TA 2014
	117	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2014
	118	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2014
	119	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga TA 2014
	120	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	121	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak TA 2014
	122	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi TA 2014
	123	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori TA 2014
	124	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara TA 2014
	125	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen TA 2014
6	Provinsi Papua Barat			
	126	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan TA 2014
	127	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak TA 2014
	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah		35	
B	PEMERIKSAAN KINERJA			
	PEMERINTAH DAERAH			
I	Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan/Ekonomi			
	1	Penanggulangan Kemiskinan		
	1	Provinsi Aceh		
	128	Provinsi Aceh	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010–2014 pada Pemerintah Aceh, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Instansi Terkait Lainnya di Banda Aceh dan Provinsi Aceh
	129	Kabupaten Simelue	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2012 s.d. Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Simeulue, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Simeulue, Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue dan Instansi Terkait Lainnya di Sinabang
	2	Provinsi Sumatera Utara		
	130	Provinsi Sumatera Utara	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010–2014
	131	Kabupaten Simalungun	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2010-2014
	3	Provinsi Sumatera Selatan		
	132	Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Palembang
	133	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Instansi Terkait Lainnya di Kayuagung
	4	Provinsi Lampung		
	134	Provinsi Lampung	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Lampung
	135	Kabupaten Lampung Timur	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	Provinsi Jawa Barat			
		136	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Instansi Terkait Lainnya di Bandung
		137	Kabupaten Garut	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Kabupaten Garut dan Instansi Terkait Lainnya di Garut
	6	Provinsi Jawa Tengah			
		138	Provinsi Jawa Tengah	1	Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2010–2014 di Semarang
		139	Kabupaten Banjarnegara	1	Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2010–2014 di Banjarnegara
	7	Provinsi Jawa Timur			
		140	Provinsi Jawa Timur	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2011–2014 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya
		141	Kabupaten Bangkalan	1	Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Instansi Terkait Lainnya.
	8	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
		142	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
		143	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 - 2014 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
	9	Provinsi Kalimantan Barat			
		144	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
	10	145	Kabupaten Bengkayang	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bengkayang
		Provinsi Sulawesi Utara			
		146	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Manado
		147	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010–2014 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Tahuna
	11	Provinsi Sulawesi Selatan			
		148	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010-2014
		149	Kabupaten Jeneponto	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Kabupaten Jeneponto dan Instansi Terkait Lainnya TA 2010-2014
	12	Provinsi Sulawesi Tenggara			
		150	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2010 - 2014
		151	Kabupaten Buton	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010-2014 pada Pemerintah Kabupaten Buton dan Instansi Terkait Lainnya di Pasarwajo

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	Provinsi Gorontalo		
152	Provinsi Gorontalo	1	Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Gorontalo
153	Kabupaten Gorontalo Utara	1	Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 - 2014 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Instansi Lainnya
14	Provinsi Maluku		
154	Provinsi Maluku	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Maluku TA 2010-2014
155	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2010-2014
15	Provinsi Papua		
156	Provinsi Papua	1	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia TA 2013 s.d. TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura
157	Kabupaten Tolikara	1	Penanggulangan Kemiskinan 2015 pada Kabupaten Tolikara di Karubaga
Jumlah LHP Terkait Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan/Ekonomi		30	
II	Pendidikan		
1	Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
1	Provinsi Kalimantan Barat		
158	Kabupaten Sanggau	1	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Menunjang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Sanggau
2	Provinsi Sulawesi Tenggara		
159	Kabupaten Konawe	1	Efektivitas Peran Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan TA 2014 dan Semester I 2015 di Unaaha
3	Provinsi Sulawesi Barat		
160	Kabupaten Majene	1	Pengelolaan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dalam Menunjang Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Majene di Majene
Jumlah LHP Terkait Pendidikan Jumlah		3	
III	Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas		
1	Provinsi Sumatera Barat		
161	Provinsi Sumatera Barat	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bukittinggi
2	Provinsi Jawa Timur		

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	162	Kabupaten Tuban	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap pada Sembilan Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Tuban TA 2014 dan Semester I 2015 di Tuban
3	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	163	Kabupaten Lombok Timur	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap dan Gawat Darurat pada RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Agustus)
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	164	Kota Kupang	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD S. K. Lerik TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Kota Kupang
5	Provinsi Maluku			
	165	Kabupaten Maluku Tengah	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap dan Pelayanan Farmasi pada RSUD Masohi
6	Provinsi Maluku Utara			
	166	Provinsi Maluku Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Ternate
	167	Kabupaten Halmahera Barat	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Jailolo
	168	Kabupaten Halmahera Selatan	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Labuha
	169	Kabupaten Halmahera Utara	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara TA 2014 dan Semester I 2015 di Tobelo
2	Program Kesehatan Ibu dan Anak			
1	Provinsi Kalimantan Barat			
	170	Kabupaten Mempawah	1	Program Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Mempawah.
Jumlah LHP Terkait Kesehatan Jumlah			10	
IV Perumahan				
1	Penyediaan Akses Air Bersih			
1	Provinsi Aceh			
	171	Kabupaten Aceh Besar	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Jantho
	172	Kabupaten Bireuen	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bireuen di Bireuen

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Provinsi Sumatera Utara		
173	Kabupaten Asahan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran
174	Kabupaten Dairi	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kab. Dairi di Sidikalang
3	Provinsi Sumatera Barat		
175	Kabupaten padang Pariaman	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten padang Pariaman di Parit Malintang
176	Kabupaten Solok	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok
4	Provinsi Riau		
177	Kabupaten Kampar	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
178	Kabupaten Kuantan Singingi	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
5	Provinsi Jambi		
179	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal TA 2014 dan Semester I 2015
180	Kabupaten Tebo	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo
6	Provinsi Sumatera Selatan		
181	Kabupaten Muara Enim	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim
182	Kabupaten Musi Rawas	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti
7	Provinsi Bengkulu		
183	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
184	Kabupaten Kaur	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kaur

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
8	Provinsi Lampung			
	185	Kabupaten Lampung Utara	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
	186	Kabupaten Tulang Bawang	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemkab Tulang Bawang di Menggala
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
	187	Kabupaten Bangka Tengah	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di Koba
	188	Kabupaten Belitung	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Belitung TA 2014 dan Semester I 2015 di Tanjung Pandan
10	Provinsi Kepulauan Riau			
	189	Kabupaten Karimun	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Karimun
11	Provinsi Jawa Barat			
	190	Kabupaten Cianjur	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Cianjur
	191	Kabupaten Sukabumi	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi
	192	Kabupaten Sumedang	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang
12	Provinsi Jawa Tengah			
	193	Kabupaten Kendal	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
	194	Kabupaten Wonogiri	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri TA 2014 dan Semester I 2015
13	Provinsi D.I. Yogyakarta			
	195	Kabupaten Gunungkidul	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari
14	Provinsi Jawa Timur			
	196	Kabupaten Blitar	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	197	Kabupaten Probolinggo	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
15	Provinsi Banten			
	198	Kabupaten Lebak	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak
16	Provinsi Bali			
	199	Kabupaten Karangasem	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Karangasem
	200	Kabupaten Klungkung	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	201	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
	202	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Minum Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe
18	Provinsi Kalimantan Tengah			
	203	Kabupaten Barito Selatan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di Buntok
	204	Kabupaten Katingan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Katingan
	205	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
19	Provinsi Kalimantan Selatan			
	206	Kabupaten Barito Kuala	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
	207	Kabupaten Tapin	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau
20	Provinsi Kalimantan Timur			
	208	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
21	Provinsi Sulawesi Tengah			
	209	Kabupaten Morowali	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
	210	Kabupaten Tolitoli	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
22	Provinsi Sulawesi Selatan			
	211	Kabupaten Maros	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Maros
	212	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
23	Provinsi Maluku			
	213	Kabupaten Buru	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buru
25	Provinsi Maluku Utara			
	214	Kabupaten Pulau Morotai	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan
26	Provinsi Papua Barat			
	215	Kabupaten Sorong Selatan	1	Upaya Pemda dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan TA 2014 dan Semester I 2015 Kabupaten Sorong Selatan
Jumlah LHP Terkait Perumahan Jumlah			45	
V	Pemerataan Antar-Wilayah			
a	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan			
1	Provinsi Papua			
	216	Provinsi Papua	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung pada Provinsi Papua TA 2013 dan 2014 di Jayapura
	217	Kabupaten Keerom	1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung TA 2013 dan 2014 pada Pemerintah Kabupaten Keerom di Waris
	218	Kabupaten Merauke	1	Efektivitas Pengelolaan Program Pemberdayaan Masyarakat TA 2013-2014 pada Pemerintah Kabupaten Merauke di Merauke
	219	Kabupaten Yalimo	1	Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Yalimo TA 2013 s.d. 2014
	Jumlah		4	

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
b	Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
	1	Provinsi Gorontalo			
		220	Kota Gorontalo	1	Penataan Ruang Kota Gorontalo Tahun 2015
		Jumlah		1	
	Jumlah LHP Terkait Pemerataan Antar-Wilayah			5	
VI	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi				
a	Reformasi Keuangan Daerah				
	1	Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual			
	1	Provinsi Aceh			
		221	Provinsi Aceh	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Aceh di Banda Aceh
		222	Kabupaten Aceh Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
		223	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya di Blang Pidie
		224	Kabupaten Aceh Tamiang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
		225	Kota Banda Aceh	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Banda Aceh
		226	Kota Langsa	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Langsa
	2	Provinsi Sumatera Utara			
		227	Provinsi Sumatera Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
		228	Kabupaten Deli Serdang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
		229	Kabupaten Langkat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implemenasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Langkat
		230	Kabupaten Mandailing Natal	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	231	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
	232	Kota Medan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III 2015 Pemerintah Kota Medan
3	Provinsi Sumatera Barat			
	233	Provinsi Sumatera Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	234	Kabupaten padang Pariaman	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III 2015 pada Pemerintah Kabupaten padang Pariaman
	235	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
	236	Kota Pariaman	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III 2015 pada Pemerintah Kota Pariaman
4	Provinsi Riau			
	237	Provinsi Riau	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Riau
	238	Kabupaten Indragiri Hulu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
	239	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pemerintah pada Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
	240	Kota Dumai	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Dumai di Dumai
5	Provinsi Jambi			
	241	Provinsi Jambi	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jambi
	242	Kabupaten Batang Hari	1	Efektivitas Upaya Pemd dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	243	Kabupaten Muaro Jambi	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015) pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
	244	Kota Jambi	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015) pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	Provinsi Sumatera Selatan		
245	Provinsi Sumatera Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
246	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
247	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
248	Kota Palembang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palembang
7	Provinsi Bengkulu		
249	Provinsi Bengkulu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
250	Kabupaten Kepahiang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang
251	Kabupaten Lebong	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebong
252	Kota Bengkulu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu
8	Provinsi Lampung		
253	Provinsi Lampung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Provinsi Lampung TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
254	Kabupaten Lampung Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
255	Kabupaten Lampung Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
256	Kabupaten Pringsewu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pringsewu
257	Kota Bandar Lampung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung
258	Kota Metro	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Metro

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
	259	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
	260	Kabupaten Bangka	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat
	261	Kabupaten Bangka Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Muntok
	262	Kota Pangkalpinang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Pangkalpinang
10	Provinsi Kepulauan Riau			
	263	Provinsi Kepulauan Riau	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
	264	Kabupaten Bintan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
	265	Kota Batam	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batam di Batam
	266	Kota Tanjungpinang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang
11	Provinsi DKI Jakarta			
	267	Provinsi DKI Jakarta	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
12	Provinsi Jawa Barat			
	268	Provinsi Jawa Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	269	Kabupaten Bandung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bandung
	270	Kabupaten Bogor	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kabupaten Bogor
	271	Kota Banjar	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Banjar
	272	Kota Depok	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Depok
	273	Kota Tasikmalaya	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Tasikmalaya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	Provinsi Jawa Tengah			
	274	Provinsi Jawa Tengah	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang
	275	Kabupaten Batang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Batang
	276	Kabupaten Boyolali	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Boyolali
	277	Kabupaten Pekalongan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Kajen
	278	Kabupaten Purworejo	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Purworejo.
	279	Kabupaten Semarang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Semarang
	280	Kota Magelang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Magelang
	281	Kota Surakarta	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Surakarta
14	Provinsi D.I. Yogyakarta			
	282	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemda D.I. Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
	283	Kabupaten Bantul	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Bantul serta Instansi Terkait Lainnya di Bantul Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
	284	Kabupaten Sleman	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sleman serta Instansi Terkait Lainnya di Sleman Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
	285	Kota Yogyakarta	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintah Kota Yogyakarta serta Instansi Terkait Lainnya di Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 (s.d. Triwulan III)
15	Provinsi Jawa Timur			
	286	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	287	Kabupaten Gresik	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
	288	Kabupaten Jombang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Jombang
	289	Kabupaten Mojokerto	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
	290	Kabupaten Pasuruan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pasuruan
	291	Kota Batu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Batu
	292	Kota Malang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Malang
	293	Kota Pasuruan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Pasuruan
16	Provinsi Banten			
	294	Provinsi Banten	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Banten dan Instansi Terkait Lainnya di Serang
	295	Kota Tangerang	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya di Tangerang
17	Provinsi Bali			
	296	Provinsi Bali	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Bali
	297	Kabupaten Badung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura
	298	Kabupaten Gianyar	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gianyar
	299	Kota Denpasar	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	300	Kabupaten Lombok Tengah	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	301	Kota Mataram	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Mataram
19	Provinsi Kalimantan Barat			
	302	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
	303	Kabupaten Kubu Raya	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
20	Provinsi Kalimantan Tengah			
	304	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
	305	Kota Palangka Raya	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Palangka Raya
21	Provinsi Kalimantan Selatan			
	306	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
	307	Kota Banjarbaru	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Banjarbaru
22	Provinsi Kalimantan Timur			
	308	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
	309	Kota Balikpapan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan
23	Provinsi Kalimantan Utara			
	310	Provinsi Kalimantan Utara	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Tanjung Selor Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
	311	Kabupaten Malinau	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Malinau Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
	312	Kabupaten Nunukan	1	Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Nunukan Tahun 2014 dan Triwulan III 2015
24	Provinsi Sulawesi Utara			
	313	Provinsi Sulawesi Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	314	Kabupaten Minahasa Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
	315	Kota Bitung	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bitung
	316	Kota Tomohon	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Tomohon
25	Provinsi Sulawesi Tengah			
	317	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
	318	Kota Palu	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Palu di Palu
26	Provinsi Sulawesi Selatan			
	319	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
	320	Kabupaten Luwu Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
27	Provinsi Sulawesi Tenggara			
	321	Kota Kendari	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2014 Dampai dengan Triwulan III TA 2015 Pemerintah Kota Kendari
28	Provinsi Gorontalo			
	322	Kabupaten Gorontalo	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Gorontalo
	323	Kota Gorontalo	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 Pemerintah Kota Gorontalo
29	Provinsi Sulawesi Barat			
	324	Provinsi Sulawesi Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
	325	Kabupaten Mamuju	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 s.d. Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju di Mamuju
30	Provinsi Maluku Utara			
	326	Provinsi Maluku Utara	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Sofifi

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	327	Kota Tidore Kepulauan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrua Tahun 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
31	Provinsi Papua			
	328	Kabupaten Asmat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Kabupaten Asmat Tahun 2014
	329	Kabupaten Jayapura	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Kabupaten Jayapura Tahun 2014
32	Provinsi Papua Barat			
	330	Provinsi Papua Barat	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
	331	Kabupaten Sorong	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sorong
	332	Kabupaten Sorong Selatan	1	Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
	Jumlah		112	
2	Pengelolaan Pajak Daerah			
1	Provinsi Lampung			
	333	Kabupaten Lampung Selatan	1	Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
	334	Kabupaten Lampung Timur	1	Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
	Provinsi Kepulauan Riau			
	335	Provinsi Kepulauan Riau	1	Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau TA 2014 dan 2015
	336	Kota Tanjungpinang	1	Pengelolaan Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Triwulan III)
2	Provinsi Kalimantan Tengah			
	337	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
	338	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
3	Provinsi Kalimantan Selatan			
	339	Kota Banjarmasin	1	Pengelolaan Kegiatan Pendataan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Banjarmasin TA 2014 dan TA 2015
	Jumlah		7	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	Manajemen Aset			
1	Provinsi Jawa Barat			
	340	Kabupaten Cirebon	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
	341	Kabupaten Karawang	1	Manajemen Aset TA 2014 dan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
	342	Kota Bekasi	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
2	Provinsi Sulawesi Tengah			
	343	Kabupaten Poso	1	Efektivitas Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015
	Jumlah		4	
4	Efektivitas Audit dan Reviu Inspektorat			
1	Provinsi Sulawesi Utara			
	344	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Tahuna
	Jumlah		1	
5	Pengelolaan Anggaran dan Keuangan RSUD Haji Makassar			
1	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	345	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pengelolaan Anggaran dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar TA 2014 dan 2015 (Semester I)
	Jumlah		1	
b	Pelayanan Publik			
1	Pelayanan Perizinan			
	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	346	Kabupaten Tojo Una-Una	1	Pelayanan Perizinan TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana
	Jumlah LHP Terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi		126	
	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah		219	
	BADAN USAHA MILIK DAERAH			
I	Bank Pembangunan Daerah (BPD)			
1	Provinsi Sumatera Barat			
	347	Provinsi Sumatera Barat	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada BPD Sumatera Barat TB 2014 dan Semester I 2015 di padang
2	Provinsi Riau dan Kepulauan Riau			
	348	Provinsi Riau dan Kepulauan Riau	1	Efisiensi BPD dan Efektivitas Program BPD dalam Peningkatan Perekonomian Daerah TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT Bank Riau Kepri

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	Provinsi Jambi			
	349	Provinsi Jambi	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah pada PT BPD Jambi di Jambi
4	Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung			
	350	Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada Bank Sumselbabel di Palembang
5	Provinsi Bengkulu			
	351	Provinsi Bengkulu	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT BPD Bengkulu, Pemda di Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya
6	Provinsi Lampung			
	352	Provinsi Lampung	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah pada PT BPD Lampung
7	Provinsi D.I. Yogyakarta			
	353	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Istimewa Yogyakarta TB 2014 dan Semester 1 2015 di Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonosari, dan Wates
8	Provinsi Jawa Timur			
	354	Provinsi Jawa Timur	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT. BPD Jawa Timur,Tbk., TB 2014 dan Semester I 2015 di Provinsi Jawa Timur.
9	Provinsi Bali			
	355	Provinsi Bali	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada BPD Bali, Pemda di Provinsi Bali, dan Instansi Terkait Lainnya di Denpasar
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	356	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Nusa Tenggara Barat TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 di Mataram
11	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	357	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada Bank Nusa Tenggara Timur TB 2014 dan Semester I 2015 di Kupang
12	Provinsi Kalimantan Barat			
	358	Provinsi Kalimantan Barat	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT. BPD Kalimantan Barat TB 2014 dan Semester I 2015 di Pontianak
13	Provinsi Kalimantan Tengah			
	359	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah TB 2014 dan Semester I 2015 di Palangka Raya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	Provinsi Kalimantan Selatan			
	360	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Kalimantan Selatan TB 2014 dan Semester I 2015 di Banjarmasin
15	Provinsi Kalimantan Timur			
	361	Provinsi Kalimantan Timur	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada BPD Kalimantan Timur TB 2014 dan Semester I 2015 di Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Tarakan, dan Berau
16	Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo			
	362	Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah TB 2014 s.d. Semester I 2015 pada PT Bank Sulutgo
17	Provinsi Sulawesi Tengah			
	363	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Sulteng TB 2014 dan Semester I 2015
18	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat			
	364	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian pada PT Bank Sulsebar TB 2014 dan Semester I 2015
19	Provinsi Sulawesi Tenggara			
	365	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Peningkatan Perekonomian pada PT BPD Sulawesi Tenggara TB 2014 dan Semester I 2015
20	Provinsi Maluku			
	366	Provinsi Maluku	1	Efisiensi Bank dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TB 2014 dan Semester I 2015 pada PT BPD Maluku dan Maluku Utara
21	Provinsi Papua			
	367	Provinsi Papua	1	Efisiensi dan Efektivitas Program Bank dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada BPD Papua di Jayapura
Jumlah LHP Terkait Bank Pembangunan Daerah			21	
Jumlah LHP Kinerja BUMD			21	
Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah dan BUMD			240	
C	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
	PEMERINTAH DAERAH			
I	Pendidikan			
a	Tunjangan Guru			
1	Provinsi Sumatera Utara			
	368	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	369	Pemerintah Kabupaten Langkat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Instansi Terkait Lainnya
	370	Pemerintah Kota Medan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya
2	Provinsi Sumatera Selatan			
	371	Pemerintah Kabupaten Lahat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait Lainnya
	372	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait Lainnya
	373	Pemerintah Kota Palembang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan Instansi Terkait Lainnya
3	Provinsi Lampung			
	374		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Lampung Tengah.
	375		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Lampung Timur.
	376		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Pringsewu.
4	Provinsi Banten			
	377	Pemerintah Kabupaten Tangerang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	378	Pemerintah Kota Tangerang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Tangerang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)
	379	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Tangerang Selatan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I)

No. Urut	Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	Provinsi Jawa Barat		
380	Pemerintah Kabupaten Bandung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung
381	Pemerintah Kota Bandung	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Bandung
382	Pemerintah Kota Bogor	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I 2014 di Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya
6	Provinsi Jawa Timur		
383		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Malang dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
384		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Pasuruan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
385		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Surabaya dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
7	Provinsi Bali		
386		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Gianyar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
387		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kabupaten Tabanan dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
388		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru pada Kota Denpasar dan Instansi Terkait Lainnya TA 2013 dan 2014 (s.d. Semester I).
8	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
389	Pemerintah Kabupaten Kupang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kupang
390	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Pengelolaan dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan
391	Pemerintah Kota Kupang	1	Pengelolaan dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9		Provinsi Kalimantan Selatan		
	392	Pemerintah Kabupaten Banjar	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Banjar
	393	Pemerintah Kota Banjarbaru	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarbaru
	394	Pemerintah Kota Banjarmasin	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarmasin
10		Provinsi Kalimantan Timur		
	395	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
	396	Pemerintah Kota Balikpapan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan
	397	Pemerintah Kota Samarinda	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda
11		Provinsi Sulawesi Tenggara		
	398		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka.
	399		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha.
	400		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru (TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Pemerintah Kota Kendari di Kendari.
12		Provinsi Maluku		
	401	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara
	402	Pemerintah Kota Ambon	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 204 Kota Ambon

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	403	Pemerintah Kota Tual	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lainnya di Kota Tual
	Jumlah LHP Terkait Pendidikan		36	
II	Pemerataan Antar-Wilayah			
a	Pedesaan			
	1	Dana Otonomi Khusus		
	1	Provinsi Papua		
	404	Pemerintah Provinsi Papua	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua
	405	Pemerintah Kabupaten Jayapura	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura
	406	Pemerintah Kabupaten Keerom	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Keerom
	407	Pemerintah Kabupaten Mimika	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mimika
	408	Pemerintah Kabupaten Nabire	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nabire
	2	Provinsi Papua Barat		
	409	Pemerintah Provinsi Papua Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat
	410	Pemerintah Kabupaten Fakfak	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Fak-fak
	411	Pemerintah Kota Sorong	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Sorong
	Jumlah LHP Terkait Dana Otonomi Khusus		8	
III	Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi			
a	Reformasi Keuangan Daerah			
	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		
	1	Provinsi Papua Barat		
	412	Pemerintah Provinsi Papua Barat	1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari
	413	Pemerintah Kabupaten Tambrau	1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tambrau
	414	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	1	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
	Jumlah		3	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	Pendapatan			
1	Provinsi Aceh			
1	415	Pemerintah Provinsi Aceh	1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Aceh TA 2014 dan Semester I TA 2015
2	Provinsi Sumatera Barat			
	416	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1	Pajak Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3	Provinsi Jambi			
	417	Pemerintah Provinsi Jambi	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	418	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	419	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
	420	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4	Provinsi Sumatera Selatan			
	421	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1	Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan TA 2014 s.d. Semester I TA 2015
5	Provinsi Kepulauan Riau			
	422	Pemerintah Kota Batam	1	Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III)
6	Provinsi Jawa Barat			
	423	Pemerintah Kabupaten Bekasi	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang
	424	Pemerintah Kabupaten Subang	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang
	425	Pemerintah Kota Bandung	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung
	426	Pemerintah Kota Cirebon	1	Pendapatan Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon
7	Provinsi D.I. Yogyakarta			
	427	Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta	1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
	428	Pemerintah Kabupaten Sleman	1	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman TA 2015 (s.d. Triwulan III)
8	Provinsi Jawa Tengah			
	429	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2015 di Banjarnegara

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	430	Pemerintah Kota Magelang	1	Perizinan Kota Magelang Tahun 2014 dan 2015 di Magelang
	431	Pemerintah Kota Pekalongan	1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekalongan TA 2015 di Pekalongan
9	Provinsi Jawa Timur			
	432	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi TA 2014 dan Semester I TA 2015 di Banyuwangi
	433	Pemerintah Kabupaten Lamongan	1	Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamongan TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) di Lamongan
	434	Pemerintah Kabupaten Tangerang	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
10	Provinsi Banten			
	435	Pemerintah Kota Cilegon	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
	436	Pemerintah Kota Serang	1	Pendapatan Asli Daerah Kota Serang TA 2014 dan 2015 (Semester I)
11	Provinsi Sulawesi Utara			
	437	Pemerintah Kota Bitung	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Kota Bitung
	438	Pemerintah Kota Manado	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kota Manado
12	Provinsi Sulawesi Barat			
	439	Pemerintah Kabupaten Mamuju	1	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2014 dan 2015 di Mamuju
13	Provinsi Sulawesi Tengah			
	440	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
14	Provinsi Bali			
	441	Pemerintah Provinsi Bali	1	Pendapatan Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
	442	Pemerintah Kabupaten Badung	1	Pendapatan Daerah Kabupaten Badung TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober 2015)
15	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	443	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	1	Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus)
16	Provinsi Papua			
	444	Pemerintah Kabupaten Jayapura	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kabupaten Jayapura
	Jumlah		30	

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3		Pengelolaan Belanja		
1		Provinsi Aceh		
	445	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	1	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
2		Provinsi Sumatera Utara		
	446	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	447	Pemerintah Kabupaten Batubara	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Batubara di Lima Puluh
	448	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal di Panyabungan
	449	Pemerintah Kabupaten Nias	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Nias di Gunung Sitoli
	450	Pemerintah Kabupaten Simalungun	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Simalungun di Pematang Raya
	451	Pemerintah Kota Medan	1	Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
3		Provinsi Sumatera Barat		
	452	Pemerintah Kabupaten Agam	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Agam TA 2014 dan 2015
	453	Pemerintah Kabupaten Pasaman	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pasaman TA 2014 dan 2015
	454	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2014 dan 2015
	455	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sijunjung TA 2014 dan 2015
	456	Pemerintah Kabupaten Solok	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Solok TA 2014 dan 2015
	457	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar TA 2014 dan 2015
4		Provinsi Jambi		
	458	Pemerintah Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	459	Pemerintah Kabupaten Bungo	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	460	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
	461	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
	462	Pemerintah Kota Sungai Penuh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	Provinsi Sumatera Selatan			
	463	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
	464		1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Terkait di Palembang
	465	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi Terkait di Prabumulih
	466	Pemerintah Kabupaten Lahat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi Terkait di Prabumulih
	467	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi Terkait di Muara Enim
	468	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	1	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
	469	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi Terkait di Indralaya
	470	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi Terkait di Martapura
	471	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
	472	Pemerintah Kota Lubuklinggau	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi Terkait di Lubuklinggau
	473	Pemerintah Kota Prabumulih	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi Terkait di Prabumulih
6	Provinsi Bengkulu			
	474	Pemerintah Provinsi Bengkulu	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
	475	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur
	476	Pemerintah Kabupaten Muko Muko	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muko Muko dan Instansi Terkait Lainnya di Muko Muko
	477	Pemerintah Kota Bengkulu	1	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu
7	Provinsi Lampung			
	478	Pemerintah Provinsi Lampung	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Lampung
	479	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	480	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
	481	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
	482	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
	483	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
	484	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
	485	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu
	486	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus
	487	Pemerintah Kota Bandar Lampung	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung
8	Provinsi Bangka Belitung			
	488	Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait
	489	Pemerintah Kabupaten Bangka	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait
	490	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait
	491	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait
	492	Pemerintah Kabupaten Belitung	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait
	493	Pemerintah Kota Pangkalpinang	1	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait
9	Provinsi Kepulauan Riau			
	494	Pemerintah Kabupaten Bintan	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2014 dan 2015 di Bandar Seri Bentan
	495	Pemerintah Kabupaten Karimun	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2014 dan 2015
	496	Pemerintah Kabupaten Natuna	1	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2014 dan 2015 di Ranai

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10		Provinsi DKI Jakarta		
	497	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
11		Provinsi Jawa Barat		
	498	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	499	Pemerintah Kabupaten Bogor	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bogor
	500	Pemerintah Kabupaten Cirebon	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon
	501	Pemerintah Kabupaten Garut	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Garut
	502	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran
	503	Pemerintah Kota Bandung	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bandung
	504	Pemerintah Kota Banjar	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Banjar
	505	Pemerintah Kota Bogor	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Bogor
	506	Pemerintah Kota Depok	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Depok
12		Provinsi di Yogyakarta		
	507	Pemerintah Provinsi di Yogyakarta	1	Belanja Non Infrastruktur dan Dana Keistimewaan di Yogyakarta
	508	Pemerintah Kabupaten Bantul	1	Belanja Daerah TA 2015 Kab. Bantul
	509	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Belanja Daerah Kota Yogyakarta
13		Provinsi Jawa Tengah		
	510	Pemerintah Provinsi Jateng	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang
	511	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	1	Belanja Modal TA 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar di Karanganyar
	512	Pemerintah Kabupaten Klaten	1	Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
	513	Pemerintah Kabupaten Pemalang	1	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2015 di Pemalang
	514	Pemerintah Kabupaten Purworejo	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kab Purworejo TA 2015
	515	Pemerintah Kabupaten Tegal	1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kab. Tegal TA 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		516	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	1	Belanja Modal Pemkab Wonosobo TA 2015
		517	Pemerintah Kota Salatiga	1	Belanja Modal Pemerintah Kota Salatiga TA 2015
		518	Pemerintah Kota Semarang	1	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kota Semarang TA 2015
		519	Pemerintah Kota Tegal	1	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kota Tegal TA 2015
	14	Provinsi Jawa Timur			
		520	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2015 di Bondowoso
		521	Pemerintah Kabupaten Jember	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2015 di Jember
		522	Pemerintah Kabupaten Kediri	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 di Kediri
		523	Pemerintah Kabupaten Lumajang	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2015 di Lumajang.
		524	Pemerintah Kabupaten Magetan	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2015 (s.d. 30 November 2015) di Magetan
		525	Pemerintah Kabupaten Malang	1	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 di Malang
		526	Pemerintah Kabupaten Ngawi	1	Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun Angaran 2015 (s.d. November 2015) di Ngawi
		527	Pemerintah Kabupaten Pacitan	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) di Pacitan
	15	Provinsi Banten			
		528	Pemerintah Provinsi Banten	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Banten
		529	Pemerintah Kabupaten Lebak	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak
		530	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang
		531	Pemerintah Kabupaten Tangerang	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
		532	Pemerintah Kota Tangerang	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang
		533	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan
	16	Provinsi Bali			
		534	Pemerintah Kabupaten Buleleng	1	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Kabupaten Buleleng
		535	Pemerintah Kabupaten Gianyar	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	536	Pemerintah Kabupaten Tabanan	1	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemkab Tabanan
	537	Pemerintah Kota Denpasar	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar
17	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
	538	Pemerintah Provinsi NTB	1	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB TA 2015 (s.d. 30 November)
	539	Pemerintah Kabupaten Bima	1	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)
	540	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	1	Belanja Daerah Kab. Lombok Tengah TA 2015 (s.d. November)
	541	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	1	Belanja Barang dan Jasa, hibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
	542	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	1	Belanja Barang dan Jasa, Bibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
	543	Pemerintah Kota Bima	1	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)
18	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
	544	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	545	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur
	546	Pemerintah Kabupaten Sikka	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sikka
19	Provinsi Kalimantan Barat			
	547	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2015
	548	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara TA 2015
	549	Pemerintah Kabupaten Ketapang	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2015
	550	Pemerintah Kabupaten Melawi	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi TA 2015
	551	Pemerintah Kota Pontianak	1	Belanja Daerah Kota Pontianak TA 2015
20	Provinsi Kalimantan Tengah			
	552	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	1	Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara TA 2015

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
		553	Pemerintah Kota Palangkaraya	1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya TA 2015
21	Provinsi Kalimantan Selatan				
		554	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalsel
		555	Pemerintah Kabupaten Banjar	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kab. Banjar di Martapura
		556	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	1	Belanja Daerah TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kab. Kotabaru di Kotabaru
		557	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kab. Tanah Bumbu di Batu Licin
		558	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 & 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kab. Tanah Laut di Pelaihari
		559	Pemerintah Kota Banjarmasin	1	Belanja Modal Infrastruktur dan Pengadaan Tanah TA 2014 dan TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
22	Provinsi Kalimantan Timur				
		560	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
		561	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	1	Belanja Daerah TA 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
		562		1	Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September 2015) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
		563	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
		564	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	1	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
		565		1	Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September 2015) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
23	Provinsi Sulawesi Utara				
		566	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
		567	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
		568	Pemerintah Kota Kotamobagu	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kota Kotamobagu
24	Provinsi Sulawesi Barat				
		569	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah TA 2014 dan 2015 di Tobadak

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	570	Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara	1	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara TA 2014 dan 2015 di Pasangkayu
25	Provinsi Sulawesi Tengah			
	571	Pemerintah Kabupaten Banggai	1	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
	572	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
	573	Pemerintah Kabupaten Buol	1	Belanja Daerah Kabupaten Buol TA 2014 dan 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol
	574	Pemerintah Kabupaten Donggala	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 November 2015) pada Pemerintah Kabupaten Donggala
	575	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	1	Belanja Daerah TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
	576	Pemerintah Kabupaten Sigi	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sigi TA 2014 dan 2015 (s.d. 30 September 2015) di Sigi
	577	Pemerintah Kota Palu	1	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2014 dan 2015 di Kota Palu
26	Provinsi Sulawesi Tenggara			
	578	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
	579	Pemerintah Kabupaten Buton	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kab. Buton di Pasarwajo
	580	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	1	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara
	581	Pemerintah Kabupaten Kolaka	1	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
	582	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2014 dan 2015
27	Provinsi Sulawesi Selatan			
	583	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kab Banteng di Bantaeng
	584	Pemerintah Kabupaten Enrekang	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang di Enrekang
	585	Pemerintah Kabupaten Pinrang	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Pinrang di Pinrang
	586	Pemerintah Kabupaten Takalar	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattalasang.

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	587	Pemerintah Kabupaten Wajo	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Wajo di Sengkang
	588	Pemerintah Kota Palopo	1	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo di Palopo
28	Provinsi Gorontalo			
	589	Pemerintah Provinsi Gorontalo	1	Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2015 di Gorontalo
	590	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2015 di Suwawa
	591	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo TA 2015 di Limboto
	592	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	1	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato TA 2015 di Marisa
29	Provinsi Maluku			
	593	Pemerintah Provinsi Maluku	1	Belanja Daerah Provinsi Maluku
	594	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	1	Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan
	595	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	1	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
30	Provinsi Maluku Utara			
	596	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	1	Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat TA 2015
31	Provinsi Papua			
	597	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	1	Belanja Kabupaten Intan Jaya TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III)
	598	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	1	Belanja Modal dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah TA 2014 dan 2015 (s.d. Nopember)
	599	Pemerintah Kabupaten Mappi	1	Belanja Kabupaten Mappi TA 2014 dan 2015
	600	Pemerintah Kabupaten Nduga	1	Belanja Pemerintah Kabupaten Nduga TA 2014 dan 2015 (s.d. Oktober) di Kenyam
	601	Pemerintah Kabupaten Paniai	1	Belanja Daerah Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Paniai
	602	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	1	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) di Oksibil

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
32	Provinsi Papua Barat			
	603	Pemerintah Kabupaten Fak-Fak	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Fak-Fak
	604	Pemerintah Kabupaten Kaimana	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Kaimana
	605	Pemerintah Kabupaten Manokwari	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Manokwari
	606	Pemerintah Kabupaten Maybrat	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Maybrat
	607	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Raja Ampat
	608	Pemerintah Kabupaten Sorong	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong
	609	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong Selatan
	610	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Teluk Wondama
	611	Pemerintah Kota Sorong	1	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kota Sorong
	Jumlah		167	
4	Manajemen Aset Daerah			
1	Provinsi Sumatera Barat			
	612	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
	613	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
	614	Pemerintah Kota Payakumbuh	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
	615	Pemerintah Kota Sawahlunto	1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Sawahlunto
2	Provinsi Riau			
	616	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
	617	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
3	Provinsi Kepulauan Riau			
	618	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2014 dan 2015 (Semester 1) di Tarempa

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	619	Pemerintah Kabupaten Lingga	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2014 DAN 2015 (Semester I) di Daik
	620	Pemerintah Kabupaten Natuna	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk TA 2014 dan 2015 (Semester I) di Ranai
4	Provinsi Jambi			
	621	Pemerintah Kabupaten Merangin	1	Pengelolaan Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
5	Provinsi Sumatera Selatan			
		Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	0	Belanja Daerah dan Manajemen Aset TA 2015 pada Pemkab. Musi Rawas Utara
		Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	0	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
6	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
	622	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA (TA) 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkal Pinang di Pangkal Pinang
7	Provinsi Jawa Tengah			
	623	Pemerintah Kabupaten Brebes	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2015 di Brebes
	624	Pemerintah Kabupaten Kebumen	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen TA 2015 di Kebumen
	625	Pemerintah Kabupaten Pati	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pati TA 2015 di Pati
	626	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	1	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo TA 2015
8	Provinsi Jawa Timur			
	627	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9	Provinsi Kalimantan Selatan			
	628	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
10	Provinsi Bali			
	629	Pemerintah Kabupaten Bangli	1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bangli di Bangli
	630	Pemerintah Kabupaten Karangasem	1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
	631	Pemerintah Kabupaten Klungkung	1	Manajemen Aset Tetap Tahun 2014 s.d. 2015 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura
11	Provinsi Sulawesi Barat			
	632	Pemerintah Kabupaten Mamasa	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mamasa di Mamasa

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	Provinsi Sulawesi Tengah			
	633	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	1	Manajemen Aset Pemekaran untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
	634	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	1	Manajemen Aset Pemekaran untuk Pembentukan Kabupaten Morowali Utara pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale dan Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
13	Provinsi Sulawesi Tenggara			
	635	Pemerintah Kabupaten Buton	1	Manajemen Aset Kabupaten Buton TA 2014 dan Semester I 2015
	636	Pemerintah Kabupaten Kolaka	1	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka
	637	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	1	Majemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
	638	Pemerintah Kota Baubau	1	Pengelolaan Aset TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Baubau
14	Provinsi Papua			
	639	Pemerintah Kabupaten Supiori	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiweri
	Jumlah		28	
5	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
1	Provinsi Sumatera Selatan			
	640	RSUD Palembang Bari	1	Operasional RSUD Palembang Bari TB 2014 s.d. Semester I TB 2015 di Kota Palembang
2	Provinsi Kepulauan Riau			
	641	RSUD Tanjung Pinang	1	Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Agustus 2015) di Tanjungpinang
3	Provinsi DKI Jakarta			
	642	RSUD Pasar Rebo	1	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Pasar Rebo di Jakarta.
	643	RSUD Cengkareng	1	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Cengkareng TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
4	Provinsi Jawa Tengah			
	644	RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Kab. Blora	1	Operasional RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu TA 2015 (s.d. Agustus 2015) pada Pemerintah Kabupaten Blora
	645	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen	1	Operasional RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen TA 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen.

No. Urut		Entitas		Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	5	Provinsi Sulawesi Barat			
		646	RSUD Polewali Kab. Polewali Mandar	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Polewali TA 2014 dan 2015 pada Pemerintahan Kabupaten Poliwali Mandar
	6	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
		647	RSUD Kab. Dompu	1	Operasional RSUD Kab. Dompu TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015)
		Jumlah		8	
		Jumlah LHP Terkait Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi		236	
		Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah		280	
BADAN USAHA MILIK DAERAH					
	1	Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)			
	1	Provinsi Sumatera Barat			
		648	PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya	1	Kegiatan Operasional TB 2014 dan Semester I 2015 pada PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya di Padang
		649	PT Balairung Citra-jaya Sumbar	1	Operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar TB 2014 dan Semester I 2015 di Jakarta
	2	Provinsi Sumatera Selatan			
		650	PD Pasar Palembang Jaya	1	Operasional PD Pasar Palembang Jaya TB 2014 s.d. Semester I TB 2015 di Kota Palembang
	3	Provinsi Lampung			
		651	PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung	1	Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
		652	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
		653	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
		654	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
		655	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	656	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan	1	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan TB 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)
4	Provinsi DKI Jakarta			
	657	BP THR Lokasari	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Aset pada BP THR Lokasari TB 2014 dan 2015 di Jakarta
	658	PT Jakarta Tourisindo	1	Pengelolaan PT Jakarta Tourisindo Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 di Jakarta dan Jawa Barat
5	Provinsi Jawa Barat			
	659	PT Jasa Sarana dan Anak Perusahaannya	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Jasa Sarana Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) di Bandung
6	Provinsi Jawa Timur			
	660	PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang	1	Operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang TB 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) di Sampang
	661	PT Bojonegoro Bangun Sarana	1	Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
7	Provinsi Kalimantan Utara			
	662	PDAM Tirta Alam Kota Tarakan	1	Operasional PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2014 dan 2015
8	Provinsi Papua			
	663	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	1	Operasional Bank Tahun 2012, 2013 dan Triwulan I 2014 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua
Jumlah LHP Terkait Badan Usaha Milik Daerah			16	
Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu BUMD			16	
Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Daerah dan BUMD			296	
Jumlah LHP pada Pemerintah Daerah dan BUMD			571	
BAB III. HASIL PEMERIKSAAN BUMN DAN BADAN LAINNYA				
A	PEMERIKSAAN KINERJA			
I	BUMN			
a	Pengelolaan Keuangan			
1	Pengelolaan Proyek PT Brantas Abipraya			
1	664	PT Brantas Abipraya (Persero)	1	Pengelolaan Proyek PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2013 dan 2014
2	Proyek dan Piutang PT Wijaya Karya			
1	665	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Proyek dan Piutang TB 2013 dan 2014 pada Segmen Infrastruktur dan Gedung PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bekasi, Bogor dan Surabaya

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	Efisiensi PT BTN			
1	666	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	1	Efisiensi Kantor Cabang pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. TB 2014 dan 2015 (Semester I) di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Jawa Timur
	Jumlah		3	
b	Transportasi Laut			
1	Pelayanan Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry			
1	667	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	1	Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Penyeberangan dan Pelabuhan TB 2013 s.d. 2015 pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Jakarta, Banten, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara serta Instansi Terkait Lainnya
2	Penyediaan dan Operasi PT Pertamina Trans Kontinental			
1	668	PT Pertamina Trans Kontinental	1	Kegiatan Penyediaan dan Operasi Kapal pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun 2012 - 2014 di Jakarta, Batam, dan Jawa Timur
3	Pembangunan Kapal Baru PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari			
1	669	PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	1	Pembangunan Kapal Baru PT DOK dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang Selesai dan Masih dilaksanakan pada Tahun 2014 dan 2015 di Jakarta dan Batam
	Jumlah		3	
c	Perkebunan			
1	670	PT Perkebunan Nasional VI	1	Kegiatan Pemanenan dan Pengelolaan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2014 dan 2015 pada PTPN VI di Jambi dan Sumatera Barat
2	671	PT Perkebunan Nasional VII	1	Kegiatan Pemanenan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pabrik Kelapa Sawit, serta Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2014 dan 2015 pada PT Perkebunan Nusantara VII di Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu
	Jumlah		2	
	Jumlah LHP Kinerja terkait BUMN		8	
II	BADAN LAINNYA			
	Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Birokrasi			
1	672	Lembaga Penjamin Simpanan	1	Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik pada Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2013 s.d. Triwulan III Tahun 2015
	Jumlah LHP Kinerja Terkait Badan Lainnya		1	
	Jumlah LHP Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya		9	
B	PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
I	BUMN			
1	Operasional BUMN			
1	673	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	1	Pengelolaan Aset pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV) dan Instansi Terkait

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	674		Perum Jasa Tirta II	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Jasa Tirta II
3	675		Perum Perhutani	1	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Perum Perhutani di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua Barat
4	676		PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya TB 2013 dan 2014 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
5	677		PT Angkasa Pura II (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya TA 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada PT Angkasa Pura II (Persero) Beserta Anak Usaha dan Instansi Terkait
6	678		PT Askrindo (Persero)	1	Pengelolaan Penjaminan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendapatan, Asuransi Kredit, Investasi, Biaya Operasional, dan Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan Tahun 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada PT Askrindo (Persero)
7	679		PT Bahana PUI (Persero)	1	Pendapatan dan Biaya Operasional, Penyertaan dan Pembiayaan serta Aktivitas Terkait TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bahana PUI (Persero)
8	680		PT BRI Agroniaga Tbk.	1	Pengelolaan Kredit TB 2014 dan 2015 (Sem I) pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan Rantau Prapat serta Instansi Terkait
9	681		PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan TA 2013 s.d. 2014
10	682		PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2013 dan 2014 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Cengkareng, Amsterdam, Jepang dan Amerika Serikat
11	683		PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	1	Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
12	684		PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT Pelindo II (Persero)	1	Proses Perpanjangan Pengelolaan/Pengoperasian PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT Pelindo II (Persero), Kemenhub, Kemen BUMN dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
13	685		PT Kertas Leces (Persero)	1	Program Restrukturisasi pada PT Kertas Leces (Persero) di Probolinggo, Surabaya, dan Jakarta
14	686		PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	1	Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan
15	687		PT Petrokimia Gresik	1	Biaya, Investasi dan Penjualan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi TB 2014 dan 2015 (Semester I) pada PT Petrokimia Gresik
16	688		PT Pos Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pos Indonesia

No. Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	689	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	1	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Beserta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Gresik, Tuban dan Banyuwangi
18	690	PT Semen Padang	1	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Padang di Indarung dan Lampung
19	691	PT Semen Tonasa	1	Biaya, Investasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Tonasa di Pangkep
20	692	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Seluler dan PT Telekomunikasi Indonesia International dan Instansi Terkait
21	693	PT Timah (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan pada PT Timah (Persero) Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait
2	Pengelolaan Lahan			
1	694	PT Perkebunan Nusantara II	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta
2	695	PT Perkebunan Nusantara VIII	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan DKI Jakarta
3	696	PT Perkebunan Nusantara XIV	1	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara XIV di Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Maluku Utara
Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu BUMN			24	
II BADAN LAINNYA				
Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Birokrasi				
a	Reformasi Keuangan Negara			
1	697	SKK Migas	1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South Natuna Sea "B" & Corridor pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips Indonesia Inc. Lt. & KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Riau
	698		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Riau
	699		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Eks Pertamina Block Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Cirebon
	700		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South East Sumatra pada SKK Migas, KKKS CNOOC SES LTD serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Seribu
	701		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas, KKKS Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur
	702		1	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea A Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea BV serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Kepulauan Riau

No. Urut			Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	2	703	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	1	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester II) pada LPEI serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Surabaya dan Medan
	3	704	Otoritas Jasa Keuangan	1	Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014-2015 (periode 1 Januari s.d. 30 September 2015) pada Kantor Pusat dan Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar
	Jumlah LHP dengan Tujuan Tertentu Badan lainnya			8	
	Jumlah LHP Dengan Tujuan Tertentu BUMN dan Badan Lainnya			32	
	Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			41	
Total LHP				704	

Keterangan: Terdapat LHP yang masuk dalam beberapa tema, sehingga untuk penyebutan pada tema yang ke-2 dst tidak diberi nomor.

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Tunjangan Guru

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pe- meriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap per- aturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	Pelak- sanaan kebijakan mengakibat kan pe- ningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pe- ngendalian Intern
				Jml Per- masa- lahan	Jml Permasa- lahan	Jml Per- masa- lahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi X						
1	1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Sertifikasi Guru Kemdikbud Kantor Pusat	17	6	4	3	4
Jumlah				17	6	4	3	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Tunjangan Guru (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidak- patuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Bukti pertang- gungjawa- ban tidak lengkap/ tidak valid	Peman- faatan barang/ jasa tidak berdampak terhadap pencapai- an tujuan		Lain-lain Per- masalahan Ketidakpatuh- an terhadap Peraturan Perundang- undangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Jumlah Per- masalahan	Permasa- lahan		Permasalahan		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Komisi X											
1	1	Kement- rian Pendi- dikan dan Kebudayaan	Sertifikasi Guru Kemdikbud Kantor Pusat	8	3.374,83	2	3.374,83	1	1		5	-	
Jumlah				8	3.374,83	2	3.374,83	1	1	-	5	-	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	1		1		
Jumlah obrik pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	1		1		
Nilai penyetoran selama proses pemerik- saan				27,90									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun	Proses Pe- nyusunan Laporan Tidak Sesuai Keten- tuan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pe- ngendalian Intern
				Jml Per- masa- lahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasa- lahan	Jml Per- masalah- an	Jml Permasa- lahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi X						
1	1	Kemenristek Dikti (bidang dikti)	Ditjen Dikti, Kopertis III Jakarta Kopertis IV dikti)	8	2	3	1	2
	2		Universitas Diponogoro	5	2	2	1	-
	3		Universitas Jember	11	5	-	-	6
	4		Universitas Negeri Malang	15	4	6	2	3
	5		Universitas Sebelas Maret	6	2	1	-	3
	6		Universitas Sriwijaya	9	1	1	1	6
Jumlah				54	16	13	5	20
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6	6	5	4	5

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Peme- riksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidak- patuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpang- an peraturan an bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Per- masalahan Ketidakpatuh- an terhadap Peraturan Perundang- undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasa- lahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Komisi X											
1	1	Kemen- ristek Dikti (bidang dikti)	Ditjen Dikti, Kopertis III Jakarta, Kopertis IV	11	4.458,02	1	28,38	-	-	3	-	7	4.429,64
	2		Universitas Diponogoro	13	4.155,89	2	276,95	-	-	2	-	9	3.878,94
	3		Universitas Jember	22	1.418,48	2	176,21	2	98,82	3	-	15	1.143,45
	4		Universi- tas Negeri Malang	18	2.154,24	2	692,53	-	-	2	-	14	1.461,71
	5		Universitas Sebelas Maret	16	19.071,60	2	1.464,97	3	1.114,22	-	-	11	16.492,41
	6		Universitas Sriwijaya	13	9.129,87	3	8.582,08	-	-	6	-	4	547,79
Jumlah				93	40.388,10	12	11.221,12	5	1.213,04	16	-	60	27.953,94
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6		6		2		5		6	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				486,39									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi I						
1	1	Kementrian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	3	1	-	-	2
	2		Kedutaan Besar Republik Indonesia Bratislava di Slovakia	1	-	-	1	-
	3		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	1	-	-	1	-
	4		Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda	2	-	-	-	2
	5		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	-	-	-	-	-
	6		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Jakarta dan Norwegia	3	-	1	1	1
	7		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Jakarta dan Swedia	2	1	-	1	-
	8		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	1	-	-	-	1
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan	-	-	-	-	-
	10		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	1	-	-	1	-
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	1	-	-	1	-
	12		KJRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan	1	1	-	-	-
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C. di Jakarta dan Amerika Serikat	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Jakarta dan Amerika Serikat	1	1	-	-	-
		Komisi III						
2	15	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY	5	2	3	-	-
	16		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	5	2	1	-	2
	17		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	4	2	1	-	1
	18		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	5	3	-	-	2
	19		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali	5	1	3	-	1
	20		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung	4	1	2	-	1
		Komisi IV						
3	21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan	7	5	-	-	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi XI						
4	22	Kementerian Keuangan	Penerimaan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Mineral dan Batu bara Tahun Anggaran 2010 S.D. Semester I 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya Serta Instansi Terkait	1	1	-	-	-
	23		Program <i>Sunset Policy</i> Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan Kanwil DJP	6	2	4	-	-
	24		Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Instansi Terkait	34	1	6	8	19
Jumlah				93	24	21	14	34
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4	4	3	2	4
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				21	14	8	7	11

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penyeteroran penerimaan negara terlambat	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai			Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Komisi I									
1	1	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	1	-	-	-	-	1	-	-
	2		Kedutaan Besar Republik Indonesia Bratislava di Slovakia	2	0,57	-	-	-	1	1	0,57
	3		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	1	EUR 0.26	1	EUR 0.26	-	-	-	-
	4		Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda	-	-	-	-	-	-	-	-
	5		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	-	-	-	-	-	-	-	-
	6		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Jakarta dan Norwegia	-	-	-	-	-	-	-	-
	7		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Jakarta dan Swedia	-	-	-	-	-	-	-	-
	8		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	1	-	-	-	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penyeteroran penerimaan negara terlambat	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan	1	-	-	-	-	1	-	-
	10		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	1	-	-	-	1	-	-	-
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	1	-	-	-	-	1	-	-
	12		KJRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washing-ton, D.C. di Jakarta dan Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-
	14		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Jakarta dan Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi III									
2	15	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY	4	4,73	1	4,73	2	1	-	-
	16		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	5	49,38	1	3,21	2	1	1	46,17
	17		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	4	USD 5.00	1	USD 5.00	2	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Peny- etoran penerimaan negara terlambat	Lain-lain Permasalah- an Ketidak- patuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Jml Perma- sala- han	Jml Perma- sala- han	Permasa- lahan	
1	2	3	4	Jml	Nilai	Jml	Nilai	9	10	Jml	Nilai
	18		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Ling- kungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	3	0,92	2	0,92	-	1	-	-
	19		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Ling- kungan Kejaksaan Tinggi Bali	3	-	-	-	2	1	-	-
	20		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Di Ling- kungan Kejaksaan Tinggi Lampung	3	141,11	2	141,11	-	1	-	-
		Komisi IV									
3	21	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelabuhan Perikanan Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2015 pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan	4	3.917,80	2	3.685,66	-	-	2	232,14
		Komisi XI									
4	22	Kementerian Keuangan	Penerimaan Pajak Sektor Minyak dan Gas Bumi serta Mineral dan Batu bara Tahun Anggaran 2010 S.D. Semester I 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KP DJP), Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Terkait, dan Instansi Vertikal di Bawahnya Serta Instansi Terkait	9	308.423,95	6	308.423,95	3	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penyetoran penerimaan negara terlambat	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	23		Program <i>Sunset Policy</i> Tahun Anggaran 2008 dan 2009 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan Kanwil DJP	10	99.151,04	10	99.151,04	-	-	-	-
	24		Kegiatan Pencetakan dan Pengawasan Pita Cukai serta Perhitungan Penerimaan Cukai dan Pajak Terkait Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun Anggaran 2011 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Instansi Terkait	12	843.805,29	7	843.805,29	1	-	4	-
Jumlah				65	1.255.494,79	33	1.255.215,91	13	11	8	278,88
					EUR 0.26		EUR 0.26				-
					USD 5.00		USD 5.00				
Jumlah ekuivalen rupiah				65	1.255.567,68	33	1.255.288,80	13	11	8	278,88
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				4		4		3	2	4	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				17		10		7	11	4	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				48,48							

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi I						
1	1	Markas Besar TNI	Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag	1	-	-	1	-
	2		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma	2	-	1	-	1
	3		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria	1	-	-	1	-
2	4	Kementerian Pertahanan	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan	7	2	1	1	3
3	5	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	1	-	1	-	-
	6		Kedutaan Besar Republik Indonesia Bratislava di Slovakia	-	-	-	-	-
	7		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	4	-	3	-	1
	8		Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda	2	-	2	-	-
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	2	-	1	-	1
	10		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Jakarta dan Norwegia	1	1	-	-	-
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Jakarta dan Swedia	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	2	-	-	1	1
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan	1	1	-	-	-
	14		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	2	-	2	-	-
	15		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	2	-	2	-	-
	16		KJRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan	1	-	1	-	-
	17		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C. di Jakarta dan Amerika Serikat	7	1	5	-	1
	18		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Jakarta dan Amerika Serikat	1	-	1	-	-
		Komisi II						
4	19	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-	-
5	20	Ombudsman RI	Ombudsman RI	-	-	-	-	-
6	21	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2	2	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi III						
7	22	Kementerian Hukum dan HAM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-
	23		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	-	-	-	-	-
	24		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	-	-	-	-	-
	25		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-
	26		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
8	27	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY	2	1	-	-	1
	28		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
	29		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	1	1	-	-	-
	30		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	2	1	-	-	1
	31		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali	2	-	1	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32		Kejaksanaan Tinggi dan Kejaksanaan Negeri Di Lingkungan Kejaksanaan Tinggi Lampung	2	1	-	-	1
9	33	Mahkamah Agung	Badan Peradilan di bawah MA	-	-	-	-	-
10	34	Majelis Permusyawaratan Rakyat	MPR	-	-	-	-	-
		Komisi V						
11	35	Kementerian Perhubungan	Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-
	36		Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan dan TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
	37		Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara dan pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi VII						
12	38	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	-	-	-	-	-
13	39	Kementerian Riset dan Teknologi	Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset dan Teknologi di Jakarta	-	-	-	-	-
		Komisi VIII						
14	40	Kementerian Agama	Perguruan Tinggi Agama Negeri Kementerian Agama	-	-	-	-	-
15	41	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-
		Komisi X						
16	42	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	-	-	-	1
Jumlah				50	11	22	4	13
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				6	4	4	3	5
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				24	9	13	4	11

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pelaksanaan Belanja Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp juta dan Ribu valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Vo- lume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pem- bayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertang- gungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Lain-lain Permasa- lahan Ketidakpa- tuhan terhadap Peraturan Perun- dang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasa- lahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Komisi I										
1	1	Markas Besar TNI	Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	2		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	3		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria	1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	4	Kementerian Pertahanan	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dan Pusat Data dan Informasi Kementेरian Pertahanan	13	4.846,65	1	240,50	1	345,55	3	8	4.260,60
3	5	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	6		Kedutaan Besar Republik Indone- sia Bratislava di Slovakia	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	7		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	8		Kedutaan Besar Republik Indone- sia Den Haag di Belanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	4	-	-	-	-	-	3	1	-
	10		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Jakarta dan Norwegia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Jakarta dan Swedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	3	-	-	-	-	-	1	2	-
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Jakarta dan Afrika Selatan	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	14		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	2	576,56	-	-	1	576,56	1	-	-
	15		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	2	4,37	-	-	-	-	1	1	4,37
	16		KJRI Cape Town di Jakarta dan Afrika Selatan	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	17		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C. di Jakarta dan Amerika Serikat	6	48,23	-	-	-	-	2	4	48,23
				-	USD 1.91						-	USD 1.91
	18		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Jakarta dan Amerika Serikat	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		Komisi II										
4	19	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	16	3.602,90	4	1.346,14	2	637,46	1	9	1.619,30
5	20	Ombudsman RI	Ombudsman RI	8	297,55	-	-	-	-	1	7	297,55

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	22	102.754,03	12	7.561,79	-	-	-	10	95.192,24
		Komisi III										
7	22	Kementerian Hukum dan HAM	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara	6	4.256,10	3	4.241,30	1	14,80	-	2	0,00
	23		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	7	2.249,40	2	485,52	3	1.709,44	-	2	54,44
	24		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	6	1.276,59	1	764,61	3	493,32	-	2	18,66
	25		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu	7	870,90	-	-	3	191,99	-	4	678,91
	26		Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat	7	3.360,31	1	1.900,06	3	1.460,25	-	3	-
8	27	Kejaksaan RI	Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi DIY	3	160,91	-	-	-	-	1	2	160,91
	28		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung	5	173,95	1	25,53	1	92,67	1	2	55,75

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Vo- lume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pem- bayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertang- gungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Lain-lain Permasa- lahan Ketidakpa- tuhan terhadap Peraturan Perun- dang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasa- lahan	Permasalahan	
1	2	3	4	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai
	29		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	2	3.664,78	-	-	-	-	-	2	3.664,78
	30		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	4	581,83	-	-	1	4,05	1	2	577,78
	31		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali	2	863,20	-	-	-	-	-	2	863,20
	32		Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Lampung	4	2.663,34	1	32,20	-	-	1	2	2.631,14
9	33	Mahkamah Agung	Badan Peradilan di bawah MA	12	1.296,03	1	898,98	3	154,49	1	7	242,56
10	34	Majelis Per- musyawaratan Rakyat	MPR	10	4.600,86	-	-	1	26,12	-	9	4.574,74
		Komisi V										
11	35	Kementerian Perhubungan	Satuan Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara	4	3.869,29	1	946,78	3	2.922,51	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36		Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Selatan dan TA 2015 pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan	2	769,54	1	769,54	-	-	-	1	-
	37		Satuan Kerja Pengembangan Perkeretaapian Sumatera Utara dan pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Provinsi Sumatera Utara	4	41.979,27	1	14.661,58	-	-	-	3	27.317,69
		Komisi VII										
12	38	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)	8	1.062,45	1	536,00	1	381,91	-	6	144,54
13	39	Kementeri-an Riset dan Teknologi di Jakarta	Research and Innovation in Science and Technology Project Kementeri-an Riset dan Teknologi di Jakarta	1	2.948,74	-	-	-	-	-	1	2.948,74
		Komisi VIII										
14	40	Kementerian Agama	Perguruan Tinggi Agama Negeri Kementerian Agama	15	8.479,48	1	1.392,28	2	205,85	-	12	6.881,35

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	41	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	18	60.557,15	-	-	7	3.321,28	2	9	57.235,87
		Komisi X										
16	42	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	21	2.360,63	1	71,74	2	483,33	3	15	1.805,56
Jumlah				239	260.175,04	33	35.874,55	38	13.021,58	33	135	211.278,91
					USD 1.91							USD 1.91
Jumlah ekuivalen rupiah				239	260.201,39	33	35.874,55	38	13.021,58	33	135	211.305,26
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				15		10		12		9	15	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				39		16		17		24	33	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				7.923,40								

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Manajemen Aset Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi I						
1	1	Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI	Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI serta Instansi terkait	7	3	1	-	3
2	2	Markas Besar TNI	Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag	1	-	1	-	-
	3		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma	3	-	1	-	2
	4		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria	1	-	1	-	-
3	5	TNI Angkatan Udara	TNI Angkatan Udara	6	-	1	4	1
4	6	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Laut	9	2	-	4	3
5	7	TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Darat	6	3	-	-	3
6	8	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	2	2	-	-	-
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Bratislava di Slovakia	5	4	-	-	1
	10		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	3	2	-	-	1
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda	5	4	-	-	1
	12		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	1	1	-	-	-
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Norwegia	4	1	-	-	3
	14		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Swedia	3	-	1	-	2
	15		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	1	1	-	-	-
	16		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Afrika Selatan	3	2	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	1	-	-	-	1
	18		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	0	-	-	-	-
	19		KJRI Cape Town di Afrika Selatan	1	1	-	-	-
	20		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C. di Amerika Serikat	1	1	-	-	-
	21		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Amerika Serikat	3	3	-	-	-
		Komisi IX						
7	22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	18	8	2	-	8
Jumlah				84	38	8	8	30
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				7	5	5	2	6
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				21	15	7	2	13

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Manajemen Aset Pusat (Nilai dalam Rp juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlongkapan atau BMN	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Komisi I										
1	1	Kementerian Pertahanan dan Markas Besar TNI	Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI serta Instansi terkait	9	-	-	-	1	-	3	5	-
2	2	Markas Besar TNI	Atase Pertahanan Republik Indonesia di Den Haag	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	3		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4		Atase Pertahanan Republik Indonesia di Pretoria	1	-	-	-	-	-	1	-	-
3	5	TNI Angkatan Udara	TNI Angkatan Udara	16	35.058,31	-	-	3	35.058,31	10	3	-
4	6	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Laut dan Jajaran Terkait	11	781,17	-	-	1	781,17	8	2	-
5	7	TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Darat	35	14.388,28	-	-	9	12.390,85	12	14	1.997,43
6	8	Kementerian Luar Negeri	Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha di Republik Ceko	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9		Kedutaan Besar Republik Indonesia Bratislava di Slovakia	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	10		Kedutaan Besar Republik Indonesia Brussels di Belgia	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	11		Kedutaan Besar Republik Indonesia Den Haag di Belanda	1	-	-	-	-	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			Jml Permasalahan	Permasalahan
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12		Kedutaan Besar Republik Indonesia Athena di Yunani	1	31,19	-	-	-	-	-	1	31,19
	13		Kedutaan Besar Republik Indonesia Oslo di Norwegia	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	14		Kedutaan Besar Republik Indonesia Stockholm di Swedia	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	15		Kedutaan Besar Republik Indonesia Roma di Italia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				1	EUR 0.78						1	EUR 0.78
	16		Kedutaan Besar Republik Indonesia Pretoria di Afrika Selatan	2	-	-	-	-	-	-	2	-
				-	USD 1.12						-	USD 1.12
				-	ZAR 60.81						-	ZAR 60.81
	17		Perutusan Tetap Republik Indonesia Jenewa di Swiss	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	18		Kedutaan Besar Republik Indonesia Wina di Austria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19		KJRI Cape Town di Afrika Selatan	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	20		Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington, D.C. di Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21		Konsulat Jenderal Republik Indonesia Chicago di Amerika Serikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan					
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Komisi IX										
7	22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan	45	88.435,25	7	80.085,79	3	93,38	15	20	8.256,08
Jumlah				129	138.694,20	7	80.085,79	17	48.323,71	57	48	10.284,70
					EUR 0.78							EUR 0.78
					USD 1.12							USD 1.12
					ZAR 60.81							ZAR 60.81
Jumlah ekuivalen rupiah				129	138.775,47	7	80.085,79	17	48.323,71	57	48	10.365,97
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				7		1		5		7	6	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				17		1		5		14	8	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan				576,72								

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan BLU

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3		4	5	6	7	8
		Komisi II						
1	1	Kementerian Sekretariat Negara	PPK Gelora Bung Karno	15	2	7	2	4
	2		BPP Taman Mini Indonesia Indah	26	12	3	3	8
		Komisi III						
2	3	Kepolisian	RS Bhayangkara Said Sukanto Jakarta	3	1	1	-	1
	4		RS Bhayangkara Samsoeri Jatim RS Bhayangkara Tulung Agung RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong	7	1	-	3	3
	5		RS Bayangkara Mappaoudang Sulsel	9	1	1	1	6
Jumlah				60	17	12	9	22
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2	2	2	2	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5	5	4	4	5

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengelolaan BLU (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Komisi II											
1	1	Kementerian Sekretariat Negara	PPK Gelora Bung Karno	23	15.725,13	5	8.438,12	2	3.914,62	4	12	3.372,39	
	2		BPP Taman Mini Indonesia Indah	14	15.196,50	2	13.055,78	-	-	2	10	2.140,72	
		Komisi III											
2	3	Kepolisian	RS Bhayangkara Said Sukamto Jakarta	10	1.002,73	2	170,24	-	-	-	8	832,49	
	4		RS Bhayangkara Samsoeri Jatim RS Bhayangkara Tulung Agung RS Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong	10	2.498,88	2	506,13	1	20,64	1	6	1.972,11	
	5		RS Bayangkara Mappaoudang Sulsel	5	87,08	1	46,21	-	-	-	4	40,87	
Jumlah				62	34.510,32	12	22.216,48	3	3.935,26	7	40	8.358,58	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2		2		2		2	2		
Jumlah obrik pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5		5		2		3	5		
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				1.136,15									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP tidak disusun	SOP tidak ditaati	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi VIII						
1	1	Kementerian Agama	Kementerian Agama	15	10	2	1	2
Jumlah				15	10	2	1	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal		Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Komisi VIII									
1	1	Kementerian Agama	Kementerian Agama	14	-	6	-	5	-	3	-
Jumlah				14	-	6	-	5	-	3	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010–2014

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
1	Prov. Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	19	Kab. Simeulue	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
2	Prov. Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	26	Kab. Asahan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP
	6	30	Kab. Humbang Hasundutan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP*
	11	35	Kab. Langkat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	27	51	Kota Binjai	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	28	52	Kota Gunung Sitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	11	89	Kab. Siak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		16		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara									1	TMP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir									1	TMP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TW
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
8	Prov. Lampung												
	LKPD			15		15		15		15		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	141	Kab. Pesisir Barat									1	TMP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	163	Kota Batam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		27		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran									1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	191	Kota Depok	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	202	Kab. Demak	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	209	Kab. Kudus	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	3	232	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	234	Kab. Sleman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	264	Kab. Tuban	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	31	266	Kota Batu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	33	268	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	35	270	Kota Malang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP
	39	274	Kota Surabaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
16	Prov. Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	4	278	Kab. Serang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	6	280	Kota Cilegon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
17	Prov. Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	287	Kab. Buleleng	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
18	Prov. Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	TMP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	296	Kab. Dompu	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		22		22		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	7	311	Kab. Lembata	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	8	312	Kab. Malaka									1	TMP*
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	13	317	Kab. Ngada	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	335	Kab. Melawi	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Pontianak (Mempawah)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	13	340	Kab. Sintang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	14	341	Kota Pontianak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	TW	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan												

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		10		10		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu									1	TMP
	7	378	Kab. Paser	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
24	Prov. Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		5		5		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara									1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	386	Kab. Nunukan	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
25	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TW	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	401	Kota Bitung	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	15	403	Kota Manado	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP
	16	404	Kota Tomohon	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
26	Prov. Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		12		12		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	408	Kab. Banggai Laut									1	TMP
	5	409	Kab. Buol	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	410	Kab. Donggala	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	411	Kab. Morowali	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	8	412	Kab. Morowali Utara									1	TMP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	11	415	Kab. Sigi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	418	Kota Palu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	421	Kab. Barru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	425	Kab. Gowa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	428	Kab. Luwu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP
	13	431	Kab. Maros	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	440	Kab. Wajo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	442	Kota Palopo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	25	443	Kota Pare-Pare	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
28	Prov. Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		13		13		15	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	448	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	449	Kab. Kolaka Timur									1	WDP
	7	450	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	451	Kab. Konawe	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Konawe Kepulauan									1	WDP
	10	453	Kab. Konawe Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	454	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	12	455	Kab. Muna	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	14	457	Kota Baubau	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	458	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
29	Prov. Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	459	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	460	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	461	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	462	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	463	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	464	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	465	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
30	Prov. Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		6		6		7	
	1	466	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	467	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	468	Kab. Mamasa	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	4	469	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	470	Kab. Mamuju Tengah									1	WDP
	6	471	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	472	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	473	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	474	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	475	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	476	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	477	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	6	478	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	479	Kab. Maluku Tenggara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	480	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	481	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	10	482	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	11	483	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
	12	484	Kota Tual	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
32	Prov. Maluku Utara												
	LKPD			10		10		10		10		11	
	1	485	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	486	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	487	Kab. Halmahera Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	488	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	5	489	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	490	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	491	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	492	Kab. Pulau Morotai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	493	Kab. Pulau Taliabu									1	TW
	10	494	Kota Ternate	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	495	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
33	Prov. Papua												
	LKPD			28		30		30		30		30	
	1	496	Prov. Papua	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP
	2	497	Kab. Asmat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	498	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW*
	4	499	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	5	500	Kab. Deiyai			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	6	501	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	7	502	Kab. Intan Jaya			1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	8	503	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	504	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	505	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	11	506	Kab. Kepulauan Yapen	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	507	Kab. Lanny Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW
	13	508	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	14	509	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	15	510	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	511	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	17	512	Kab. Mimika	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	513	Kab. Nabire	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	19	514	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP*
	20	515	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	21	516	Kab. Pegunungan Bintang	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP*
	22	517	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	23	518	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP

No.	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2010		Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014	
	24	519	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	25	520	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP*
	26	521	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	27	522	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP*
	28	523	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	29	524	Kab. Yalimo	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	30	525	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP
34	Prov. Papua Barat												
	LKPD			12		12		12		12		14	
	1	526	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	527	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	3	528	Kab. Kaimana	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	529	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	530	Kab. Manokwari Selatan									1	WDP*
	6	531	Kab. Maybrat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	7	532	Kab. Pegunungan Arfak									1	WDP*
	8	533	Kab. Raja Ampat	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	534	Kab. Sorong	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WTP	1	WTP
	10	535	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	536	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	12	537	Kab. Teluk Bintuni	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	538	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	14	539	Kota Sorong	1	TW	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
			Jumlah	522		524		524		524		539	

Keterangan

- WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)
WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (unqualified opinion with modified wording)
WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)
TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)
TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)
* : Opini LKPD tahun 2014 yang masuk ke IHPS II tahun 2015

Pengecualian Akun pada 35 LKPD Tahun 2014 yang Memperoleh Opini WDP dan TMP

No.	Entitas			Opini	Kas	Aset Lan- car Selain Kas	Inves- tasi	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Kewa- jiban	Penda- patan	Be- lanja	Pem- biaya- an	SILPA
1	Prov. Sumatera Utara													
	1	1	Kab. Mandailing Natal	WDP	√			√						
	2	2	Kab. Nias Barat	TMP	√	√		√		√		√		
	3	3	Kab. Nias Selatan	TMP	√	√		√		√				
	4	4	Kab. Nias Utara	WDP	√			√						
	5	5	Kab. Padang Lawas	WDP	√			√						
	6	6	Kab. Toba Samosir	WDP	√			√						
	7	7	Kab. Tanjung Balai	WDP	√	√		√						
2	Prov. Kalimantan Utara													
	1	8	Kab. Tana Tidung	WDP				√						
3	Nusa Tenggara Timur													
	1	9	Kab. Kupang	WDP	√		√	√			√	√		√
	2	10	Kab. Lembata	WDP	√	√	√	√						
	3	11	Kab. Malaka	TMP	√	√		√				√		
	4	12	Kab. Nagekeo	WDP		√	√	√		√				
	5	13	Kab. Rote Ndao	WDP		√	√	√		√		√		
	6	14	Kab. Sikka	WDP	√		√	√				√		
4	Prov. Maluku													
	1	15	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	√	√		√		√		√		
	2	16	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	√		√	√	√		√	√		
	3	17	Kota Ambon	WDP				√						
5	Prov. Papua													
	1	18	Kab. Biak Numfor	TW		√		√	√		√	√		
	2	19	Kab. Boven Digoel	TMP				√	√			√		√
	3	20	Kab. Deiyai	TMP	√	√		√	√			√		
	4	21	Kab. Dogiyai	TMP	√	√		√	√		√	√		
	5	22	Kab. Intan Jaya	TMP	√			√				√		
	6	23	Kab. Keerom	TMP	√	√		√				√		
	7	24	Kab. Mamberamo Raya	TMP	√			√	√			√		
	8	25	Kab. Mamberamo Tengah	TMP	√	√		√		√		√		

No.	Entitas	Opini	Kas	Aset Lan- car Selain Kas	Inves- tasi	Aset Tetap	Aset Lain- nya	Kewa- jiban	Penda- patan	Be- lanja	Pem- biaya- an	SILPA
9	26 Kab. Nduga	WDP	√	√		√		√		√		
10	27 Kab. Pegunungan Bintang	WDP				√						
11	28 Kab. Puncak	TMP	√			√		√		√		
12	29 Kab. Sarmi	TMP	√	√		√	√	√		√	√	
13	30 Kab. Supiori	WDP		√		√		√		√		
14	31 Kab. Tolikara	TMP	√			√	√	√	√	√		
15	32 Kab. Waropen	TMP	√	√		√	√	√	√	√	√	
6	Prov. Papua Barat											
1	33 Kab. Manokwari Selatan	WDP	√									
2	34 Kab. Pegunungan Arfak	WDP	√							√		
	Jumlah		26	17	6	32	9	11	7	22	2	2

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014

No	Nama Entitas	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan				Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	
			Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran lainnya	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Provinsi Sumatera Utara										
1.1	Pemkab Labuhan Batu Utara	9	-	3	1	1	-	2	-	1	1
1.2	Pemkab Mandailing Natal	9	-	2	2	-	-	3	1	1	-
1.3	Pemkab Nias Barat	8	1	3	1	1	1	-	-	-	1
1.4	Pemkab Nias Selatan	15	1	3	2	4	3	1	-	-	1
1.5	Pemkab Nias Utara	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-
1.6	Pemkab Padang Lawas	11	3	1	1	2	3	-	-	-	1
1.7	Pemkab Toba Samosir	9	1	1	1	-	1	2	1	2	-
1.8	Pemkot Tanjung Balai	19	6	2	1	2	1	2	1	1	3
2	Provinsi Kalimantan Utara										
2.1	Pemkab Tana Tidung	9	1	3	1	1	-	3	-	-	-
3	Provinsi NTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Pemkab Kupang	9	1	2	-	-	2	-	-	3	1
3.2	Pemkab Lembata	11	3	1	1	2	1	1	-	2	-
3.3	Pemkab Malaka	1-	2	3	-	1	2	-	1	-	1
3.4	Pemkab Nagekeo	17	5	1	1	2	3	3	2	-	-
3.5	Pemkab Rote Ndao	11	5		-	-	-	2	2	1	1
3.6	Pemkab Sikka	8	2	1	-	1	1	1	1	1	-
4	Provinsi Maluku										
4.1	Pemkab Seram Bagian Barat	12	4	4	1	1	1	-	-	-	1
4.2	Pemkab Seram Bagian Timur	15	2	4	-	1	2	1	3	1	1
4.3	Pemkot Ambon	6	-	3	-	1	1	-	-	-	1
5	Provinsi Papua										
5.1	Pemkab Biak Numfor	19	2	4	-	3	4	1	-	3	2
5.2	Pemkab Boven Digoel	15	3	5	-	3	2	-	-	2	-
5.3	Pemkab Deyai	22	3	2	-	4	3	5	3	1	1
5.4	Pemkab Dogiyai	13	2	1	-	2	1	2	-	5	-
5.5	Pemkab Intan Jaya	11	1	4	-	2	-	1	1	1	1
5.6	Pemkab Keerom	25	3	6	1	2	1	3	2	7	-
5.7	Pemkab Mamberamo Raya	13	5	2	-	4	-	1		1	-
5.8	Pemkab Membramo Tengah	17	2	1	-	1	8	-	1	3	1

No	Nama Entitas	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern								
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan			Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja			Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
			Pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporannya	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran lainnya	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.9	Pemkab Nduga	21	2	2	-	3	4	2	-	5	3
5.1-	Pemkab Pegunungan Bintang	15	1	3	-	3	2	2	1	3	-
5.11	Pemkab Puncak	26	4	3	-	8	4	1	5	1	-
5.12	Pemkab Sarmi	24	2	8	2	2	3	2	3	-	2
5.13	Pemkab Supiori	9	2	2	-	1	-	2	-	1	1
5.14	Pemkab Tolikara	22	4	2	-	3	4	2	-	6	1
5.15	Pemkab Waropen	19	1	6	-	1	2	7	-	-	2
6	Provinsi Papua Barat										
6.1	Pemkab Manokwari Selatan	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2
6.2	Pemkab Pegunungan Arfak	7	2	2	-	2	1	-	-	-	-
Jumlah		474	78	91	17	65	61	53	28	52	29
Kab		449	72	86		62	59		27	51	
Kota		25	6	5		3	2		1	1	

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan-Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Kabupaten		Kota		Jumlah Permasa-lahan	Nilai
		Jumlah Permasa-lahan	Nilai	Jumlah Permasa-lahan	Nilai		
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan							
I	Kerugian Daerah	197	194.866,38	11	3.429,06	208	198.295,44
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	5	2.684,92	-	-	5	2.684,92
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	9	13.350,64	-	-	9	13.350,64
3	Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	8	5.149,54	-	-	8	5.149,54
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	44	36.805,19	2	1.206,29	46	38.011,48
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	31	12.253,00	1	270,71	32	12.523,71
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	7	961,46	-	-	7	961,46
7	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	22	7.149,50	3	744,53	25	7.894,03
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	14	31.817,94	-	-	14	31.817,94
9	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	8	2.079,22	1	216,08	9	2.295,30
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	30	11.946,03	2	281,97	32	12.228,00
11	Lain-lain	19	70.668,94	2	709,48	21	71.378,42
II	Potensi Kerugian Daerah	22	18.883,88	1	311,49	23	19.195,37
1	Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	15	5.737,17	1	311,49	16	6.048,66
3	Aset dikuasai pihak lain	1	3,93	-	-	1	3,93

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Kabupaten		Kota		Jumlah Permasa-lahan	Nilai
		Jumlah Permasa-lahan	Nilai	Jumlah Permasa-lahan	Nilai		
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	2	11.597,14	-	-	2	11.597,14
5	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	1.358,97	-	-	2	1.358,97
6	Lain-lain	2	186,67	-	-	2	186,67
III	Kekurangan Penerimaan	56	20.427,02	10	1.670,68	66	22.097,70
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	28	9.322,87	3	326,90	31	9.649,77
2	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah	25	10.995,04	7	1.343,78	32	12.338,82
3	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	55,67	-	-	1	55,67
4	Lain-lain	2	53,44	-	-	2	53,44
IV	Administrasi	204		6		210	-
1	Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	15		-		15	
2	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	82		3		85	
3	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	3		-		3	
4	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian daerah)	8		-		8	
5	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		-		1	

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Tingkat Pemerintahan				Total	
		Kabupaten		Kota		Jumlah Permasa-lahan	Nilai
		Jumlah Permasa-lahan	Nilai	Jumlah Permasa-lahan	Nilai		
6	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah/Perusahaan	21		-		21	
7	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	8		-		8	
8	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	14		-		14	
9	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	8		1		9	
12	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	14		1		15	
13	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	5		-		5	
14	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	23		1		24	
15	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	1		-		1	
16	Lain-lain	1		-		1	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		479	234.177,28	28	5.411,23	507	239.588,51

Daftar Kelompok Temuan Kepatuhan menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Prov. Sumatera Utara	109	35.985,57	55	23.099,62	8	3.833,30	24	9.052,65	22	9	779,79	2	134,37
1	1 Kab. Labuhan Batu Utara	13	1.934,49	8	1.615,14	1	304,18	1	15,17	3	1	84,05	-	-
2	2 Kab. Mandailing Natal	11	6.721,52	7	3.007,19	-	-	2	3.714,33	2	1	77,50	-	-
3	3 Kab. Nias Barat	16	5.465,17	8	3.524,47	1	1.361,33	2	579,37	5	-	-	-	-
4	4 Kab. Nias Selatan	15	6.443,37	9	4.379,05	1	12,00	4	2.052,32	1	2	22,18	1	129,50
5	5 Kab. Nias Utara	9	2.871,61	4	2.829,98	-	-	1	41,63	4	2	461,10	-	-
6	6 Kab. Padang Lawas	18	7.095,13	11	5.622,15	1	232,27	3	1.240,71	3	1	74,41	-	-
7	7 Kab. Toba Samosir	14	3.024,00	4	768,62	3	1.612,03	4	643,35	3	1	59,54	-	-
8	8 Kota Tanjung Balai	13	2.430,28	4	1.353,02	1	311,49	7	765,77	1	1	1,01	1	4,87
2	Prov. Nusa Tenggara Timur	84	5.781,76	20	3.573,46	2	217,75	15	1.990,55	47	4	220,92	3	162,21
9	1 Kab. Kupang	11	2.131,16	3	1.417,55	-	-	1	713,61	7	1	49,56	-	-
10	2 Kab. Lembata	12	262,84	1	84,35	1	43,08	3	135,41	7	-	-	-	-
11	3 Kab. Malaka	19	727,97	4	287,13	1	174,67	3	266,17	11	-	-	-	-
12	4 Kab. Nagekeo	9	483,79	1	110,10	-	-	2	373,69	6	-	-	2	152,21
13	5 Kab. Rote Ndao	20	1.241,32	7	764,30	-	-	4	477,02	9	2	151,48	1	10,00
14	6 Kab. Sikka	13	934,68	4	910,03	-	-	2	24,65	7	1	19,88	-	-
3	Prov. Kalimantan Utara	5	956,99	1	707,73	1	249,26	-	-	3	-	-	-	-
15	1 Kab. Tana Tidung	5	956,99	1	707,73	1	249,26	-	-	3	-	-	-	-
4	Prov. Maluku	56	25.911,55	27	12.418,29	4	12.025,72	6	1.467,54	19	4	295,88	3	406,53
16	1 Kab. Seram Bagian Barat	25	16.602,68	12	6.133,23	3	10.177,91	2	291,54	8	1	100,00	-	-
17	2 Kab. Seram Bagian Timur	16	6.327,92	8	4.209,02	1	1.847,81	1	271,09	6	1	6,60	-	-
18	3 Kota Ambon	15	2.980,95	7	2.076,04	-	-	3	904,91	5	2	189,28	3	406,53
5	Prov. Papua	242	169.853,47	103	157.413,21	8	2.869,34	20	9.570,92	111	2	261	-	-
19	1 Kab. Biak Numfor	12	2.202,79	4	1.867,23	-	-	2	335,56	6	-	-	-	-
20	2 Kab. Boven Digoel	12	5.753,74	5	5.289,40	-	-	1	464,34	6	1	71,15	-	-
21	3 Kab. Deiyai	15	1.666,47	4	1.616,57	-	-	1	49,90	10	-	-	-	-
22	4 Kab. Dogiyai	9	1.259,14	2	1.184,39	-	-	2	74,75	5	-	-	-	-

No.	Entitas	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan			
		Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
		Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai	Jumlah Permasalahan	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	5 Kab. Intan Jaya	18	8.468,91	9	8.344,98	1	3,93	1	120,00	7	-	-	-	-
24	6 Kab. Keerom	24	4.605,25	6	4.280,01	1	58,36	2	266,88	15	-	-	-	-
25	7 Kab. Mamberamo Raya	23	8.460,17	12	6.137,89	-	-	2	2.322,28	9	1	189,38	-	-
26	8 Kab. Mamberamo Tengah	27	15.292,05	13	13.294,94	-	-	3	1.997,11	11	-	-	-	-
27	9 Kab. Nduga	19	5.390,33	8	4.594,49	1	521,04	1	274,80	9	-	-	-	-
28	10 Kab. Pegunungan Bintang	9	4.537,04	7	4.537,04	-	-	-	-	2	-	-	-	-
29	11 Kab. Puncak	20	11.222,37	10	10.860,54	2	361,83	-	-	8	-	-	-	-
30	12 Kab. Sarmi	17	9.854,13	6	9.679,89	1	174,24	1	-	9	-	-	-	-
31	13 Kab. Supiori	8	6.338,51	4	6.222,76	-	-	1	115,75	3	-	-	-	-
32	14 Kab. Tolikara	11	24.826,82	4	22.586,48	1	1.347,80	1	892,54	5	-	-	-	-
33	15 Kab. Waropen	18	59.975,75	9	56.916,60	1	402,14	2	2.657,01	6	-	-	-	-
6	Prov. Papua Barat	11	1.099,17	2	1.083,13	-	-	1	16,04	8	-	-	-	-
34	1 Kab. Manokwari Selatan	6	578,19	1	578,19	-	-	-	-	5	-	-	-	-
35	2 Kab. Pegunungan Arfak	5	520,98	1	504,94	-	-	1	16,04	3	-	-	-	-
Jumlah LKPD TA 2014		507	239.588,51	208	198.295,44	23	19.195,37	66	22.097,70	210	19	1.557,12	8	703,11
Jumlah LKPD TA 2014 (Kabupaten)		479	234.177,28	197	194.866,38	22	18.883,88	56	20.427,02	204	16	1.366,83	4	291,71
Jumlah LKPD TA 2014 (Kota)		28	5.411,23	11	3.429,06	1	311,49	10	1.670,68	6	3	190,29	4	411,40

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Daftar Permasalahan yang Memengaruhi Keberhasilan Upaya Pemda
dalam Menyediakan Akses Air Bersih

A. Perencanaan

No	Entitas	Pemda Belum Memiliki Konsep Perencanaan yang Baik				
		Belum Memiliki Perencanaan Pengembangan SPAM BM	Kurang tersedianya data informasi :			Tidak Ada Data Jumlah SPAM BM Yang Sudah Dibangun dan Cakupan SPAM BM Sebagai Dasar Penyusunan Target Cakupan Pelayanan
			Kebutuhan Air Bersih	Sumber Air Baku/ Potensi Air Baku	Kebutuhan Sumber Daya	
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Aceh					
1	Kab. Aceh Besar	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kab. Bireuen	✓	✓		✓	✓
2	Provinsi Sumatera Utara					
3	Kab. Asahan	✓	✓	✓	✓	✓
4	Kab. Dairi	✓			✓	✓
3	Provinsi Sumatera Barat					
5	Kab. Padang Pariaman	✓	✓	✓	✓	✓
6	Kab. Solok	✓	✓	✓	✓	✓
4	Provinsi Riau					
7	Kab. Kampar	✓	✓		✓	✓
8	Kab. Kuantan Singingi	✓	✓	✓	✓	✓
5	Provinsi Jambi					
9	Kab. Tanjung Jabung Barat	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kab. Tebo	✓	✓	✓	✓	✓
6	Provinsi Sumatera Selatan					
11	Kab. Muara Enim	✓	✓			✓
12	Kab. Musi Rawas	✓				✓
7	Provinsi Bengkulu					
13	Kab. Bengkulu Selatan	✓		✓	✓	✓
14	Kab. Kaur	✓	✓		✓	✓
8	Provinsi Lampung					
15	Kab. Lampung Utara	✓	✓	✓	✓	✓
16	Kab. Tulang Bawang	✓	✓	✓	✓	✓
9	Provinsi Kep. Babel					
17	Kab. Bangka Tengah	✓	✓	✓	✓	✓
18	Kab. Belitung	✓			✓	✓
10	Provinsi Kep. Riau					
19	Kab. Karimun	✓	✓	✓	✓	✓
11	Provinsi Jawa Barat					
20	Kab. Cianjur	✓			✓	✓
21	Kab. Sukabumi	✓	✓		✓	✓
22	Kab. Sumedang	✓			✓	✓
12	Provinsi Jawa Tengah					
23	Kab. Kendal	✓	✓	✓	✓	✓

No	Entitas		Pemda Belum Memiliki Konsep Perencanaan yang Baik				
			Belum Memiliki Perencanaan Pengembangan SPAM BM	Kurang tersedianya data informasi :			Tidak Ada Data Jumlah SPAM BM Yang Sudah Dibangun dan Cakupan SPAM BM Sebagai Dasar Penyusunan Target Cakupan Pelayanan
				Kebutuh-an Air Bersih	Sumber Air Baku/ Potensi Air Baku	Kebu-tuhan Sumber Daya	
1	2		3	4	5	6	7
	24	Kab. Wonogiri	✓			✓	✓
13	Provinsi DI Yogyakarta						
	25	Kab. Gunungkidul	✓	✓	✓	✓	✓
14	Provinsi Jawa Timur						
	26	Kab. Blitar	✓			✓	✓
	27	Kab. Probolinggo	✓	✓	✓	✓	✓
15	Provinsi Banten						
	28	Kab. Lebak	✓	✓		✓	✓
16	Provinsi Bali						
	29	Kab. Karang Asem	✓			✓	✓
	30	Kab. Klungkung	✓			✓	✓
17	Provinsi NTT						
	31	Kab. Sumba Barat Daya	✓			✓	✓
	32	Kab. Timor Tengah Selatan	✓	✓		✓	✓
18	Provinsi Kalimantan Tengah						
	33	Kab. Barito Selatan	✓	✓	✓	✓	✓
	34	Kab. Katingan	✓	✓	✓	✓	✓
	35	Kab. Kotawaringin Timur	✓	✓	✓	✓	
19	Provinsi Kalimantan Selatan						
	36	Kab. Barito Kuala	✓			✓	✓
	37	Kab. Tapin	✓				✓
20	Provinsi Kalimantan Timur						
	38	Kab. Penajam Paser Utara	✓	✓			✓
21	Provinsi Sulawesi Tengah						
	39	Kab. Morowali	✓	✓	✓	✓	✓
	40	Kab. Toli-Toli	✓	✓	✓	✓	✓
22	Provinsi Sulawesi Selatan						
	41	Kab. Maros	✓	✓	✓	✓	✓
	42	Kab. Pangkajene Kepulauan	✓	✓		✓	✓
23	Provinsi Maluku						
	43	Kab. Buru	✓			✓	✓
24	Provinsi Maluku Utara						
	44	Kab. Pulau Morotai	✓	✓	✓	✓	✓
25	Provinsi Papua Barat						
	45	Kab. Sorong Selatan	✓			✓	✓
		Jumlah	45	30	22	41	44
		Persentase	100%	67%	49%	91%	98%

B. Peningkatan Kelayakan Air Bersih

No	Entitas		Pemda Belum Maksimal dalam Mendorong Penyediaan Akses Air Bersih Yang Layak			
			Pengawasan Pemenuhan Kualitas Air		Pengawasan Pemenuhan Kuantitas Air	
			Menguji Tapi Belum Sesuai Permenkes	Tidak Menguji	Belum Ada data Jumlah Produksi, Pengguna Air dan Konsumsi Air	memiliki data namun tidak lengkap dan ti- dak mutakhir
1	2		3	4	5	6
1	Provinsi Aceh					
	1	Kab. Aceh Besar	✓		✓	
	2	Kab. Bireuen	✓		✓	
2	Provinsi Sumatera Utara					
	3	Kab. Asahan	✓		✓	
	4	Kab. Dairi	✓		✓	
3	Provinsi Sumatera Barat					
	5	Kab. Padang Pariaman	✓		✓	
	6	Kab. Solok	✓			✓
4	Provinsi Riau					
	7	Kab. Kampar	✓		✓	
	8	Kab. Kuantan Singingi	✓		✓	
5	Provinsi Jambi					
	9	Kab. Tanjung Jabung Barat		✓	✓	
	10	Kab. Tebo	✓		✓	
6	Provinsi Sumatera Selatan					
	11	Kab. Muara Enim	✓		✓	
	12	Kab. Musi Rawas	✓		✓	
7	Provinsi Bengkulu					
	13	Kab. Bengkulu Selatan	✓		✓	
	14	Kab. Kaur	✓		✓	
8	Provinsi Lampung					
	15	Kab. Lampung Utara	✓		✓	
	16	Kab. Tulang Bawang	✓		✓	
9	Provinsi Kep. Babel					
	17	Kab. Bangka Tengah	✓		✓	
	18	Kab. Belitung	✓		✓	
10	Provinsi Kep. Riau					
	19	Kab. Karimun	✓		✓	
11	Provinsi Jawa Barat					
	20	Kab. Cianjur		✓	✓	
	21	Kab. Sukabumi	✓		✓	
	22	Kab. Sumedang	✓		✓	
12	Provinsi Jawa Tengah					
	23	Kab. Kendal	✓		✓	
	24	Kab. Wonogiri	✓		✓	

No	Entitas		Pemda Belum Maksimal dalam Mendorong Penyediaan Akses Air Bersih Yang Layak			
			Pengawasan Pemenuhan Kualitas Air		Pengawasan Pemenuhan Kuantitas Air	
			Menguji Tapi Belum Sesuai Permenkes	Tidak Menguji	Belum Ada data Jumlah Produksi, Pegguna Air dan Konsumsi Air	memiliki data namun tidak lengkap dan ti- dak mutakhir
1	2		3	4	5	6
13	Provinsi DI Yogyakarta					
	25	Kab. Gunungkidul	✓			✓
14	Provinsi Jawa Timur					
	26	Kab. Blitar	✓		✓	
	27	Kab. Probolinggo	✓			✓
15	Provinsi Banten					
	28	Kab. Lebak	✓		✓	
16	Provinsi Bali					
	29	Kab. Karang Asem	✓			✓
	30	Kab. Klungkung	✓		✓	
17	Provinsi NTT					
	31	Kab. Sumba Barat Daya	✓		✓	
	32	Kab. Timor Tengah Selatan	✓		✓	
18	Provinsi Kalimantan Tengah					
	33	Kab. Barito Selatan	✓		✓	
	34	Kab. Katingan	✓		✓	
	35	Kab. Kotawaringin Timur	✓		✓	
19	Provinsi Kalimantan Selatan					
	36	Kab. Barito Kuala	✓		✓	
	37	Kab. Tapin	✓		✓	
20	Provinsi Kalimantan Timur					
	38	Kab. Penajam Paser Utara		✓	✓	
21	Provinsi Sulawesi Tengah					
	39	Kab. Morowali	✓		✓	
	40	Kab. Toli-Toli	✓		✓	
22	Provinsi Sulawesi Selatan					
	41	Kab. Maros	✓		✓	
	42	Kab. Pangkajene Kepulauan	✓		✓	
23	Provinsi Maluku					
	43	Kab. Buru	✓		✓	
24	Provinsi Maluku Utara					
	44	Kab. Pulau Morotai	✓		✓	
25	Provinsi Papua Barat					
	45	Kab. Sorong Selatan	✓		✓	
	Jumlah		42	3	41	4
	Persentase		93%	7%	91%	9%

C. Kepedulian Pemda dalam Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan SPAM BM

No	Entitas		Kepedulian Pemda dalam Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan SPAM BM Kurang Optimal			
			Belum Dilaksanakan Kegiatan Pembinaan	Belum Ada Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Menyediakan Fasilitator	Belum Sepenuhnya Memberikan Pembinaan Teknis	Belum Memberikan Dukungan Bantuan Pemeliharaan untuk SPAM BM yang Belum Mandiri
1	2		3	4	5	6
1	Provinsi Aceh					
	1	Kab. Aceh Besar	✓	✓	✓	✓
	2	Kab. Bireuen	✓	✓	✓	✓
2	Provinsi Sumatera Utara					
	3	Kab. Asahan	✓	✓	✓	
	4	Kab. Dairi	✓	✓	✓	✓
3	Provinsi Sumatera Barat					
	5	Kab. Padang Pariaman	✓		✓	✓
	6	Kab. Solok	✓	✓	✓	✓
4	Provinsi Riau					
	7	Kab. Kampar	✓		✓	✓
	8	Kab. Kuantan Singingi	✓	✓	✓	✓
5	Provinsi Jambi					
	9	Kab. Tanjung Jabung Barat	✓	✓	✓	✓
	10	Kab. Tebo	✓	✓	✓	✓
6	Provinsi Sumatera Selatan					
	11	Kab. Muara Enim	✓	✓	✓	✓
	12	Kab. Musi Rawas	✓	✓	✓	✓
7	Provinsi Bengkulu					
	13	Kab. Bengkulu Selatan	✓		✓	✓
	14	Kab. Kaur	✓	✓	✓	✓
8	Provinsi Lampung					
	15	Kab. Lampung Utara	✓	✓	✓	✓
	16	Kab. Tulang Bawang	✓	✓	✓	✓
9	Provinsi Kep. Babel					
	17	Kab. Bangka Tengah	✓	✓	✓	✓
	18	Kab. Belitung	✓	✓	✓	✓
10	Provinsi Kep. Riau					
	19	Kab. Karimun	✓	✓	✓	✓
11	Provinsi Jawa Barat					
	20	Kab. Cianjur	✓	✓	✓	✓
	21	Kab. Sukabumi	✓	✓	✓	✓
	22	Kab. Sumedang	✓	✓	✓	✓
12	Provinsi Jawa Tengah					
	23	Kab. Kendal	✓	✓	✓	✓
	24	Kab. Wonogiri	✓	✓	✓	✓

No	Entitas		Kepedulian Pemda dalam Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan SPAM BM Kurang Optimal			
			Belum Dilaksanakan Kegiatan Pembinaan	Belum Ada Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Menyediakan Fasilitator	Belum Sepenuhnya Memberikan Pembinaan Teknis	Belum Memberikan Dukungan Bantuan Pemeliharaan untuk SPAM BM yang Belum Mandiri
1	2		3	4	5	6
13	Provinsi DI Yogyakarta					
	25	Kab. Gunungkidul	✓	✓	✓	✓
14	Provinsi Jawa Timur					
	26	Kab. Blitar		✓	✓	✓
	27	Kab. Probolinggo	✓	✓	✓	✓
15	Provinsi Banten					
	28	Kab. Lebak	✓	✓	✓	✓
16	Provinsi Bali					
	29	Kab. Karang Asem	✓	✓	✓	✓
	30	Kab. Klungkung	✓	✓	✓	✓
17	Provinsi NTT					
	31	Kab. Sumba Barat Daya	✓	✓	✓	✓
	32	Kab. Timor Tengah Selatan	✓	✓	✓	✓
18	Provinsi Kalimantan Tengah					
	33	Kab. Barito Selatan	✓	✓	✓	✓
	34	Kab. Katingan	✓		✓	✓
	35	Kab. Kotawaringin Timur	✓	✓	✓	✓
19	Provinsi Kalimantan Selatan					
	36	Kab. Barito Kuala	✓		✓	✓
	37	Kab. Tapin	✓	✓	✓	✓
20	Provinsi Kalimantan Timur					
	38	Kab. Penajam Paser Utara	✓		✓	✓
21	Provinsi Sulawesi Tengah					
	39	Kab. Morowali	✓	✓	✓	✓
	40	Kab. Toli-Toli	✓	✓	✓	✓
22	Provinsi Sulawesi Selatan					
	41	Kab. Maros	✓	✓	✓	✓
	42	Kab. Pangkajene Kepulauan	✓	✓	✓	✓
23	Provinsi Maluku					
	43	Kab. Buru	✓	✓	✓	✓
24	Provinsi Maluku Utara					
	44	Kab. Pulau Morotai	✓	✓	✓	✓
25	Provinsi Papua Barat					
	45	Kab. Sorong Selatan	✓	✓	✓	✓
		Jumlah	44	39	45	44
		Persentase	98%	87%	100%	98%

Daftar Permasalahan Efektivitas Upaya Pemda dalam Implementasi SAP Berbasis Akrua

No.	Entitas	Belum ada strategi komprehen- sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual						Regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual belum selaras dengan peraturan lainnya
			Sumber Daya Manusia (SDM)					Sistem aplikasi belum mampu menghasilkan LK berbasis akrual	
			Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuangan, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mutakhir	Penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/diterapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
1	Provinsi Aceh								
	1 Pemerintah Aceh					√	√		
	2 Kab. Aceh Barat	√	√	√		√			
	3 Kab. Aceh Barat Daya	√	√	√		√			
	4 Kab. Aceh Tamiang	√		√	√	√	√		
	5 Kota Banda Aceh			√	√	√	√		
	6 Kota Langsa	√		√	√	√	√	√	
2	Provinsi Sumatera Utara								
	7 Prov. Sumatera Utara	√	√	√	√	√		√	
	8 Kab. Deli Serdang	√	√	√	√	√		√	
	9 Kab. Langkat	√	√	√	√	√		√	
	10 Kab. Mandailing Natal	√		√	√	√			
	11 Kab. Tapanuli Selatan	√	√	√	√	√		√	
	12 Kota Medan	√	√	√	√	√		√	
3	Provinsi Sumatera Barat								
	13 Prov. Sumatera Barat		√		√	√	√		
	14 Kab. Padang Pariaman	√	√	√	√	√	√	√	
	15 Kab. Pesisir Selatan	√	√			√	√		
	16 Kota Pariaman	√	√	√	√	√	√	√	
4	Provinsi Riau								
	17 Prov. Riau				√	√	√		√
	18 Kab. Indragiri Hulu		√	√	√	√	√	√	√
	19 Kab. Kep. Meranti		√	√	√	√	√	√	√
	20 Kota Dumai	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Provinsi Jambi								
	21 Prov. Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√
	22 Kab. Batanghari	√	√	√	√	√	√	√	√
	23 Kab. Muaro Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Entitas		Belum ada strategi komprehen-sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual						Regulasi dan kebi-jakan SAP berbasis akrual belum selaras dengan peraturan lainnya
				Sumber Daya Manusia (SDM)					Sistem aplikasi belum mampu mengha-silkan LK berbasis akrual	
				Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuang-an, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mu-takhir	Penempat-an SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/di-terapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
	24	Kota Jambi	√	√	√	√		√	√	√
6	Provinsi Sumatera Selatan									
	25	Prov. Sumatera Selatan		√	√		√			√
	26	Kab. Muratara	√	√	√	√	√	√	√	√
	27	Kab. Ogan Komering Ulu	√	√		√	√	√		√
	28	Kota Palembang		√		√	√	√		√
7	Provinsi Bengkulu									
	29	Prov. Bengkulu	√	√	√	√	√	√	√	√
	30	Kab. Kepahiang	√	√	√	√	√	√	√	√
	31	Kab. Lebong	√	√	√	√	√	√	√	√
	32	Kota Bengkulu	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Provinsi Lampung									
	33	Prov. Lampung	√	√	√	√	√	√		
	34	Kab. Lampung Barat	√	√	√	√	√	√	√	√
	35	Kab. Lampung Selatan	√	√	√	√	√	√		√
	36	Kab. Pringsewu		√	√	√		√	√	
	37	Kota Bandar Lampung		√	√	√		√		
	38	Kota Metro		√	√	√	√	√	√	
9	Provinsi Kep. Bangka Belitung									
	39	Prov. Kep. Bangka Belitung	√	√	√	√	√	√	√	√
	40	Kab. Bangka	√	√	√	√	√	√	√	√
	41	Kab. Bangka Barat	√	√	√	√	√	√	√	√
	42	Kota Pangkalpinang	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Provinsi Kepulauan Riau									
	43	Prov. Kepulauan Riau	√	√		√	√	√	√	
	44	Kab. Bintan		√	√	√	√	√	√	
	45	Kota Batam	√	√	√	√	√	√	√	√
	46	Kota Tanjung Pinang	√	√	√	√	√	√	√	√

No.	Entitas		Belum ada strategi komprehen-sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual						Regulasi dan kebi-jakan SAP berbasis akrual be-lum selaras dengan peraturan lainnya
				Sumber Daya Manusia (SDM)					Sistem aplikasi belum mampu mengha-silkan LK berbasis akrual	
				Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuang-an, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mu-takhir	Penempat-an SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/di-terapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
11	Provinsi DKI Jakarta									
	47	Prov. DKI Jakarta	√	√	√	√	√	√	√	
12	Provinsi Jawa Barat									
	48	Prov. Jawa Barat		√	√	√	√		√	
	49	Kab. Bandung		√	√	√	√		√	
	50	Kab. Bogor		√		√	√		√	√
	51	Kota Banjar			√	√	√	√	√	√
	52	Kota Depok		√		√	√		√	√
	53	Kota Tasikmalaya	√		√	√	√	√	√	√
13	Provinsi DI Yogyakarta									
	54	Prov. DIY		√	√		√			√
	55	Kab. Bantul	√	√	√	√	√		√	
	56	Kab. Sleman	√	√	√		√	√	√	
	57	Kota Yogyakarta			√		√	√	√	
14	Provinsi Jawa Tengah									
	58	Prov. Jawa Tengah			√	√	√		√	√
	59	Kab. Batang	√	√	√	√	√		√	√
	60	Kab. Boyolali	√	√	√	√	√	√	√	√
	61	Kab. Pekalongan	√	√	√	√	√	√	√	√
	62	Kab. Purworejo	√	√	√	√	√		√	√
	63	Kab. Semarang			√	√	√		√	√
	64	Kota Magelang	√	√	√	√	√	√	√	√
	65	Kota Solo		√			√	√	√	
15	Provinsi Jawa Timur									
	66	Prov. Jawa Timur	√	√	√				√	
	67	Kab. Gresik	√	√	√	√	√	√	√	√
	68	Kab. Jombang				√	√		√	√
	69	Kab. Mojokerto		√		√	√	√		√
	70	Kab. Pasuruan		√	√	√			√	√

No.	Entitas		Belum ada strategi komprehen-sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual					Regulasi dan kebi-jakan SAP berbasis akrual belum selaras dengan peraturan lainnya	
				Sumber Daya Manusia (SDM)						Sistem aplikasi belum mampu mengha-silkan LK berbasis akrual
				Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuang-an, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mu-takhir	Penempat-an SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/di-terapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
	71	Kota Batu	√		√	√	√		√	√
	72	Kota Malang		√	√	√	√			√
	73	Kota Pasuruan	√	√	√		√	√	√	√
16	Provinsi Banten									
	74	Prov. Banten		√						√
	75	Kota Tangerang		√						√
17	Provinsi Bali									
	76	Prov. Bali	√	√	√	√		√	√	√
	77	Kab. Badung	√	√	√	√		√	√	√
	78	Kab. Gianyar	√	√	√	√		√	√	
	79	Kota Denpasar	√	√	√	√			√	√
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat									
	80	Kab. Lombok Tengah	√	√	√	√	√	√	√	√
	81	Kota Mataram	√	√	√	√	√	√	√	
19	Provinsi Kalimantan Barat									
	82	Prov. Kalimantan Barat			√		√	√	√	
	83	Kab. Kubu Raya			√		√	√	√	
20	Provinsi Kalimantan Tengah									
	84	Prov. Kalimantan Tengah	√				√	√	√	
	85	Kota Palangkaraya	√	√	√	√	√	√	√	
21	Provinsi Kalimantan Selatan									
	86	Prov. Kalimantan Selatan					√	√	√	
	87	Kota Banjarbaru	√	√		√	√	√	√	√
22	Provinsi Kalimantan Timur									
	88	Prov. Kalimantan Timur			√		√	√		
	89	Kota Balikpapan	√		√			√		√

No.	Entitas		Belum ada strategi komprehen-sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual						Regulasi dan kebi-jakan SAP berbasis akrual be-lum selaras dengan peraturan lainnya
				Sumber Daya Manusia (SDM)					Sistem aplikasi belum mampu mengha-silkan LK berbasis akrual	
				Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuang-an, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mu-takhir	Penempat-an SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/di-terapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
23	Provinsi Kalimantan Utara									
	90	Prov. Kalimantan Utara	√	√	√	√	√	√	√	√
	91	Kab. Malinau	√	√	√	√	√	√	√	√
	92	Kab. Nunukan	√	√	√	√	√	√		√
24	Provinsi Sulawesi Utara									
	93	Prov. Sulawesi Utara	√	√		√	√	√	√	√
	94	Kab. Minahasa Utara				√	√	√	√	√
	95	Kota Bitung		√	√	√	√	√	√	√
	96	Kota Tomohon	√	√	√	√	√	√	√	√
25	Provinsi Sulawesi Tengah									
	97	Prov. Sulawesi Tengah		√	√	√	√		√	√
	98	Kota Palu	√	√	√	√	√	√	√	√
26	Provinsi Sulawesi Selatan									
	99	Prov. Sulawesi Selatan	√	√	√		√	√	√	√
	100	Kab. Luwu Utara	√	√	√		√	√	√	√
27	Provinsi Sulawesi Tenggara									
	101	Kota Kendari	√	√	√	√	√	√	√	√
28	Provinsi Gorontalo									
	102	Kab. Gorontalo	√	√		√	√	√	√	
	103	Kota Gorontalo	√	√				√	√	√
29	Provinsi Sulawesi Barat									
	104	Prov. Sulawesi Barat	√	√	√	√	√	√	√	
	105	Kab. Mamuju	√	√	√	√	√	√	√	
30	Provinsi Maluku Utara									
	106	Prov. Maluku Utara	√	√	√		√	√	√	√
	107	Kota Tidore Kepu-lauan	√	√	√		√	√	√	√
31	Provinsi Papua									
	108	Kab. Asmat	√	√	√	√	√	√		√

No.	Entitas		Belum ada strategi komprehen- sif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual	Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual						Regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual belum selaras dengan peraturan lainnya
				Sumber Daya Manusia (SDM)					Sistem aplikasi belum mampu menghasilkan LK berbasis akrual	
				Perencanaan kebutuhan kompetensi dan pelatihan SDM yang menangani fungsi keuangan, aset, dan TI tidak dilakukan	Tidak memiliki database SDM yang lengkap dan mutakhir	Penempatan SDM pengelola keuangan, aset, dan TI sesuai dengan bidangnya	Kebijakan mutasi dan promosi pegawai belum dimiliki/di-terapkan	Pelatihan/ sosialisasi SDM terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual belum memadai		
	109	Kab. Jayapura	√	√	√	√	√	√	√	√
32	Provinsi Papua Barat									
	110	Prov. Papua Barat	√		√			√	√	√
	111	Kab. Sorong	√		√	√		√	√	√
	112	Kab. Sorong Selatan	√		√	√		√	√	√
		Jumlah	77	89	91	87	96	84	88	71
		Persentase	69%	79%	81%	78%	86%	75%	79%	63%

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Lain-lain Kele- mahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasa- lahan	Jml Permasala- han	Jml Permasa- lahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasa- lahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi Sumatera Utara								
1	1	Pemkab Deli Ser- dang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya.	7	4	2	1	-
2	2	Pemkab Langkat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Pro- fesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Peng- hasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA2014 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Instansi Terkait Lainnya	5	2	1	1	1
3	3	Pemkot Medan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Se- mester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya	7	6	-	1	-
Provinsi Sumatera Selatan								
4	4	Pemkab Lahat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dan instansi terkait lainnya	6	3	-	1	2
5	5	Pemkab Muara Enim	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dan instansi terkait lainnya	4	2	-	1	1
6	6	Pemkot Palembang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan instansi terkait lainnya	4	2	-	1	1
Provinsi Lampung								
7	7	Pemkab Lampung Tengah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah dan instansi terkait lainnya	8	2	4	2	-
8	8	Pemkab Lampung Timur	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan instansi terkait lainnya	7	2	3	2	-
9	9	Pemkab Pringsewu	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu dan instansi terkait lainnya	7	2	3	2	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Banten						
10	10	Pemkab Tangerang	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kabupaten Tangerang Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D. Semester I)	5	1	-	2	2
11	11	Pemkot Tangerang	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kota Tangerang Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D. Semester I)	6	4	-	1	1
12	12	Pemkot Tangerang Selatan	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kota Tangerang Selatan Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D.Semester I)	5	4	-	-	1
		Provinsi Jawa Barat						
13	13	Pemkab Bandung	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung	10	8	-	1	1
14	14	Pemkot Bandung	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Bandung	6	4	-	1	1
15	15	Pemkot Bogor	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 di Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya	5	3	-	1	1
		Provinsi Jawa Timur						
16	16	Pemkab Malang	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Malang	5	4	-	1	-
17	17	Pemkab Pasuruan	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan	7	5	-	2	-
18	18	Pemkot Surabaya	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Surabaya	8	5	1	1	1
		Provinsi Bali						
19	19	Pemkab Gianyar	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Gianyar	8	1	3	2	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Lain-lain Kele- mahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasa- lahan	Jml Permasalah- an	Jml Permasa- lahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasa- lahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	20	Pemkab Tabanan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Tabanan	6	-	5	1	-
21	21	Pemkot Denpasar	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Denpasar	5	1	1	-	3
Provinsi Nusa Tenggara Timur								
22	22	Pemkab Kupang	Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabu- upaten Kupang	3	-	1	-	2
23	23	Pemkab Timor Tengah Selatan	Pengelolaan Dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Pengha- silan Guru Ta 2013 Dan Semester I 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan	7	1	4	-	2
24	24	Pemkot Kupang	Pengelolaan Dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Pengha- silan Guru Ta 2013 Dan Semester I 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Kupang	5	1	3	-	1
Provinsi Kalimantan Selatan								
25	25	Pemkab Banjar	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Banjar	4	2	1	1	-
26	26	Pemkot Banjarbaru	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarbaru	8	2	2	1	3
27	27	Pemkot Banjar- masin	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarmasin	6	2	2	1	1
Provinsi Kalimantan Timur								
28	28	Pemkab Kutai Ker- tanegara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	12	10	-	-	2
29	29	Pemkot Balikpapan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	10	7	-	1	2
30	30	Pemkot Samarinda	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	9	8	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP tidak ditaati	SOP belum disusun	Lain-lain Kele- mahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasa- lahan	Jml Permasalahan	Jml Permasa- lahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasa- lahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Sulawesi Tenggara						
31	31	Pemkab Kolaka	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Kolaka	2	1	1	-	-
32	32	Pemkab Muna	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Muna	3	2	-	1	-
33	33	Pemkot Kendari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kota Kendari	5	2	2	1	-
		Provinsi Maluku						
34	34	Pemkab Maluku Tenggara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara	6	-	5	1	-
35	35	Pemkot Ambon	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 204 Kota Ambon	-	-	-	-	-
36	36	Pemkot Tual	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lainnya di Kota Tual	-	-	-	-	-
Jumlah				211	103	44	32	32
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				34	31	18	26	21
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				34	31	18	26	21

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Tunjangan Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2013 dan 2014 (Semester I)
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidapatuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penaatan Tarif Pajak/PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Sumatera Utara										
1	1	Pemkab Deli Serdang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA2014 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang dan Instansi Terkait Lainnya.	2	1.493,97	2	1.493,97	-	-	-	-	-
2	2	Pemkab Langkat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA2014 pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat dan Instansi Terkait Lainnya	7	478,54	1	398,70	1	1	79,84	4	-
3	3	Pemkot Medan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran (TA) 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Kota Medan dan Instansi Terkait Lainnya	2	806,13	2	806,13	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan										
4	4	Pemkab Lahat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dan instansi terkait lainnya	2	193,91	2	193,91	-	-	-	-	-
5	5	Pemkab Muara Enim	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dan instansi terkait lainnya	1	96,42	1	96,42	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penaatan Tarif Pajak/PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
6	6	Pemkot Palembang	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dan instansi terkait lainnya	1	907,94	1	907,94	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Lampung											
7	7	Pemkab Lampung Tengah	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah dan instansi terkait lainnya	6	175,45	2	167,59	3	1	7,86	-	-	-
8	8	Pemkab Lampung Timur	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur dan instansi terkait lainnya	2	386,27	2	386,27	-	-	-	-	-	-
9	9	Pemkab Pringsewu	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan 2014 (Semester I) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pringsewu dan instansi terkait lainnya	1	11,14	-	-	-	1	11,14	-	-	-
		Provinsi Banten											
10	10	Pemkab Tangerang	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kabupaten Tangerang Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D. Semester I)	4	1.161,46	2	1.155,28	1	-	-	1	6,18	6,18
11	11	Pemkot Tangerang	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kota Tangerang Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D. Semester I)	4	1.960,24	2	1.934,17	1	-	-	1	26,07	26,07

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penaan Tarif Pajak/PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12	12	Pemkot Tangerang Selatan	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Pada Kota Tangerang Selatan Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2013 Dan 2014 (S.D.Semester I)	2	182,17	2	182,17	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Barat											
13	13	Pemkab Bandung	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Bandung	4	1.149,37	4	1.149,37	-	-	-	-	-	-
14	14	Pemkot Bandung	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Bandung	4	793,42	4	793,42	-	-	-	-	-	-
15	15	Pemkot Bogor	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Tahun Anggaran 2013 dan Semester I 2014 di Kota Bogor dan Instansi Terkait Lainnya	2	425,28	2	425,28	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Timur											
16	16	Pemkab Malang	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17	Pemkab Pasuruan	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan	1	20,80	-	-	-	-	-	1	20,80	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpa- tuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Me- lebihhi Ketentuan		Penyim- pangan peraturan bidang tertentu	Penaan Tarif Pajak/PNPB Le- bih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terhad- ap Peraturan Perundang-un- dangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasa- lahan	Permasalahan		Permasalahan		
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	18	Pemkot Surabaya	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Surabaya	1	106,21	1	106,21	-	-	-	-	-	
		Provinsi Bali											
19	19	Pemkab Gianyar	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabu- paten Gianyar	5	-	-	-	5	-	-	-	-	
20	20	Pemkab Tabanan	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabu- paten Tabanan	5	46,20	1	46,20	4	-	-	-	-	
21	21	Pemkot Denpasar	Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Denpasar	4	11,08	1	11,08	3	-	-	-	-	
		Provinsi Nusa Tenggara Timur											
22	22	Pemkab Kupang	Pengelolaan Dan Pertanggung-jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 Dan Semester I TA 2014 Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kupang	3	136,08	2	136,08	1	-	-	-	-	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpa- tuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Me- lebihi Ketentuan		Penyimp- angan peraturan bidang tertentu	Penaan Tarif Pajak/PNPB Le- bih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terhad- ap Peraturan Perundang-un- dangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasa- lahan	Permasalahan		Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
23	23	Pemkab Timor Tengah Selatan	Pengelolaan Dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Ta 2013 Dan Semester I 2014 Pada Dinas Pen- didikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan	5	251,55	3	249,87	-	1	1,68	1	-	-
24	24	Pemkot Kupang	Pengelolaan Dan Tanggungjawab Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Dan Dana Tambahan Penghasilan Guru Ta 2013 Dan Semester I 2014 Pada Dinas Pen- didikan, Pemuda Dan Olah Raga Kota Kupang	4	86,06	2	86,06	-	-	-	2	-	-
Provinsi Kalimantan Selatan													
25	25	Pemkab Banjar	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kabupaten Banjar	2	274,44	1	268,07	-	1	6,37	-	-	-
26	26	Pemkot Banjarbaru	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarbaru	2	185,20	1	181,51	-	1	3,69	-	-	-
27	27	Pemkot Banjarmas- in	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Penghasilan Guru TA 2013 dan Semster I TA 2014 pada Dinas Pendidikan Serta Instansi Terkait Lainnya di Kota Banjarmasin	2	49,51	1	45,53	-	1	3,98	-	-	-
Provinsi Kalimantan Timur													
28	28	Pemkab Kutai Ker- tanegara	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong	7	1.264,92	2	34,81	-	-	-	5	1.230,11	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Penaan Tarif Pajak/PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
29	29	Pemkot Balikpapan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	4	401,42	3	133,50	-	-	-	1	267,92	
30	30	Pemkot Samarinda	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru, TA 2013 dan Semester I TA 2014 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	2	412,75	2	412,75	-	-	-	-	-	-
Provinsi Sulawesi Tenggara													
31	31	Pemkab Kolaka	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Kolaka	7	368,36	3	368,36	4	-	-	-	-	-
32	32	Pemkab Muna	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Muna	8	396,60	3	386,91	4	-	-	1	9,69	
33	33	Pemkot Kendari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kota Kendari	4	269,54	2	114,93	-	-	-	2	154,61	
Provinsi Maluku													
34	34	Pemkab Maluku Tenggara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional dan Dana Tambahan Pengehasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 2014 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Serta Intansi Terkait Lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara	3	109,70	3	109,70	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan								
				Total Ketidakpa- tuhan		Belanja Tidak Sesuai atau Me- lebih Ketentuan		Penyim- pangan peraturan bidang tertentu	Pengenaan Tarif Pajak/PNPB Le- bih Rendah dari Ketentuan		Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terha- dap Peraturan Perundang-un- dangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasa- lahan	Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	35	Pemkot Ambon	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan SMT I 204 Kota Ambon	5	488,55	3	488,55	2	-	-	-	-
36	36	Pemkot Tual	Pengelolaan dan Pertanggung- jawaban Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2013 dan Semester I 2014 Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Instansi Lainnya di Kota Tual	6	29,10	2	29,10	3	-	-	1	-
Jumlah				124	15.129,78	65	13.299,84	32	7	114,56	20	1.715,38
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				35		32		12	7		11	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				35		32		12	7		11	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				769,94								

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 dan 2012

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan Kegiatan tidak memadai	SOP belum disusun	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Papua						
1	1	Pemprov Papua	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua	11	5	2	3	1
2	2	Pemkab Jayapura	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura	-	-	-	-	-
3	3	Pemkab Keerom	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Keerom	1	-	-	-	1
4	4	Pemkab Mimika	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mimika	8	2	4	1	1
5	5	Pemkab Nabire	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nabire	6	1	2	-	3
		Provinsi Papua Barat						
6	6	Pemprov Papua Barat	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat	11	5	3	2	1
7	7	Pemkab Fakfak	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak	4	1	2	1	-
8	8	Pemkot Sorong	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Sorong	3	2	-	1	-
Jumlah				44	16	13	8	7
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				7	6	5	5	5
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7	6	5	5	5

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2011 dan 2012 (Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan		
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			Jml Permasalahan	Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Provinsi Papua											
1	1	Pemprov Papua	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua	17	596.567,44	3	10.700,92	1	1.110,39	2	11	584.756,13	
2	2	Pemkab Jayapura	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Jayapura	2	21,00	-	-	1	21,00	1	-	-	
3	3	Pemkab Keerom	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Keerom	6	331,49	1	217,25	1	17,52	2	2	96,72	
4	4	Pemkab Mimika	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Mimika	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
5	5	Pemkab Nabire	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Nabire	3	543,74	-	-	-	-	1	2	543,74	
		Provinsi Papua Barat											
6	6	Pemprov Papua Barat	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Provinsi Papua Barat	27	12.619,51	6	9.204,00	3	2.311,86	2	16	1.103,65	
7	7	Pemkab Fakfak	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kabupaten Fakfak	10	1.763,14	1	94,73	-	-	2	7	1.668,41	
8	8	Pemkot Sorong	Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Otonomi Khusus TA 2011 dan 2012 pada Pemerintah Kota Sorong	3	99,99	-	-	-	-	-	3	99,99	
Jumlah				70	611.946,31	11	20.216,90	6	3.460,77	11	42	588.268,64	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				8		4		4		7	7		
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		4		4		7	7		
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				2.225,33									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP tidak ditaati	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum disusun
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Provinsi Papua Barat					
1	1	Pemprov Papua Barat	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari	3	1	1	1
2	2	Pemkab Teluk Bintuni	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	3	3	-	-
3	3	Pemkab Tambrauw	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tambrauw	3	3	-	-
Jumlah				9	7	1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	3	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	3	1	1

Lampiran F.6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten di Papua Barat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
				Total Ketidakpatuhan	Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik	Pelaksanaan kegiatan terlambat / terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
		Provinsi Papua Barat				
1	1	Pemprov Papua Barat	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari	1	1	-
2	2	Pemkab Teluk Bintuni	Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni	3	2	1
3	3	Pemkab Tambrauw	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tambrauw	-	-	-
Jumlah				4	3	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				2	2	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	1
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan						-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun	Mekanisme pengelolaan penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Aceh						
1	1	Pemprov Aceh	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Provinsi Aceh TA 2014 dan Semester I TA 2015	7	4	1	-	2
		Provinsi Sumatera Barat						
2	2	Pemprov Sumatera Barat	Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	8	5	-	-	3
		Provinsi Jambi						
3	3	Pemprov Jambi	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	3	1	1	-	1
4	4	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 Dan Semester I TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari Di Muara Bulian	1	1	-	-	-
5	5	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 Dan Semester I TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Di Sengeti	3	1	-	1	1
6	6	Pemkab Tanjung Jabung Timur	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	1	-	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan						
7	7	Pemprov Sumatera Selatan	Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 s.d Semester I Tahun Anggaran 2015	3	-	1	-	2
		Provinsi Kepulauan Riau						
8	8	Pemkot Batam	Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III)	10	3	3	-	4
		Provinsi Jawa Barat						
9	9	Pemkab Bekasi	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	6	6	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun	Mekanisme pengelolaan penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	Pemkab Subang	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Subang Di Subang	8	5	3	-	-
11	11	Pemkot Bandung	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung	2	2	-	-	-
12	12	Pemkot Cirebon	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon	6	5	1	-	-
		Provinsi D.I. Yogyakarta						
13	13	Pemprov D.I. Yogyakarta	Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Di Yogyakarta	7	-	2	1	4
14	14	Pemkab Sleman	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 (s.d. Triwulan III)	10	2	1	1	6
		Provinsi Jawa Tengah						
15	15	Pemkab Banjarnegara	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 Di Banjarnegara	18	8	4	4	2
16	16	Pemkot Pekalongan	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 Di Pekalongan	15	6	8	1	-
17	17	Pemkot Magelang	Perizinan Kota Magelang Tahun 2014 Dan 2015 Di Magelang	9	-	2	-	7
		Provinsi Jawa Timur						
18	18	Pemkab Banyuwangi	Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi TA 2014 Dan Semester I TA 2015 Di Banyuwangi	7	6	-	1	-
19	19	Pemkab Lamongan	Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 Dan Tahun Anggaran 2015 (S.D Triwulan III) Di Lamongan	12	5	3	-	4
		Provinsi Banten						
20	20	Pemkab Tangerang	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Di Tigaraksa	6	6	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun	Mekanisme pengelolaan penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	21	Pemkot Cilegon	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kota Cilegon Di Cilegon	11	7	2	-	2
22	22	Pemkot Serang	Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (Semester I)	11	10	1	-	-
		Provinsi Sulawesi Utara						
23	23	Pemkot Manado	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Agustus) Pada Pemerintah Kota Manado	7	4	2	1	-
24	24	Pemkot Bitung	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Kota Bitung	7	2	2	3	-
		Provinsi Sulawesi Barat						
25	25	Pemkab Mamuju	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Di Mamuju	10	6	1	-	3
		Provinsi Sulawesi Tengah						
26	26	Pemprov Sulawesi Tengah	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu	4	3	1	-	-
		Provinsi Bali						
27	27	Pemprov Bali	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. Oktober) Pada Pemerintah Provinsi Bali Di Denpasar	7	5	-	-	2
28	28	Pemkab Badung	Pendapatan Daerah Kabupaten Badung TA 2014 Dan 2015 (S.D Oktober 2015)	11	5	4	-	2
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
29	29	Pemkab Lombok Barat	Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus)	9	4	-	3	2
		Provinsi Papua						
30	30	Pemkab Jayapura	Pendapatan Asli Daerah Ta 2014 Dan Semester I 2015 Pada Kabupaten Jayapura	4	2	1	-	1
Jumlah				223	115	44	16	48
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				30	27	20	9	17
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				30	27	20	9	17

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Daerah (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Penyetoran penerimaan daerah terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Aceh											
1	1	Pemprov Aceh	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Pada Pemerintah Provinsi Aceh TA 2014 Dan Semester I TA 2015	2	293,76	1	293,76	-	-	1	-	-	-
		Provinsi Sumatera Barat											
2	2	Pemprov Sumatera Barat	Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Provinsi Jambi											
3	3	Pemprov Jambi	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	6	510.314,39	4	509.926,85	-	-	-	-	2	387,54
4	4	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	8	660,79	7	660,79	-	-	-	-	1	-
					USD 124,55	-	USD 124,55						
			Total Rupiah		2.378,96		2.378,96						
5	5	Pemkab Muaro Jambi	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 Dan Semester I TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Di Sengeti	5	437,62	3	417,62	-	-	1	-	1	20,00
6	6	Pemkab Tanjung Jabung Timur	Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2	2.390,57	2	2.390,57	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan											
7	7	Pemprov Sumatera Selatan	Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014 s.d Semester I Tahun Anggaran 2015	11	15.110,11	9	15.110,11	-	-	1	-	1	-
					USD 1,80	-	USD 1,80	-	-	-	-	-	-
			Total Rupiah		15.134,94		15.134,94						
		Provinsi Kepulauan Riau											
8	8	Pemkot Batam	Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Batam Tahun 2014 dan 2015 (Triwulan III)	4	6.493,93	4	6.493,93	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Barat											
9	9	Pemkab Bekasi	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang	6	1.739,17	5	1.739,17	1	-	-	-	-	-
10	10	Pemkab Subang	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Subang Di Subang	3	4.622,76	3	4.622,76	-	-	-	-	-	-
11	11	Pemkot Bandung	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bandung di Bandung	11	11.825,52	6	11.825,52	5	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Penyetoran penerimaan daerah terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Pemkot Cirebon	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Cirebon di Cirebon	6	1.692,72	6	1.692,72	-	-	-	-	-	-
		Provinsi D.I. Yogyakarta											
13	13	Pemprov D.I. Yogyakarta	Pendapatan Daerah Pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Di Yogyakarta	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-
14	14	Pemkab Sleman	Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 (s.d. Triwulan III)	2	156,09	2	156,09	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Tengah											
15	15	Pemkab Banjarnegara	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 Di Banjarnegara	8	2.084 ,31	5	1.228,38	-	-	1	-	2	855,93
16	16	Pemkot Pekalongan	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2015 Di Pekalongan	4	67,44	4	67,44	-	-	-	-	-	-
17	17	Pemkot Magelang	Perizinan Kota Magelang Tahun 2014 Dan 2015 Di Magelang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Jawa Timur											
18	18	Pemkab Banyuwangi	Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi TA 2014 Dan Semester I TA 2015 Di Banyuwangi	10	4.993,42	7	3.983,55	1	-	-	-	2	1.009,87
19	19	Pemkab Lamongan	Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 Dan Tahun Anggaran 2015 (S.D Triwulan III) Di Lamongan	11	1.315 ,48	7	1.315 ,48	4	-	-	-	-	-
		Provinsi Banten											
20	20	Pemkab Tangerang	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang Di Tigaraksa	7	7.337,25	7	7.337,25	-	-	-	-	-	-
21	21	Pemkot Cilegon	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kota Cilegon Di Cilegon	4	464,35	4	464,35	-	-	-	-	-	-
22	22	Pemkot Serang	Pendapatan Asli Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (Semester I)	7	1.478,22	7	1.478,22	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Utara											
23	23	Pemkot Manado	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Agustus) Pada Pemerintah Kota Manado	7	1.612,85	6	1.558,45	-	-	-	-	1	54,40
24	24	Pemkot Bitung	Pendapatan Asli Daerah TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Kota Bitung	5	242,02	4	242,02	1	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Barat											
25	25	Pemkab Mamuju	Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Di Mamuju	4	323,28	3	323,28	-	-	1	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Penyetoran penerimaan daerah terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Sulawesi Tengah											
26	26	Pemprov Sulawesi Tengah	Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu	4	1.235,50	3	1.158,29	-	-	-	-	1	77,21
		Provinsi Bali											
27	27	Pemprov Bali	Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. Oktober) Pada Pemerintah Provinsi Bali Di Denpasar	7	168,43	-	-	2	-	3	-	2	168,43
28	28	Pemkab Badung	Pendapatan Daerah Kabupaten Badung TA 2014 Dan 2015 (S.D Oktober 2015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Nusa Tenggara Barat											
29	29	Pemkab Lombok Barat	Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus)	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Provinsi Papua											
30	30	Pemkab Jayapura	Pendapatan Asli Daerah Ta 2014 Dan Semester I 2015 Pada Kabupaten Jayapura	3	2.172,76	3	2.172,76	-	-	-	-	-	-
Jumlah				154	579.232,74	112	576.659,36	17	-	10	-	15	2.573,38
					USD 126,35		USD 126,35						
Jumlah ekuivalen rupiah				154	580.975,74	112	578.402,36	17	-	10	-	15	2.573,38
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				28		24		9		8		11	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				28		24		9		8		11	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													2.594,46

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pelaksanaan Belanja Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Aceh						
1	1	Pemkab Aceh Utara	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	2	2	-	-	-
		Provinsi Sumatera Utara						
2	2	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Prov. Sumatera Utara di Medan	-	-	-	-	-
3	3	Pemkab Batubara	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Batubara di Lima Puluh	-	-	-	-	-
4	4	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal di Panyabungan	-	-	-	-	-
5	5	Pemkab Nias	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Nias di Gunung Sitoli	-	-	-	-	-
6	6	Pemkab Simalungun	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Simalungun di Pematang Raya	-	-	-	-	-
7	7	Pemkot Medan	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Barat						
8	8	Pemkab Agam	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
9	9	Pemkab Pasaman	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
10	10	Pemkab Pesisir Selatan	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
11	11	Pemkab Sijunjung	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
12	12	Pemkab Solok	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
13	13	Pemkab Tanah Datar	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 dan 201	-	-	-	-	-
		Provinsi Jambi						
14	14	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	-	-	-	-	-
15	15	Pemkab Bungo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	-	-	-	-	-
16	16	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	1	1	-	-	-
17	17	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	18	Pemkot Sungai Penuh	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan						
19	19	Pemprov Sumsel	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	5	-	4	-	1
	20		Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi terkait di Palembang	1	-	1	-	-
20	21	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi terkait di Prabumulih	1	-	-	1	-
21	22	Pemkab Lahat	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi terkait di Prabumulih	-	-	-	-	-
22	23	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi terkait di Muara Enim	1	-	1	-	-
23	24	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	1	-	-	-	1
24	25	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi terkait di Indralaya	-	-	-	-	-
25	26	Pemkab Ogan Komering Ulu Timur	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi terkait di Martapura	-	-	-	-	-
26	27	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	3	2	-	-	1
27	28	Pemkot Lubuklinggau	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi terkait di Lubuklinggau	-	-	-	-	-
28	29	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi terkait di Prabumulih	1	-	-	-	1
		Provinsi Bengkulu						
29	30	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	3	1	1	1	-
30	31	Pemkab Bengkulu Utara	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur	-	-	-	-	-
31	32	Pemkab Muko Muko	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Muko Muko dan Instansi Terkait Lainnya di Muko Muko	2	-	1	-	1
32	33	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kota Bengkulu Dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	1	-	-	-	1
		Provinsi Lampung						
33	34	Pemprov Lampung	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Lampung	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	35	Pemkab Lampung Barat	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	-	-	-	-	-
35	36	Pemkab Lampung Selatan	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	1	1	-	-	-
36	37	Pemkab Lampung Tengah	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	4	1	2	1	-
37	38	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	2	-	-	2	-
38	39	Pemkab Lampung Utara	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	2	1	-	-	1
39	40	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	3	2	-	1	-
40	41	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu	3	1	1	-	1
41	42	Pemkab Tanggamus	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus	-	-	-	-	-
42	43	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung	2	1	-	-	1
Provinsi Bangka Belitung								
43	44	Pemprov Kepulauan Babel	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
44	45	Pemkab Bangka	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
45	46	Pemkab Bangka Barat	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
46	47	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
47	48	Pemkab Belitung	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
48	49	Pemkot Pangkalpinang	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait	-	-	-	-	-
Provinsi Kepulauan Riau								
49	50	Pemkab Bintan	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2014 dan 2015 di Bandar Seri Bentan	-	-	-	-	-
50	51	Pemkab Karimun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2014 dan 2015	8	3	-	2	3
51	52	Pemkab Natuna	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2014 dan 2015 di Ranai	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi DKI Jakarta						
52	53	Pemprov DKI Jakarta	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	6	-	1	1	4
		Provinsi Jawa Barat						
53	54	Pemprov Jawa Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	-	-	-	-
54	55	Pembk Bogor	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor	-	-	-	-	-
55	56	Pembk Cirebon	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon	-	-	-	-	-
56	57	Pembk Garut	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Garut	-	-	-	-	-
57	58	Pembk Pangandaran	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran	-	-	-	-	-
58	59	Pemkot Bandung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bandung	-	-	-	-	-
59	60	Pemkot Banjar	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Banjar	2	1	-	-	1
60	61	Pemkot Bogor	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bogor	1	1	-	-	-
61	62	Pemkot Depok	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Depok	-	-	-	-	-
		Provinsi DI Yogyakarta						
62	63	Pemprov DI Yogyakarta	Belanja Non Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	4	1	2	-	1
63	64	Pembk Bantul	Belanja Daerah TA 2015 Kab. Bantul	3	1	-	-	2
64	65	Pemkot Yogyakarta	Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1	1	-	-	-
		Provinsi Jawa Tengah						
65	66	Pemprov Jateng	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang	1	-	-	1	-
66	67	Pembk Karanganyar	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar Di Karanganyar	-	-	-	-	-
67	68	Pembk Klaten	Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten	3	-	-	2	1
68	69	Pembk Pemalang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2015 di Pemalang	1	-	-	-	1
69	70	Pembk Purworejo	Belanja Modal pada Pemerintah Kab Purworejo TA 2015	1	-	-	1	-
70	71	Pembk Tegal	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kab. Tegal TA 2015	1	-	-	1	-
71	72	Pembk Wonosobo	Belanja Modal Pembk Wonosobo TA 2015	1	-	-	1	-
72	73	Pemkot Salatiga	Belanja Modal Pemerintah Kota Salatiga TA 2015	1	-	-	1	-
73	74	Pemkot Semarang	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kota Semarang TA 2015	3	-	-	-	3
74	75	Pemkot Tegal	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kota Tegal TA 2015	10	6	-	1	3
		Provinsi Jawa Timur						
75	76	Pembk Bondowoso	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Bondowoso	-	-	-	-	-
76	77	Pembk Jember	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Jember	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	78	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 di Kediri	1	-	1	-	-
78	79	Pemkab Lumajang	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Lumajang	-	-	-	-	-
79	80	Pemkab Magetan	Belanja Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2015 (s.d. 30 November 2015) di Magetan	-	-	-	-	-
80	81	Pemkab Malang	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 di Malang	1	1	-	-	-
81	82	Pemkab Ngawi	Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2015 (s.d. November 2015) di Ngawi	1	-	-	1	-
82	83	Pemkab Pacitan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) di Pacitan	1	-	-	1	-
		Provinsi Banten						
83	84	Pemprov Banten	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak	3	1	1	-	1
84	85	Pemkab Lebak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak	-	-	-	-	-
85	86	Pemkab Pandeglang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang	2	2	-	-	-
86	87	Pemkab Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang	4	2	-	2	-
87	88	Pemkot Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang	5	1	2	1	1
88	89	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan	2	-	1	1	-
		Provinsi Bali						
89	90	Pemkab Buleleng	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemkab Buleleng	2	2	-	-	-
90	91	Pemkab Gianyar	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar	4	1	-	-	3
91	92	Pemkab Tabanan	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemkab Tabanan	8	2	2	3	1
92	93	Pemkot Denpasar	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar	2	-	-	-	2
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
93	94	Pemprov NTB	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB TA 2015 (s.d. 30 November)	1	-	1	-	-
94	95	Pemkab Bima	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)	-	-	-	-	-
95	96	Pemkab Lombok Tengah	Belanja Daerah Kab. Lombok Tengah TA 2015 (s.d. November)	-	-	-	-	-
96	97	Pemkab Lombok Timur	Belanja Barang dan Jasa, hibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	4	1	3	-	-
97	98	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Barang dan Jasa, Bibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	4	-	4	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	99	Pemkot Bima	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)	-	-	-	-	-
		Provinsi Nusa Tenggara Timur						
99	100	Pemprov NTT	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	5	1	1	1	2
100	101	Pemkab Flores Timur	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur	3	-	1	1	1
101	102	Pemkab Sikka	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sikka	5	2	-	1	2
		Provinsi Kalimantan Barat						
102	103	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2015	-	-	-	-	-
103	104	Pemkab Kayong Utara	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara TA 2015	1	-	-	-	1
104	105	Pemkab Ketapang	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2015	3	-	1	1	1
105	106	Pemkab Melawi	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi TA 2015	1	-	-	-	1
106	107	Pemkot Pontianak	Belanja Daerah Kota Pontianak TA 2015	5	-	2	3	-
		Provinsi Kalimantan Tengah						
107	108	Pemkab Barito Utara	Belanja Daerah Kab.Barito Utara TA 2015	2	1	-	1	-
108	109	Pemkot Palangkaraya	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya TA 2015	1	-	-	-	1
		Provinsi Kalimantan Selatan						
109	110	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Prov.Kalsel	1	-	1	-	-
110	111	Pemkab Banjar	Belanja Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Banjar di Martapura	-	-	-	-	-
111	112	Pemkab Kota Baru	Belanja Daerah TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. KotaBaru di Kotabaru	-	-	-	-	-
112	113	Pemkab Tanah Bumbu	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Tanah Bumbu di BatuLicin	-	-	-	-	-
113	114	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 & 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Tanah Laut di Pelaihari	-	-	-	-	-
114	115	Pemkot Banjarmasin	Belanja Modal Infrastruktur dan Pengadaan Tanah TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Timur						
115	116	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	5	1	1	1	2
116	117	Pemkab Kutai Barat	Belanja Daerah TA 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	7	5	2	-	-
	118		Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	119	Pemkab Kutai Kartanegara	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	6	2	2	1	1
118	120	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	-	-	-	-	-
	121		Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Di Sangatta	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Utara						
119	122	Pemkab Minahasa Tenggara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	-	-	-	-	-
120	123	Pemkab Minahasa Utara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	3	-	-	2	1
121	124	Pemkot Kotamobagu	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kota Kotamobagu	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Barat						
122	125	Pemkab Mamuju Tengah	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di Tobadak	-	-	-	-	-
123	126	Pemkab Mamuju Utara	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di Pasangkayu	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Tengah						
124	127	Pemkab Banggai	Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Di Luwuk	2	-	2	-	-
125	128	Pemkab Banggai Kepulauan	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
126	129	Pemkab Buol	Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Buol Di Buol	1	-	1	-	-
127	130	Pemkab Donggala	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 30 November 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Donggala	2	-	-	-	2
128	131	Pemkab Parigi Moutong	Belanja Daerah Ta 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	1	1	-	-	-
129	132	Pemkab Sigi	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Di Sigi	1	-	1	-	-
130	133	Pemkot Palu	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2014 Dan 2015 Di Kota Palu	3	2	1	-	-
		Provinsi Sulawesi Tenggara						
131	134	Pemprov Sulawesi Tenggara	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
132	135	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kab. Buton di Pasarwajo	-	-	-	-	-
133	136	Pemkab Buton Utara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	137	Pemkab Kolaka	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka	1	-	-	-	1
135	138	Pemkab Konawe Utara	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2014 dan 2015	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Selatan						
136	139	Pemkab Bantaeng	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Banteng di Bantaeng	1	1	-	-	-
137	140	Pemkab Enrekang	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang di Enrekang	2	-	2	-	-
138	141	Pemkab Pinrang	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Pinrang di Pinrang	4	-	1	1	2
139	142	Pemkab Takalar	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattalasang	-	-	-	-	-
140	143	Pemkab Wajo	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Wajo di Sengkang	1	-	-	1	-
141	144	Pemkot Palopo	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo di Palopo	-	-	-	-	-
		Provinsi Gorontalo						
142	145	Pemprov Gorontalo	Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 di Gorontalo	1	-	-	-	1
143	146	Pemkab Bone Bolango	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 di Suwawa	1	-	-	-	1
144	147	Pemkab Gorontalo	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 di Limboto	-	-	-	-	-
145	148	Pemkab Pohuwato	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 di Marisa	-	-	-	-	-
		Provinsi Maluku						
146	149	Pemprov Maluku	Belanja Daerah Provinsi Maluku	-	-	-	-	-
147	150	Pemkab Buru Selatan	Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	5	1	3	1	-
148	151	Pemkab Kepulauan Aru	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	1	-	-	-	1
		Provinsi Maluku Utara						
149	152	Pemkab Halmahera Barat	Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015	9	3	4	-	2
		Provinsi Papua						
150	153	Pemkab Intan Jaya	Belanja Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (s.d. Triwulan III)	7	-	5	-	2
151	154	Pemkab Mamberamo Tengah	Belanja Modal Dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d. Nopember)	3	1	2	-	-
152	155	Pemkab Mappi	Belanja Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2014 Dan 2015	3	2	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	156	Pemkab Nduga	Belanja Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (s.d. Oktober) di Kenyam	1	1	-	-	-
154	157	Pemkab Paniai	Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015	3	1	-	1	1
155	158	Pemkab Pegunungan Bintang	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) di Oksibil	1	-	1	-	-
		Provinsi Papua Barat						
156	159	Pemkab Fak-Fak	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Fak-Fak	1	1	-	-	-
157	160	Pemkab Kaimana	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Kaimana	1	-	-	1	-
158	161	Pemkab Manokwari	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Manokwari	1	1	-	-	-
159	162	Pemkab Maybrat	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Maybrat	-	-	-	-	-
160	163	Pemkab Raja Ampat	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Raja Ampat	-	-	-	-	-
161	164	Pemkab Sorong	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong	-	-	-	-	-
162	165	Pemkab Sorong Selatan	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong Selatan	-	-	-	-	-
163	166	Pemkab Teluk Wondama	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Teluk Wondama	-	-	-	-	-
164	167	Pemkot Sorong	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kota Sorong	-	-	-	-	-
Jumlah				238	67	66	43	62
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				90	43	37	34	42
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				92	43	39	34	42

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pelaksanaan Belanja Daerah (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Aceh											
1	1	Pemkab Aceh Utara	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	16	464,86	4	252,25	3	17,78	4	134,83	5	60,00
		Provinsi Sumatera Utara											
2	2	Pemprov Sumatera Utara	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Prov. Sumatera Utara di Medan	19	6.709,44	4	2.135,68	4	2.008,87	4	172,10	7	2.392,79
3	3	Pemkab Batubara	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Batubara di Lima Puluh	13	1.820,35	4	961,57	3	462,15	3	113,87	3	282,76
4	4	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Mandailing Natal di Panyabungan	6	909,50	2	631,77	-	-	-	-	4	277,73
5	5	Pemkab Nias	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Nias di Gunung Sitoli	15	2.762,95	1	55,05	7	2.354,94	3	260,59	4	92,37
6	6	Pemkab Simalungun	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kab. Simalungun di Pematang Raya	8	1.262,98	1	278,88	2	215,59	1	93,25	4	675,26
7	7	Pemkot Medan	Belanja Modal Serta Belanja Barang dan Jasa TA 2015 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	15	2.841,69	3	99,92	6	1.868,44	2	35,82	4	837,51
		Provinsi Sumatera Barat											
8	8	Pemkab Agam	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2014 dan 2015	10	196,62	3	105,65	2	30,39	3	21,84	2	38,74
9	9	Pemkab Pasaman	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2014 dan 2015	5	554,49	1	183,86	1	71,08	1	21,83	2	277,72
10	10	Pemkab Pesisir Selatan	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014 dan 2015	15	652,86	5	324,17	4	170,12	1	27,64	5	130,93
11	11	Pemkab Sijunjung	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2014 dan 2015	7	579,21	2	70,12	3	293,16	1	215,93	1	-
12	12	Pemkab Solok	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014 dan 2015	8	192,52	1	65,45	3	115,26	2	11,81	2	-
13	13	Pemkab Tanah Datar	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2014 dan 201	7	65,21	2	16,19	3	20,53	1	28,49	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Jambi											
14	14	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	15	4.440,89	2	1.890,28	-	-	-	-	13	2.550,61
15	15	Pemkab Bungo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	6	3.621,77	1	80,15	1	15,68	-	-	4	3.525,94
16	16	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	7	443,83	2	162,07	1	10,46	-	-	4	271,30
17	17	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	11	1.364,50	3	933,85	-	-	-	-	8	430,65
18	18	Pemkot Sungai Penuh	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh	6	819,11	2	177,88	1	5,97	1	60,41	2	574,85
		Provinsi Sumatera Selatan											
19	19	Pemprov Sumsel	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d Semester I TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang	6	20.427,63	-	-	-	-	-	-	6	20.427,63
	20		Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi terkait di Palembang	14	11.301,16	2	540,21	4	9.618,74	1	14,86	7	1.127,35
20	21	Pemkab Banyuasin	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Instansi terkait di Prabumulih	9	1.126,75	1	412,79	1	37,85	-	-	7	676,11
21	22	Pemkab Lahat	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lahat dan Instansi terkait di Prabumulih	7	1.996,21	1	1.252,54	-	-	1	194,03	5	549,64
22	23	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan Instansi terkait di Muara Enim	6	1.993,03	1	1.506,16	1	289,53	-	-	4	197,34
23	24	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	15	1.298,93	1	879,46	2	104,39	-	-	12	315,08
24	25	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Instansi terkait di Indralaya	9	4.854,01	1	101,67	3	1.951,10	1	27,10	4	2.774,14

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	26	Pemkab Ogan Komering Ulu Timur	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Instansi terkait di Martapura	7	2.727,35	1	39,94	-	-	1	111,41	5	2.576,00
26	27	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Belanja Daerah dan Manajemen Aset Tetap TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	8	3.939,30	1	2.334,83	1	613,15	1	27,88	5	963,44
27	28	Pemkot Lubuklinggau	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Instansi terkait di Lubuklinggau	7	6.519,23	2	377,05	1	93,67	1	2.459,09	3	3.589,42
28	29	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kota Prabumulih dan Instansi terkait di Prabumulih	7	9.208,22	1	1.175,87	1	6.206,83	1	15,36	4	1.810,16
		Provinsi Bengkulu											
29	30	Pemprov Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	13	11.481,40	2	2.841,90	2	221,28	3	113,77	6	8.304,45
30	31	Pemkab Bengkulu Utara	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur	12	4.265,52	2	1.784,80	1	149,73	1	108,21	8	2.222,78
31	32	Pemkab Muko Muko	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Muko Muko dan Instansi Terkait Lainnya di Muko Muko	8	3.620,60	1	1.988,35	-	-	-	-	7	1.632,25
32	33	Pemkot Bengkulu	Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2015 Pada Pemerintah Kota Bengkulu Dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu	13	4.509,47	2	1.432,83	-	-	-	-	11	3.076,64
		Provinsi Lampung											
33	34	Pemprov Lampung	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Lampung	11	6.439,26	-	-	1	164,22	-	-	10	6.275,04
34	35	Pemkab Lampung Barat	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	10	2.845,03	1	95,97	1	329,78	1	4,08	7	2.415,20
35	36	Pemkab Lampung Selatan	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	8	4.616,16	1	117,18	2	3.957,42	-	-	5	541,56
36	37	Pemkab Lampung Tengah	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	15	12.839,89	-	-	2	1.689,99	1	17,86	12	11.132,04
37	38	Pemkab Lampung Timur	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	9	9.184,28	1	115,44	-	-	-	-	8	9.068,84
38	39	Pemkab Lampung Utara	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	7	3.143,39	-	-	1	166,39	-	-	6	2.977,00
39	40	Pemkab Pesisir Barat	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	12	2.507,78	1	1.333,27	1	150,57	1	23,20	9	1.000,74

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	41	Pemkab Pringsewu	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu	8	2.495,99	-	-	1	976,39	-	-	7	1.519,60
41	42	Pemkab Tanggamus	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus	8	1.054,86	-	-	1	430,70	1	3,77	6	620,39
42	43	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Daerah TA 2015 Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung	8	1.729,08	-	-	2	1.194,21	-	-	6	534,87
Provinsi Bangka Belitung													
43	44	Pemprov Kepulauan Babel	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Instansi Terkait	22	12.205,54	3	662,99	3	169,62	-	-	16	11.372,93
44	45	Pemkab Bangka	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka dan Instansi Terkait	8	368,62	2	211,93	2	101,76	-	-	4	54,93
45	46	Pemkab Bangka Barat	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Instansi Terkait	7	246,97	2	110,78	2	70,11	1	62,45	2	3,63
46	47	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan Instansi Terkait	13	596,73	5	247,08	3	176,86	2	128,83	3	43,96
47	48	Pemkab Belitung	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Belitung dan Instansi Terkait	8	1.257,85	2	521,15	2	90,93	1	106,31	3	539,46
48	49	Pemkot Pangkalpinang	Belanja Modal dan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Instansi Terkait	16	1.181,41	5	318,44	5	594,35	3	80,16	3	188,46
Provinsi Kepulauan Riau													
49	50	Pemkab Bintan	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Bintan TA 2014 dan 2015 di Bandar Seri Bentan	7	787,54	2	287,32	2	345,54	-	-	3	154,68
50	51	Pemkab Karimun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Karimun TA 2014 dan 2015	8	3.514,97	-	-	-	-	-	-	8	3.514,97
51	52	Pemkab Natuna	Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Kabupaten Natuna TA 2014 dan 2015 di Ranai	13	1.693,06	4	222,93	6	1.419,33	-	-	3	50,80

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi DKI Jakarta											
52	53	Pemprov DKI Jakarta	Pengelolaan Kas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	16	4.249,10	-	-	-	-	-	-	16	4.249,10
		Provinsi Jawa Barat											
53	54	Pemprov Jawa Barat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat	25	7.565,14	5	1.481,75	2	2.596,33	5	1.065,88	13	2.421,18
54	55	Pemkab Bogor	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor	14	2.782,33	1	331,27	4	1.084,54	3	512,26	6	854,26
55	56	Pemkab Cirebon	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon	12	1.525,03	4	404,80	3	284,66	2	27,59	3	807,98
56	57	Pemkab Garut	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Garut	13	2.138,01	5	580,26	2	513,82	2	145,46	4	898,47
57	58	Pemkab Pangandaran	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran	11	1.120,23	3	210,19	2	527,83	1	18,99	5	363,22
58	59	Pemkot Bandung	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bandung	14	8.379,30	2	433,87	4	6.357,88	1	124,25	7	1.463,30
59	60	Pemkot Banjar	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Banjar	5	340,46	1	113,69	1	66,66	-	-	3	160,11
60	61	Pemkot Bogor	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Bogor	9	1.038,09	2	174,88	2	539,82	2	44,09	3	279,30
61	62	Pemkot Depok	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kota Depok	7	1.910,03	1	234,17	3	1.322,61	-	-	3	353,25
		Provinsi DI Yogyakarta											
62	63	Pemprov DI Yogyakarta	Belanja Non Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	4	424,62	-	-	-	-	-	-	4	424,62
63	64	Pemkab Bantul	Belanja Daerah TA 2015 Kab. Bantul	4	2.802,27	2	2.193,42	-	-	-	-	2	608,85
64	65	Pemkot Yogyakarta	Belanja Daerah Kota Yogyakarta	10	2.310,70	3	2.211,08	-	-	2	59,41	5	40,21
		Provinsi Jawa Tengah											
65	66	Pemprov Jateng	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2015 di Semarang	6	1.984,57	1	1.457,79	2	446,07	1	80,71	2	-
66	67	Pemkab Karanganyar	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Karanganyar Di Karanganyar	25	1.764,63	7	476,48	10	1.028,48	6	259,67	2	-
67	68	Pemkab Klaten	Belanja Modal TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten	7	975,95	1	331,48	2	566,83	1	4,68	3	72,96
68	69	Pemkab Pemalang	Belanja Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2015 di Pemalang	10	1.422,54	1	198,51	2	1.083,28	1	19,68	6	121,07
69	70	Pemkab Purworejo	Belanja Modal pada Pemerintah Kab Purworejo TA 2015	6	1.108,69	1	874,54	1	44,88	-	-	4	189,27
70	71	Pemkab Tegal	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kab. Tegal TA 2015	9	2.120,32	1	145,11	3	1.927,02	1	37,04	4	11,15

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	72	Pemkab Wonosobo	Belanja Modal Pemkab Wonosobo TA 2015	6	701,39	1	111,43	1	240,32	1	250,34	3	99,30
72	73	Pemkot Salatiga	Belanja Modal Pemerintah Kota Salatiga TA 2015	5	189,31	1	63,55	1	96,29	1	29,47	2	-
73	74	Pemkot Semarang	Belanja Infrastruktur pada Pemerintah Kota Semarang TA 2015	6	1.401,97	1	539,84	-	-	1	148,59	4	713,54
74	75	Pemkot Tegal	Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kota Tegal TA 2015	26	1.758,14	3	373,34	6	1.242,35	-	-	17	142,45
Provinsi Jawa Timur													
75	76	Pemkab Bondowoso	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Bondowoso	11	2.216,99	3	1.119,57	2	302,60	2	83,19	4	711,63
76	77	Pemkab Jember	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Jember	4	736,42	4	736,42	-	-	-	-	-	-
77	78	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 di Kediri	5	7.930,26	-	-	3	7.863,08	1	2,21	1	64,97
78	79	Pemkab Lumajang	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 di Lumajang	7	2.239,68	1	776,38	3	1.075,73	1	50,55	2	337,02
79	80	Pemkab Magetan	Belanja Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2015 (s.d. 30 November 2015) di Magetan	5	1.396,25	2	847,30	1	495,54	1	53,41	1	-
80	81	Pemkab Malang	Belanja Daerah Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2015 di Malang	9	5.789,85	4	4.863,43	3	764,81	-	-	2	161,61
81	82	Pemkab Ngawi	Belanja Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2015 (s.d. November 2015) di Ngawi	4	2.363,48	3	1.713,20	1	650,28	-	-	-	-
82	83	Pemkab Pacitan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jembatan Tahun Anggaran 2015 (s.d. 31 Oktober 2015) di Pacitan	4	1.730,18	2	1.122,45	2	607,73	-	-	-	-
Provinsi Banten													
83	84	Pemprov Banten	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak	17	9.295,45	1	221,58	1	489,91	2	90,94	13	8.493,02
84	85	Pemkab Lebak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebak	9	3.589,02	4	3.370,91	-	-	-	-	5	218,11
85	86	Pemkab Pandeglang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang	15	910,03	1	104,61	-	-	1	25,36	13	780,06
86	87	Pemkab Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang	5	1.035,92	2	263,71	1	698,82	1	58,48	1	14,91
87	88	Pemkot Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang	6	603,22	2	157,92	-	-	-	-	4	445,30

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	89	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan	6	1.146,63	3	489,69	-	-	-	-	3	656,94
		Provinsi Bali											
89	90	Pemkab Buleleng	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemkab Buleleng	5	263,34	-	-	-	-	-	-	5	263,34
90	91	Pemkab Gianyar	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar	9	569,67	1	60,31	1	76,23	1	12,50	6	420,63
91	92	Pemkab Tabanan	Belanja Bantuan Keuangan Desa Pemkab Tabanan	6	86,67	-	-	-	-	-	-	6	86,67
92	93	Pemkot Denpasar	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Oktober) pada Pemerintah Kota Denpasar di Denpasar	10	2.547,47	2	1.061,66	-	-	-	-	8	1.485,81
		Provinsi Nusa Tenggara Barat											
93	94	Pemprov NTB	Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB TA 2015 (s.d. 30 November)	7	573,17	1	247,76	1	53,73	1	105,95	4	165,73
94	95	Pemkab Bima	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)	9	1.475,92	1	248,66	-	-	1	23,33	7	1.203,93
95	96	Pemkab Lombok Tengah	Belanja Daerah Kab. Lombok Tengah TA 2015 (s.d. November)	5	200,30	1	130,05	-	-	1	50,90	3	19,35
96	97	Pemkab Lombok Timur	Belanja Barang dan Jasa, hibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	7	579,28	-	-	-	-	-	-	7	579,28
97	98	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Barang dan Jasa, Bibah dan Bantuan Sosial TA 2014 dan 2015 (s.d. Agustus) pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	11	990,20	1	65,07	-	-	-	-	10	925,13
98	99	Pemkot Bima	Belanja Daerah Kota Bima TA 2015 (s.d. November)	9	485,28	1	28,17	2	57,95	1	12,62	5	386,54
		Provinsi Nusa Tenggara Timur											
99	100	Pemprov NTT	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang	10	770,55	1	361,01	-	-	1	115,33	8	294,21
100	101	Pemkab Flores Timur	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur	9	570,76	2	170,59	1	84,21	1	182,24	5	133,72
101	102	Pemkab Sikka	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Tahun 2014 dan Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Sikka	5	111,54	2	40,07	1	28,08	1	28,97	1	14,42
		Provinsi Kalimantan Barat											
102	103	Pemkab Bengkayang	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang TA 2015	7	282,93	1	8,78	-	-	-	-	6	274,15
103	104	Pemkab Kayong Utara	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara TA 2015	8	247,68	1	5,04	1	27,96	-	-	6	214,68
104	105	Pemkab Ketapang	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang TA 2015	11	2.883,38	1	331,33	1	16,91	1	42,58	8	2.492,56

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	106	Pemkab Melawi	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Melawi TA 2015	7	598,78	2	278,69	1	30,95	-	-	4	289,14
106	107	Pemkot Pontianak	Belanja Daerah Kota Pontianak TA 2015	6	1.742,57	1	407,26	1	496,55	1	42,49	3	796,27
		Provinsi Kalimantan Tengah											
107	108	Pemkab Barito Utara	Belanja Daerah Kab.Barito Utara TA 2015	13	1.475,21	1	185,84	7	846,41	1	35,74	4	407,22
108	109	Pemkot Palangkaraya	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangkaraya TA 2015	8	662,18	1	30,44	3	321,05	1	72,96	3	237,73
		Provinsi Kalimantan Selatan											
109	110	Pemprov Kalimantan Selatan	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Prov.Kalsel	11	5.933,59	4	2.795,70	6	3.137,89	-	-	1	-
110	111	Pemkab Banjar	Belanja Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Banjar di Martapura	4	2.321,83	1	1.873,30	1	415,83	1	32,70	1	-
111	112	Pemkab Kota Baru	Belanja Daerah TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. KotaBaru di Kotabaru	8	3.541,13	1	1.769,18	2	493,36	1	934,80	4	343,79
112	113	Pemkab Tanah Bumbu	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Tanah Bumbu di BatuLicin	2	2.377,30	1	2.283,70	-	-	1	93,60	-	-
113	114	Pemkab Tanah Laut	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 & 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kab. Tanah Laut di Pelayhari	3	2.790,11	1	2.527,74	1	195,27	-	-	1	67,10
114	115	Pemkot Banjarmasin	Belanja Modal Infrastruktur dan Pengadaan Tanah TA 2014 dan TA 2015 (s.d Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	9	3.563,42	2	1.254,32	1	343,96	1	1.276,08	5	689,06
		Provinsi Kalimantan Timur											
115	116	Pemprov Kalimantan Timur	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	50	893.720,79	7	7.089,36	3	604,68	11	821.692,34	29	64.334,41
116	117	Pemkab Kutai Barat	Belanja Daerah TA 2011, 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	23	29.115,58	1	324,91	6	18.028,52	1	364,31	15	10.397,84
	118		Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	10	2.472,59	3	350,93	3	1.041,86	1	107,32	3	972,48
117	119	Pemkab Kutai Kartanegara	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	25	30.959,88	5	9.030,38	2	11.974,57	4	1.091,42	14	8.863,51
118	120	Pemkab Kutai Timur	Belanja Daerah TA 2012 dan 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	12	12.386,48	-	-	1	9.537,68	-	-	11	2.848,80
	121		Belanja Infrastruktur Daerah TA 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Di Sangatta	9	3.111,51	3	1.306,76	4	1.753,77	1	41,75	1	9,23

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Sulawesi Utara											
119	122	Pemkab Minahasa Tenggara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	5	3.057,75	2	2.623,13	2	434,62	-	-	1	-
120	123	Pemkab Minahasa Utara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	8	1.143,87	1	877,79	1	97,28	2	67,12	4	101,68
121	124	Pemkot Kotamobagu	Belanja Modal Infrastruktur TA 2015 pada Pemerintah Kota Kotamobagu	5	923,05	1	244,87	2	248,97	1	428,05	1	1,16
		Provinsi Sulawesi Barat											
122	125	Pemkab Mamuju Tengah	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di Tobadak	10	505,72	3	128,67	-	-	2	19,65	5	357,40
123	126	Pemkab Mamuju Utara	Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 di Pasangkayu	5	133,25	3	67,39	-	-	1	41,62	1	24,24
		Provinsi Sulawesi Tengah											
124	127	Pemkab Banggai	Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Di Luwuk	5	76,51	-	-	-	-	-	-	5	76,51
125	128	Pemkab Banggai Kepulauan	Belanja Modal Infrastruktur Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	4	856,29	1	97,99	1	645,87	1	32,26	1	80,17
126	129	Pemkab Buol	Belanja Daerah Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 31 Oktober 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Buol Di Buol	8	1.742,89	1	973,58	2	188,87	1	77,99	4	502,45
127	130	Pemkab Donggala	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D. 30 November 2015) Pada Pemerintah Kabupaten Donggala	9	2.237,74	2	526,08	-	-	-	-	7	1.711,66
128	131	Pemkab Parigi Moutong	Belanja Daerah Ta 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	19	2.886,66	3	777,09	2	269,72	-	-	14	1.839,85
129	132	Pemkab Sigi	Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (S.D 30 September 2015) Di Sigi	6	2.328,31	2	549,69	-	-	-	-	4	1.778,62
130	133	Pemkot Palu	Belanja Daerah Pemerintah Kota Palu Tahun 2014 Dan 2015 Di Kota Palu	6	465,51	1	270,36	-	-	-	-	5	195,15
		Provinsi Sulawesi Tenggara											
131	134	Pemprov Sulawesi Tenggara	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	14	4.676,06	1	1.929,31	3	435,30	1	1.454,25	9	857,20
132	135	Pemkab Buton	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kab. Buton di Pasarwajo	4	338,14	1	103,65	1	13,45	1	221,04	1	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	136	Pemkab Buton Utara	Belanja Modal Infrastruktur TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara	3	2.484,80	1	1.783,21	1	476,60	1	224,99	-	-
134	137	Pemkab Kolaka	Belanja Modal TA 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka	11	1.012,28	1	71,34	1	325,98	2	90,54	7	524,42
135	138	Pemkab Konawe Utara	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara TA 2014 dan 2015	4	749,74	1	305,19	2	85,04	1	359,51	-	-
Provinsi Sulawesi Selatan													
136	139	Pemkab Bantaeng	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Banteng di Bantaeng	6	4.029,25	1	564,91	2	3.296,08	1	17,22	2	151,04
137	140	Pemkab Enrekang	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Enrekang di Enrekang	6	226,78	1	116,97	-	-	-	-	5	109,81
138	141	Pemkab Pinrang	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Pinrang di Pinrang	9	1.287,49	2	650,41	1	5,38	1	37,64	5	594,06
139	142	Pemkab Takalar	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Takalar di Pattalasang	7	852,27	1	500,59	-	-	-	-	6	351,68
140	143	Pemkab Wajo	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kab Wajo di Sengkang	13	2.616,72	3	823,39	2	328,54	2	131,60	6	1.333,19
141	144	Pemkot Palopo	Belanja Barang/ Jasa dan Modal TA 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kota Palopo di Palopo	10	833,59	1	199,13	1	87,74	2	135,69	6	411,03
Provinsi Gorontalo													
142	145	Pemprov Gorontalo	Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2015 di Gorontalo	14	1.806,92	6	603,42	5	674,35	1	190,79	2	338,36
143	146	Pemkab Bone Bolango	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2015 di Suwawa	17	997,11	8	344,28	4	538,70	4	63,53	1	50,60
144	147	Pemkab Gorontalo	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2015 di Limboto	11	746,63	3	283,21	4	238,51	2	3,77	2	221,14
145	148	Pemkab Pohuwato	Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015 di Marisa	16	353,17	7	127,04	7	197,10	2	29,03	-	-
Provinsi Maluku													
146	149	Pemprov Maluku	Belanja Daerah Provinsi Maluku	14	1.341,72	1	393,71	1	216,61	1	138,43	11	592,97
147	150	Pemkab Buru Selatan	Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan	15	3.359,93	1	159,65	-	-	-	-	14	3.200,28

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidapatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	151	Pemkab Kepulauan Aru	Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru	8	2.280,67	2	887,01	1	630,67	1	729,74	4	33,25
		Provinsi Maluku Utara											
149	152	Pemkab Halmahera Barat	Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015	9	537,06	-	-	1	45,11	1	20,21	7	471,74
		Provinsi Papua											
150	153	Pemkab Intan Jaya	Belanja Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (s.d. Triwulan III)	9	1.771,96	1	484,09	1	628,20	1	72,93	6	586,74
151	154	Pemkab Mamberamo Tengah	Belanja Modal Dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d. Nopember)	25	16.394,45	10	11.120,58	6	3.926,92	4	947,87	5	399,08
152	155	Pemkab Mappi	Belanja Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2014 Dan 2015	11	7.188,22	2	3.112,84	1	77,69	1	149,81	7	3.847,88
153	156	Pemkab Nduga	Belanja Pemerintah Kabupaten Nduga Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (s.d. Oktober) di Kenyam	18	9.419,12	8	3.317,90	5	4.582,34	1	131,81	4	1.387,07
154	157	Pemkab Paniai	Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015	12	1.920,58	1	945,95	1	43,26	2	192,63	8	738,74
155	158	Pemkab Pegunungan Bintang	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) di Oksibil	11	3.127,61	1	1.864,41	2	174,25	1	89,90	7	999,05
		Provinsi Papua Barat											
156	159	Pemkab Fak-Fak	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Fak-Fak	2	1.281,63	-	-	1	1.281,63	-	-	1	-
157	160	Pemkab Kaimana	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Kaimana	7	1.730,96	1	138,17	3	1.538,45	3	54,34	-	-
158	161	Pemkab Manokwari	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Manokwari	5	606,14	1	160,05	2	442,92	1	3,17	1	-
159	162	Pemkab Maybrat	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Maybrat	2	2.526,55	-	-	2	2.526,55	-	-	-	-
160	163	Pemkab Raja Ampat	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Raja Ampat	6	465,94	2	162,00	3	273,86	1	30,08	-	-
161	164	Pemkab Sorong	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong	5	1.016,68	1	682,54	2	81,99	1	138,41	1	113,74
162	165	Pemkab Sorong Selatan	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Sorong Selatan	3	115,91	1	42,39	2	73,52	-	-	-	-
163	166	Pemkab Teluk Wondama	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kab Teluk Wondama	6	556,10	-	-	2	91,15	2	464,95	2	-
164	167	Pemkot Sorong	Belanja Infrastruktur TA 2014 Kota Sorong	2	479,79	-	-	2	479,79	-	-	-	-
Jumlah				1.618	1.383.576,81	311	131.347,28	298	147.163,46	173	841.039,53	836	264.026,54
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				164		145		126		106		152	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				167		146		128		107		155	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													947.172,13

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Manajemen Aset Daerah**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Sumatera Barat						
1	1	Pemkab Lima Puluh Kota	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Di Sarilamak	14	3	2	3	6
2	2	Pemkab Solok Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro	11	4	2	3	2
3	3	Pemkot Payakumbuh	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh di Payakumbuh	9	-	2	1	6
4	4	Pemkot Sawahlunto	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Sawahlunto	18	11	3	1	3
		Provinsi Riau						
5	5	Pemkab Bengkalis	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis	5	5	-	-	-
6	6	Pemkab Indragiri Hilir	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	24	10	-	2	12
		Provinsi Kepulauan Riau						
7	7	Pemkab Kepulauan Anambas	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2014 dan 2015 (Semester 1) di Tarempa	9	1	1	3	4
8	8	Pemkab Lingga	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lingga TA 2014 DAN 2015 (Semester I) Di Daik	7	3	-	2	2
9	9	Pemkab Natuna	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 dan 2015 (Semester I) di Ranai	7	2	-	3	2
		Provinsi Jambi						
10	10	Pemkab Merangin	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Merangin Di Bangko	3	2	-	-	1
		Provinsi Sumatera Selatan						
11	11	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah dan Manajemen Aset TA 2015 pada Pemkab. Musi Rawas Utara	1	1	-	-	-
12	12	Pemkab Penukal Abab Lematang ilir	Belanja Daerah Dan Manajemen Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Talang Ubi	1	-	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
13	13	Pemkot Pangkalpinang	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran (TA) 2014 Dan Semester I Ta 2015 Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Pangkalpinang	5	-	1	-	4
		Provinsi Jawa Tengah						
14	14	Pemkab Brebes	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 Di Brebes	2	1	-	-	1
15	15	Pemkab Kebumen	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 di Kebumen	2	1	-	-	1
16	16	Pemkab Pati	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 Di Pati	5	1	1	-	3
17	17	Pemkab Sukoharjo	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015	2	1	1	-	-
		Provinsi Jawa Timur						
18	18	Pemprov Jawa Timur	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	8	5	-	-	3
		Provinsi Kalimantan Selatan						
19	19	Pemkab Hulu Sungai Utara	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-
		Provinsi Bali						
20	20	Pemkab Bangli	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (S.D TRIWULAN III) Pada Pemerintah Kabupaten Bangli Di Bangli	10	3	-	3	4
21	21	Pemkab Karangasem	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (S.D TRIWULAN III) Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Amlapura	11	2	2	1	6
22	22	Pemkab Klungkung	Manajemen Aset Tetap Tahun 2014 s.d. 2015 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura	8	4	2	-	2
		Provinsi Sulawesi Barat						
23	23	Pemkab Mamasa	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Mamasa Di Mamasa	10	5	-	1	4
		Provinsi Sulawesi Tengah						
24	24	Pemkab Banggai Laut	Manajemen Aset Pemekaran Untuk Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Di Banggai Dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	SOP belum disusun	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	Pemkab Morowali Utara	Manajemen Aset Pemekaran Untuk Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Di Kolonodale Dan Pemerintah Kabupaten Morowali Di Bungku	9	-	2	3	4
		Provinsi Sulawesi Tenggara						
26	26	Pemkab Buton	Manajemen Aset Kabupaten Buton TA 2014 dan Semester I 2015	8	4	-	-	4
27	27	Pemkab Kolaka	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kolaka di Kolaka	4	2	-	-	2
28	28	Pemkab Konawe Selatan	Majemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	7	4	1	-	2
29	29	Pemkot Baubau	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kota Baubau	8	3	3	1	1
		Provinsi Papua						
30	30	Pemkab Supiori	Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Supiori Di Sorendiweri	8	-	4	-	4
Jumlah				216	78	27	27	84
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				22	20	9	16	18
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				22	20	9	16	18

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Manajemen Aset Daerah (Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidaka- patuhan		Aset Dikuasai Pihak Lain		Aset Tidak Diketa- hui Keberadaannya		Penyimpang- an peraturan bidang pengelo- laan pereng- kapan atau BMD	Lain-lain Per- masalahan Ketidakpatuhan terhadap Pera- turan Perundang- undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasa- lahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Sumatera Barat										
1	1	Pemkab Lima Puluh Kota	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Di Sarilamak	11	270,21	1	88,43	2	156,52	6	2	25,26
2	2	Pemkab Solok Selatan	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Seme-ster I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro	9	5.070,23	1	1.138,47	1	3.931,76	5	2	-
3	3	Pemkot Payakumbuh	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 Pemerintah Kota Payakumbuh di Payakumbuh	6	3,49	-	-	-	-	4	2	3,49
4	4	Pemkot Sawahlunto	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kota Sawahlunto	12	-	-	-	-	-	9	3	-
		Provinsi Riau										
5	5	Pemkab Bengkalis	Manajemen Aset Tahun Ang-garan 2014 dan 2015 (Semes-ter I) Pada Pemerintah Kabupa-ten Bengkalis di Bengkalis	19	5.734,22	1	2.797,87	1	2.446,35	14	3	490,00
6	6	Pemkab Indragiri Hilir	Manajemen Aset TA 2014 dan 2015 (Semester I) pada Pemer-intah Kabupaten Indragiri Hilir	22	41.554,79	2	2.018,47	2	22.900,73	7	11	16.635,59
		Provinsi Kepulauan Riau										
7	7	Pemkab Kepulauan Anambas	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Ka-bupaten Kepulauan Anambas TA 2014 dan 2015 (Semester 1) di Tarempa	12	121,71	1	-	-	-	9	2	121,71
8	8	Pemkab Lingga	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupa-ten Lingga TA 2014 DAN 2015 (Semester I) Di Daik	5	-	-	-	-	-	4	1	-
9	9	Pemkab Natuna	Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran (TA) 2014 dan 2015 (Semester I) di Ranai	8	-	-	-	-	-	6	2	-
		Provinsi Jambi										
10	10	Pemkab Merangin	Pengelolaan Aset Tahun Ang-garan 2014 Dan 2015 Pada Pem-erintah Kabupaten Merangin Di Bangko	9	93,23	2	-	-	-	4	3	93,23

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Aset Dikuasai Pihak Lain		Aset Tidak Diketahui Keberadaannya		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perengkapan atau BMD	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Provinsi Sumatera Selatan										
11	11	Pemkab Musi Rawas Utara	Belanja Daerah dan Manajemen Aset TA 2015 pada Pemkab. Musi Rawas Utara	5	-	-	-	-	-	3	2	-
12	12	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Belanja Daerah Dan Manajemen Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 Pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Talang Ubi	3	-	-	-	-	-	3	-	-
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung										
13	13	Pemkot Pangkalpinang	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran (TA) 2014 Dan Semester I Ta 2015 Pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Pangkalpinang	12	1.523,47	1	1.523,47	-	-	8	3	-
		Provinsi Jawa Tengah										
14	14	Pemkab Brebes	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015 Di Brebes	8	-	-	-	-	-	7	1	-
15	15	Pemkab Kebumen	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 di Kebumen	4	-	-	-	-	-	3	1	-
16	16	Pemkab Pati	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2015 Di Pati	9	3,20	-	-	-	-	7	2	3,20
17	17	Pemkab Sukoharjo	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015	9	-	-	-	-	-	8	1	-
		Provinsi Jawa Timur										
18	18	Pemprov Jawa Timur	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	10	268,67	1	256,34	-	-	5	4	12,33
		Provinsi Kalimantan Selatan										
19	19	Pemkab Hulu Sungai Utara	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 Dan 2015 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	8	-	-	-	-	-	7	1	-
		Provinsi Bali										
20	20	Pemkab Bangli	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (S.D. TRIWULAN III) Pada Pemerintah Kabupaten Bangli Di Bangli	7	2.715,27	1	195,92	1	2.519,35	4	1	-
21	21	Pemkab Karangasem	Manajemen Aset Tetap Tahun 2015 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Di Amlapura	8	26.285,61	-	-	1	21.164,72	5	2	5.120,89

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpa- tuhan		Aset Dikuasai Pihak Lain		Aset Tidak Diketa- hui Keberadaannya		Penyimpang- an peraturan bidang pengelo- laan pengelo- laan perngelo- laan atau BMD	Lain-lain Per- masalahan Ketidakpatuhan terhadap Pera- turan Perundang- undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			Jml Permasa- lahan	Permasalahan
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Pemkab Klungkung	Manajemen Aset Tetap Tahun 2014 s.d. 2015 (Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Klungkung di Semarapura	8	5.480,11	-	-	1	273,37	4	3	5.206,74
		Provinsi Sulawesi Barat										
23	23	Pemkab Mamasa	Manajemen Aset Tahun Ang- garan 2014 Dan 2015 Pada Peme- rintah Kabupaten Mamasa Di Mamasa	11	10.862,77	2	5.896,88	1	4.965,89	5	3	-
		Provinsi Sulawesi Tengah										
24	24	Pemkab Banggai Laut	Manajemen Aset Pemekaran Untuk Pembentukan Kabupa- ten Banggai Laut Pada Peme- rintah Kabupaten Banggai Laut Di Banggai Dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Di Salakan	11	1.729,73	2	1.629,84	-	-	5	4	99,89
25	25	Pemkab Morowali Utara	Manajemen Aset Pemekaran Untuk Pembentukan Ka- bupaten Morowali Utara Pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Di Kolonodale Dan Pemerintah Kabupaten Morowali Di Bungku	4	-	-	-	-	-	2	2	-
		Provinsi Sulawesi Tenggara										
26	26	Pemkab Buton	Manajemen Aset Kabupaten Buton TA 2014 dan Semester I 2015	5	3.545,23	1	847,51	1	2.697,72	2	1	-
27	27	Pemkab Kolaka	Manajemen Aset Tahun Ang- garan 2014 dan 2015 pada Peme- rintah Kabupaten Kolaka di Kolaka	9	32.665,40	1	-	1	32.497,84	4	3	167,56
28	28	Pemkab Konawe Selatan	Majemen Aset Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	9	32.427,02	1	1.380,12	1	30.795,66	3	4	251,24
29	29	Pemkot Baubau	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2014 Dan Semester I 2015 Pada Pemerintah Kota Baubau	10	49.478,28	-	-	1	49.478,28	8	1	-
		Provinsi Papua										
30	30	Pemkab Supiori	Manajemen Aset Pada Peme- rintah Kabupaten Supiori Di Sorendiweri	5	-	-	-	-	-	4	1	-
Jumlah				268	219.832,64	18	17.773,32	14	173.828,19	165	71	28.231,13
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				30		14		12		30	29	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				30		14		12		30	29	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan												

**Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi Sumatera Selatan						
1	1	RSUD Palembang Bari	Operasional RSUD Palembang Bari TB 2014 s.d Semester I TB 2015 di Kota Palembang	4	-	1	1	2
		Provinsi Kepulauan Riau						
2	2	RSUD Tanjungpinang	Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Agustus 2015) di Tanjungpinang	9	2	1	-	6
		Provinsi DKI Jakarta						
3	3	RSUD Pasar Rebo	Kegiatan Operasional Blud Rsud Pasar Rebo Di Jakarta	5	2	-	1	2
	4	RSUD Cengkareng	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Cengkareng TA 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Di Jakarta	6	3	3	-	-
		Provinsi Jawa Tengah						
4	5	RSUD R Soeprapto	Operasional RSUD DR. R.Soeprapto Cepu TA 2015(s.d Agustus 2015) pada Pemkab Blora	8	3	-	1	4
5	6	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Operasional RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen Tahun Anggaran 2015 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Di Sragen	7	2	-	1	4
		Provinsi Sulawesi Barat						
6	7	RSUD Polewali	Pendapatan dan Belanja RSUD Polewali Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	6	1	2	-	3
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
7	8	RSUD Kab Dompu	Operasional RSUD Kab. Dompu TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015)	9	-	1	1	7
Jumlah				54	13	8	5	28
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				7	5	5	5	7
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8	6	5	5	7

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (Nilai dalam Rp Juta)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Pemborosan atau kemahalan harga		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Provinsi Sumatera Selatan											
1	1	RSUD Palembang Bari	Operasional RSUD Palembang Bari TB 2014 s.d Semester I TB 2015 di Kota Palembang	9	522,51	1	6,45	-	-	1	383,13	7	132,93
		Provinsi Kepulauan Riau											
2	2	RSUD Tanjungpinang	Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang TA 2014 dan 2015 (Agustus 2015) di Tanjungpinang	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Provinsi DKI Jakarta											
3	3	RSUD Pasar Rebo	Kegiatan Operasional Blud Rsd Pasar Rebo Di Jakarta	6	1.523,22	2	359,57	1	983,02	-	-	3	180,63
	4	RSUD Cengkareng	Kegiatan Operasional BLUD RSUD Cengkareng TA 2014 Dan 2015 Pada Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Di Jakarta	7	4.124,95	1	85,00	3	3.782,90	-	-	3	257,05
		Provinsi Jawa Tengah											
4	5	RSUD R Soeprapto	Operasional RSUD DR. R.Soeprapto Cepu TA 2015(s.d Agustus 2015) pada Pemkab Blora	11	183,03	1	69,46	-	-	-	-	10	113,57
5	6	RSUD dr. Soehadi Prijonegoro	Operasional RSUD dr. SOEHADI PRIJONEGORO Sragen Tahun Anggaran 2015 (S.D. TRIWULAN III) Pada Pemerintah Kabupaten Sragen Di Sragen	9	195,13	1	165,82	-	-	-	-	8	29,31
		Provinsi Sulawesi Barat											
6	7	RSUD Polewali	Pendapatan dan Belanja RSUD Polewali Tahun Anggaran 2014 dan 2015 pada Pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar	5	58,22	-	-	-	-	1	-	4	58,22
		Provinsi Nusa Tenggara Barat											
7	8	RSUD Kab Dompu	Operasional RSUD Kab. Dompu TA 2014 dan 2015 (s.d. Mei 2015)	8	128,97	1	1,50	-	-	-	-	7	127,47
Jumlah				56	6.736,03	7	687,80	4	4.765,92	2	383,13	43	899,18
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				7		5		1		2		7	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		6		2		2		8	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				611,08									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	3	4	5	6	7
		Provinsi Sumatera Barat						
1	1	PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 pada PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya di Padang					
			a. PT Andalas Tuah Sakato	6	2	1	-	3
			b. PT Grafika Jaya Sumbar	13	3	-	-	10
			c. PT Dinamika Sumbar Jaya	11	2	2	-	7
2	2	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Operasional PT Balairung Citrajaya Sumbar Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 di Jakarta	12	4	4	-	4
		Provinsi Sumatera Selatan						
3	3	PD Pasar Palembang Jaya	Operasional PD Pasar Palembang Jaya TB 2014 s.d Semester I TB 2015 di Kota Palembang	18	3	5	2	8
		Provinsi Lampung						
4	4	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	8	1	1	-	6
5	5	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	2	-	-	1	1
6	6	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	6	-	1	2	3
7	7	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	5	-	1	1	3
8	8	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	10	2	1	5	2
9	9	PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung	Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	5	1	2	2	-
		Provinsi DKI Jakarta						
10	10	BP THR Lokasari	Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Aset Pada Bp Thr Lokasari Tahun Buku 2014 Dan 2015 Di Jakarta	4	3	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	3	4	5	6	7
11	11	PT Jakarta Tourisindo	Pengelolaan PT Jakarta Tourisindo Tahun 2014 Dan Semester I Tahun 2015 Di Jakarta Dan Jawa Barat	1	-	-	-	1
		Provinsi Jawa Barat						
12	12	PT Jasa Sarana dan Anak Perusahaannya	Pendapatan, Biaya dan Investasi Pada PT Jasa Sarana Tahun 2014 dan 2015 (s.d Semester I) di Bandung	1	-	-	1	-
		Provinsi Jawa Timur						
13	13	PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang	Operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang Tahun Buku 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) di Sampang	8	3	1	-	4
14	14	PT Bojonegoro Bangun Sarana	Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	7	2	2	-	3
		Provinsi Kalimantan Utara						
15	15	PDAM Tirta Alam Kota Tarakan	Operasional PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2014 dan 2015	6	-	3	-	3
		Provinsi Papua						
16	16	PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Operasional Bank Tahun 2012, 2013 dan Triwulan I 2014 pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua	14	-	1	11	2
Jumlah				137	26	25	25	61
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				18	11	13	8	16
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				16	9	12	8	14

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpa- tuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	Penyimpang- an peraturan bidang tertentu	Pemborosan atau kemahalan harga		Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terhadap Peraturan Perun- dang-undangan			
				Permasalahan		Permasalahan		Jumlah Per- masalahan	Permasalahan		Permasalahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Provinsi Sumatera Barat											
1	1	PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya	Kegiatan Operasional Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 pada PT Andalas Tuah Sakato, PT Grafika Jaya Sumbar, dan PT Dinamika Sumbar Jaya di Padang										
			a. PT Andalas Tuah Sakato	7	1.044,71	2	656,25	-	-	-	5	388,46	
			b. PT Grafika Jaya Sumbar	4	174,37	1	23,00	-	-	-	3	151,37	
			c. PT Dinamika Sumbar Jaya	6	292,58	-	-	-	-	-	6	292,58	
2	2	PT Balairung Citrajaya Sumbar	Operasional PT Balairung Citra- jaya Sumbar Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015 di Jakarta	12	9.036,47	4	8.941,59	3	-	-	5	94,88	
		Provinsi Sumatera Selatan											
3	3	PD Pasar Palembang Jaya	Operasional PD Pasar Palem- bang Jaya TB 2014 s.d Semester I TB 2015 di Kota Palembang	13	1.318,07	-	-	-	-	-	13	1.318,07	
		Provinsi Lampung											
4	4	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Tengah Tahun Buku 2013, 2914, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	4	803,68	-	-	1	1	9,39	2	794,29	
5	5	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Way Kanan Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	9	1.018,44	-	-	1	3	389,75	5	628,69	
6	6	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Tanggamus Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	6	2.851,05	-	-	2	1	25,86	3	2.825,19	
7	7	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa Lampung Utara Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I).	5	664,81	1	20,30	1	-	-	3	644,51	
8	8	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung	Operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)	3	223,22	-	-	1	-	-	2	223,22	
9	9	PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung	Operasional PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kota Bandar Lampung Tahun Buku 2013, 2014, dan 2015 (s.d. Triwulan I)	3	323,69	-	-	2	1	323,69	-	-	

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpa- tuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpang- an peraturan bidang tertentu	Pemborosan atau kemahalan harga		Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terhadap Peraturan Perun- dang-undangan		
Permasalahan		Permasalahan		Jumlah Per- masalahan	Permasalahan		Permasalahan						
Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Provinsi DKI Jakarta											
10	10	BP THR Lokasari	Pengelolaan Pendapatan, Biaya Dan Aset Pada Bp Thr Lokasari Tahun Buku 2014 Dan 2015 Di Jakarta	13	2.817,67	2	1.119,30	-	3	355,98	8	1.342,39	
11	11	PT Jakarta Tourisindo	Pengelolaan PT Jakarta Tourisin- do Tahun 2014 Dan Semester I Tahun 2015 Di Jakarta Dan Jawa Barat	8	8.506,09	2	213,35	-	-	-	6	8.292,74	
		Provinsi Jawa Barat											
12	12	PT Jasa Sarana dan Anak Perusahaannya	Pendapatan, Biaya dan Inves- tasi Pada PT Jasa Sarana Tahun 2014 dan 2015 (s.d Semester I) di Bandung	10	46.055,05	2	2.661,41	-	-	-	8	43.393,64	
		Provinsi Jawa Timur											
13	13	PDAM Trunojoyo Ka- bupaten Sampang	Operasional PDAM Trunojoyo Kabupaten Sampang Tahun Buku 2014 dan 2015 (s.d Triwu- lan III) di Sampang	8	3,11	-	-	1	-	-	7	3,11	
14	14	PT Bojonegoro Bangun Sarana	Operasional PT Bojonegoro Bangun Sarana Tahun Anggar- an 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	12	3.232,39	5	2.726,36	2	1	336,93	4	169,10	
					USD 86.97		USD 86.97			-		-	
			Total Rupiah		4.432,14		3.926,11			336,93	-	169,10	
		Provinsi Kalimantan Utara											
15	15	PDAM Tirta Alam Kota Tarakan	Operasional PDAM Tirta Alam Kota Tarakan Tahun 2014 dan 2015	7	635,40	-	-	2	-	-	5	635,40	
		Provinsi Papua											
16	16	PT Bank Pembangun- an Daerah Papua	Operasional Bank Tahun 2012, 2013 dan Triwulan I 2014 pada PT Bank Pembangunan Dae- rah Papua	14	65.238,34	1	6,88	4	1	60.556,62	8	4.674,84	
Jumlah				144	144.239,14	20	16.368,44	20	11	61.998,22	93	65.872,48	
					USD 86.97		USD 86.97						
Jumlah ekuivalen rupiah				144	145.438,89	20	17.568,19	20	11	61.998,22	93	65.872,48	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				18		9		11	7		17		
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				16		8		11	7		15		
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan				2.185,01									

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMN

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi VI						
		Perseroan Terbatas (PT)						
1	1	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan anak perusahaan TA 2013 s.d. 2014	8	1	3	-	4
2	2	PT Timah (Persero) Tbk.	Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan pada PT Timah (Persero) Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait	2		2	-	-
3	3	PT Adhi Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya TB 2013 dan 2014 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	16	2	2	-	12
4	4	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2013 dan 2014 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Cengkareng, Amsterdam, Jepang dan Amerika Serikat	14	4	1	1	8
5	5	PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya TA 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada PT Angkasa Pura II (Persero) Beserta Anak Usaha dan Instansi Terkait	16	4	3	-	9
6	6	PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PELINDO II (Persero)	Proses Perpanjangan Pengelolaan/ Pengoperasian PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PELINDO II (Persero), Kemenhub, Kemen BUMN dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta	2	-	1	-	1
7	7	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta	2	-	1	-	1
8	8	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Seluler dan PT Telekomunikasi Indonesia International dan Instansi Terkait	9	3	-	1	5

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Beserta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta, Gresik, Tuban dan Banyuwangi	5	1	1	2	1
10	10	PT Semen Tonasa	Biaya, Investasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Tonasa di Pangkep	5	2	1	-	2
11	11	PT Semen Padang	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Padang di Indarung dan Lampung	9	5	-	3	1
12	12	PT Kimia Farma (Persero) Tbk.	Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan	7	4	1	-	2
13	13	PT Petrokimia Gresik	Biaya, Investasi dan Penjualan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi TB 2014 dan 2015 (Semester I) pada PT Petrokimia Gresik	3	1	-	1	1
14	14	PT Kertas Leces (Persero)	Program Restrukturisasi pada PT Kertas Leces (Persero) di Probolinggo, Surabaya, dan Jakarta	1	-	-	-	1
15	15	PT Pos Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pos Indonesia	9	-	2	4	3
		Perusahaan Umum (Perum)						
16	16	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Pengelolaan Aset pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV) dan Instansi Terkait	5		1	3	1
17	17	Perum Perhutani	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Perum Perhutani di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua Barat	16	3	5	1	7
18	18	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Jasa Tirta II	3	-	1	-	2

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi VI dan XI						
19	19	PT Bahana PUI (Persero)	Pendapatan dan Biaya Operasional, Penyertaan dan Pembiayaan Serta Aktivitas Terkait TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bahana PUI (Persero)	11	3	2	1	5
20	20	PT BRI Agroniaga Tbk.	Pengelolaan Kredit TB 2014 dan 2015 (Sem I) pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan Rantau Prapat Serta Instansi Terkait	8	-	-	8	-
21	21	PT Askrindo (Persero)	Pengelolaan Penjaminan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendapatan, Asuransi Kredit, Investasi, Biaya Operasional, dan Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan Tahun 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada PT Askrindo (Persero)	13	-	-	8	5
Jumlah				164	33	27	33	71
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				21	12	15	11	19
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				21	12	15	11	19

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Operasional BUMN (Nilai dalam Rp Juta dan ribu valas)**

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Komisi VI									
		Perseroan Terbatas (PT)									
1	1	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. dan anak perusahaan TA 2013 s.d. 2014	8	87.588,49			2	30.039,18		6
				1	USD 2,672.86			-	USD 601.01		1
			Nilai ekuivalen Rupiah	9	124.460,59			2	38.330,11		7
2	2	PT Timah (Persero) Tbk.	Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan pada PT Timah (Persero) Tbk., Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait	5					-	5	-
3	3	PT Adhi Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya TB 2013 dan 2014 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	3	3.525,31	2	3.525,31	-	-	-	1
4	4	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2013 dan 2014 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jakarta, Cengkareng, Amsterdam, Jepang dan Amerika Serikat	1	-	-	-			1	-
				4	USD 18,069.51						4
			Nilai ekuivalen Rupiah	5	249.268,89	-	-	-	-	1	4
5	5	PT Angkasa Pura II (Persero)	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya TA 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada PT Angkasa Pura II (Persero) Beserta Anak Usaha dan Instansi Terkait	1	863,33						1
					USD 184.79						-
			Nilai ekuivalen Rupiah	1	3.412,51						1
6	6	PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PELINDO II (Persero), Kemenhub, Kemen BUMN dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta	Proses Perpanjangan Pengelolaan/Pengoperasian PT Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan KSO Terminal Peti Kemas Koja (KSO TPK Koja) pada PT PELINDO II (Persero), Kemenhub, Kemen BUMN dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta	8	-					5	3
				2	USD 32,650.00						2
			Nilai ekuivalen Rupiah	10	450.406,75					5	5
7	7	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta	4	-					3	1
8	8	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan dan Biaya pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Seluler dan PT Telekomunikasi Indonesia International dan Instansi Terkait	1	-						1
9	9	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Beserta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta, Gresik, Tuban dan Banyuwangi	5	1.879,73			2	1.879,73		3

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpa- tuhan		Piutang ber- potensi tidak tertagih		Denda keterla- mbatan pekerjaan belum dipun- gut/diterima		Penyim- pangan peraturan bidang tertentu	Lain-lain Perma- salahan Ketidak- patuhan terhadap Peraturan Perun- dang-undangan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Perma- salahan	Permasalahan	
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	PT Semen Tonasa	Biaya, Investasi, dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Tonasa di Pangkep	7	63.893,74						7	63.893,74
11	11	PT Semen Padang	Biaya, Investasi dan Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Semen Padang di Indarung dan Lampung	9	4.242,65			3	3.985,96		6	256,69
12	12	PT Kimia Farma (Per- sero) Tbk.	Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya pada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Anak Perusahaan	5	9.519,53	2	9.391,05				3	128,48
				-	USD 394,68		USD 394,68				-	-
			Nilai ekuivalen Rupiah	5	14.964,14	2	14.835,66				3	128,48
13	13	PT Petrokimia Gresik	Biaya, Investasi dan Penjualan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi TB 2014 dan 2015 (Semester I) pada PT Petrokimia Gresik	6	40,40			2	40,40	1	3	-
14	14	PT Kertas Leces (Per- sero)	Program Restrukturisasi pada PT Kertas Leces (Persero) di Probolinggo, Surabaya, dan Jakarta	3						1	2	-
15	15	PT Pos Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada PT Pos Indonesia	23	98.813,25	2	34.130,29	2	926,64	1	18	63.756,32
		Perusahaan Umum (Perum)										
16	16	Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Pengelolaan Aset pada Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navi- gasi Penerbangan Indonesia (AIRNAV) dan Instansi Terkait	13	10.179,13			2	3.382,21	2	9	6.796,92
17	17	Perum Perhutani	Pendapatan, Biaya dan Investasi Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester I) pada Perum Perhutani di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua Barat	20	12.101,89			2	930,84	1	17	11.171,05
18	18	Perum Jasa Tirta II	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Jasa Tirta II	19	33.426,73	1	21.276,85	1	52,25	3	14	12.097,63
		Komisi VI dan XI										
19	19	PT Bahana PUI (Persero)	Pendapatan dan Biaya Operasional, Penyer- taan dan Pembiayaan Serta Aktivitas Terkait TB 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bahana PUI (Persero)	9	94.430,02	5	11.431,70			1	3	82.998,32
20	20	PT BRI Agroniaga Tbk.	Pengelolaan Kredit TB 2014 dan 2015 (Sem I) pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. di Jakarta, Pekanbaru, Medan dan Rantau Prapat Serta Instansi Terkait	14	-	14					-	-
21	21	PT Askrindo (Persero)	Pengelolaan Penjaminan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pendapatan, Asuran- si Kredit, Investasi, Biaya Operasional, dan Pengelolaan Aset Tetap Perusahaan Tahun 2013 s.d. 2015 (Semester I) pada PT Askrindo (Persero)	13	8.427,71	-	-	1	130,90	2	10	8.296,81
Jumlah				184	428.931,91	26	79.755,20	17	41.368,11	26	115	307.808,60
					USD 53,971.84		USD 394,68		USD 601,01			USD 52,976.15
Jumlah ekuivalen rupiah				184	1.173.473,44	26	85.199,81	17	49.659,04	26	115	1.038.614,59
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				21		6		9		12	19	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				21		6		9		12	19	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan												2.135,28

Keterangan :

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Lahan

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	SOP tidak ditaati	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi VI						
1	1	PT Perkebunan Nusantara II	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta	3	-	1	-	2
2	2	PT Perkebunan Nusantara VIII	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan DKI Jakarta	7	4	-	1	2
3	3	PT Perkebunan Nusantara XIV	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara XIV di Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Maluku Utara	1	-	1	-	-
Jumlah				11	4	2	1	4
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3	1	2	1	2
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	1	2	1	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Lahan (Nilai dalam Rp juta)

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpa- tuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pembelian Aset yang Berstatus Sengketa		Kepemi- likan aset belum didukung bukti yang sah	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Lain-lain Permasalah- an Ketidak- patuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml Perma- salahan	Jml Permasalahan	Jml Perma- salahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Komisi VI										
1	1	PT Perkebunan Nusantara II	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara II di Sumatera Utara, Papua dan DKI Jakarta	5	1.425,65	1	1.425,65	-	-	-	4	
2	2	PT Perkebunan Nusantara VIII	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara VIII di Jawa Barat dan DKI Jakarta	7	288,24	3	288,24	-	-	3	1	-
3	3	PT Perkebunan Nusantara XIV	Pengelolaan Lahan Tahun 2012, 2013 dan 2014 pada PT Perkebunan Nusantara XIV di Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Maluku Utara	7	3.445,00	-	-	1	3.445,00	2	1	3
Jumlah				19	5.158,89	4	1.713,89	1	3.445,00	5	6	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				3		2		1		2	3	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3		2		1		2	3	1
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-								

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	
				Total SPI	SOP tidak ditaati
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6
		Komisi VII			
1	1	SKK Migas	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South Natuna Sea "B" & Corridor pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips Indonesia Inc. Lt. & KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan kepulauan Riau	-	-
	2		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Riau	-	-
	3		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Eks Pertamina Block Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Cirebon	-	-
	4		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South East Sumatra pada SKK Migas, KKKS CNOOC SES LTD serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Kepulauan Seribu	1	1
	5		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas, KKKS Total E&P Indonesia dan Inpex Corporation serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	-	-
	6		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea A Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea BV serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan kepulauan Riau	-	-
Jumlah				1	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS		Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Penyimpangan peraturan bidang tertentu
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Komisi VII							
1	1	SKK Migas	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South Natuna Sea “B” & Corridor pada SKK Migas dan KKKS ConocoPhillips Indonesia Inc. Lt. & KKKS ConocoPhillips (Grissik) Ltd serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan kepulauan Riau	9	USD 161,944.28	8	USD 161,944.28	-	1
			Nilai ekuivalen Rupiah	9	2.234.021,34	8	2.234.021,34		1
	2		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Rokan Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Chevron Pacific Indonesia serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Riau	16	USD 22,641.55	16	USD 22,641.55	-	-
			Nilai ekuivalen Rupiah	16	312.340,18	16	312.340,18		
	3		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Eks Pertamina Block Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS PT Pertamina EP serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Cirebon	7	USD 26,503.76	7	USD 26,503.76	-	-
			Nilai ekuivalen Rupiah	7	365.619,37	7	365.619,37		
	4		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja South East Sumatra pada SKK Migas, KKKS CNOOC SES LTD serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Kepulauan Seribu	6	USD 4,777.98	6	USD 4,777.98	-	-
			Nilai ekuivalen Rupiah	6	65.912,23	6	65.912,23		
	5		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2014 Wilayah Kerja Mahakam pada SKK Migas, KKKS Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Kalimantan Timur	8	USD 67,872.11	8	USD 67,872.11	-	
			Nilai ekuivalen Rupiah	8	936.295,77	8	936.295,77		
	6		Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Natuna Sea A Tahun 2014 pada SKK Migas dan KKKS Premier Oil Natuna Sea BV serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan kepulauan Riau	11	3,71	9	3,71	1	1
				-	USD 6,600.61	-	USD 6,600.61	-	-
			Nilai ekuivalen Rupiah	11	91.059,12	11	91.059,12		
Jumlah				57	3,71	54	3,71	1	2
					USD 290,340.29		USD 290,340.29		
Jumlah ekuivalen rupiah				57	4.005.248,01	54	4.005.248,01	1	2
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6		6		1	2
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-					

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2015

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	SOP belum disusun	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pen- dapatan dan belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7
		Komisi XI				
1	1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester II) pada LPEI serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta, Surabaya dan Medan	6	5	1
Jumlah				6	5	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI (Nilai dalam Rp Juta)

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
				Total Ketidakpatuhan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan
				Permasalahan		Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	Jml	Nilai	7	8
		Komisi XI					
1	1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2014 dan 2015 (s.d. Semester II) pada LPEI serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta, Surabaya dan Medan	12	--	11	1
Jumlah				12	--	11	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	1
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan							-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun	Proses Penyusunan Laporan Tidak Sesuai Ketentuan	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Komisi XI						
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014-2015 (periode 1 Januari s.d. 30 September 2015) pada Kantor Pusat dan Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar	9	3	2	1	3
Jumlah				9	3	2	1	3
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Lampiran G.10

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK (Nilai dalam Rp Juta)

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR/Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidapatuhan	Proses Pengadaan Barang/ Jasa Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	Pemborosan atau kemahalan harga	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume	Lain-lain Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan						
Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan						
Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Komisi XI													
1	1	Otoritas Jasa Keuangan	Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2014-2015 (periode 1 Januari s.d. 30 September 2015) pada Kantor Pusat dan Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar	42	13.123,53	10	7	1.248,60	5	1.809,47	4	9.008,88	16	1.056,58	
Jumlah				42	13.123,53	10	7	1.248,60	5	1.809,47	4	9.008,88	16	1.056,58	
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1	1				1		1		
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	1				1		1		
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-											

**Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2015
dengan Status Telah Ditetapkan (Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)**

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab			Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
TGR Benda-hara	IDR	464	196,83	108	16,27	238	9,52	4	0,14	224	170,90
	USD	1	150,00	0	-	0	-	0	-	1	150,00
TGR Non Bendahara	IDR	18.161	602,77	4.172	85,08	9.526	147,67	47	0,72	8.593	369,30
	USD	104	4.475,17	6	15,78	1	2,37	1	12,82	102	4.444,20
	EUR	39	7.722,95	0	-	0	-	0	-	39	7.722,95
	JPY	28	826.806,64	0	-	0	-	0	-	28	826.806,64
	AUD	21	2.815,24	0	-	0	-	0	-	21	2.815,24
	GBP	6	430,03	0	-	0	-	0	-	6	430,03
	CAD	2	301,48	0	-	0	-	0	-	2	301,48
	ZWD	1	16,45	0	-	0	-	0	-	1	16,45
	ILS	1	122,42	0	-	1	122,42	0	-	0	-
Pihak Ketiga	IDR	3.584	291,00	511	39,03	2.053	124,18	91	1,40	1.441	126,39
Pengelolaa Keuangan	IDR	127	57,68	50	3,17	45	1,15	13	5,99	69	47,37
Total	IDR	22.336	1.148,28	4.841	143,55	11.862	282,52	155	8,25	10.327	713,96
	USD	105	4.625,17	6	15,78	1	2,37	1	12,82	103	4.594,20
	EUR	39	7.722,95	0	-	0	-	0	-	39	7.722,95
	JPY	28	826.806,64	0	-	0	-	0	-	28	826.806,64
	AUD	21	2.815,24	0	-	0	-	0	-	21	2.815,24
	GBP	6	430,03	0	-	0	-	0	-	6	430,03
	CAD	2	301,48	0	-	0	-	0	-	2	301,48
	ZWD	1	16,45	0	-	0	-	0	-	1	16,45
	ILS	1	122,42	0	-	1	122,42	0	-	0	-
Total Valas Ekuivalen *)	IDR	203	315,43	6	0,21	2	0,46	1	0,17	200	314,59
Total Keru-gian	IDR	22.539	1.463,71	4.847	143,76	11.864	282,98	156	8,42	10.527	1.028,55

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2015, kecuali untuk mata uang Zimbabwe dan mata uang Israel berdasarkan nilai kurs tengah berdasarkan www.Currency-Converter.net per 31 Desember 2015

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003–2015
dengan Status Telah Ditetapkan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD
(Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
Pemerintah Pusat											
TGR Bendahara	IDR	59	18,69	21	1,03	28	1,46	2	0,04	30	16,16
	USD	1	150,00	0	-	0	-	0	-	1	150,00
TGR Non Bendahara	IDR	2.550	153,52	456	12,49	1.417	25,70	4	0,15	1.129	115,18
	USD	104	4.475,17	6	15,78	1	2,37	1	12,82	102	4.444,20
	EUR	39	7.722,95	0	-	0	-	0	-	39	7.722,95
	JPY	28	826.806,64	0	-	0	-	0	-	28	826.806,64
	AUD	21	2.815,24	0	-	0	-	0	-	21	2.815,24
	GBP	6	430,03	0	-	0	-	0	-	6	430,03
	CAD	2	301,48	0	-	0	-	0	-	2	301,48
	ZWD	1	16,45	0	-	0	-	0	-	1	16,45
Pihak Ketiga	IDR	568	51,57	33	6,63	496	13,27	1	0,16	71	31,51
Pengelola Keuangan		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	IDR	3.177	223,78	510	20,15	1.941	40,43	7	0,35	1.230	162,85
	USD	105	4.625,17	6	15,78	1	2,37	1	12,82	103	4.594,20
	EUR	39	7.722,95	0	-	0	-	0	-	39	7.722,95
	JPY	28	826.806,64	0	-	0	-	0	-	28	826.806,64
	AUD	21	2.815,24	0	-	0	-	0	-	21	2.815,24
	GBP	6	430,03	0	-	0	-	0	-	6	430,03
	CAD	2	301,48	0	-	0	-	0	-	2	301,48
	ZWD	1	16,45	0	-	0	-	0	-	1	16,45
Total Valas Ekuivalen*)	IDR	202	315,00	6	0,21	1	0,03	1	0,17	200	314,59
Total Kerugian	IDR	3.379	538,78	516	20,36	1.942	40,46	8	0,52	1.430	477,44

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai	Jumlah Kasus	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 **)	12
Pemerintah Daerah											
TGR Bendahara	IDR	403	172,83	87	15,24	209	8,06	2	0,10	193	149,43
TGR Non Bendahara	IDR	15.605	448,92	3.714	72,57	8.108	121,89	43	0,57	7.459	253,89
	ILS	1	122,42	0	-	1	122,42	0	-	0	-
Pihak Ketiga	IDR	2.880	201,99	474	31,30	1.535	85,67	2	0,13	1.344	84,89
Pengelola Keuangan		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	IDR	18.888	823,74	4.275	119,11	9.852	215,62	47	0,80	8.996	488,21
	ILS	1	122,42	0	-	1	122,42	0	-	0	-
Total Valas Ekuivalen*)	IDR	1	0,43	0	-	1	0,43	0	-	0	-
Total Kerugian	IDR	18.889	824,17	4.275	119,11	9.853	216,05	47	0,80	8.996	488,21
BUMN											
TGR Bendahara	IDR	1	-	0	-	1	-	0	-	0	-
TGR Non Bendahara		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pihak Ketiga	IDR	136	37,44	4	1,10	22	25,24	88	1,11	26	9,99
Pengelola Keuangan	IDR	98	51,94	46	3,17	33	0,52	13	5,99	52	42,26
Total	IDR	235	89,38	50	4,27	56	25,76	101	7,10	78	52,25
BUMD											
TGR Bendahara	IDR	1	5,31	0	-	0	-	0	-	1	5,31
TGR Non Bendahara	IDR	6	0,33	2	0,02	1	0,08	0	-	5	0,23
Pihak Ketiga		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengelola Keuangan	IDR	29	5,74	4	-	12	0,63	0	-	17	5,11
Total	IDR	36	11,38	6	0,02	13	0,71	0	-	23	10,65

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2015, kecuali untuk mata uang Zimbabwe dan mata uang Israel berdasarkan nilai kurs tengah berdasarkan www.Currency-Converter.net per 31 Desember 2015

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Unsur Pidana
Periode 2003-2015 (Nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

No	APH	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditin-dakan-lajuti
		Tahun	Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Penyeli-dikan	Penyidi-kan	Tuntutan/Proses Pera-dilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai \$								
1	KEPOLISIAN RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3		2005	1	1	103,63	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		2006	1	4	391,13	3.191,92	-	-	-	-	-	-	-	4
5		2007	5	9	1.130,89	-	-	4	-	-	5	-	-	-
6		2008	2	2	7,97	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7		2009	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8		2010	2	2	16,13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9		2011	6	23	17,79	-	-	18	-	2	2	1	-	-
10		2012	6	5	30,03	10.846,07	-	1	1	1	1	-	1	-
11		2013	5	4	8,97	-	-	1	1	1	1	-	-	-
12		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		2015	3	3	73,46	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Sub Total Kepolisian RI			33	64	20.744,61	14.037,99	-	24	4	5	14	11	1	5
1	KEJAKSAAN RI	2003	4	17	120,58	-	1	-	10	-	6	-	-	-
2		2004	9	54	383,83	3.240,00	22	-	-	3	29	-	-	-
3		2005	8	17	2.758,09	39.598,17	-	3	2	-	8	2	-	2
4		2006	11	23	1.185,82	112.047,47	1	6	6	-	8	1	-	1
5		2007	10	29	1.681,83	53.838,40	-	8	-	-	17	4	-	-
6		2008	7	9	86,51	-	5	-	-	-	2	1	-	1
7		2009	17	21	216,55	315,40	1	-	4	-	13	2	-	1
8		2010	10	15	82,15	8.834,63	2	3	3	-	6	1	-	-
9		2011	3	2	1,29	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10		2012	9	8	26,47	-	3	1	-	-	4	-	-	-
11		2013	7	6	140,72	-	1	-	-	-	4	-	-	1
12		2014	4	5	22,72	893,30	-	-	-	1	1	-	-	3
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	APH	Kasus					Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti
		Tahun	Surat Ketua dan Anggota				Limpah	Penyeli-dikan	Penyidi-kan	Tuntutan/Proses Pera-dilan	Vonis/Banding/Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Keluar	Temuan	Nilai (Rp)	Nilai \$								
Sub Total Kejaksaan Agung			99	206	6.706,56	218.767,37	37	21	25	4	99	11	-	9
1	KOMISI PEM-BERANTASAN KORUPSI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		2006	3	8	120,33	-	-	3	-	-	5	-	-	-
5		2007	5	5	18,77	235.214,22	-	2	-	-	3	-	-	-
6		2008	23	38	3.627,74	26.375,63	1	24	-	1	9	-	-	3
7		2009	22	23	402,58	1.463,99	1	9	-	4	2	-	3	4
8		2010	13	46	394,98	453,00	25	8	-	5	-	-	4	4
9		2011	4	4	78,51	-	2	-	2	-	-	-	-	-
10		2012	12	8	321,02	-	-	-	3	2	3	-	-	-
11		2013	11	38	144,97	345.572,34	-	2	32	1	2	-	-	1
12		2014	5	5	928,90	-	-	-	1	-	2	-	2	-
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total KPK			98	175	6.037,80	609.079,18	29	48	38	13	26	-	9	12
a	Total (IDR & Valas)		230	445	33.488,97	841.884,54	66	93	67	22	139	22	10	26
b	Total Valas Ekuivalen*)					11.613,79	15%	21%	15%	5%	31%	5%	2%	6%
c	Total					45.102,76	94%							6%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2015 Rp13.795,00.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549000 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id